



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG**

RKPD

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

**“ Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas
Unggulan yang Berkelanjutan ”**



MUBA
TERUS BERKARYA



MUBA
SINERGI



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);
23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan kerja Pemerintah Kabupaten periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dan provinsi serta RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi:
 - a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2023;
 - b. pedoman penyempurnaan perangkat daerah; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023, untuk memastikan APBD tahun 2023 telah disusun berlandaskan RKPD tahun 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

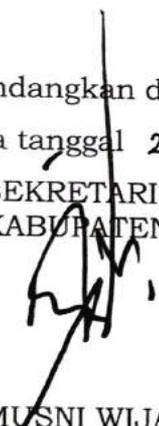
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JUNI 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JUNI 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

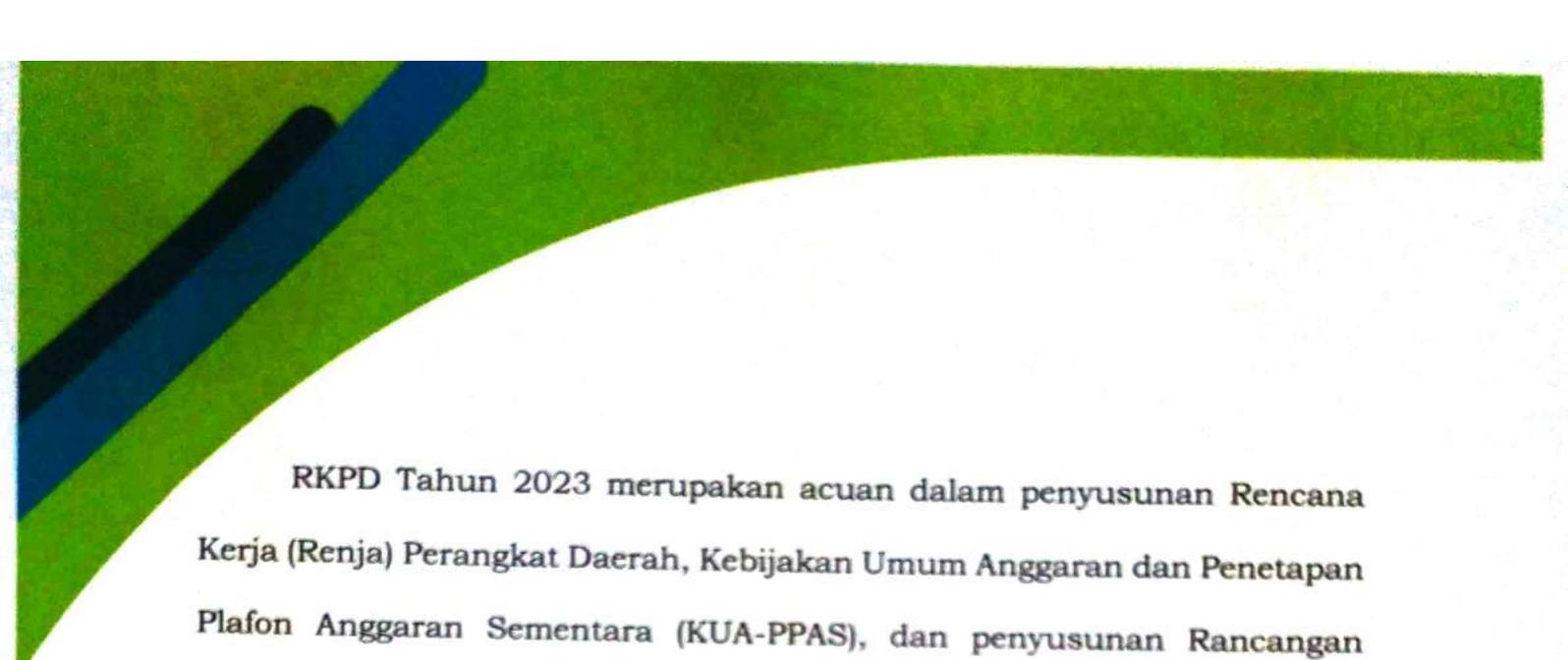


MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.



RKPD Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 telah disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Dokumen ini juga memuat (1) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023, (2) Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin , (3) Hasil Forum Perangkat Daerah, (4) Hasil Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah dengan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Reses DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, (5) Hasil Musrenbang RKPD, dan (6) Hasil Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Musi Banyuasin.



Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, serta dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 29 JUNI 2022

Pj.BUPATI MUSI BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

H. APRIYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 38
TANGGAL : 29 JUNI 2022
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang I-1
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan. I-5
- 1.3 Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya. I-12
- 1.4 Maksud dan Tujuan I-21
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-23
- 1.6 Pendekatan Perencanaan dan Pendekatan Kinerja
Berdasarkan PMDN 70 Tahun 2019 dan PMDN 90 Tahun 2019 I-25
- 1.7 Rujukan Kebijakan..... I-34
- 1.8 Inovasi Daerah I-35

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2022 Triwulan I dan Realisasi RPJMD II-113
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-139

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-3
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-19
- 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Kab. Muba III-46

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 IV-19
- 4.3 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah IV-60

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUPVII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah RKPD Kab.Muba Tahun 2022 dengan RPD Kab. Muba Tahun 2023-2026	I-17
Tabel 1.2	Daftar Inovasi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin...	I-44
Tabel 2.1	Jumlah Desa Kelurahan dan Luas Wilayah Kab. Muba 2021	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai Kab Muba	II-3
Tabel 2.3	Jenis, Jumlah Kejadian dan Realisasi Bencana Kab. Muba. ..	II-20
Tabel 2.4	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.	II-22
Tabel 2.5	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kab. Muba 2021.	II-23
Tabel 2.6	Distribusi Persentase PDRB Kab. Muba ADHB menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021(%).....	II-27
Tabel 2.7	Distribusi Persentase PDRB Kab. Muba ADHK menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021(%).....	II-28
Tabel 2.8	PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Muba Periode 2017-2021 (Milyar Rupiah).....	II-29

Tabel 2.9 Distribusi Kab. Muba ADHB Menurut Pengeluaran Periode 2017-2021.	II-31
Tabel 2.10 Distribusi Kab. Muba ADHK Menurut Pengeluaran Periode 2017-2021.	II-31
Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Periode 2017 - 2021	II-31
Tabel 2.12 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Periode 2016 - 2020	II-33
Tabel 2.13 Pengembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sumsel.....	II-36
Tabel 2.14 Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota	II-37
Tabel 2.15 IPM Kabupaten / Kota	II-39
Tabel 2.16 Indikator Variabel Pembentuk IPG	II-41
Tabel 2.17 Indikator Variabel Pembentuk IDG	II-42
Tabel 2.18 Penduduk Kab. Muba U-15 Menurut Jenis Kegiatan Utama ..	II-48
Tabel 2.19 Kegiatan Kebudayaan Kab. Muba Tahun 2020 – 2021.....	II-50
Tabel 2.20 Kegiatan Kepemudaan Olahraga Kab. Muba Tahun 2020- 2021 ..	II-52

Tabel 2.21	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Muba dan 2021	II-53
Tabel 2.22	Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kab. Muba Tahun 2016 – 2021.....	II-57
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Muba Tahun 2017 – 2021.	II-61
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Muba Tahun 2017 – 2021.....	II-63
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Muba Tahun 2017 – 2021.....	II-65
Tabel 2.29	Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.....	II-66
Tabel 2.30	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.....	II-68
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kab. Muba Tahun 2017 – 2021.	II-69

Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-70
Tabel 2.33	Neraca Ketersediaan Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 - 2021.....	II-71
Tabel 2.34	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kab. Muba Tahun 2020 – 2021.	II-71
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kab. Muba Tahun 2017-2021.....	II-72
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Cakil Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-176
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-77

Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Muba Tahun 2017 - 2021	II-78
Tabel 2.41	Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 – 2021.	II-79
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-80
Tabel 2.43	Koperasi / KUD dan Non KUD dalam Kab. Muba Tahun 2017 – 2021	II-82
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-83
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-84
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-85
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-85
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Kebuayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-87

Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-87
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	II-88
Tabel 2.51	Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Prov Sumsel Tahun 2017 – 2021.	II-89
Tabel 2.52	Konsumsi Ikan di Kab. Muba Tahun 2016 – 2021.	II-90
Tabel 2.54	Luas Panen Pertanian (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Bayuasin Tahun 2015-2021	II-93
Tabel 2.55	Luas Panen (Ha) Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Bayuasin Tahun 2016-2021	II-94
Tabel 2.56	Luas Panen (Ha) Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Bayuasin Tahun 2016-2021	II-94
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Muba	II-96
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Muba	II-97
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Muba	II-98

Tabel 2.59a	UPT yang terbina Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.59b	Jumlah Transmigran yang terbina Kab. Muba Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.57	Distribusi Program-program Pembangunan Dasar Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-127
Tabel 2.58	Distribusi Program-program Pembangunan Dasar Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-127
Tabel 2.59	Distribusi Program-program Pembangunan Dasar Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	II-129
Tabel 2.60	Urusan Perencanaan Kab Muba 2017-2021	II-100
Tabel 2.61	Urusan Litbang Kab Muba 2017-2021	II-101
Tabel 2.62	Urusan Keuangan Kab Muba 2017-2021	II-102
Tabel 2.63	Urusan Diklat Kab Muba 2017-2021	II-103
Tabel 2.64	Urusan Pengawasan Kab Muba 2017-2021	II-104
Tabel 2.65	Urusan Administrasi Pemerintahan Kab Muba 2017-2021	II-105
Tabel 2.65	Urusan Administrasi Pemerintahan Kab Muba	II-105

Tabel 2.66	Pengeluaran Konsumsi RT/Kapita 2017-2021	II-106
Tabel 2.67	Pengeluaran Konsumsi Akhir RT/Kapita 2017-2021	II-107
Tabel 2.68	Jumlah Orang/Barang yang terangkut per tahun	II-108
Tabel 2.69	Penataan Ruang Kab Muba 2017-2022	II-109
Tabel 2.70	Perekonomian Kab Muba 2017-2021	II-110
Tabel 2.71	Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda	II-110
Tabel 2.72	Jumlah Angkatan Kerja	II-111
Tabel 2.73	Rasio Lulusan S1-S3 terhadap total penduduk	II-112
Tabel 2.74	Komposisi Penduduk dan Rasion Ketergantungan	II-112
Tabel 2.75	Distribusi Program Pembangunan Daerah Yandas	II-114
Tabel 2.76	Distribusi Program Pembangunan Daerah Bukan Yandas	II-114
Tabel 2.77	Distribusi Program Pembangunan Daerah Pilihan	II-116
Tabel 2.78	Distribusi Program Pembangunan Daerah Pendukung	II-116
Tabel 2.79	Distribusi Program Pembangunan Daerah Penunjang.....	II-117
Tabel 2.80	Distribusi Program Pembangunan Daerah Pengawas	II-117
Tabel 2.81	Distribusi Program Pembangunan Daerah Kewilayahan	II-118

Tabel 2.82	Distribusi Program Pembangunan Daerah Pem. Umum.....	II-118
Tabel 2.83	Tabel Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	II-119
Tabel 2.84	Capaian Target Indikator Kinerja Umum 2021.....	II-130
Tabel 2.85	Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan BL 2022	II-132
Tabel 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2017-2021.....	III-3
Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	III-5
Tabel 3.3	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)	III-7
Tabel 3.4	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021(Miliar Rp)	III-9
Tabel 3.5	Kerangka Ekonomi Makro Kab.Muba	III-11
Tabel 3.6	Produksi Komoditas Perkebunan di Kab.Muba	III-16
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kab Muba 2019-2021	III-24

Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Muba tahun 2022	III-25
Tabel 3.9	Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kab Muba 2019-2021	III-26
Tabel 3.10	Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kab Muba 2019-2021...	III-27
Tabel 3.11	Prognosis Pendapatan Daerah Kab Muba 2022-2023.....	III-29
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021.....	III-37
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Daerah Kab Muba Tahun 2022	III-38
Tabel 3.14	Proyeksi Belanja Daerah Kab Muba 2022-2023	III-39
Tabel 3.15	Realisasi Pembiayaan Kab Muba Tahun 2019-2021.....	III-45
Tabel 3.16	Realisasi Pembiayaan Daerah Kab Muba Tahun 2022	III-45
Tabel 3.17	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab Muba 2022-2023	III-46
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kab Muba 2016-2021	III-57
Tabel 3.17	Rekapitulasi Pendanaan PKBL/CSR 2015-2021	III-59
Tabel 4.1	Indikator Tujuan Tahun 2023	IV-5
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.3	Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran.....	IV-10
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran RPD Kab Muba Tahun 2023-2026.....	IV-11

Tabel 4.5	Target Indikator Sasaran Makro	IV-14
Tabel 4.6	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-15
Tabel 4.7	Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-32
Tabel 4.8	Isu Strategis dan Program Prioritas RKPD Tahun 2023	IV-45
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas RKPD.....	IV-47
Tabel 4.10	Isu Strategis dan Program Prioritas RKPD Tahun 2022.....	IV-60
Tabel 4.11	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2023 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2023.....	IV-59
Tabel 4.12	Pendanaan Prioritas Daerah RKPD Kab Muba	IV-77
Tabel 4.15	Kebijakan Penanganan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Tahun 2023.....	IV-78
Tabel 4.16	Kebijakan Penanganan Transformasi Sosial Dampak Covid-19 Tahun 2023.....	IV-80
Tabel 5.1	Indikator Tujuan	V-3
Tabel 5.1a	Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	V-4
Tabel 5.2.	Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	V-5

Tabel 5.3	Target dan Capaian SPM Urusan PU Tahun 2021.....	V-6
Tabel 5.4	Target dan Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat 2021 ..	V-8
Tabel 5.5	Target dan Capaian SPM Urusan Trantibum Linmas 2021 .	V-11
Tabel 5.6	Target dan Capaian SPM Urusan Bencana Daerah 2021	V-12
Tabel 5.7	Target dan Capaian SPM Urusan Sosial 2021	V-13
Tabel 5.8	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Untuk Pemenuhan SPM pada RKPD Kab.Muba 2023	V-13
Tabel 5.9	Kebijakan Penanganan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Tahun 2023.....	V-21
Tabel 5.10	Kebijakan Penanganan Transformasi Sosial Dampak Covid-19 Tahun 2023.....	V-23
Tabel 5.11	Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2023	V-23
Tabel 5.12	Pendanaan dan Lokasi per PD 1	V-43
Tabel 5.13	Pendanaan dan Lokasi per PD 2	V-44
Tabel 5.14	Pendanaan dan Lokasi per PD 3	V-45
Tabel 5.15	Pendanaan dan Lokasi per PD 4	V-46

Tabel 5.16	Alokasi Kegiatan Strategi Penurunan Kemiskinan Kab. Muba Tahun 2020-2022.....	V-48
Tabel 5.17	Realisasi Pendapatan sd April 2022.....	V-50
Tabel 5.18	Realisasi Belanja sd April 2022.....	V-51
Tabel 5.19	Struktur RKPD Kab. Muba Tahun 2023	V-52
Tabel 5.20	Rekapitulasi RKPD Berdasarkan PD Kab. Muba Tahun 2023	V-54
Tabel 6.1	Capaian dan Realisasi IKU Tahun 2021.....	VI-2
Tabel 6.2	Penetapan IKU Kab Muba Tahun 2023.....	VI-5
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VI-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyampaian Usulan Bottom up Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.	I-5
Gambar 1.2	Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Panggaran.....	I-12
Gambar 1.3	Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan RKPD	I-27
Gambar 1.3	Peta Sebaran Wifi Publik Area Pemkab Muba	I-43
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Kecamatan	II-3
Gambar 2.2	Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Banyuasin	II-25
Gambar 2.4	Curah Hujan per hari	II-27
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.	II-19

Gambar 2.6	Tren Pertumbuhan Ekonomi Kab Muba Periode 2012 – 2021	II-25
Gambar 2.7	Pengembangan Indeks Gini Kab Muba-Prov Sumsel	II-34
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kab Muba 2017-2021	II-35
Gambar 2.9	Garis Kemiskinan Kab Muba 2011-2021	II-38
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	II-39
Gambar 2.11	Perkembangan IPG Kab. Muba Tahun 2017 - 2021	II-41
Gambar 2.12	Perkembangan IDG Kab Muba Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.13	Persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk Berumur 15 tahun ke atas di Kab Muba 2019-2020	II-43
Gambar 2.14	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas Di Kab Muba Tahun 2017-2021	II-44
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup di Kab Muba Tahun 2017-2021	II-45
Gambar 2.16	Angka kesakitan di Kab Muba Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.17	Persentase Penduduk menurut Lapangan usaha utama Di Kab Muba Tahun 201-2021	II-49
Gambar 2.18	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI	II-56
Gambar 2.19	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs	II-56

Gambar 2.20	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	II-57
Gambar 2.21	Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Capaian Akses Sanitasi.....	II-62
Gambar 2.22	TPT Muba dan Sumsel Periode 2017 - 2021	II-67
Gambar 2.23	Ikan Patin	II-290
Gambar 2.24	Distribusi Program – Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan dan Program	II-119
Gambar 2.24	Distribusi Program-program Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan dan Program	II-130
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024	IV-20
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023	IV-23
Gambar 4.3	Tema Pembangunan RKP Tahun 2023	IV-25
Gambar 4.4	Prioritas Nasional RKP Tahun 2023.....	IV-28
Gambar 4.5	Peta Kabupaten Musi Banyuasin.....	IV-53



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 untuk melanjutkan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19

1.1. LATAR BELAKANG

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif, hal ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merespon dan beradaptasi dengan dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut baik secara nasional

maupun daerah ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif tepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan Tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan didukung oleh peran masyarakat dan swasta diutamakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi daerah sehingga tetap terjaga. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. RKPD Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023 mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”. Penetapan tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi covid-19 serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD ini mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun secara simultan baik proses maupun perumusan substansinya dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD). RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta

atas-bawah dan bawah-atas, dengan berorientasi secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HIS).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 serta Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, telah disusun Prioritas Daerah RKPD tahun 2023 yang tetap mengacu pada program prioritas dalam RPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Proses Penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mulai dari proses musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjaringan saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok – pokok pikiran DPRD juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasikan dalam SIPD. Proses penyampaian

usulan *bottom up* untuk penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Proses Penyampaian Usulan *Bottom Up* Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023



Sumber: SE Arah Kebijakan Kab. Muba Tahun 2023, diolah

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268).

24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

1.3. HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

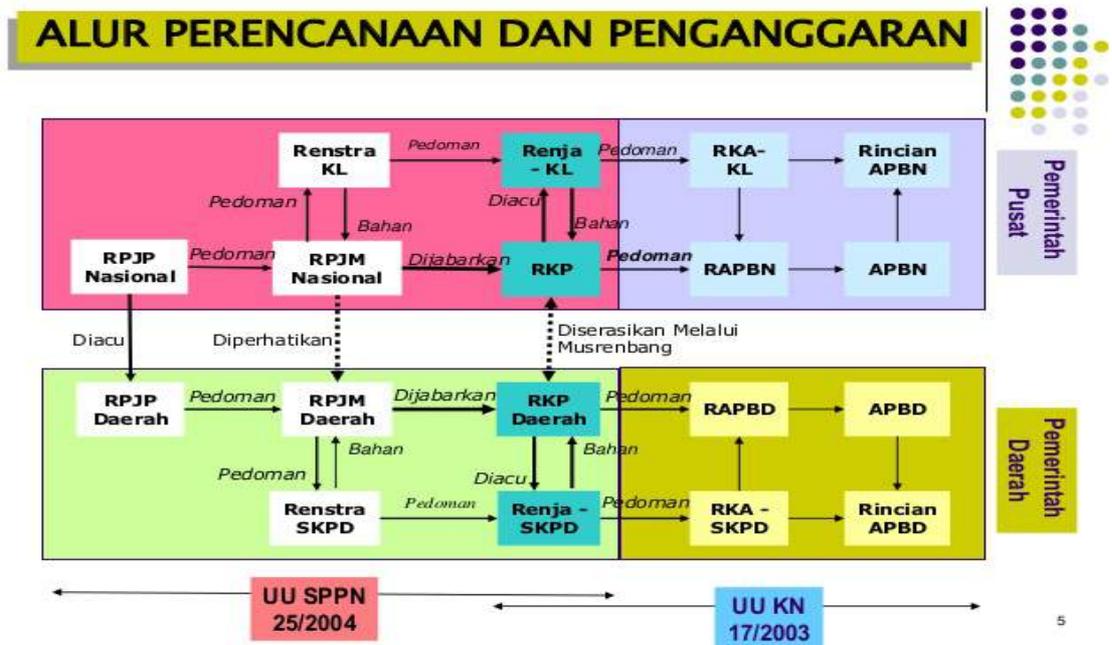
RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu Kabupaten Musi

Banyuasin sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2023 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Hubungan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2.

Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran



Sumber: Bappenas, diolah

1. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 mengacu pada dokumen RKP 2023 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan diuraikan dalam Bab IV.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. yang diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dapat lebih integratif dan sinergis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan begitu juga sebaliknya.

2. RKPD dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, dirumuskan tujuan pembangunan daerah (*goal*) dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun kedepan.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut maka perlu dirumuskan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governmence*).

Berdasarkan Tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, ada 11 (sebelas) sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;

4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;
6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam RKPD. Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah :

“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”

Untuk mendukung Tema Pembangunan Tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan **4 (empat) Prioritas Daerah** Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai upaya

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 1.1.

Sinkronisasi Prioritas Daerah RKPD Kab. Muba
 Tahun 2023 dengan RPD Kab. Muba
 Tahun 2023-2026

PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPD TAHUN 2023
(PD.1) Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat dan Menurunkan Angka Kemiskinan	(PP.1) Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Beban Masyarakat
	(PP.2) Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC
(PD.2) Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	(PP.3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Kelembagaan Pertanian dan Perikanan
	(PP.4) Penumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan
	(PP.5) Percepatan Pelaksanaan Program TORA

PRIORITAS DAERAH RKPD TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPD TAHUN 2023
(PD.3) Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	(PP.6) Optimalisasi Perencanaan yang Berbasis Satu Data Muba untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain : Jalan Kabupaten, Air Minum, Sanitasi, Pemukiman Kumuh dan Kawasan
	(PP.7) Peningkatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup
(PD.4) Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	(PP.8) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan
	(PP.9) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan
	(PP.10) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik disertai Percepatan Implementasi Satu Data Muba
	(PP.11) Peningkatan Akses Terhadap Layanan Publik

Sumber: RPD Kab. Muba Tahun 2023-2026

Ada 5 (lima) isu strategis yang diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu :

1. Penurunan ketimpangan antar wilayah;
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
5. Pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, Ada 10 (sepuluh) isu strategis yang diangkat, yaitu :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan;
2. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi;
3. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan produktivitas pertanian dan Nilai Tukar Petani;
5. Pengembangan energi baru dan terbarukan;
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi;
8. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar;
9. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan;
10. Pengembangan sosial budaya dan olahraga.

Dengan memperhatikan gambaran kondisi Daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemik Covid-19 maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19.

3. RKPD dan Dokumen RENJA Perangkat Daerah

RKPD mempunyai hubungan timbal balik dengan RENJA Perangkat Daerah. Disatu sisi rancangan awal RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan Program Prioritas setiap Perangkat Daerah dan disisi lain RENJA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi selanjutnya terintegrasi kedalam RKPD.

4. RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKPD diajukan kepada pihak Legislatif (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun 2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Implementasi RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan bagi eksekutif dan legislatif Kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah dalam menentukan program prioritas serta kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan Kerjasama Pihak Swasta;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;

3. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan : (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen RKPD, (6) Pendekatan Perencanaan Dan Pendekatan Kinerja Berdasarkan PMDN 70 Tahun 2019 dan PMDN 90 Tahun 2019, (7) Rujukan Kebijakan, (8) Inovasi Daerah.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Kondisi Umum Daerah, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

VII. PENUTUP

Bab ini menampilkan kesimpulan.

1.6. PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENDEKATAN KINERJA BERDASARKAN PMDN 70 TAHUN 2019 DAN PMDN 90 TAHUN 2019

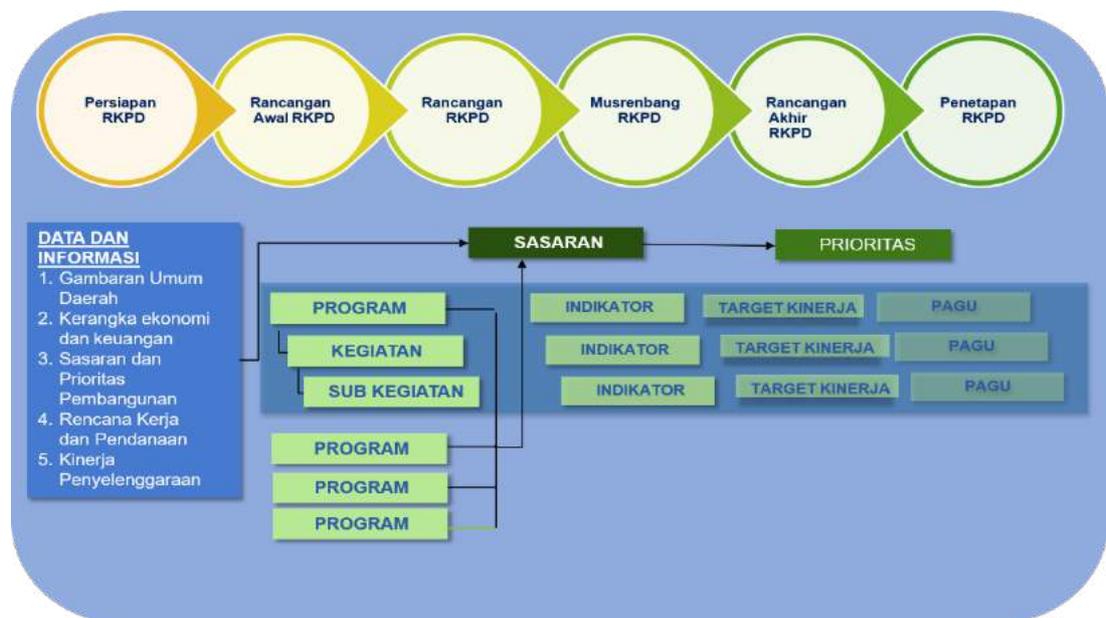
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan

publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Seluruh Bisnis Proses dilakukan melalui SIPD berdasarkan Permendagri 70 Tahun 2019 dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Serta Pemutakhiran pada Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Gambar 1.3.
Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan RKPD



Sumber : PMDN 70/2019 dan PMDN 90/2019

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1) Pendekatan HITS

Dalam penyusunan RKPD 2023 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- Holistik : untuk mencapai sasaran program prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya dalam penanggulangan kemiskinan, program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan masyarakat dan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa-desa sehingga dapat membuat geliat pembangunan di desa lebih terasa sehingga memacu penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin
- Integratif : kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi , harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Sebagai contoh dalam hal Pencapaian Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan program kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan

program kegiatan pembangunan jalan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melakukan program kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

- Tematik : merupakan pendekatan Perencanaan yang difokuskan sampai dengan program prioritas
- Spasial : Kegiatan Pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik. Sebagai contoh dalam hal pembangunan Ruang Kelas Baru, lokasi harus didukung dengan fasilitas pendidikan, sumber daya air, dan terintegrasi dengan jalan yang ada maupun yang direncanakan.

2) Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui berbagai kegiatan yaitu:

- a. Rapat dengan stakeholder Kabupaten;
- b. Musrenbang.

3) Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*

Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down* dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2023 serta proses perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin maka usulan kegiatan dapat disampaikan melalui sistem perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis elektronik dan online yaitu SIPD yang terus mengalami pengembangan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Musrenbang Sektoral (*Ratek Triateral Meeting*) yang dihadiri oleh *stakeholder* untuk menfokuskan dan mempermudah mefollow-up usulan dari Kabupeten/Kota yang akan diinput melalui SIPD.

Usulan Kabupaten Musi Banyuasin untuk RKPD Tahun 2023 yang diinput oleh melalui SIPD. Selanjutnya usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dan sinkron dengan target RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan skala prioritas arah kebijakan RKPD Tahun 2023 dapat diakomodir menjadi rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Penggunaan aplikasi SIPD dan pemanfaatan teknologi informasi secara sistematis dan aplikatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

2. Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pendekatan ini yaitu:

- a. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial (Facebook dan Instagram).
- b. Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui datang langsung (tatap muka), usulan/proposal.
- c. Usulan dapat dilakukan juga dengan proposal dan melalui reses DPRD yang nantinya diinput melalui SIPD.

4) Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dan pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengikutsertakan unsur akademisi, praktisi dan para ahli. Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini, yaitu:

- a. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang bersumber dari APBD-APBN-DAK melalui Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP Kabupaten Musi Banyuasin).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis terhadap permasalahan dari hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang bersumber melalui APBD-APBN-DAK dilaksanakan melalui sistem aplikasi online SIPP yang terdapat dalam menu pada <http://sipp.mubakab.go.id> melalui sistem aplikasi ini

mempermudah Bappeda untuk mengawal pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien.

- b. Pusat Data dan Informasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD Kab. Muba).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis kinerja pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat dalam menu pada <http://musibanyuasinkab.sipd.kemendagri.go.id>.

5) Pendekatan Politis

Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Kepala Daerah. Selain itu, terdapat pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan hasil rapat dengan DPRD dan hasil reses. Ada 3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) pokok-pokok pikiran dari 45 (empat puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah diinput melalui aplikasi SIPD.

1.7. RUJUKAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 merujuk kepada beberapa hal yaitu :

1. Kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2020-2021;

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing instansi. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik. Capaian indikator kinerja utama serta standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi kunci dalam penilaian kemajuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2022;

Permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat *mandatory*. Adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan

capaian dari target tersebut (*gap expectation*) itulah yang disebut permasalahan pembangunan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki telah berupaya melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan dengan sebaik-baiknya, namun pada sisi lain pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang akan mempengaruhi pembangunan daerah serta berbagai isu strategis daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026;

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam tahun pelaksanaan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 dan

pemilihan Kepala Daerah serentak ditetapkan pada bulan Februari 2024, sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003-2026 serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah: “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025”.

4. Prioritas RPJPD 2005-2025;

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah: “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025”. Sehingga dari penjabaran visi RPJPD tersebut telah ditetapkan prioritas pembangunan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.

5. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023;

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2021, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

6. Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah RPJMD pada tahun keempat pelaksanaannya dan disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024. Namun pelaksanaan setiap program dan kegiatan sangat membutuhkan konsistensi yang harus secara cerdas disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.

Dengan pendekatan pembangunan wilayah, memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Dengan pendekatan pembangunan wilayah, memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang;

4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.

7. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*".

8. Prioritas RPD Tahun 2023-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, terdapat 3 (tiga) Tujuan Utama Pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator pencapaian tujuan yaitu: Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Disamping itu, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governace*). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan setiap tahunnya.

1.8. INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka

pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, saat ini tengah berkegiatan melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan publik dikategorikan sebagai berikut:

A. *Smart Governance*

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance* yang merupakan paradigma sistem proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas. Sasaran *smart governance* mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi, adopsi teknologi yang terpadu

B. *Smart Living*

Cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada paradigma kenyamanan, praktis, dan kreatif. Konsep *smart living* merupakan paradigma gaya hidup manusia yang memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

C. *Smart Society*

Masyarakat cerdas berbasis teknologi digital. Pendekatan pembangunan memaknai kerangka *smart city* semakin menemukan relevansinya dimasa pandemic Covid-19. Ketika protocol kesehatan harus dijalankan dan membatasi tatap muka, maka pola hidup ada perubahan yang luar biasa. Perubahan pola interaksi terlihat dari berbagai aspek kehidupan, peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan public, bahkan silaturahmi. Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) sendiri memaksa masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak rumah. Oleh karena itu, inovasi terkait perkembangan smart society sangatlah dibutuhkan untuk lingkungan pada masa yang akan datang.

Gambar 1.4.

Peta Sebaran Wifi Publik Area Pemkab Muba



Sumber: Dikominfo Kab. Muba,diolah

D. Smart Environment

Keberlanjutan sumberdaya lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan keberlanjutan sumber daya baik fisik maupun non fisik bagi masyarakat.suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Adapun perkembangan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang juga telah

terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Daftar Inovasi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- <i>E-planning Muba</i> (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sistem perencanaan pembangunan (e-Planning) adalah sebuah alat penyampian usulan kecamatan yang merupakan hasil musrenbang kecamatan, alat bagi OPD dalam menyusun Renja-PD, penyusunan RKPD agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.	Tersedianya <i>e-Planning Muba</i> (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang handal untuk mendukung Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.
		- Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Pengumpulan data dari desa-desa dalam kecamatan sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang akurat dalam penentuan kebijakan baik itu bantuan social, perencanaan pembangunan, kesehatan mauun pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara realita dilapangan dan perencanaan kebijakan.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Terbuka.

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Sijempolan Keren (Sistem Jemput Bola Pelayanan Keluarga Berencana)	Upaya pemerintah Kabupaten Muba dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah tertuang di dalam RPJMD 2017 – 2022, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat di pedesaan dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Jemput Bola Pelayanan Keluarga Berencana.	<p>Dengan inovasi Sistem Jemput bola pelayanan Keluarga Berencana (Sijempolan Keren) yang berkolaborasi dengan bidan di desa sejak tahun 2020 dengan di tanda tangani MOU antara DPPKB dengan Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin yang disaksikan oleh Kepala BKKBN RI dan Bupati Musi Banyuasin saat penyerahan penghargaan Manggala Karya Kencana. ada beberapa indikator penilaian yang digunakan BKKBN. Salah satunya adalah menurunnya total fertility rate atau TFR yang terhitung bagus di Muba, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan stunting, dan semua akseptor kb di semua pedesaan, dusun dapat terlayani KB. Maka hasil inovasi Sijempolan keren yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,33 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,19 pada 2024. 2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 65,29 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
				<p>67,03 persen pada tahun 2024.</p> <p>3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 7,88 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,16 persen pada 2024</p> <p>4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 26 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 19 per1.000 kelahiran pada 2024.</p> <p>5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 52,47 % pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 58,2 % pada tahun 2024.</p> <p>6. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 20 tahun pada 2020.menjadi 21 tahun pada 2024.</p>

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- KLINIK JAGUK (Jasa Layanan Aset Giat Usaha Desa dan Keuangan)	<p>Klinik konsultasi JAGUK singkatan dari jasa layanan aset, giat usaha desa dan keuangan. Klinik konsultasi "JAGUK" adalah inovasi berupa layanan "One Stop Services" dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Layanan yang disediakan berupa penyediaan fasilitas klinik konsultasi / pendampingan / bimbingan teknis.</p>	<p>Klinik JAGUK berhasil meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa yang terkendala penyusunan pelaporan sehingga Pemerintahan Desa bisa menggunakan layanan Klinik JAGUK sehari 24 jam pada saat dibutuhkan jika menghadapi permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Evaluasi dilakukan secara internal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam rapat evaluasi untuk memantau perkembangan Klinik JAGUK. Laporan Realiasi APBDesa sangat mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyampaikan Laporan tercepat di Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2018. Laporan Kompilasi Realiasi APBDesa Tahun Anggaran 2020 sudah tersusun tanggal 5 Januari 2021 dan disampaikan ke BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. LKPD diserahkan Bupati Musi Banyuasin ke BPK Perwakilan Sumsel tanggal 8 Januari 2021, dan merupakan tercepat di Indonesia untuk ke 4 kalinya.</p>

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
4	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	- Terapi Holistik Pasien Covid 19 RSUD Sekayu	Terapi holistik merupakan sebuah program terbaru dari RSUD Sekayu bersama Pemerintah Musi Banyuasin berupaya terus meningkatkan pelayanan. Terapi holistik merupakan pelayanann yang diberikan oleh RSUD Sekayu kepada pasien yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Terapi holistik merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien Covid-19 dan menunjang kesembuhan baik fisik maupun mental pasien.	Adapun Hasil Inovasi Terapi Holistik adalah : 1. Pemulihan Pasien dengan cepat 2. Pasien Merasa Tidak Bosan selama di isolasi 3. Suasana Tempat Isolasi Mendukung dengan suasana Outdoor dan Free Wif 4. Setiap Hari Pasien di Latih akan pemulihan dengan sistem di berjemur dengan udara pagi yang sehat dalam mendapatkan Oksigen yang alami
		- SIPENDI (Sistem Pelayanan Digitalisasi) di RSUD Sekayu	SIPENDI (Sistem Pelayanan Digitalisasi) adalah transformasi digital pada industri kesehatan yang diterapkan di RSUD Sekayu antara lain - Saroale merupakan inovasi pelayanan public system pendaftaran online, whatsapp dan telegram yang diterapkan oleh RSUD Sekayu pada tahun 2019	Untuk penerapan Inovasi SIPENDI di dalam Pelayanan Kesehatan berbasis Teknologi Digitalisasi ini telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berskala dari survey tersebut dengan Triwulan sekali. Dari Survey tersebut dapat disimpulkan Berkurangnya keluhan pasien karena pasien tidak perlu menunggu sehingga bisa tetap melaksanakan aktifitas lain dan masyarakat terbantu dari pelayanan masuk Rumah Sakit Sampai pulang Rumah Sakit dengan kemudahan dan waktu yang singkat

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			<ul style="list-style-type: none"> - Larajaket merupakan inovasi pelayanan publik layanan rawat jalan tanpa kertas - Sirensi merupakan inovasi pelayanan public penjadwalan operasi secara online - Terapi holistic merupakan sebuah program terbaru dari RSUD Sekayu. - Visite dokter yang semula menggunakan berkas rekam medik, kini telah dijadikan berkas online. - Sidebat merupakan Sistem Delivery Obat yang dilakukan oleh RSUD Sekayu guna untuk memudahkan pasien yang berobat khusus snya pasien yang rutin mengambil obat setiap bulanya. - Kepuasan Pasien, pasien yang berobat ataupun yang berkunjung ke 	<p>dengan mudah di akses sistem Pelayanan Digitalisasi nya dari angka IKM yang di dapatkan berdasarkan standart yang diterapkan MENPAN-RB, maka pelayanan di RSUD Sekayu masuk Kriteria " BAIK".</p>

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			RSUD Sekayu dapat mengentry mesin system kepuasan masyarakat guna menyampaika n pendapatnya terhadap pelayan yang diberikan di rsud Sekayu.	
5	Dinas Kesehatan	- SIRENE MUBA (Sistem Informasi Emergency Terpadu)	SIRENE MUBA merupakan solusi untuk mengatasi lanbannya penanganan kasus kegawatdaruratan terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga penanganan kasus gawat darurat dapat ditangani lebih cepat dan efisien serta memudahkan evaluasi dan pemantauan pasien, PSC 119 telah bermitra dengan berbagai pihak seperti rumah sakit daerah, puskesmas, dan ambulans desa agar dapat menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau akses kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aplikasi Sirene Muba berbasis android yang dapat diinstal oleh seluruh masyarakat melalui Playstore 2. Terbentuknya Tim PSC 119 Sirene Muba yang terlatih dan Profesional 3. Terbentuknya Jaringan PSC 119 Sirene Muba mulai dari rumah sakit, puskesmas, ambulans desa dan tenaga kesehatan desa 4. Tersedianya sarana dan prasarana Sirene Muba yang lengkap dan beroperasi dengan maksimal di wilayah Kab. Muba 5. Tersedianya layanan gawat darurat dan non gawat darurat medis pra rumah sakit pada dinas kesehatan secara gratis yang beroperasi 24 jam 6. Tersedianya layanan pemeriksaan Screening Covid-19 yaitu Pemeriksaan Genose dan Swab Antigen

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
		<p>- SIDAYU PERKASA (Sayangi Ibu dan Anak Sidorahayu dengan Pemeriksaan Secara Rutin dan Akurat)</p>	<p>SIDAYU PERKASA adalah pelayanan asuhan antenatal terintegrasi yang dapat memfasilitasi kemitraat antara dokter spesialis, dokter umum, bidan maupun dukun dengan sistem rujukan yang jelas, dilengkapi fasilitas pendukung dari masing - masing program guna mewujudkan making pregnancy safer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi SIDAYU PERKASA merupakan inovasi yang inovatif, tidak hanya sekedar berinovasi akan tetapi dalam inovasi tersebut memiliki keunggulan, manfaat, kesesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil. 2. Dampak inovasi pelayanan kesehatan melalui inovasi SIDAYU PERKASA yaitu terdapat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Sidorahayu mulai dari aspek kehandalan, daya tanggap serta jaminan pelayanan. 3. Menurunkan angka kejadian AKI dan AKB di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sidorahayu.
		<p>- MUBA BERGERAKS (Musi Banyuasin Beraksi dengan Gerakan Tidak Berak Sembarangan)</p>	<p>MUBA BERGERAKS merupakan program Pemkab Musi Banyuasin dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan upaya mencetak generasi penerus yang cerdas dan memiliki daya saing tinggi.</p>	<p>Dengan adanya inovasi Muba Bergeraks ini dan kerjasama dari pihak terkait sehingga banyak hasil yang didapat seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penghargaan dari MURI Museum Rekor Indonesia 2019-2020 dengan kategori pembongkaran bong serentak dan terbanyak - Penggunaan jamban sehat meningkat - Jamban terapung/bong berkurang - Kasus penyakit diare menurun

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
6	Dinas Ketahanan Pangan	- PERAWAN dan Tampan (Peranan Wanita dan Ketahanan Pangan)	PERAWAN dan TAMPAN (Peranan Wanita dan Ketahanan Pangan) adalah pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) yang merupakan masyarakat miskin yang siap bekerja memanfaatkan lahan perkarangan yang tidak terpakai dengan ditanami sayuran protein hewani untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga dan membantu perekonomian keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan pangan keluarga rumah tangga 2. Penambahan pendapatan per anggota per rumah tangga 3. Pemanfaatan lahan tidur dan perkarangan 4. Jumlah anggota kelompok 5. Kontribusi penurunan angka kemiskinan kabupaten musibanyuasin 6. Skor PPRH tingkat konsumsi 7. Skor PPH tingkat konsumsi 8. Skor PPH tingkat ketersediaan <p>2018 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tergantung dari luar 2. Rp.486.000,/orang/rumah tangga/perbulan 3. - 4. 0 orang 5. 16,52% 6. 85.5 7. 96.8 <p>2019 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pangan tercukupi dari perangkat dan demplot 2. Rp.750.000,/orang/rumah tangga/bulan 3. Perkarangan rumah seluas 96.000m2 kebun percontohan (demplot) seluas 11.500m2 4. 690 orang 5. 16,41% 6. 86.9 7. 96.9

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- SIP OK MUBA (Sistem Informasi Pelayanan Online Kependudukan Musi Banyuasin)	SIP OK MUBA (Sistem Informasi Pelayanan Online Kependudukan Musi Banyuasin) merupakan pelayanan administrasi kependudukan (aminduk) untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.	Sejak pandemi Covid-19 kelompok rentan (lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin) dapat dijangkau melalui penyediaan akses yang lebih memadai melalui inovasi SIP OK MUBA. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan adminduk tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil MUBA. Pelayanan dapat diakses melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin dengan memilih jenis layanan 'Pelayanan Online'. Masyarakat terhubung langsung dengan WhatsApp petugas terkait dan nantinya dapat mencetak sendiri hasil file pdf dokumen kependudukan yang dikirim petugas pelayanan. Inovasi ini dapat memangkas birokrasi sehingga pelayanan semakin cepat, mudah, efisien, dan mampu meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. SIP OK MUBA menghasilkan outcome positif yang dapat dilihat dari jumlah pelayanan adminduk yang meningkat dari tahun sebelumnya ketika belum menjalankan pelayanan online. Dapat dilihat dari Cetak KK yang sebelumnya 25.237 menjadi 43.150 setelah diterapkannya SIP OK MUBA. Cetak SKDWINI ya

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
				ng sebelumnya 8.044 menjadi 9.127 setelah diterapkannya SIP OK MUBA.
		- PESONA MAS PANDU (Penguatan Operator Kecamatan Solusi Andalan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk)	PESONA MAS PANDU (Penguatan Operator Kecamatan Solusi Andalan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk) merupakan solusi andalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminduk dengan fitur penerimaan kedatangan, Fitur Pencarian status KTP elektronik dan Fitur Request Update NIK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan persentasi perekaman KTP-elektronik di Kabupaten MUBA, yaitu pada Tahun 2017 mencapai 85,24%, pada Tahun 2018 mencapai 98,76%, 2019 mencapai 99,93% dan pada 2020 mencapai 100,02%. 2. Penggunaan Fitur Request Update NIK sebanyak 412 record dan tahun 2020 sebanyak 279. 3. Penggunaan Fitur Kedatangan sebanyak 3.898 record dan tahun 2020 sebanyak 1.703. 4. Berdasarkan catatan manual petugas tahun 2019, Fitur Pencarian KTP-elektronik diakses sebanyak 1.790. Berdasarkan data record pada 2020 sebanyak 22.518. 5. Indeks Kepuasan Masyarakat sebelumnya 83,71 meningkat menjadi 83,77 pada tahun 2020. 6. Mendapatkan penghargaan Dukcapil Hebat dari Menteri Dalam Negeri dan Predikat Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" dari MenpanRB pada 2020.

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
8	Dinas Perhubungan	- SI RANDIK (Sistem Informasi Kendaraan Berbasis Online Terintegrasi Berkeselamatan	SI RANDIK (Sistem Informasi Kendaraan Berbasis Online Terintegrasi Berkeselamatan merupakan system aplikasi yang berbasis online untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan uji berkala kendaraan wajib uji.	- Menyediakan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Computerize dalam bentuk Database untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengujian dan meningkatkan kualitas hasil Pengujian Kendaraan Bermotor.- Hasil Uji dapat dilihat melalui layar (Lulus Uji / Tidak Lulus Uji).
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- iMuba (Buku Elektronik)	iMuba (Buku Elektronik) merupakan bentuk inovasi pelayanan public di bidang pendidikan yang berbentuk digital / elektronik dan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat adapun dengan cara akses iMuba (Perpustakaan elektronik) dengan cara mendownload di Paly Store Android	Dengan adanya Aplikasi iMuba masyarakat mudah membaca buku sehingga perekonomian masyarakat meningkat seperti desa Bukit Jaya yang berhasil menerapkan literasi Berbasis Inklusi Sosial. Dalam pembuatan Pupuk Kandang dan Penanaman tanaman daun kelor yang berkhasiat buat obat-obatan sehingga menambah penghasilan Masyarakat desa Bukit Jaya.
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	- Si Pissat (Sistem Informasi Pelayanan SP2d Satu Jam Tuntas)	Si Pissat (Sistem Informasi Pelayanan SP2D Satu Jam Tuntas) merupakan sbentuk inovasi pelayanan dalam penerbbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi resiko pengembalian berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama bank tujuan. 2. BUD dapat memantau kondisi keuangan kas daerah terkini melalui rekening koran setiap waktu. 3. Kontrol terhadap transaksi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank secara online oleh Bendahara Umum

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
				<p>Daerah (BUD) atau Kuasa Umum Daerah.</p> <p>4. Memudahkan Kas Umum Daerah (kasda) dalam melakukan integrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan eksternal yang sudah digunakan di BPKAD Kab. Muba.</p> <p>5. Memudahkan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data pencairan SP2D ke rekening penerima SP2D.</p> <p>6. Memudahkan administrasi Bank dan Kas Umum Daerah (kasda) dalam proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penerimaan pendapatan.</p> <p>7. Mengurangi resiko kesalahan pengakuan pendapatan yang dikarenakan adanya kesalahan nama rekening atau Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima.</p>
		<p>- Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP)</p>	<p>Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) merupakan system akuntansi persediaan sendiri mempunyai peran penting dalam kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan pencatatan data, penyimpanan data, sampai penyusunan laporan barang persediaan.</p>	<p>Tersedianya :</p> <p>1. Laporan Saldo Barang Persediaan (output ASAP)</p> <p>2. Laporan Mutasi Barang Persediaan (output ASAP) Daftar Transaksi Persediaan Pembelian (output ASAP)</p>

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
		- Sistem Rekonsiliasi Aset (SEREKAT)	Sistem Rekonsiliasi Aset (SEREKAT) merupakan system yang menyediakan layanan alam hal pelaporan asset secara digital dan online, dimulai dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat tersaji gambaran seluruh asset daerah.	Hasil inovasi ini adalah berupa sebuah Aplikasi pelaporan secara digital dan online yang dapat digunakan seluruh relasi dan jaringan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam wilayah kecamatan Musi Banyuasin, sehingga OPD dapat dengan mudah memonitoring laporan asset OPD masing-masing dan dapat membaca gambaran seluruh asset daerah.
11	Dinas Perkebunan	- Penguatan Kelembagaan Petani Karet Rakyat (UPPB)	Penguatan Kelembagaan Petani Karet Rakyat (UPPB) dengan aspal karet guna meningkatkan kesejahteraan petani khususnya pekebun pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Hasil Inovasi Daerah ini sebagai bentuk mendukung program nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun dengan harga jual kelapa sawit yang dulu anjlok sekarang berangsur naik.
		- Peremajaan Sawit Rakyat	Peremajaan Sawit Rakyat / replanting	Hasil Inovasi Daerah ini sebagai bentuk mendukung program nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun dengan harga jual kelapa sawit yang dulu anjlok sekarang berangsur naik.
12	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	- YANKESWANLIN G (Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling)	YANKESWANLING (Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling) merupakan bagian kegiatan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) melalui mobil pelayanan kesehatan hewan keliling yang bias secara langsung dating ke desa – desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan meningkat dari tahun 2019 dengan nilai 1.680 ke tahun 2020 dengan nilai 2.401. 2. Kegiatan vaksinasi rabies meningkat dari tahun 2019 dengan nilai 974 ke tahun 2020 dengan nilai 1.656 3. Kegiatan vaksinasi jembrana meningkat

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			atau lokasi berkumpulnya masyarakat di beberapa kecamatan.	dari tahun 2019 dengan nilai 1.284 ke tahun 2020 dengan nilai 1.581
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- KEPOIN MUBA (Kenali Potensi Musi Banyuasin)	KEPOIN MUBA (Kenali Potensi Musi Banyuasin) merupakan layanan informasi investasi yang didukung dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) penanaman modal dalam bentuk peta tematik yang menyajikan data dan informasi spasial dan nonspasial mengenai penanaman modal serta data terkait	- Peningkatan investasi PMDN melalui peran UMKM - Terciptanya kenyamanan investasi, ease of doing business - Meningkatnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap Pemerintah terutama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
14	Satuan Polisi Pamong Praja	- Pelayanan Terpadu (PADU) Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Terpadu (PADU) Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung ke pos pelayanan terpadu yang berlokasi di Kantor Stuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaporkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pelanggaran perda serta kebakaran kota dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Pelayanan Terpadu (PADU) SATPOL PP bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat merupakan salah satu wujud kerja nyata yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka upaya untuk pelaksanaan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dan salah satu wujud nyata dalam rangka untuk pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dimana Satuan Polisi Pamong Praja masuk kedalam misi 1 (satu) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan misi III

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
				(tiga) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai pendorong misi 1 (satu).
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Muba Siaga 112	Muba Siaga 112 adalah layanan dukungan untuk mewujudkan Pelayanan Maksimal pada Masyarakat yang bertujuan memberikan layanan informasi kepada publik, baik darurat maupun non darurat.	Terlaksananya Panggilan Kedaruratan di Musi Banyuasin dan Proses Pelayanan Masyarakat yang tepat, responsive, Terintegrasi dan Berkualitas Mutu yang Baik
		- Radio Gema Randik	Radio Gema Randik merupakan satu-satunya Radio yang telah menggema dan menemani masyarakat Musi Banyuasin, menjadi sumber informasi terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi dalam hal penyampaian Informasi Terkait dengan Pemerintahan	Pemuatan Konten Mengenai Literasi untuk peningkatan Minat Baca Masyarakat Musi Banyuasin, Penguatan Kerjasama antar Lembaga di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin (Talkshow Bersama, Pemuatan Konten Informasi Publik, Penyebarluasan Informasi Pembangunan) dan Terciptanya konten Edukasi berkualitas yang tersinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin.
16	Sekretariat Daerah	- Aplikasi Report (Monitoring & Reporting UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin) (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Aplikasi report (monitoring dan reporting UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin) dipresentasikan dalam bentuk sistem informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel dan	Aplikasi report ((monitoring dan reporting UKPBJ Kab. Musi Banyuasin) dapat di akses melalui http://lpse.mubakab.go.id/report .

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk mengaksesnya secara lebih efektif dan efisien.	
		- Bantuan Hukum (BANKUM) Bagi Masyarakat Miskin) (Bagian Hukum)	Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma – Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.	Terbantunya masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, utamanya rakyat miskin, melalui program inovasi Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
17	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	- Pelayanan Pajak Daerah Keliling (PAPA DARLING)	Pelayanan Pajak Daerah Keliling (PAPA DARLING) merupakan inovasi yang pada dasarnya dilaksanakan karena kesadaran wajib pajak yang masih kurang. PAPA DARLING menyediakan layanan sosialisasi dan konsultasi pajak daerah, pendaftaran di tempat, pembayaran host to host ditempat, platform aplikasi papa darling antara lain ESPPT PBB, E-SPTPD, E-BPHTB, cek piutang PBB dan dashboard realisasi.	Terlaksananya pelayanan yang prima bagi wajib pajak daerah dan menyediakan pelayanan pajak daerah yang menjangkau seluruh desa/kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah terintegrasi dengan semua aplikasi pelayanan pajak daerah guna mempercepat peningkatan PAD
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	- PAKAM NIAN (Pakan Alternatif Mandiri Perikanan)	PAKAM NIAN (Pakan Alternatif Mandiri Perikanan) dengan penggunaan maggot. Pemanfaatan maggot sebagai sumber pakan alternatif	Pakan ikan berkualitas, harga terjangkau yang dapat diproduksi sendiri

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			mampu mengurangi biaya produksi budidaya ikan yang secara langsung akan meningkatkan penghasilan masyarakat pembudidaya ikan.	
19	Inspektorat	- Klinik KPK (Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan)	Inspektorat menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultasi bagi Perangkat Daerah untuk mendapatkan solusi dari sisi pengawasan ketika menghadapi permasalahan dalam tupoksinya tanpa harus menunggu jadwal kegiatan audit.	Perangkat Daerah yang semula menjadi obyek audit berganti sebagai subyek yang diharapkan aktif memanfaatkan layanan ketika menghadapi permasalahan yang perlu dikonsultasikan kepada Inspektorat selaku APIP. Dari sisi APIP inovasi ini akan meningkatkan kapabilitas yang berguna dalam pemeringkatan (leveling) APIP. Sehingga melalui inovasi Klinik Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan (Klinik KPK) dapat diperoleh keuntungan dari kedua belah pihak baik pemberi layanan, dalam hal ini Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun penerima layanan dalam hal ini yang utama adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak-pihak lain seperti APIP lainnya, masyarakat dan lain sebagainya.

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
20	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	- OSS BKPSDM MUBA (One Stop Service Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin)	OSS BKPSDM MUBA untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara yang datang ke kantor Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. Layanan SMS Broadcast dimana Identitas pengirim SMS yang muncul pada layar ponsel penerima SMS merupakan Nama Perangkat Daerah dari pengirim yang sudah dikonfigurasi.	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya Kinerja Pegawai yang semakin meningkat
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Limbah Menjadi Berkah Wirausaha IRT	Mengembangkan limbah getah gambir sebagai bahan pewarna alami yang selanjutnya secara bersamaan digunakan sebagai gerakan pemberdayaan ibu ibu rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan limbah tersebut sebagai pewarna kain jumputan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Jual Limbah Gambir yang semula Rp. 0,- menjadi Rp. 50.000 per Derigen(30 Liter) 2. Tumbuh wirausaha (ibu ibu pengrajin kain) sekarang hingga 130 orang (110 KK) 3. Memberi tambahan pendapatan kisaran Rp.1.500.000 hingga Rp.3.000.000 per bulan bagi pengrajin
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Teknologi Aspal Karet	Teknologi Aspal Karet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama petani karet di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Aspal Karet Berbasis Serbuk Karet (SKAT) 2. Teknologi Aspal Karet Berbasis Lateks

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			Kabupaten Musi Banyuasin.	
23	Dinas Lingkungan Hidup	- Sistem Informasi Lingkungan (SIL)	Sistem informasi Lingkungan Hidup merupakan Sistem Informasi yang di jadikan acuan untuk memberikan gambaran perubahan yang sedang terjadi. Sistem Informasi Lingkungan (SIL) ini mencakup beberapa aspek didalamnya yaitu: layanan lingkungan Satu Platform Informasi Lingkungan, Monitoring Lingkungan, Berbasis MAPS, Search Engine Prusahaan / Pelaku Usaha, Monitoring dan Prizinan Lingkungan Online, Center dan big data, Komunikasi dan Konsultasi	Mendorong pemberdayaan fungsi kontrol masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang pada akhirnya akan meningkatkan pelaku pengelolaan usaha dan pemanfaatan lingkungan yang lestari.
24	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	- Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga (SIPORA)	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga (SIPORA) memberikan pelayanan dibidang olahraga diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga (SIPORA) ini dapat meningkatkan prestasi olahraga Pusat Pendidik Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penggunaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Penunjang Olahraga oleh masyarakat; 2. Terlaksananya penyediaan ruang makan yang representatif bagi atlet yang memadai; 3. Terlaksananya event – event lokal olahraga kemasyarakatan; 4. Terwujudnya Pembuatan Rekening Mandiri untuk para Atlet sehingga Mempermudah Akses Pembiayaan

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
				Pelaksanaan Kegiatan Olahraga; 5. Tersedianya Aplikasi SIPORA sebagai Akses Informasi Kegiatan Olahraga dan PPLP-D di Kabupaten Musi Banyuasin.
25	Kecamatan Bayung Lencir	- Sekolah Lewat Radio (SELERA)	Sekolah Lewat Radio (SELERA) menjadi Solusi terbaik untuk peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran Daring. Inovasi Sekolah Lewat Radio (SELERA) ini disiarkan sesuai dengan jam pelajaran disekolah. Adapun mengenai sebaran siswa di kecamatan Bayung Lencir tersebar pada seluruh desa dalam wilayah Kecamatan sehingga walaupun Kondisi Pandemi Covid 19 siswa sekolah dapat menerima pelajaran melalui Bayung Radio pada Frekuensi FM 91,5 MHz.	1. Terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar daring yang efektif dan efisien, 2. Tercapainya proses penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun peserta didik.
26	Kecamatan Lawang Wetan	- Go Layanan Digital Lawet	Aplikasi pelayanan Elektronik ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mempermudah melakukan pelayanan surat dan penyebaran berita seputar kecamatan. Dan bagi Masyarakat dapat melakukan permohonan pembuatan surat dan melihat berita seputar kecamatan.	aplikasi yang akan digunakan untuk membantu kinerja dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap masyarakat dengan cepat dan efisien

No	INSTANSI/OPD	NAMA INOVASI	URAIAN	OUTCOME /DAMPAK
			Dalam penerapannya aplikasi terintegrasi dengan aplikasi kependudukan dan pencetakan surat yang sebelumnya sudah ada. Terkait dengan implementasi dan sinkronisasi data, aplikasi menggunakan kombinasi database online dan ofine demi menjaga keamanan data penduduk.	

Sumber: Perbup Penerapan Inovasi Nomor 18 Tahun 2020



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

“Gambaran Umum Kondisi Daerah menggambarkan Kondisi Umum Daerah serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD dan Berbagai Permasalahan Pembangunan Daerah sebagai landasan dalam upaya Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Bedasarkan data BPS, Kabupaten Musi Banyuasin secara astronomis terbentang pada garis koordinat 103⁰⁰' dan 105⁴⁰' Bujur Timur dan antara 1³⁰' dan 4⁰⁰' Lintang Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah sebesar 14.265,96 Km² dan merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten PALI (Penungkal Abab Lematang Ilir)

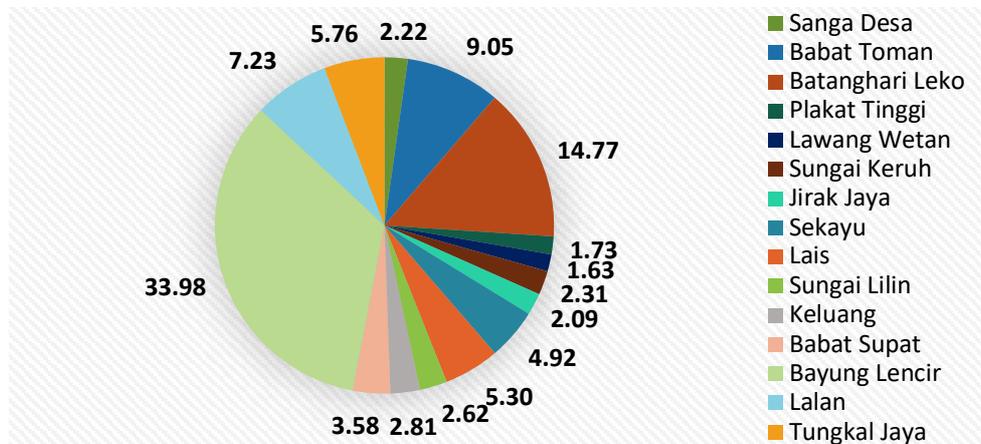
Secara administratif, Kabupaten Musi Banyuasin terbagi kedalam 15 Kecamatan, 230 Desa dan 13 Kelurahan. Dari 15 Kecamatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki Desa/ Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dengan 27 Desa/ Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Keruh menjadi Kecamatan dengan jumlah Desa/ Kelurahan paling sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 11 Desa/ Kelurahan.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sanga Desa	19	317,00	2,22
2.	Babat Toman	14	1.291,00	9,05
3.	Batang Hari Leko	16	2.107,79	14,77
4.	Plakat Tinggi	15	247,00	1,73
5.	Lawang Wetan	15	232,00	1,63
6.	Sungai Keruh	11	330,12	2,31
7.	Jirak Jaya	12	298,88	2,09
8.	Sekayu	14	701,60	4,92
9.	Lais	16	755,53	5,30
10.	Sungai Lilin	15	374,26	2,62
11.	Keluang	14	400,57	2,81
12.	Babat Supat	16	511,02	3,58
13.	Bayung Lencir	23	4.847,00	33,98
14.	Lalan	27	1.031,00	7,23
15.	Tungkal Jaya	16	821,19	5,76
J u m l a h		243	14.265,96	100,00

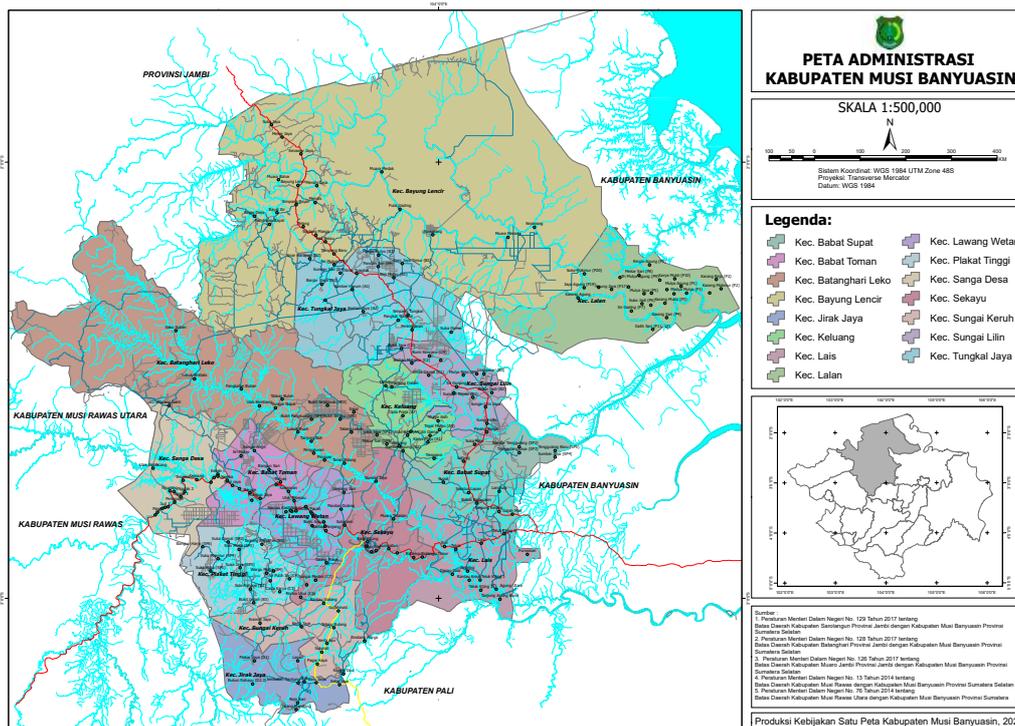
Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Menurut Kecamatan (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.2
Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: Produksi Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, 2020

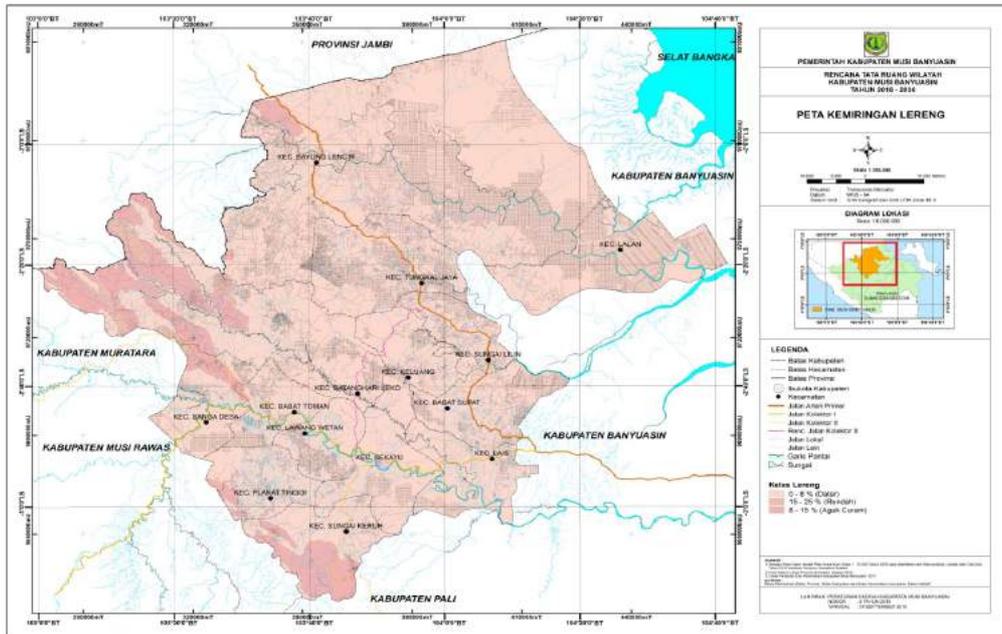
Terdapat beberapa kali pemekaran jumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang diakibatkan karena terdapat pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Pada tahun 2010, terjadi penambahan kecamatan sebanyak 3 kecamatan.

Pemekaran berikutnya terjadi pada tahun 2013 yaitu penambahan sebanyak 4 desa. Sepanjang tahun 2014-2017 tidak terjadi perubahan, hingga pemekaran terbaru dilakukan pada tahun 2018 yaitu penambahan satu kecamatan dan tiga desa menjadi 15 kecamatan, 230 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin terus berkembang dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Bayung Lencir dengan luas 4.847 Km² dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Lawang Wetan dengan luas 232,00 Km².

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas 3 (tiga) bagian wilayah berdasarkan kemiringan lahan yakni dataran rendah, bergelombang dan berbukit. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan topografi dan ketinggian di wilayah berkisar antara 14-37 meter di atas permukaan laut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 37 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari topografi wilayahnya, ada 40 desa berada di lembah daerah aliran sungai, dan 203 desa berada di dataran.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Kondisi fisik dasar Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada di bagian timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. Kondisi ini berguna bagi kegiatan irigasi/pengairan pertanian sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut. Sedangkan guna memenuhi keperluan penduduk dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk pengambilan air baku PDAM.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari empat macam meliputi *Organosol* (berada di dataran rendah atau rawa-rawa yang sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan);

Glei Humus (berada di dataran rendah dan rawa rawa dan banyak digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa seperti pada Bayung Lencir, Lais dan Lalan); *Alluvial* (berada di sepanjang sungai seperti Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang dan Sanga Desa); dan *Padzolik* (berada di daerah berbukit – bukit yang sebagian besar terdapat di daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lais dan Sungai Lilin). Berdasarkan kondisi jenis tanah tersebut, maka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan mempunyai jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi dan sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

Kondisi jenis tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diidentifikasi bahwa pada kedalaman efektif tanah > 90 cm, sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman pada tanah yang berdrainase baik. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa tanaman tahunan maupun tanaman semusim memberikan hasil yang memuaskan pada tanah berdrainase baik dengan kedalaman zona perakaran efektif tanah > 90 cm. Berdasarkan pengalaman ini maka kemudian kedalaman efektif tanah > 90 cm dijadikan patokan untuk batas minimum tanah kelas 1 dengan tingkat pengelolaan yang standar.

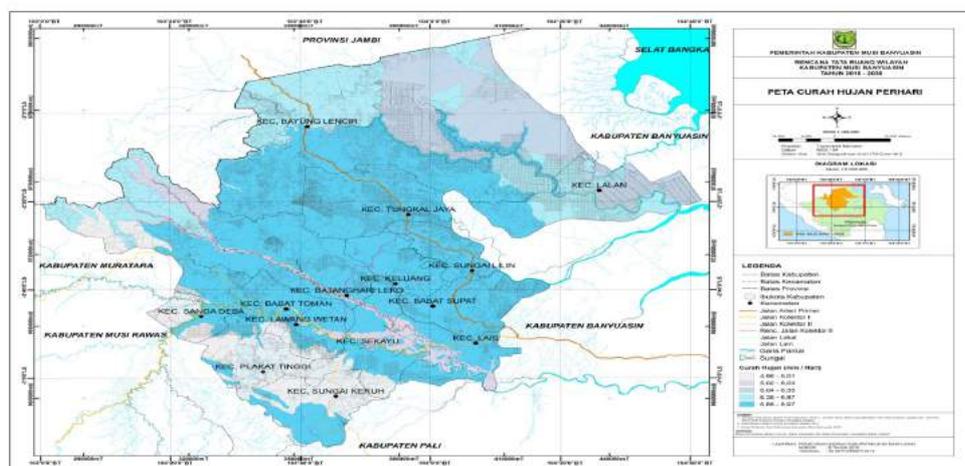
Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-

lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalaman efektifnya antara 60 hingga 90 cm.

Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas berupa Hutan dengan luas 535.421,57 Ha atau 37,53% dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91% dari luas Kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63 Ha atau 8,92% dari luas wilayah Kabupaten disusul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52% dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penggunaan terbesar keempat. Sedangkan jenis penggunaan lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan keempat penggunaan diatas.

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Per hari



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis basah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021, variasi curah hujan antara 60,0 – 587,5 mm sepanjang tahun 2021. Curah hujan paling banyak pada bulan Desember 2021. Hari hujan pada tahun 2021 menunjukkan variasi antara 6-23 hari, dengan hari hujan paling banyak pada bulan November dan Desember 2021.

Secara garis besar arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengidentifikasiannya di lakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional.

Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi untuk di budidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong tinggi dan sangat tinggi, baik untuk pengembangan kawasan pertanian maupun perkotaan yang berdasarkan analisis spasial arahan pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin luas kawasan budidaya sebesar 1.326.112.732 Ha.

Berdasarkan pada letaknya, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan tersebut yakni berupa sungai, danau, rawa-rawa dan perairan laut. Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran rectanguler (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya dendritik (menjari). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka selain disebabkan menurunnya curah hujan juga disebabkan batuan penyusunnya umumnya kedap air sehingga pemunculan mata air langka di daerah ini. Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 m³/detik, sedangkan DAS Air Lalan seluas 8.30 km² memiliki debit rata-rata 196,8 m³/detik. Berikut ini merupakan sungai yang mengalir di wilayah Kab. Musi Banyuasin beserta debit rata-rata hariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M3/dtk)
Sungai Ibul (Anak Sungai Musi)	35	14.500	3,3
Sungai A. Calik (Anak Sungai A.Banyuasin)	57	96.400	28
Sungai Dawas (Anak Sungai A. Calik)	50	6.500	1,6
Sungai Supat (Anak Sungai A. Calik)	32	22.600	5,1
Sungai Keluang (Anak Sungai A. Calik)	19	9.400	2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik)	82	149.500	33,6
Sungai Lalan (Anak Sungai A.Banyuasin)	243	830.300	196,8
Sungai Merang (Anak Sungai Lalan)	66	83.900	24,4
Sungai Bohar (Anak Sungai Lalan)	20	10.000	2,2
Sungai Medak (Anak Sungai Lalan)	72	108.300	25,7
Sungai Tungkal (Anak Sungai Lalan)	25	5.900	1,9
Sungai Serdang (Anak Sungai Lalan)	34	8.300	2,4
Sungai Meranti (Anak Sungai Lalan)	28	15.100	4,4
Sungai Kepahiang (Anak Sungai Lalan)	16	13.300	3,9
Sungai Mangsang (Anak Sungai Lalan)	18	7.400	1,8
Sungai Mendis (Anak Sungai Lalan)	19	3.900	0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi)	176	374.600	103,9
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko)	63	71.300	16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko)	38	26.400	8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko)	38	20.100	8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko)	19	12.700	5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko)	19	11.600	4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko)	13	5.300	2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko)	15	10.200	4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko)	25	21.900	5,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Banyuasin

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Lindung

- **Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di :

- Kecamatan Batanghari Leko
- Kecamatan Sanga Desa

- **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yaitu Kawasan Rawa Gambut Muara Medak dengan luas kurang lebih 24.768 (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Bayung Lencir.

- **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- Kawasan Sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar;
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar.

- **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas:

1. Suaka Margasatwa

- Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas kurang lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya.

- Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang lebih 47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.
- Suaka Margasatwa (SM) Buaya Senyulong seluas kurang lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir .

2. Taman Nasional

Taman Nasional Sembilang dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di Kecamatan Lalan.

3. Taman Nasional Laut

Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat) hektar yang terletak di kecamatan Lalan.

▪ **Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:

- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu.

- Kawasan rawan banjir terletak di kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.
- Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor didinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa.
- Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi :

- a) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
- Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719 (empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.

- Hutan Produksi Konveksi (Hpk) dengan luas kurang lebih 66.408 (enam puluh enam ribu empat ratus delapan) hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

1. Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 125.062 (seratus dua puluh lima ribu enam puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.
2. Kawasan budidaya tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur – sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 (tiga ribu tiga puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah – buahan dengan luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar dibeberapa kecamatan.

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan

Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.

2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Kawasan pengembangan sarana dan prasarana perikanan berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan batubara, yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.

g) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah industri kecil yang berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Sekayu dan Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Sekayu dan Keluang. Industri kimia dan logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

h) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

1. Danau Ulak Lia/*Ulak Lia Lake*, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
2. Danau Konger/*Konger Lake*, Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
3. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga Desa;
4. Sungai Kubu /*Kubu River*, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
5. Agro Wisata Perkebunan Gambir/*Gambir Estate*, Desa Toman Kecamatan Babat Toman;
6. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
7. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;
8. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung Lencir;
9. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;
10. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

i) Kawasan Peruntukan Perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan meliputi :

1. Kecamatan Sekayu
 2. Kecamatan Sungai Lilin
 3. Kecamatan Bayung Lencir
 4. Kecamatan Babat Toman
- j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman, meliputi :

1. Permukiman Perkotaan

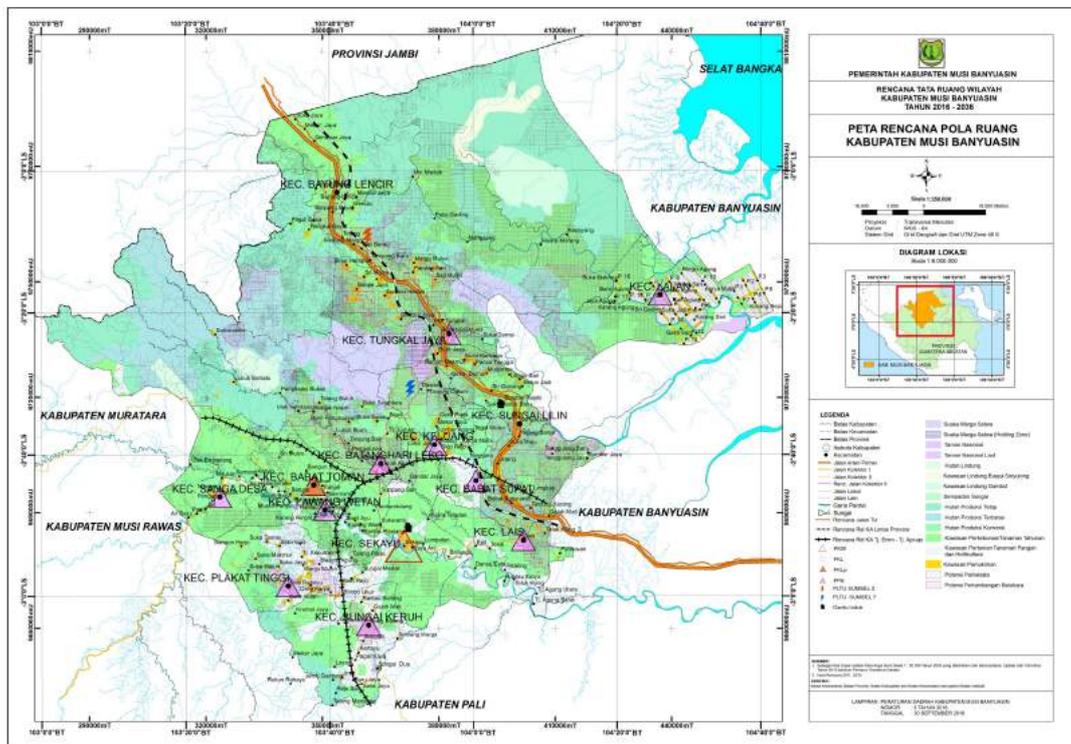
Permukiman perkotaan sebagaimana seluas kurang lebih 22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan Babat Toman.

2. Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua) hektar terletak di:

- Kecamatan Sekayu;
- Kecamatan Babat Toman;
- Kecamatan Batanghari Leko;
- Kecamatan Sanga Desa;
- Kecamatan Sungai Keruh;
- Kecamatan Lais;
- Kecamatan Sungai Lilin;
- Kecamatan Keluang;
- Kecamatan Bayung Lencir;
- Kecamatan Plakat Tinggi;
- Kecamatan Lalan;
- Kecamatan Lawang Wetan;
- Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- Kecamatan Babat Supat.

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;

2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemii; (C) Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror.

Adapun potensi bencana di Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jenis, Jumlah Kejadian dan Realisasi Bencana
di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Jenis Bencana	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	10	11	6	24	16
Banjir jalan	-	1	-	-	1
Banjir Bandang	-	-	-	-	1
Banjir dan tanah longsor	-	-	1	-	-
Angin Kencang	-	1	-	-	5
Angin Kencang + Pohon Tumbang	-	-	-	-	2
Tanah Longsor	2	3	2	3	1
Angin Puting Beliung	2	-	-	5	1
Orang Tenggelam	7	3	6	10	3
Ledakan (Kebakaran) tempat Pengeboran Minyak	1	-	-	-	-
Kebakaran Rumah	4	1	-	-	-
Karhutbunlah	-	70	115	7	2
Pohon Tumbang	-	-	1	-	-
Rumah Roboh	-	-	-	1	-
Orang Hilang	-	-	-	1	1
Pemakaman Covid-19	-	-	-	23	181

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Banyuasin, diolah

Pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

2.1.4. Aspek Demografi

Berdasarkan Data Hasil Sensus Penduduk tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah penduduk sebanyak 644.832 jiwa. Angka ini terus meningkat dari 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 622.206 jiwa, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,31 persen. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Apabila dilihat dari persebarannya, Kecamatan Sekayu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 93.424 jiwa atau 14,50 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Kecamatan Jirak Jaya merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 19.664 jiwa atau 3,00 persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 tercatat sebesar 43,91 jiwa/km² meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 43,61 jiwa/km². Dengan luas wilayah sebesar 14.265,96 km², maka setiap 1 km² rata-rata ditempati penduduk sebanyak 43 orang pada tahun 2021. Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai

Lilin dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 170,02 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lawang Wetan dengan masing-masing kepadatan penduduk sebesar 133,16 jiwa/km² dan 116,51 jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batang Hari Leko (10,48 jiwa/km²), Kecamatan Bayung Lencir (16,21 jiwa/km²), dan Kecamatan Babat Toman (29,02 jiwa/km²).

Tabel 2.4
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sanga Desa	317,00	19	34.709	2,53	109,49
2.	Babat Toman	1.291,00	14	37.468	2,61	29,02
3.	Batang Hari Leko	2.107,79	16	22.085	2,69	10,48
4.	Plakat Tinggi	247,00	15	27.712	2,18	112,19
5.	Lawang Wetan	232,00	15	27.031	2,34	116,51
6.	Sungai Keruh	330,12	11	24.489	2,59	38,93
7.	Jirak Jaya	298,88	12	19.664	2,57	46,71
8.	Sekayu	701,60	14	93.424	2,16	133,16
9.	Lais	755,53	16	54.853	2,01	72,60
10.	Sungai Lilin	374,26	15	63.631	2,02	170,02
11.	Keluang	400,57	14	33.857	2,02	84,52
12.	Babat Supat	511,02	16	36.112	2,12	70,67
13.	Bayung Lencir	4.847,00	23	78.567	2,74	16,21
14.	Lalan	1.031,00	27	40.232	2,26	39,02
15.	Tungkal Jaya	821,19	16	50.998	2,30	62,10
J u m l a h		14.265,96	243	644.832	2,31	43,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah

Tabel 2.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Sekayu	47.343	46.081	93,424	103.00
2.	Lais	28.146	26.707	54,853	105.00
3.	Sungai Keruh	12.560	11.929	24,489	105.00
4.	Batang Hari Leko	11.587	10.498	22,085	110.00
5.	Sanga Desa	17.743	16.966	34,709	104.00
6.	Babat Toman	19.244	18.224	37,468	106.00
7.	Sungai Lilin	32.661	30.970	63,631	105.00
8.	Keluang	17.321	16.536	33,857	105.00
9.	Bayung Lencir	41.460	37.107	78,567	112.00
10.	Plakat Tinggi	14.085	13.627	27,712	103.00
11.	Lalan	21.175	19.057	40,232	111.00
12.	Tungkal Jaya	26.613	24.385	50,998	109.00
13.	Lawang Wetan	13.821	13.210	27,031	104.00
14.	Babat Supat	18.373	17.739	36,112	104.00
15.	Jirak Jaya	10.211	9.453	19,664	108.00
J u m l a h		332.343	312,489	644.832	106.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sebesar 106,00 persen, yang artinya terdapat 106 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 51,52 persen, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk perempuan sekitar 48,48 persen. Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level Kabupaten Musi

Banyuasin, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi.

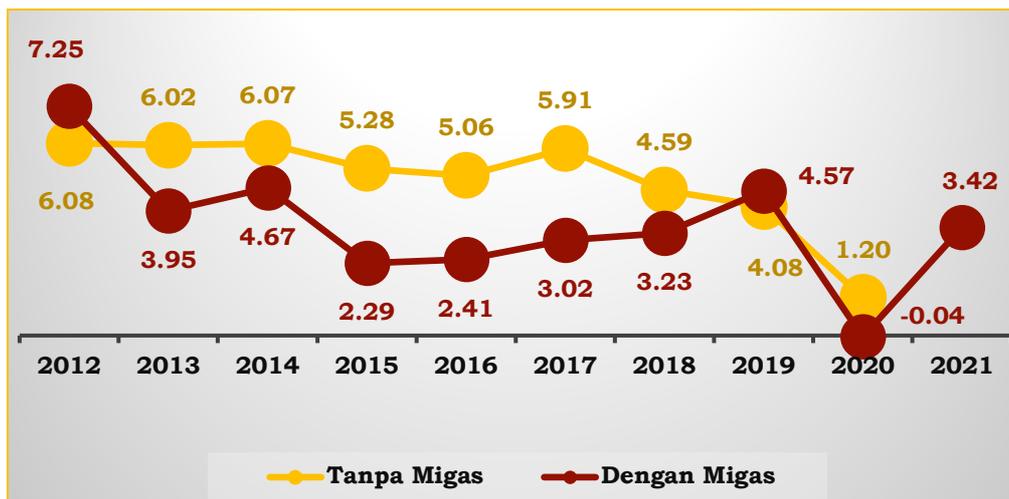
2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.5.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sebesar 56.020,03 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 60.861,46 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 66.089,04 milyar rupiah, tahun 2020 sebesar 65.943,88 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar 72.640,74 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 yaitu tahun 2017 sebesar 41.341,25 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 42.670,21 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 44.620,40 milyar rupiah, tahun 2020 sebesar 44.604,66 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar 46.128,39 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif setelah sempat mengalami perlambatan pada tahun 2013 dan tahun 2015. Pada Tahun 2019 ekonomi Musi Banyuasin tumbuh sebesar 4,57 persen dan kembali turun hingga negatif pada tahun 2020 sebesar - 0,04 persen dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat sebesar 3,42%.

Gambar 2.6
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2012-2021 (%)



Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2022, Diolah

Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 1 (satu) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,35 persen, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,78 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,75 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan juga

tumbuh 2,70 persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,21 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan satu - satunya Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,33 persen.

Masing-masing lapangan usaha (sektor) memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 53,67%. Selanjutnya sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,69%. Sektor industri pengolahan menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 10,69%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,02%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,04%, serta sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05%. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,74	11,70	11,19	12,00	11,69
B	Pertambangan dan Penggalian	54,18	54,87	55,36	52,43	53,67
C	Industri Pengolahan	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,32	8,02	7,79	8,09	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,29	0,30	0,31	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,16	0,18	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,25	0,26	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,94	1,88	1,95	1,84
L	Real Estate	1,88	1,98	2,06	2,22	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,35	3,13	3,43	3,32
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,83	1,96	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,33	0,34	0,39	0,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,58	0,63	0,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.7
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.596,46	5.632,86	5.721,21	5.862,32	6.109,33
B	Pertambangan dan Penggalian	24.944,13	25.588,54	26.823,40	26.379,81	27.093,26
C	Industri Pengolahan	2.845,44	3.169,24	3.435,11	3.478,64	3.570,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,94	10,37	10,89	12,31	13,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	6,27	6,51	6,96	6,99
F	Konstruksi	2.813,48	2.890,10	3.026,09	3.103,38	3.216,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.281,11	1.333,30	1.393,26	1.388,14	1.495,77
H	Transportasi dan Pergudangan	86,95	95,00	102,75	101,38	101,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,87	46,95	52,29	52,13	55,61
J	Informasi dan Komunikasi	88,71	98,76	110,14	125,74	137,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726,62	746,92	768,24	791,56	813,94
L	Real Estate	621,71	678,66	727,39	761,01	819,92
M,N	Jasa Perusahaan	12,72	13,63	14,80	14,87	14,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.195,25	1.235,87	1.248,12	1.299,99	1.380,82
P	Jasa Pendidikan	731,30	767,00	802,22	818,57	872,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,11	126,58	134,61	147,57	159,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	216,64	230,16	243,37	260,27	267,63
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	41.341,25	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.128,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.8
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.137,78	7.119,72	7.371,60	7.911,97	8.493,84
B	Pertambangan dan Penggalian	30.352,65	33.392,11	36.682,99	34.574,36	38.989,39
C	Industri Pengolahan	5.150,33	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,41	28,14	28,39	33,15	36,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,12	11,44	12,14	13,26	13,79
F	Konstruksi	4.659,23	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560,76	2.846,87	3.175,05	3.318,61	3.613,09
H	Transportasi dan Pergudangan	155,77	178,24	200,56	201,61	201,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,93	99,91	119,31	122,68	131,37
J	Informasi dan Komunikasi	128,72	149,64	174,02	202,29	221,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,35	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.335,06
L	Real Estate	1.055,13	1.204,69	1.355,54	1.462,02	1.593,72
M,N	Jasa Perusahaan	20,96	23,98	27,52	28,55	28,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999,14	2.037,72	2.071,30	2.264,15	2.409,79
P	Jasa Pendidikan	1.067,77	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,45	199,92	225,73	259,73	283,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	301,55	336,52	379,21	418,28	432,58
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	56.020,03	60.861,46	66.089,04	65.943,88	72.640,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Periode 2017-2021 (%)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,34	72,00	70,37	70,54	66,53
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,81	1,87	1,97	1,87	1,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,34	6,35	6,35	6,12	5,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,08	32,78	30,07	31,12	28,25
Perubahan Inventori	0,22	-1,00	0,16	-0,89	0,02
Net Ekspor Barang dan Jasa	-14,78	-12,01	-8,93	-8,76	-2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Berdasarkan **Tabel 2.9** diatas terlihat bahwa selama periode 2017– 2021, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 s.d. 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 30 s.d. 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 2.10
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40.522,20	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.325,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.012,34	1.137,73	1.299,67	1.232,91	1.306,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.552,52	2.886,85	4.181,84	4.037,52	4.346,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19.091,17	19.949,57	19.790,52	20.523,03	20.521,82
Perubahan Inventori	123,20	-606,79	104,53	-587,47	-15,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8.281,39	-7.308,00	-5.879,36	-5.777,56	-1874,34
PDRB	56.020,03	60.861,46	65.811,00	65.943,88	72.640,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.11
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.319,80	27.484,04	28.392,65	27.961,97	28.541,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	723,17	783,14	852,34	817,05	834,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.755,57	2.802,97	2.937,74	2.803,78	2.922,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.701,14	14.091,52	13.84,00	14.258,45	13.833,72
Perubahan Inventori	706,29	-500,77	94,91	-586,19	12,39
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.864,72	-1.990,69	-1.506,24	-650,40	-17,37
PDRB	41.341,25	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.128,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.1.5.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) PDRB per kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 85.017,39 Miliar lalu meningkat menjadi Rp. 101.488,07 Miliar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Atas Harga Konstan (ADHK) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin juga menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 64.647,20 Miliar lalu meningkat menjadi Rp. 68.057,05 Miliar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.12
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas
Periode 2016-2020 (dalam Miliar rupiah)

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	85.017,39	88.950,20	95.300,78	102.135,05	101.488,07
ADHK	64.647,20	65.642,82	66.815,75	68.957,08	68.057,05

Sumber : BPS, 2021. Diolah

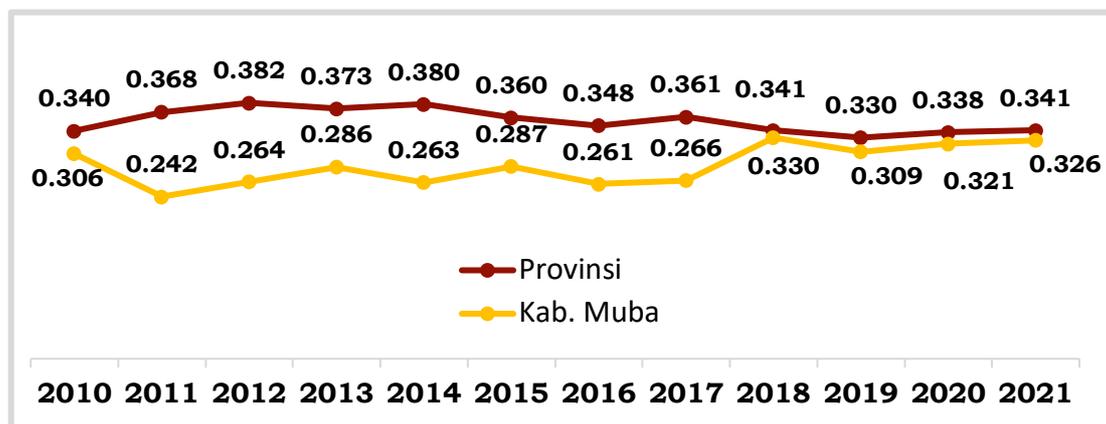
2.1.5.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Berdasarkan data BPS, bahwa indeks gini di Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Secara umum selama periode tersebut ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung meningkat.

Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021



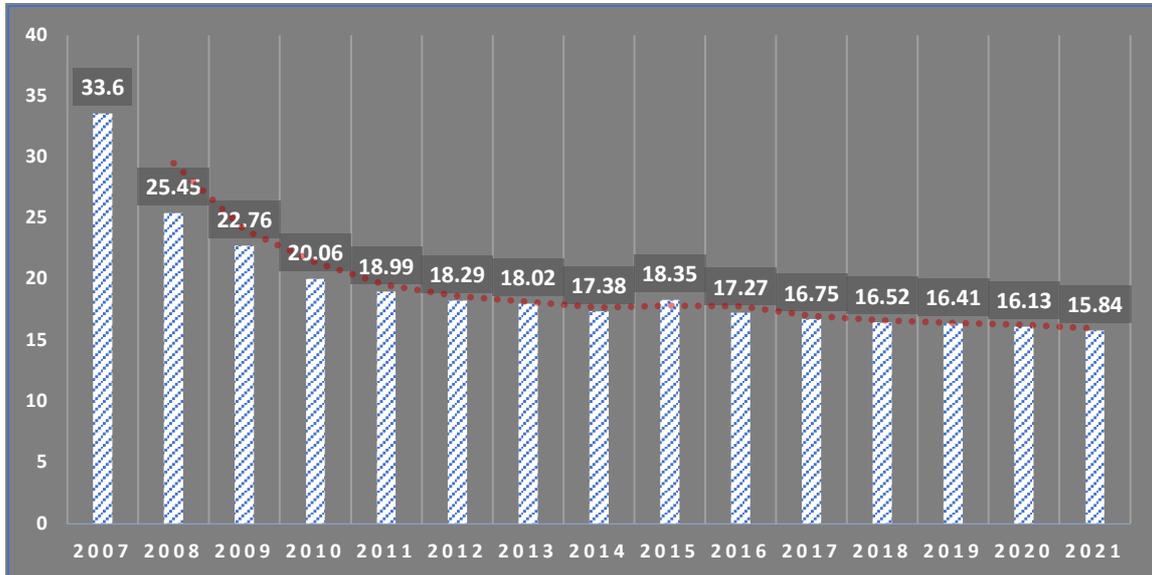
Sumber : BPS, 2022

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, indeks gini Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik atau dengan kata lain bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Musi Banyuasin lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,326 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,321. ketimpangan ini harus terus dikurangi dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

2.1.5.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2007-2021 terus menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 15,84% pada tahun 2021 atau turun sebesar 17,76%.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2007 – 2021



Sumber : BPS, 2021.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak

20,55% tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata perubahan setiap tahunnya sebesar 1,209%. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 36,39%. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15,84%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Musi Banyuasin selama ini sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, tetap diperlukan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 1 digit.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota																			▲ T	Rank	Total Perubahan	Rata-rata Perubahan
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004					
Ogan Komering Ulu	12,62	12,75	12,77	12,61	12,95	13,29	13,22	11,96	12,31	11,19	11,58	12,28	13,17	14,64	15,69	17,59	17,80	15,69	-0,13	8	3,07	0,181	
Ogan Komering Ilir	14,68	14,73	15,01	15,28	15,75	16,03	17,08	15,30	15,82	14,53	15,06	15,98	16,17	17,67	22,50	24,47	25,93	22,50	-0,05	14	7,82	0,460	
Muara Enim	12,32	12,32	12,41	12,56	13,19	13,56	14,54	13,76	14,26	13,21	13,71	14,51	15,96	17,98	19,87	22,03	21,88	19,87	0,00	7	7,55	0,444	
Lahat	16,46	15,95	15,92	16,15	16,81	17,11	18,02	18,02	18,61	17,45	17,92	19,03	20,98	23,21	28,09	29,57	29,67	28,09	0,51	16	11,63	0,684	
Musi Rawas	13,89	13,50	13,37	13,76	14,24	14,30	15,13	17,28	17,85	17,67	18,25	19,38	21,40	24,27	32,93	34,82	34,49	32,93	0,39	13	19,04	1,120	
Musi Banyuasin	15,84	16,13	16,41	16,52	16,75	17,27	18,35	17,38	18,02	18,29	18,99	20,06	22,76	25,45	33,60	35,52	36,28	36,39	-0,29	15	20,55	1,209	
Banyuasin	10,75	11,17	11,33	11,32	11,47	11,72	12,45	11,88	12,28	11,27	11,66	12,39	13,72	15,38	17,72	20,22	19,81	17,72	-0,42	3	6,97	0,410	
Ogan Komering Ulu Selatan	11,12	10,85	10,53	10,64	10,98	10,95	11,58	11,21	11,57	10,49	10,84	11,53	12,73	14,56	18,96	18,42	21,06	18,96	0,27	4	7,84	0,461	
Ogan Komering Ulu Timur	10,6	10,43	10,43	10,57	11,00	11,29	11,24	10,13	10,28	8,98	9,23	9,81	9,95	12,12	16,03	18,38	18,26	16,03	0,17	2	5,43	0,319	
Ogan Ilir	13,82	13,36	13,31	13,19	13,58	13,80	14,43	13,38	13,86	12,79	13,18	13,98	15,65	17,78	21,57	23,75	22,67	21,57	0,46	12	7,75	0,456	
Empat Lawang	13,35	12,63	12,30	12,25	12,44	12,54	13,33	12,89	13,10	13,36	13,82	14,74	15,80	18,37	23,50	-	-	23,50	0,72	11	10,15	0,677	
Pali	12,91	12,62	13,47	13,81	14,53	14,23	14,88	-	-	-	-	-	-	-	8,98	-	-	-	0,29	9	-3,93	-0,561	
Musi Rawas Utara	20,11	19,47	19,12	19,12	19,49	20,00	19,73	-	-	-	-	-	-	-	7,57	-	-	-	0,64	17	-12,54	-1,791	
Palembang	11,34	10,89	10,90	10,95	11,40	12,04	12,85	12,93	13,36	13,59	14,13	15,00	14,75	16,66	8,98	9,35	9,23	8,98	0,45	5	-2,36	-0,139	
Prabumulih	12,2	11,59	11,61	11,39	11,42	11,44	12,12	10,86	11,23	11,71	12,19	12,94	13,93	15,39	7,57	11,83	9,33	7,57	0,61	6	-4,63	-0,272	
Pagar Alam	9,4	9,07	8,90	8,77	8,89	9,19	9,64	8,90	9,00	9,00	9,24	9,81	9,66	10,23	9,75	13,20	11,88	9,75	0,33	1	0,35	0,021	
Lubuk Linggau	13,23	12,71	12,95	13,02	13,12	13,99	15,16	13,90	14,37	13,88	14,43	15,30	15,12	17,36	14,25	16,11	16,01	14,25	0,52	10	1,02	0,060	
Sumatera Selatan	12,84	12,7	12,71	12,80	13,19	13,54	14,25	13,62	14,06	13,48	13,95	14,80	15,68	17,67	19,15	21,01	20,99	19,15	0,18		6,31	0,371	

Sumber : BPS, 2021. Diolah

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan daerah dengan kondisi pandemi covid-19. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tetap konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi

Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (15,84%) menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Muratara (20,11%) dan Kabupaten Lahat (16,46%).

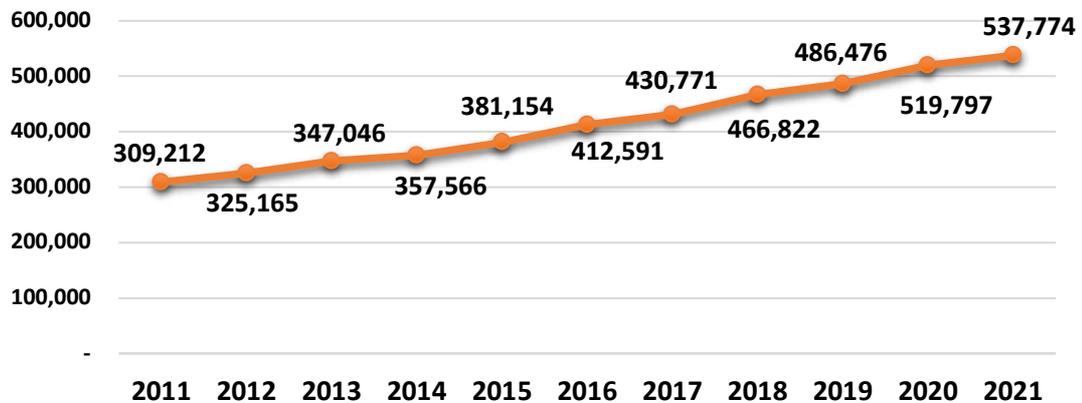
Tabel 2.14
Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	GK (Rupiah/Kapita/Bulan)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prabumulih	466.459	493.871	530.748	541.648	569.769	592.209
2	Palembang	456.225	480.735	510.994	521.489	548.563	567.517
3	Musi Banyuasin	412.591	430.771	466.822	486.476	519.797	537.774
4	Musi Rawas Utara	401.205	417.805	456.844	470.485	504.598	532.273
5	Lubuk Linggau	417.192	435.956	470.897	477.756	495.213	516.762
6	Musi Rawas	377.135	392.740	427.595	437.854	467.766	493.675
7	Ogan Ilir	367.067	386.740	416.098	433.616	469.746	492.536
8	Lahat	369.359	385.525	419.658	428.309	457.569	485.141
9	Ogan Komering Ulu	365.341	380.254	415.785	428.200	457.452	481.139
10	Banyuasin	337.391	353.914	381.437	397.496	429.816	445.088
11	Pali	330.907	346.448	377.160	388.208	412.236	435.379
12	Muara Enim	316.729	331.554	353.012	367.761	390.342	405.782
13	Ogan Komering Ilir	295.852	310.341	333.505	347.121	375.837	393.239
14	Oku Timur	274.608	285.970	312.340	321.629	343.601	362.446
15	Empat Lawang	269.211	280.350	306.546	315.699	341.007	360.377
16	Oku Selatan	273.594	286.157	310.717	319.333	341.148	359.858
17	Pagar Alam	289.493	299.982	324.025	328.745	342.738	356.287

Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.9

Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021



Sumber : BPS, 2021.

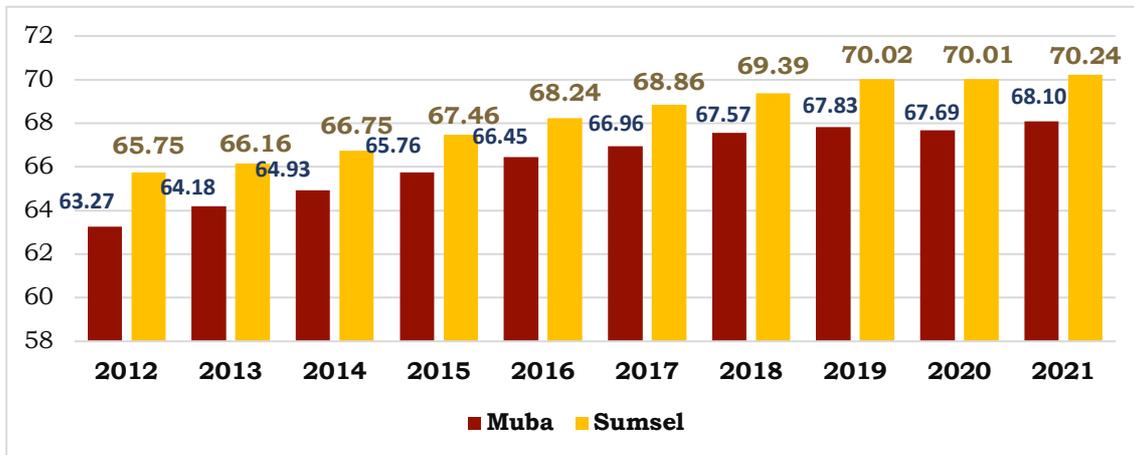
2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil (*adjusted*).

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Dalam kurun waktu tahun 2012-2021, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meningkat sebesar 4,83 poin yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin walaupun masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tahun 2012 capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 63,27 dan terus meningkat menjadi 68,10 pada tahun 2021.

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Muba dan Sumsel Periode 2012-2021



Sumber : BPS, 2021

Walaupun IPM Musi Banyuasin telah mengalami peningkatan dalam waktu delapan tahun terakhir tetapi apabila dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin masih menempati urutan ke-8 dibawah Kota Palembang (78,72), Kota Lubuk Linggau (74,89), Kota Prabumulih (74,67), Kabupaten OKU (69,60), Kabupaten OKU Timur (69,58), Kabupaten Muara Enim (68,86) dan Kabupaten Pagar Alam (68,68). Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM		Selisih 2020- 2021
		2020	2021	
1	Palembang	78,33	78,72	0,39
2	Lubuk Linggau	74,78	74,89	0,11
3	Prabumulih	74,55	74,67	0,12
4	Ogan Komering Ulu	69,32	69,60	0,28

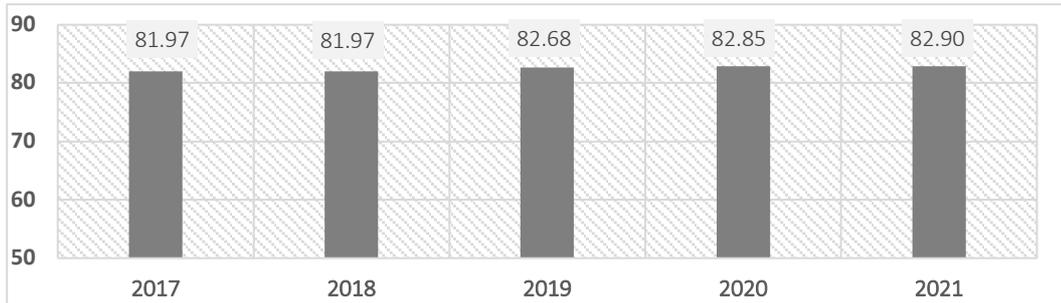
No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM		Selisih
		2020	2021	2020-2021
5	Ogan Komering Ulu Timur	69,28	69,58	0,3
6	Muara Enim	68,74	68,86	0,12
7	Pagar Alam	68,31	68,68	0,37
8	Musi Banyuasin	67,69	68,10	0,41
9	Lahat	67,44	67,58	0,14
10	Ogan Ilir	67,06	67,17	0,11
11	Ogan Komering Ilir	66,82	67,17	0,35
12	Musi Rawas	66,79	67,01	0,22
13	Banyuasin	66,74	67,13	0,39
14	Ogan Komering Ulu Selatan	65,30	65,34	0,04
15	Empat Lawang	65,25	65,39	0,14
16	PALI	64,70	64,88	0,18
17	Musi Rawas Utara	64,49	64,93	0,44
Sumatera Selatan		70,01	70,24	0,23

Sumber : BPS, 2021

2.1.5.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar 82,90%. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur selisih antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan yang bertujuan melihat ketidakadilan gender antara pencapaian laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indikator Variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu 4 variabel pokok yang menggabungkan 3 aspek di bidang kesehatan (Angka Harapan Hidup), Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (Pengeluaran perkapita).

Gambar 2.11
Perkembangan IPG Kab.Muba Tahun 2017-2021



Sumber: DPPP A Kab. Muba, 2021

Tabel 2.16
Indikator Variabel Pembentuk IPG

No	Indikator	Tahun 2021	
		Laki- Laki	Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 82,90			
1	Angka Harapan Hidup	66,58	70,71
2	Harapan Lama Sekolah	11,99	12,08
3	Rata- rata lama sekolah	7,89	7,34
4	Pengeluaran perkapita	15,8 juta/th	5,2 juta/th

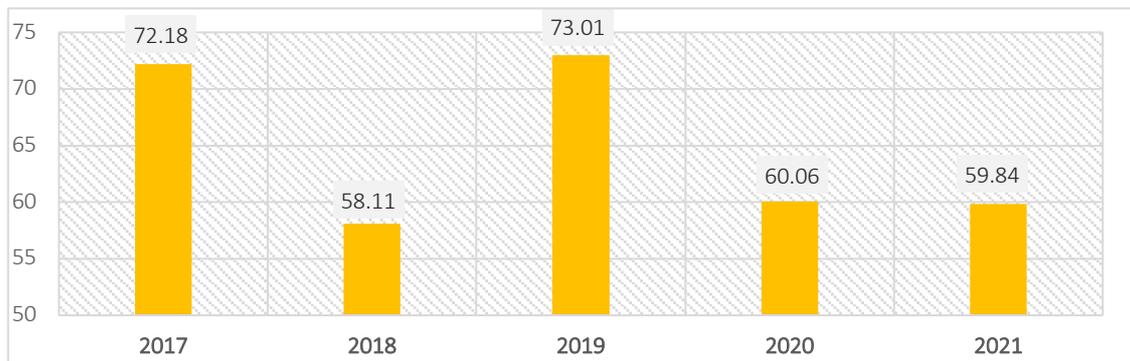
Sumber: DPPP A Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar 66,5% terealisasi sebesar 59,84%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun variabel pembentuk IDG yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Gambar 2.12

Perkembangan IDG Kab.Muba Tahun 2017-2021



Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

Tabel 2.17

Indikator Variabel Pembentuk IDG

No	Indikator	Tahun 2021
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 59,84		
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	6,67
2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	47,11
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	35,21

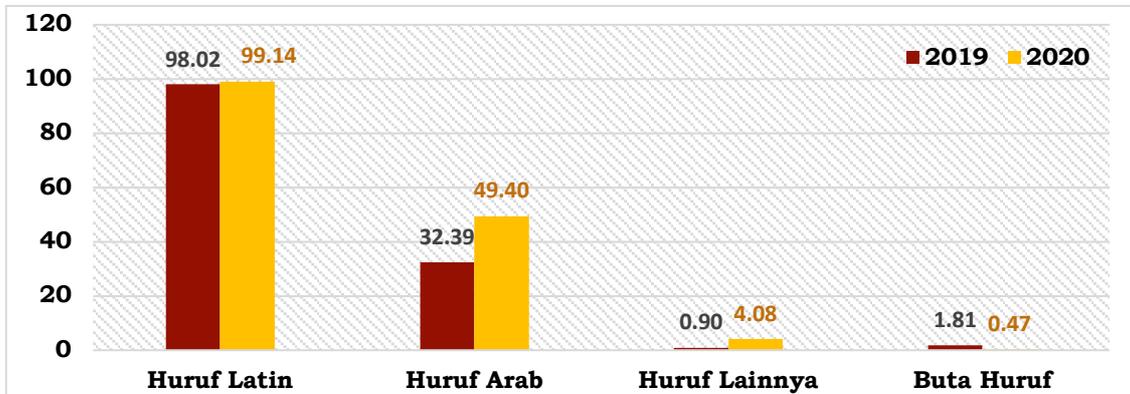
Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.4 Aspek Pendidikan

Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan dapat menikmati hasil- hasil pembangunan secara wajar. Sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera.

Gambar 2.13

Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Pada tahun 2020 masih terdapat 0,47 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, hal ini mengalami penurunan karena pada tahun 2019 penduduk Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca maupun menulis (buta huruf) adalah sebesar 1,81 persen.

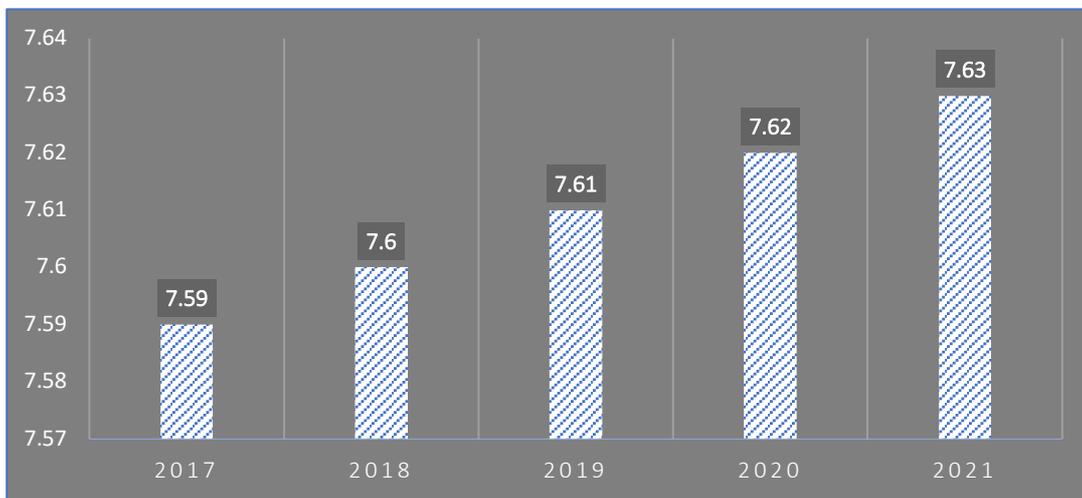
Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-rata lama bersekolah (tahun). Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin lama rata-rata lama bersekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan penduduk tersebut.

Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Musi Banyuasin adalah 7,59 tahun. Artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 (tingkat VII).

Dalam perkembangannya, rata-rata lamanya sekolah tampak mengalami peningkatan hingga tahun 2021, rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 7,63 artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 atau kelas 2.

Gambar 2.14

**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021**



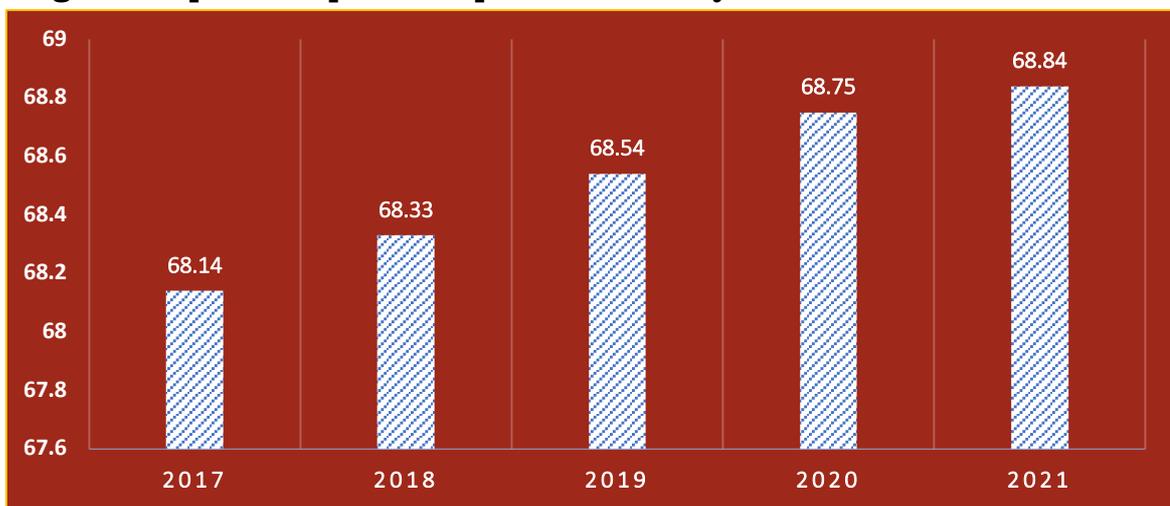
Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.5 Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin

baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama pada tingkat puskesmas dan pustu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021



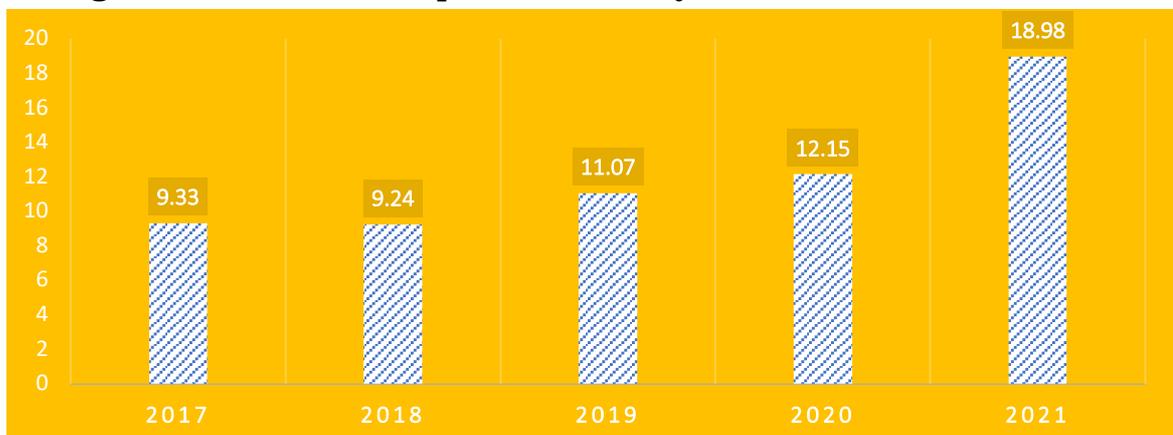
Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Berdasarkan tabel diatas, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 adalah 68,84 yang artinya rata-rata penduduk Musi Banyuasin akan hidup mencapai umur 68 tahun. Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup periode sebelumnya, terdapat peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk saat waktu tertentu dimana dalam Susenas dicatat selama

sebulan sebelum pencacahan. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Sebagai contoh pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan (pekerja sehat) akan dapat bekerja dengan jam kerja lebih lama dan bekerja lebih optimal.

Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan. Angka kesakitan adalah adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Secara umum, angka kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka kesakitan yaitu sebesar 9,33 lalu turun hingga 9,24 di tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 11,07 dan akibat pandemi Covid-19 kembali meningkat hingga mencapai 12,15 di tahun 2020 dan 18,98 di tahun 2021.

Gambar 2.16
Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.6 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antarjumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja agar aktif bekerja atau mencari kerja yang

sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang memengaruhi angka TPAK.

Tabel 2.18
Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021

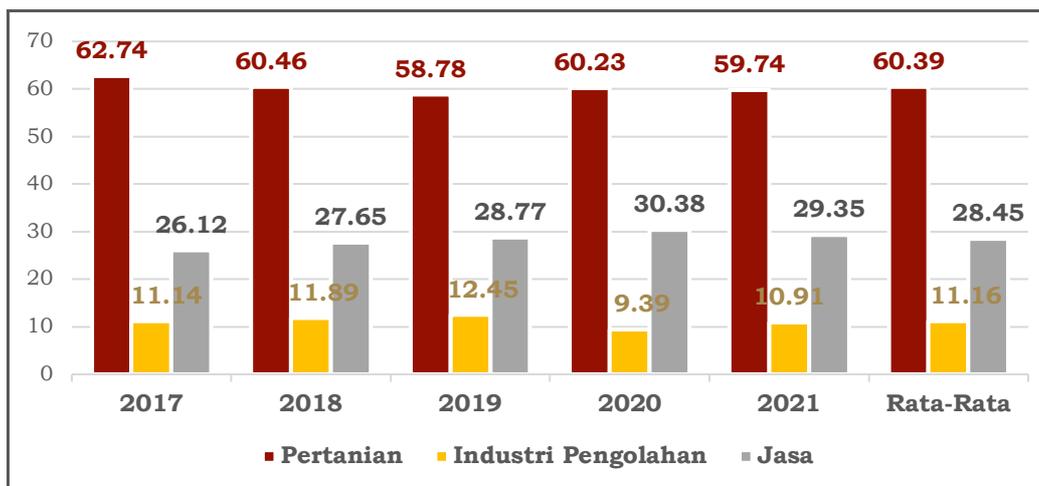
Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Angkatan Kerja	285.123	298.957	303.317	333.864	331.326
Bekerja	269.140	290.745	290.744	317.868	318.096
Menganggur	15.983	8.212	12.573	15.986	13.230
2. Bukan Angkatan Kerja	139.425	143.045	153.811	138.952	147.576
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,64	65,36	66,35	70,61	69,18
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,75	3,29	4,15	4,79	3,99

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Jumlah angkatan kerja di Musi Banyuasin tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2021 terdapat 331.326 penduduk yang merupakan angkatan kerja, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 46.203 jiwa dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2017. Pada tahun 2021, TPAK Musi Banyuasin sebesar 70,61 persen yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 69,18. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 69,18 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan

30,82 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021



Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin menurut lapangan usaha utama masih menunjukkan dominasi persentase tenaga kerja di sektor primer disusul sektor tersier dan kemudian sektor sekunder. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah angka pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 2,75 persen, lalu terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 4,79 persen. Dan turun kembali menjadi 3,99 persen pada tahun 2021. Tingkat pengangguran di Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 3,99 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 sampai 4 orang yang menganggur atau dari 331.326 angkatan kerja terdapat 13.230 orang yang menganggur.

2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.5.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Sehingga keberagaman dan keunikan budaya di Kabupaten Musi Banyuasin mendorong kebhinekaan dan ketahanan budaya, melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Kondisi layanan kebudayaan tercermin dari tabel data-data berikut ini.

Tabel 2.19
Kegiatan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021

Kegiatan	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	48 Sanggar	68 Sanggar
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Yang Aktif	1 Festival	1 Festival
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1 Lokasi	2 Lokasi
Persentasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	29%	33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2022

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan hasil yang statis yang menunjukkan bahwa ketahanan budaya dalam melestarikan dan melindungi aset budaya di Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal. Hanya 33 persen situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun di Kabupaten Musi Banyuasin diselenggarakan festival seni budaya yang aktif setiap tahunnya, yakni Festival Randik yang merupakan ajang kesenian antar kecamatan dalam upaya pelestarian seni budaya di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.5.3.2 Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dengan peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan, dan akses permodalan.

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 35 organisasi. Sedangkan organisasi olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 – 2021 meningkat yaitu sebanyak 43 organisasi menjadi 45 organisasi. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penambahan

sebanyak 3 kegiatan dari tahun 2020 ke 2021. Untuk kegiatan olahraga, jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin juga mengalami penambahan sebanyak 20 kegiatan dari tahun 2020 ke 2021.

Tabel 2.20
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2020-2021

Kegiatan	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	35 organisasi	35 organisasi
Jumlah Organisasi Olahraga Yang Aktif	43 organisasi	45 organisasi
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender Kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan
Jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan	10 kegiatan	30 kegiatan
Persentase Penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi Muda yang dibina	16,49	91,48

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Muba, 2021

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Berikut merupakan Capaian SPM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.21
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2020 dan 2021

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN	
			2020	2021
1	Pendidikan	A. Pendidikan Anak Usia Dini	36,71%	83,07%
		B. Pendidikan Dasar	88,18%	82,33%
		C. Pendidikan Kesetaraan	55,51%	90,46%
2	Kesehatan	A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,25%	98,04%
		B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97,50%	98,54%
		C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	94,97%	100,29%
		D. Pelayanan Kesehatan Balita	96,57%	95,61%
		E. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,46%	94,49%
		F. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87,83%	98,85%
		G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	88,56%	98,00%
		H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	94,25%	99,70%
		I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	92,99%	98,63%
		J. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92,22%	97,60%
		K. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	97,86%	94,55%

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN	
			2020	2021
		L. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	112,16%	92,29%
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	85,47%	87,94%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	66,30%	81,30%
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00%	62,50%
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	19,73%	83,33%
5	Trantibum Linmas	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	100,00%	100,00%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100,00%	97,00%
6	Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1,46%	100,00%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0,42%	100,00%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100,00%
7	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00%	100,00%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	100,00%	100,00%

Sumber : SPM Kab. Muba, 2021

2.1.7 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum terdapat 36 bidang urusan yang menjadi kewenangan

Pemerintah, yang dibagi berdasarkan urusan wajib, pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Namun tidak semua bidang urusan berhubungan langsung dengan pelayanan umum terhadap publik. Berikut ini urusan wajib yang memberikan kontribusi terbesar dalam mengukur pelayanan terhadap publik.

2.1.7.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

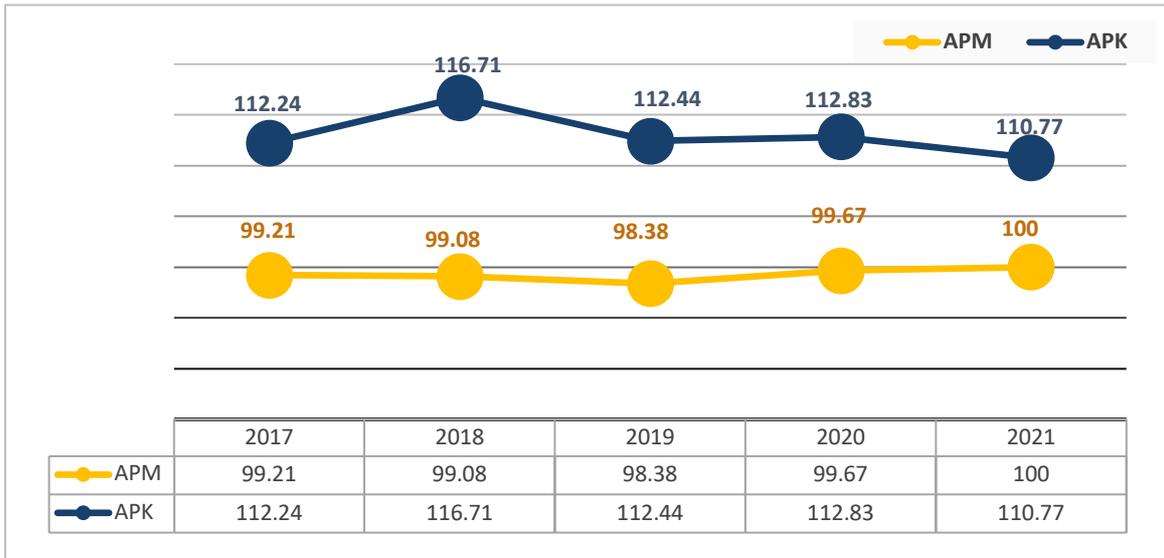
2.1.7.1.1 Urusan Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah, Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkannya. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dicerminkan dalam program pemerintah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan. Untuk melihat angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK)

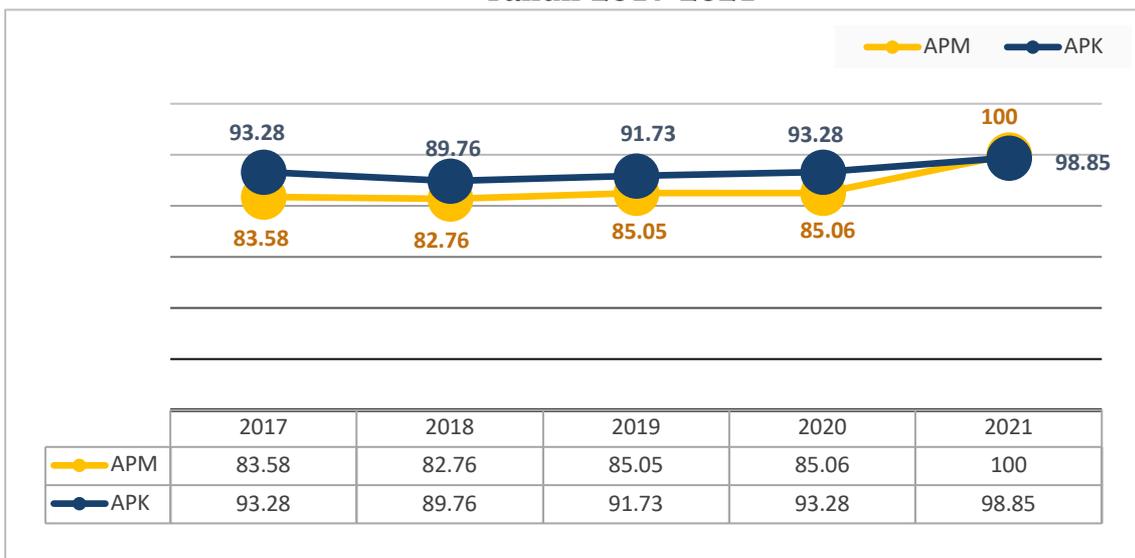
menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI Kab.Muba
Tahun 2017-2021



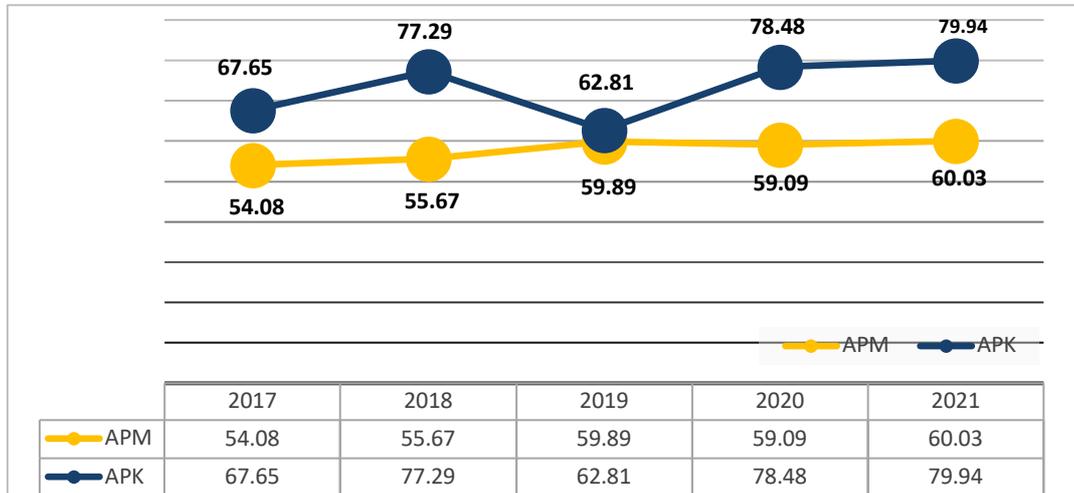
Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Gambar 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kab.Muba
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Kab.Muba
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kab. Muba Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)						Jumlah Murid (jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TK/RA	N/A	N/A	196	224	224	248	N/A	N/A	8.632	10.084	10.533	10.004
SD/MI	483	492	500	502	488	481	86.627	91.082	89.764	88.589	89.518	83.443
SLTP/MTs	172	190	191	195	188	162	32.283	33.062	34.220	34.725	34.609	31.228
SMU/SMK/MA	86	99	99	101	100	101	20.808	20.808	25.308	26.848	28.084	27.757

Sumber : BPS Kab. Muba dan Dinas Pendidikan Kab. Muba, 2022

Pada tahun 2021 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai dengan TK/RA sebanyak 248 unit, SD/MI sebanyak 481 unit, SLTP/MTs sebanyak 162unit, SMU/SMK/MA sebanyak 101 unit, Poltek Sekayu sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER sebanyak 1 unit dan Sekolah

Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima Program. Sementara jumlah murid tahun 2021 untuk tingkat TK/RA sebanyak 10.004 orang, SD/MI sebanyak 83.443 orang, SLTP/MTs sebanyak 31.228 orang, dan SMU/SMK/MA sebanyak 27.757 orang.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase terlayannya pendidikan anak usia dini 0-6 tahun	79,58	70,33	72,95	55,38	55,38
2	APK SD	104,31	108,72	108,29	115,72	110,77
3	APK SMP	109,18	109,70	108,30	97,17	98,85
4	APM SD	100	100	100	115,72	100
5	APM SMP	100	100	100	100	100
6	Jumlah Kelompok Belajar Paket C	20	19	18	18	17
7	Jumlah Kelompok belajar non formal	25	24	23	18	17
8	Persentase guru bersertifikasi	75,00	83,62	90,32	91,04	94,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2021

2.1.7.1.2 Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan dalam masyarakat diperlukan koordinasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan adalah dengan peningkatan tipe rumah sakit dan mulai beroperasi pada awal tahun 1999.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 3 unit yang terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Bayung Lencir, dan Kecamatan Sungai Lilin. Adapun jumlah sarana kesehatan lainnya yaitu poliklinik sebanyak 10 unit, puskesmas sebanyak 32 unit, puskesmas pembantu sebanyak 107 unit, dan apotek sebanyak 16 unit. Sedangkan jumlah tenaga medis dan paramedis pada tahun 2020 sebanyak 1.384 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, sanitarian dan lainnya.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kematian balita (per kasus)	-	-	0/1000	150/1000	3/1000
2	Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100
3	Persentase stunting pada balita	21,4	10,12	9	7,67	23
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	43	71,4	100	100	100
5	Angka Kematian Ibu	9 Kasus	94/ 100000	86/ 100000	63/ 1000	60/ 1000
6	Angka Kematian Bayi	42 Kasus	3/1000	5/1000	5/1000	2/1000
7	Angka Kematian Balita	N/A	N/A	0/1000	150/1000	3/1000
8	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	42,23	50,81	99,70	95,08	95,08
9	Indeks Keluarga Sehat	0,09	0,09	0,10	0,193	0,27
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	82,66	83,19	83,62	95,24
11	Rata-rata indeks kepuasan pelanggan rumah sakit	77	82,66	83,19	83,62	95,24
12	Tipe kelas Rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel	Tipe B	Tipe B	Tipe B	Tipe B	Tipe B
13	Predikat penilaian akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna versi SNARS	Paripurna versi SNARS
14	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	-	-	85,71	90,48	81,77*

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

2.1.7.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk penanganan jalan dan pada jalur horizontal dan vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk menangani jalan-jalan non status pada jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menyelenggarakan program dan kegiatan diseluruh bidang kebina margaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan berbasis kinerja. Disamping penanganan jalan Kabupaten, juga telah dilakukan pula peningkatan jalan sebagai pendukung Kawasan Industri, yaitu peningkatan dan rehabilitasi jalan antara desa dalam kecamatan.

Total panjang jalan Kabupaten tahun 2021 sebesar 1.073,77 km dimana berdasarkan jenis permukaannya sebesar 494,97 km adalah jalan diaspal, 224,69 km adalah jalan beton, 305,11 km adalah jalan kerikil dan 49,00 km masih merupakan jalan tanah. Pada tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 776,21 km dibandingkan dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 1.073,77 km. Dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja utama sudah menggunakan data panjang jalan terbaru, sehingga capaian kinerjanya belum mencapai target.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	54,33	49,88	56,72	57,88	72,29
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	70,00	78,30	81,23	80	81,26

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

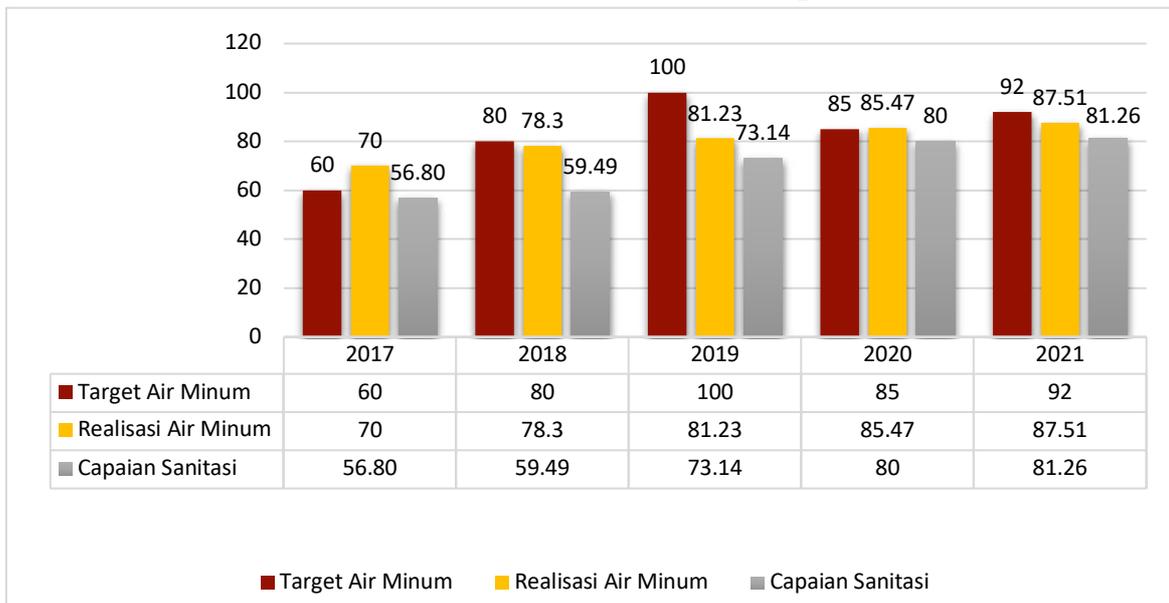
2.1.7.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah. Masalah pokok kawasan perumahan dan permukiman adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana. Adanya keterbatasan proporsi penduduk yang menerima manfaat dari fasilitas pelayanan air bersih dan air limbah, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Sementara perkembangan perumahan dan permukiman semakin bertambah cepat. Disamping itu kenyataan yang ada bahwa perkembangan infrastruktur menurun karena kemampuan keuangan pemerintah dalam pembiayaan fasilitas perkotaan dan fasilitas pelayanan umum. Berbagai upaya peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan telah dilakukan dalam masalah ini. Salah satu pemecahannya adalah peningkatan akses terhadap lingkungan permukiman yang tidak memadai, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas, terutama pada penyediaan pelayanan fasilitas listrik, air bersih dan

pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lingkungan perumahan dan permukiman yang ada.

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih tahun 2021 sebesar 95,11% dari target sebesar 92% terealisasi sebesar 87,51%. Angka ini naik sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2020 dimana realisasi jumlah KK yang terlayani Air Bersih sebesar 85,54%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 100%, maka jumlah KK yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah KK yang terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

Gambar 2.21
Presentase Penduduk Berakses Air Minum dan Capaian Akses Sanitasi



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2022

Capaian indikator kinerja jumlah KK yang terlayani air bersih ini didukung oleh peningkatan dan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah setiap tahun melakukan

penambahan sarana prasarana distribusi air bersih di wilayah kecamatan serta terus meningkatkan kualitas air bersih yang dipasok kepada masyarakat. Disamping pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan melalui PDAM Tirta Randik Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga membangun sumur – sumur bor terutama untuk wilayah perdesaan yang sulit dan sangat jauh dari jangkauan layanan air bersih PDAM serta melakukan pembangunan sarana prasarana PAMSIMAS baik melalui Program PAMSIMAS APBD maupun Program HID (Hibah Insentif Desa) untuk Desa PAMSIMAS berkinerja baik yang menggunakan dana APBN. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara merata hingga ke wilayah perdesaan.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	63,46	65,47	59,91	67,93	87,51
2.	Rumah tangga bersanitasi (%)	57,65	58,75	73,14	83,83	81,26
3.	Rumah layak huni (%)	84	84,32	84,39	84,45	84,37
4.	Rumah tangga pengguna listrik	95,78	98,3	98,9	98,55	98,55

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2022

2.1.7.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman akan berdampak

positif pada proses pembangunan di berbagai sektor. Rasa aman yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial berupa berbagai penyakit sosial serta rasa aman dari adanya bencana alam. Kerjasama harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas, Kepolisian dan PD terkait senantiasa digalang dalam rangka meminimalisir terjadinya berbagai penyakit masyarakat.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Musi Banyuasin 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	100	100	100	100	100
3.	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin (%)	60,12	63,67	82	75	82
4.	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah sesuai kalender kerja	12	4	1	1	3
5.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	52,85	100	100	100	100
6.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	4	1	1	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial

terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat sebagai berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka PMKS yang mendapat layanan	5,49	32	85,54	71,41	76,15
2	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat layanan	14	25	51	65,59	84,12
3	Persentase panti sosial yang dibina	100	100	75	100	100
4	Persentase lembaga sosial yang berdaya	100	100	100	100	100
5	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup PMKS	100	100	100	100	100
6	Persentasi korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin, 2022

Pada **Tabel 2.29** berikut ini, disampaikan jumlah panti asuhan dalam binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 2.29
Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

NO.	JENIS PELAYANAN PANTI	NAMA PANTI SOSIAL	JUMLAH ANAK ASUH /PENGHUNI
1.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan At- Taqwa	41 Orang
2.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Hari Kurnia	40 Orang
3.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Nurul Huda	23 Orang
4.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Elnuza	42 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab. Muba

2.1.7.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

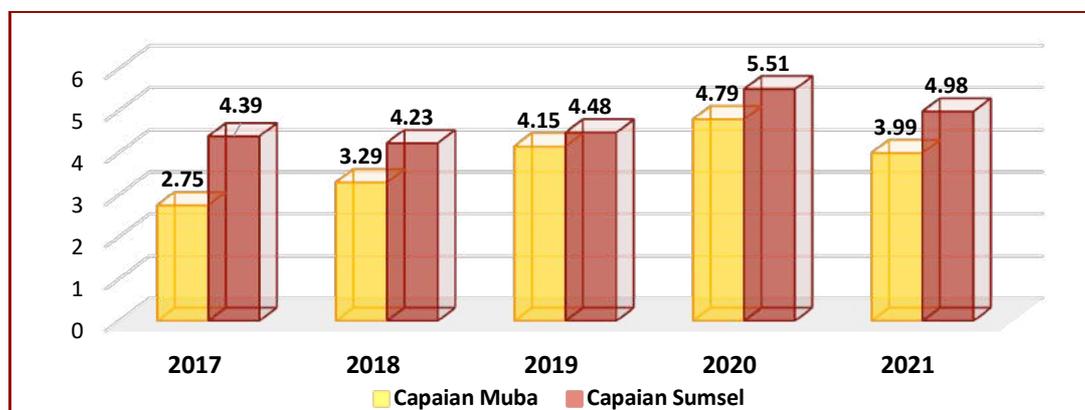
2.1.7.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Hal ini mengakibatkan pentingnya penyediaan lapangan kerja utamanya untuk generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 3,99%. Capaian Kinerja Indikator Pengangguran terbuka didapat dari perbandingan jumlah pengangguran terbuka Usia Angkatan

Kerja sebanyak 13.230 Orang dan jumlah Penduduk Angkatan Kerja sebanyak 331.326 Orang. Untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,75% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 3,29%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 4,15% dan tahun 2020 menjadi 4,79%. Di tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin menurun menjadi 3,99%.

Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel
Periode 2017-2021 (%)



Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Muba, 2021

Peningkatan angka pengangguran terbuka tersebut berbanding lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang sama sebagai salah satu dampak dari kondisi pandemi covid-19. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebanyak 13.230 orang yang terdiri dari 7.177 laki-laki dan 6.053

perempuan.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 433 perusahaan dengan pekerja sebanyak 57.116 orang. Usaha-usaha pembinaan terhadap pengrajin akan terus dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang mengingat jumlah dan ragam kegiatan pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan. Pada **tabel 2.30** dapat dilihat jumlah perusahaan industri menurut tenaga kerja yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin :

Tabel 2.30
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin 2021

No.	Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Sanga Desa	10	2.141
2	Babat Toman	19	3.676
3	Batanghari Leko	21	2.044
4	Plakat Tinggi	4	816
5	Lawang Wetan	-	-
6	Sungai Keruh	6	1.108
7	Sekayu	73	6.243
8	Lais	84	7.878
9	Sungai Lilin	41	6.192
10	Keluang	3	223
11	Babat Supat	11	1.857
12	Bayung Lencir	132	18.082
13	Lalan	10	3.308
14	Tungkal Jaya	17	3.483
15	Jirak Jaya	2	65
MUSI BANYUASIN		433	57.116

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba, 2022

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk yang bekerja	94,80	94,99	83,19	67,32	68,92
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	29,14	32,32	16,50	38,66	40,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75	3,29	4,15	4,79	3,99
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,43	77,03	66,35	70,61	69,18
5	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	7,3	7,1	6	12,59	11,43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar 82,90%. Sedangkan untuk Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar 66,5% terealisasi sebesar 59,84%.

Meskipun capaian kinerja ini sudah sangat baik, namun perlu ditingkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Tidak saja diukur dari jumlah perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, tetapi perlu didorong organisasi – organisasi perempuan sebagai wadah penyampaian aspirasi para perempuan, serta meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan serta kesempatan yang sama dengan kaum laki – laki.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	-	20	30	32	35
2	Rasio KDRT perempuan	0,01	0,076	0,007	0,0041	0,006
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,97	81,97	82,68	82,85	82,90
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,18	58,11	73,01	60,06	59,84
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	-	20	27	N/A*	N/A*
6	Persentase kecamatan layak anak	-	26	33,33	40	54,34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin, 2021

* Tahun 2020 Tidak menghitung penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan Rasio Kekerasan Terhadap Anak : 0,014

2.1.7.2.3 Urusan Pangan

Dalam urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta mendukung program Sumsel Lumbung Pangan. Pembangunan Ketahanan Pangan didasarkan kepada tiga pilar utama yaitu ketersediaan, distribusi dan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan sendiri. Data produksi dan konsumsi langsung masyarakat beberapa komoditas pangan pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33
Neraca Ketersediaan Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2021

NO	Komoditi	2020			2021		
		Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus /minus	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus /minus
1.	Beras	173.843	54.477	106.510	130.776	54.816	75.960
2.	Jagung	44.312	504	160.483	6.045	2.116	3.929
3.	Ubi Kayu	30.675	12.155	7.463	110	15.804	94.196
4.	Ubi Jalar	2.108	1.700	1.282	29	2.9	26.076
5.	Kedelai	3	2.960	2.123	1.5	3.82	-2.32
6.	Gula Pasir	0	3.590	(3.590)	0	3.55	-3.55
7.	Minyak goreng/ Sawit	0	7.117	(7.117)	0	8.275	-8.275
8.	Sayuran	72.710	36.654	(27.388)	51.233	44.052	7.181
9.	Buah	24.240	20.279	(7.927)	10.67	23.021	-12.351
10.	Daging Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi	1.100	2.204	(1.288)	3.17	1.493	1.677
11.	Daging ayam	3.924	7.872	(3.595)	1.8	9.333	-7.533
12.	Telur	502.327	8.313	(4.532)	453	7,902	- 7,449
13.	Susu	0	8.943	(8.943)	0	7.217	-7.217
14.	Ikan	238.080	30.167	10.122	318.58	27.937	29.094

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Tabel 2.34
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020 dan 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Tahun 2020						Tahun 2021					
		Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	3.214	133,90	0,5	67,0	25,0	25,0	1.216,47	50,69	0,5	28,95	25	25
2.	Umbi-umbian	241	10,02	0,5	5,0	2,5	2,5	163,67	5,99	0,5	3,42	2,5	2,5
3.	Pangan Hewani	3.761	156,69	2,0	313,4	24,0	24,0	159,47	6,64	2	15,18	15,68	24
4.	Minyak dan Lemak	2.850	118,76	0,5	59,4	5,0	5,0	342,52	14,27	0,5	8,15	5	5
5.	Buah/biji berminyak	8	0,35	0,5	0,2	0,2	1,0	4,54	0,19	0,5	0,11	0,91	1
6.	Kacang-kacangan	121	5,05	2,0	10,1	10,0	10,0	73,2	3,05	2	6,97	8,18	10
7.	Gula	68	2,82	0,5	1,4	1,4	2,5	76,14	3,17	0,5	1,81	1,8	2,5
8.	Sayuran dan buah	176	7,34	5,0	36,7	30,0	30,0	84,37	3,52	5	20,08	29,5	30
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	0,31	0,01	0	0	0	0
	Jumlah	10.438	434,93		493,1	98,1	100,0	2.100,68	87,53		84,67	88,57	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba, 2022

Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 untuk Tingkat Ketersediaan Pangan sebesar 88,6 lebih rendah dibandingkan skor PPH di tahun sebelumnya yang mencapai 98,1. Sedangkan untuk Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar 88,5 meningkat dibandingkan dibandingkan skor PPH di tahun sebelumnya yang mencapai 88,0. Skor PPH berhasil mencapai target dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan lagi yaitu lagi yaitu dari kelompok Padi-padian, Umbi – umbian, Pangan Hewani, Kacang – kacangan dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	89,1	96,8	96,9	98,1	88,6
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan	83,5	85,4	86,9	88,0	88,5
3	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	234,22	371,28	209,5	312,2	281,9
4	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	200,4	2004,9	2011,6	2059,8	2086,2
5	Persentase desa mandiri pangan	31,36	33,47	15,86	23,45	23,45
6	Persentase Pangan Aman di Konsumsi	-	85	76,8	84,23	96,7
7	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi	-	-	-	5	5
8	Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit)	-	-	1	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.4 Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Indikator persentase luas lahan bersertifikat sebanyak 9,2 di tahun 2017, 9,63% di tahun 2018, 9,53% di tahun 2019, 9,87% di tahun 2020 dan 15,44% di tahun 2021. Sedangkan untuk indikator penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2021 menyelesaikan kasus tanah negara mencapai 81,25%. Di Kabupaten Musi Banyuasin, untuk indikator penyelesaian izin lokasi selama 5 tahun terakhir, izin lokasi yang dikeluarkan terselesaikan sebanyak 100%.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	9,2	9,63	9,53	9,87	15,44
2	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	16,00	33,33	100	6,25	81,25
3	Penyelesaian izin lokasi(%)	100	100	100	100	100

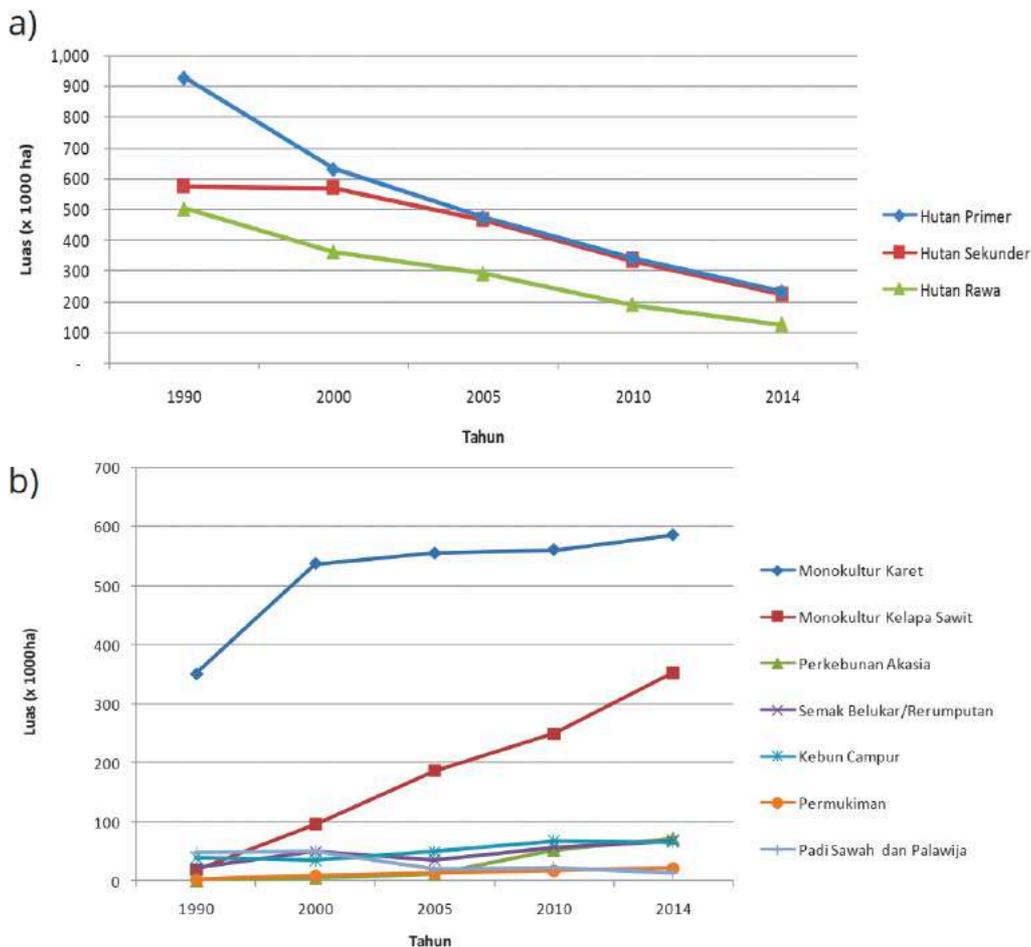
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sesuai dengan Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012, sejalan dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Musi

Banyuasin sebagai dari Provinsi Sumatera Selatan merasa memiliki peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan inisiatif ini juga merupakan dukungan terhadap proses Implementasi RAD – GRK Provinsi Sumsel. Bagi Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini merupakan proses yang memperkuat proses perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim dan berwawasan keberlanjutan (*sustainability*), yang belum semua daerah di Indonesia dapat melaksanakan proses ini.

Grafik Perubahan Luas Penggunaan Lahan (a) Luasan hutan yang menurun (b) Luasan penggunaan lahan yang meningkat secara signifikan



Sumber: Analisis POKJA PTGL-EHKB Kab. Muba

Gambar 1 dan 2 menunjukkan dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 1990-2014. Komoditas sawit dan karet merupakan penggunaan lahan yang sangat dominan berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin di ikuti dengan perkebunan akasia. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembangunan yang signifikan akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah kegiatan pembangunan tersebut terjadi di wilayah yang sesuai fungsinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dikarenakan pada sisi lain terjadi penurunan luasan hutan yang sangat signifikan. Gambar 3 menunjukkan lokasi dimana terjadinya emisi akibat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Emisi dari perubahan penggunaan lahan tersebut terjadi akibat perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan dengan cadangan karbon (C) tinggi ke penggunaan lahan dengan cadangan karbon (C) yang lebih rendah, dimana cadangan karbon tersebut berasosiasi dengan ketersediaan vegetasi pepohonan. Berdasarkan data 1990 - 2014 terlihat emisi CO₂ banyak terjadi di bagian utara Kabupaten Musi Banyuasin. Rerata laju emisi pada tiap periode dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Tahun	Laju emisi (ton CO ₂ eq/(ha.tahun))
1990-2000	19.13
2000-2005	11.60
2005-2010	7.85
2010-2014	9.51

Sumber: Analisis POKJA PTGL-EHKB Kab. Musi Banyuasin

Tabel 2.37

**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	54,56	72,93	73,03	72,78	73,11
2	Persentase Indeks Kualitas Air	%	61,11	87,2	87	55,56	56,45
3	Persentase Indeks Kualitas Udara	%	71,2	87,29	83,02	85,52	89,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir mencapai lebih dari 90%. Kondisi demikian dikarenakan berkurangnya lama pengurusan KTP yang hingga pada tahun 2021 mencapai 1 hari saja.

Tabel 2.38

**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Jumlah Penduduk ber. KTP	%	76,71	97,12	99,91	99,99	99,45
2	Lama Pengurusan KTP	Hari	5	5	1	1	1
3	Nilai SKM	%	70,05	82,45	83,71	83,75	94,11*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin, 2022

* Data tahun 2021 merupakan data sementara (s.d Triwulan III)

2.1.7.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerja Sama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; serta Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal.

Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada tahun 2021 mencapai sebesar 25 Kelompok. Sedangkan Jumlah kelompok PKK aktif pada tahun 2021 mencapai sebanyak 227 kelompok.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	68	3	11	12	25
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	76	5	15	10	-
3	Jumlah PKK Aktif	kelompok	-	-	-	-	227

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/ prevalensi peserta KB aktif*). CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2021 capaian dari indikator ini sebesar 84,96%. Memang terlihat ada penurunan dibanding selama periode tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang memasuki fase menopause dan mengalami kehamilan.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Prevalensi peserta KB aktif (CPR)	97,94%	84,25%	82,08%	84,72%	84,96%
2	Rasio petugas KB /desa	0,17%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%
3	Prevalensi peserta KB pria	450	487	454	422	388
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,49	2,25	2,01	2,1	2,1
5	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	20,11%	12,11%	11,03%	10,60%	8,75%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.9 Urusan Perhubungan

Sarana pengangkutan massa atau sarana transportasi merupakan salah satu sarana yang penting untuk meningkatkan mobilitas

masyarakat, baik dari daerah ke kota maupun sebaliknya. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, terdapat beberapa jenis angkutan darat yang tercatat yaitu Bus Umum dengan jumlah 2 unit, Bus Tak Umum 62 unit, Truk Umum 50 unit, Truk Tak Umum 1.120 unit, Pick Up Umum 95 unit, dan Pick Up Tak Umum 443 unit.

Tabel 2.41
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2021

JENIS KENDARAAN	JUMLAH			
	2018	2019	2020	2021
Bus Umum/Otobus	97	3.650	-	2
Bus Tak Umum	105	92	5	62
Mobil Penumpang	208	-	-	-
Mobil Penumpang Otolet Tak Umum	10.316	-	1.774	-
Truk Umum	465	520	-	50
Truk Tak Umum	2.394	1.745	116	1.129
Pick Up Umum	41	900	-	95
Pick Up Tak Umum	4.429	2.017	443	2.098
Sepeda Motor	217.149	12.304	8.524	-
Lainnya	20	-	16	-
JUMLAH	4.327	21.228	10.878	3.436

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2022

Selain transportasi darat, di Kabupaten Musi Banyuasin juga mempergunakan transportasi air. Sarana transportasi air ini sangat penting karena dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan darat dikarenakan topografi Kabupaten Musi Banyuasin yang sulit dan keterbatasan jumlah sarana jalan darat.

Sungai yang sebagian besar dipergunakan untuk transportasi adalah Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dan Sungai Supat. Jenis alat transportasi yang dipergunakan

untuk transportasi sungai ini adalah kapal motor dengan berbagai kapasitas angkut dan daya mesin. Jumlah dermaga sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah empat lokasi yaitu dermaga sekayu, UPLLASD Karang Agung/Lalan, UPLLASD Sungai Lilin/Muara Tobo dan UPLLASD Kepayang.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	51	52	52	52	52
2.	Persentase Fasilitas LLAJ yang direhap	30%	30%	35%	38%	43%
3.	Jumlah Rute Pelayanan	1	1	1	1	1
4.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	3,3	4,2%	3%	3%	31,7%
5.	Persentase transportasi yang nyaman dan layak jalan	71,52%	60,2%	60%	61%	53%
6.	Persentase Prasarana Penunjang Fasilitas Perhubungan	30%	30%	35%	30%	35%
7.	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan	30%	30%	33%	30%	33%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (realtime). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017, sebanyak 43 media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial). Pada tahun 2018 media

komunikasi publik milik Pemda bertambah menjadi 51 media dan kembali bertambah pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 104 media komunikasi publik milik Pemda Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebanyak 60% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 66,15%. Di tahun 2019 dan 2020, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,5%.

2.1.7.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2021, koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 362 unit yang terdiri dari 104 unit KUD, 22 unit KPN, 21 unit KOPKAR, 2 unit KOPPAS dan lainnya berjumlah 213 unit. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi belum bisa berperan sebagai lembaga ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan pengawas koperasi tentang perkoperasian dan koperasi belum dikelola secara professional. Sehingga masih diperlukan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada kelompok-kelompok orang yang akan mendirikan koperasi.

Namun demikian mekanisme sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang telah dilakukan pada periode terdahulu perlu dilakukan telaah dan evaluasi, hal ini untuk mengetahui model *transfer knowledge* seperti apa yang efektif, jangan sampai kegiatan sosialisasi tidak berdampak dalam mewujudkan tujuan. Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan *transfer knowledge* harus dapat merubah *mindset* kelompok yang akan mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Tabel 2.43
Koperasi/KUD dan Non KUD Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

NO.	JENIS	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	KOPERASI / KUD	96	98	99	104	104
2.	NON KUD	201	216	226	239	258
JUMLAH		283	292	314	325	362

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muba, 2022

2.1.7.2.12 Urusan Penanaman Modal

Kebijakan mengundang investor adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja urusan penanaman modal Kab. Musi Banyuasin tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perda yang mendukung iklim perusahaan	3 perda	3 perda	-	-	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	82,22	88,37	88,6	88,61	98,23

Sumber: DPM-PTSP Kab. Musi Banyuasin, 2022

Terkait dengan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Selain mengandalkan investasi di sektor industri, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan istilah public private partnership (PPP).

2.1.7.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, perolehan medali dan prestasi olahraga serta pembinaan kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dengan peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan, dan akses permodalan. Capaian kinerja pemuda dan olahraga sendiri mengalami perbedaan karena adanya perubahan

indikator kinerja pada perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	40	45	45	46	N/A
2.	Persentase Pemuda yang bebas narkoba	99,90	99,95	99,94	99,94	99,94
3.	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	22,20	19,05	19,88	8,84	62,05
4.	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat provinsi	2	2	1	0	2
5.	Persentase pemuda yang berwirausaha	17,00	17,68	21,28	32,81	29,38

Sumber: Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.14 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kabupaten dalam Angka selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Selain itu Buku PDRB Kabupaten dan Buku Statistik Daerah selalu tersedia setiap tahunnya. Kedua buku tersebut merupakan sumber data dan informasi sosial ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat

digunakan sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

Tabel 2.46

**Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021**

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah buku Statistik Daerah	1	1	1	1	-
2	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	2	2	2	2	-
3	Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka	1	1	1	1	-
4	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	1
5	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	97%
6	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.15 Urusan Persandian

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017- 2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	7	14	18	32,26	-
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	2	2	2	100	-
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	4	6	0	97,80	-
4	Persentase Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	-	-	-	-	58,33

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin, 2022

Urusan Persandian ditujukan untuk pengamanan informasi pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Berdasarkan Tabel 2.47 dapat diketahui bahwa rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan pada tahun 2020 hanya 32,26 persen, rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian pada tahun 2020 sebesar 100 persen dan rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian 97,80 persen. Sedangkan untuk tahun 2021, indikator urusan persandian berganti menjadi Persentase Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah yang terealisasi sebesar 58,33% dan telah melebihi dari target yang telah ditentukan yakni 40%.

2.1.7.2.16 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 diselenggarakan dua festival seni dan budaya, kemudian di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diselenggarakan empat festival seni dan budaya, capaian kinerja tersebut mencapai target setiap tahunnya. Lebih lanjut, setiap tahun target benda dan cagar budaya yang dilestarikan selalu tercapai. Untuk jumlah sanggar seni budaya yang aktif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya sebanyak 8 sanggar seni budaya, dan pada tahun 2021 sanggar seni budaya yang aktif berjumlah 106 sanggar.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	8	8	8	8	106
2	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) sesuai kalender budaya	4	4	4	4	1
3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	1	1	1	1	1
4	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	20,94	27,54	28,22	29	30,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan yang dibina di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebanyak 24 binaan, terbilang turun dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebanyak 48 binaan. Kinerja pelayanan urusan perpustakaan diukur melalui indikator rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun yang selama periode 2017-2021 memiliki capaian yang fluktuasi dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 0,81 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kunjungan ke perpustakaan. Disamping itu untuk indikator persentase peningkatan bahan pustaka menunjukkan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	20	23.53	7.67	7,37	9,79
2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	6,53	10,58	11,60	2,65	0,81

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.12.17 Urusan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 pasal 4 Kearsipan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperhatikan 14 Asas dalam pengelolaan arsip secara Akuntabilitas. Untuk penyimpanan arsip, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melakukan penyusutan arsip, saat ini perangkat daerah melakukan penyimpanan arsip di tempat masing-masing. Lebih lanjut, indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 masih berada pada angka 100 persen.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	100	100	100	100	100
2	Persentase arsip statis dan in aktif yang terdata dan tertata dengan baik	25	40,19	53,84	53,84	-
3	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	-	-	3	3	-
4	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	-	-	-	-	4 Kegiatan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.7.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin cukup besar baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya. Pada periode 2021 jumlah produksi ikan tangkap mencapai 23.023,59 ribu ton dan 25.466,42 ribu ton produksi perikanan budidaya. Pembangunan sektor perikanan di masa yang akan datang diarahkan pada produksi budidaya, sesuai dengan paradigma pembangunan perikanan yang mengarah kepada usaha budidaya ikan dan membatasi eksploitasi penangkapan ikan di alam.

Tabel 2.51
Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 - 2021

Urusan dan Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Capaian								
Produksi Ikan Tangkap (Ribu Ton)	22.413	22.229,60	22.637	23.607,17	22.863	22.863	23.092	25.101,89	23.323	23.023,59
Produksi Ikan Budidaya (Ribu Ton)	18.964	19.003,27	20.861	19.276,07	22.947	21.886,25	25.242	23.996,02	27.766	25.466,42
Produk Olahan Perikanan (Ribu Ton)	203,89	200,00	207,96	206	212,12	207,72	216,36	207,24	216,36	95,04

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

Potensi tambak dalam Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 86.740 hektar, yang telah dimanfaatkan sekitar 84 hektar, lahan dataran rendah 337.166 hektar yang sangat cocok untuk kegiatan budidaya perikanan, daerah aliran sungai sekitar 650 km yang dialiri 7 (tujuh) sungai besar (sungai Musi, Batanghari leko, lalan, Bayat,

Merang, Dawas, Tungkal) dengan anak sungai mencapai 1.057 buah, 6 (enam) buah danau dengan luas mencapai 329,5 ha yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif perikanan.

Namun, peningkatan capaian produksi ikan di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut tidak diikuti dengan kenaikan pada konsumsi ikan masyarakat. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 40,73 kg/kapita/ tahun terbilang lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 44 kg/kapita/tahun.

Gambar 2.23
Ikan Patin



Tabel 2.52
Konsumsi Ikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

Konsumsi Ikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(kg/kapita/th)	44	42,63	35,24	40,99	40,52	40,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

2.1.7.3.2 Urusan Pariwisata

Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tiga jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Wisata alam yang tercatat sebagai potensi lokasi wisata yang menarik adalah danau Ulak Lia, danau Konger, danau Cala, pulau Pandak, sungai Sembilang, sungai Kubu dan agrowisata perkebunan

gambir. Untuk wisata budaya terdapat tambang minyak tradisional, tambang minyak modern dan kebudayaan Suku Anak Dalam. Wisata Sejarah meliputi Makam keramat di beberapa lokasi, Goa Jepang, Peninggalan Sriwijaya dan Candi Sereka.

Tabel 2.53

Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak Dari Pusat Kota	Jenis ODTW
1	Danau Ufak Lia	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 7,33KM	Alam
2	Sungai Musi	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Alam
3	Rumah Linmas	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
4	Danau Sidoati	Ds. Bailangu, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 28 KM	Alam
5	Taman Permata Muba	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2,75 KM	Buatan
6	Waterfront Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 3,94 KM	Buatan
7	Gelanggang Remaja Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
8	Stabel Berkuda Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2 KM	Buatan
9	Kolam Renang Tina Randik Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2 KM	Buatan
10	Water Fun Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 3 KM	Buatan
11	Taman Selarai Indah	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	±7,43 KM	Buatan
12	Tugu Bintang Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
13	Taman Terbuka Hjau	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2,75 KM	Buatan
14	Taman Pertanian Terpadu	Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 3,61 KM	Buatan
15	Sirkuit Sky Land	Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 15,03 KM	Buatan
16	Taman Agro Inovasi	Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 17,96 KM	Buatan
17	Masjid Raya Baitul Makmur	Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara Kab. Musi Banyuasin	± 2,74 KM	Buatan
18	Pantai Bongen Tahunan	Jln. Merdeka, Kel. Balai Agung Kab. Musi Banyuasin	± 3,94 KM	Alam
19	Taman Adipura	Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara Kab. Musi Banyuasin	± 2,52 KM	Buatan
20	Makam Dindi Muro Bayo	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 28 KM	Budaya
21	Puyang Keramat Burung Jauh Sedekah Bumi	Kec. Sungai Keuh Kab. Musi Banyuasin	± 37 KM	Budaya
22	Danau Konger	Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin	± 42 KM	Alam
23	Goa Bukit Benape	Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin	± 45 KM	Alam
24	Bukit Pendape	Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh	± 70 KM	Alam
25	Tebat Indah Kertajaya	Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Buatan
26	Makam Puyang Pekik Nyaring	Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin	± 49 KM	Budaya
27	Danau Cala	Desa Danau Salak Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin	± 50 KM	Alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak Dari Pusat Kota	Jenis ODTW
28	Tanampo	Desa Teluk Kijing Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin	± 32,9 KM	Alam
29	Danau Kajang	Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin	± 32,9 KM	Alam
30	Masjid Raya Abdul Kadim	Desa Epil Kec. Lais	± 28 KM	Buatan
31	Makam Bujang Ranggonang	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 19 KM	Budaya
32	Industri Pembuatan Getah Gambir	Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin	± 37 KM	Minat Khusus
33	Taman Toga Mangun Jaya	Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin	± 50 KM	Buatan
34	Perkebunan Gambir	Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin	± 38 KM	Agro
35	Embung Senja	Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin	± 15 KM	Buatan
36	Danau Ujan Mas	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	± 47 KM	Buatan
37	Danau Ulak Libok	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	± 47 KM	Alam
38	Kolam Renang Az-Zahra	Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya	± 90 KM	Buatan
39	Danau Putih Ex Batu Bara	Kec. Tungkal Jaya	± 95 KM	Alama
40	Pemancingan Rawa Kuning	Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin	± 51,4 KM	Buatan
41	Manau Kuning	Kec. Jirak Jaya	± 53,4 KM	Buatan
42	Keramat Puyang Dukun	Dusun II Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 29 KM	Budaya
43	Danau Siarak	Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 29 KM	Alam
44	Puyang Janggut	Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	± 39 KM	Budaya
45	Danau Panjang	Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	± 39 KM	Alam
46	Keramat Puyang Apul	Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 39 KM	Budaya
47	Situs Ran Putri	Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 49 KM	Budaya
48	Keramat Selerang	Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 60 KM	Budaya
49	Assalam Water Fun & Family Park	Sri Gunug Kec. Sungai Lilin	± 75 KM	Buatan
50	Water Boom Gunung Sari Jos	Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin	± 80 KM	Buatan
51	Sungai BB	Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin	± 83 KM	Alam
52	Objek Wisata Alam Rawa Hijau	Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin	± 78 KM	Buatan
53	Guci Purbakala Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	± 160 KM	Budaya
54	Perkampungan Suku Anak Dalam	Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	± 200 KM	Budaya
55	Rumah Rakit Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	± 312 KM	Budaya
56	Embung Desa Cinta Bumi	Desa Mendis Kec. Bayung Lencir	± 312 KM	Buatan
57	Danau Kodok	Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,8 KM	Alam
58	Water Boom Lalan	Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,8 KM	Buatan
59	Rain Bow Garden	Karang Tirta Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,4 KM	Buatan
60	Embung Tegal Mulyo	Kec. Keluang	± 43 KM	Buatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.3.3 Urusan Pertanian

Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Dalam kurun waktu 2017-2021 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB 11,69 persen pada tahun 2021 dan terbesar kedua di Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan tabel 2.65, luas total lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 1.153.307 ha yang dididominasi oleh lahan perkebunan dan lahan hutan negara.

Tabel 2.54
Luas Lahan Pertanian (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2021

Tahun	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah								Jumlah Lahan Pertanian
	Sawah	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan Negara	Sementara tidak diusahakan	Lainnya (Tambah, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	
2015	67.029	29.999	29.029	439.902	60.281	456	-	95.471	276.282	998.048
2016	63.011	31.029	27.176	442.884	60.020	438	257.040	95.216	18.272	995.086
2017	60.650	26.234	21.213	431.375	154.854	453	236.950	86.411	18.233	1.036.373
2018	40.823	24.675	17.324	506.793	100.475	498	410.815	67.210	19.718	1.188.391
2019	41.627	43.468	19.897	498.173	100.376	554	410.815	59.495	17.977	1.192.382
2020	47.704	43.368	19.908	449.157	100.797	543	410.815	58.416	17.983	1.192.691
2021	41.339	55.161	23.709	444.925	100.797	564	409.836	57.902	19.074	1.153.307

Sumber : Dinas TPHP Kab. Musi Banyuasin

Tabel 2.55
Luas Panen (Ha) Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babat Toman	1.470	643	537	537	314	360
2	Plakat Tinggi	915	226	-	-	-	-
3	Batanghari Leko	2.025	287	-	-	-	-
4	Sanga Desa	991	4.003	3.781	3.781	2.355	3.432
5	Sungai Keruh	416	1.481	616	616	-	-
6	Sekayu	760	4.009	3.758	3.758	2.971	2.971
7	Lais	91	3.754	3.936	3.936	4.681	4.684
8	Sungai Lilin	1.716	2.146	1.258	1.258	1.368	1.246
9	Keluang	409	144	-	-	-	-
10	Bayung Lencir	4.745	3.343	2.119	2.119	1.188	584
11	Lalan	33.683	53.729	71.812	71.812	58.442	61.689
12	Lawang Wetan	1.442	2.094	1.942	1.942	958	958
13	Babat Supat	725	1.480	2.126	2.126	1.820	576
14	Tungkal Jaya	2.059	820	104	104	99	4
15	Jirak Jaya	-	-	-	-	644	647
Jumlah		31.256	78.164	91.989	91.989	74.840	77.151

Sumber: Muba Dalam Angka 2017-2021, Dinas TPHP Kab. Musi Banyuasin, 2022

Tabel 2.56
Luas Panen (Ha) Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babat Toman	209	10	16	16	6	48
2	Plakat Tinggi	130	92	49	49	-	-
3	Batanghari Leko	288	24	90	90	15	14
4	Sanga Desa	141	126	13	13	76	42
5	Sungai Keruh	60	95	180	180	-	-
6	Sekayu	108	320	527	527	3	4
7	Lais	13	135	9	9	3	290
8	Sungai Lilin	244	19	2.339	2.339	91	199
9	Keluang	58	33	57	57	10	-
10	Bayung Lencir	675	208	385	385	293	75
11	Lalan	4.792	7.178	3.049	3.049	5.436	6.570
12	Lawang Wetan	205	59	8	8	-	6
13	Babat Supat	103	86	49	49	35	237
14	Tungkal Jaya	293	217	494	494	72	39
15	Jirak Jaya	-	-	-	-	7	-
Jumlah		7.319	8.602	7.265	7.265	6.047	7.524

Sumber : Muba Dalam Angka 2017-2021

Luas panen padi sawah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 adalah 77.151 hektar bertambah 2.311 hektar dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 74.840 hektar. Sedangkan luas panen jagung di tahun 2021 sebesar 7.524 hektar atau bertambah 1.477 hektar dari luas panen jagung tahun 2020. Produksi padi dan jagung Kabupaten Musi Banyuasin tidak mencapai target yang ditetapkan, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Muba akan terus berupaya meningkatkan produksi padi dan jagung, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berupaya meningkatkan capaian produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan cara :

1. Intensifikasi lahan sawah melalui kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas padi dan palawija dan dari kegiatan penguasaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna.
2. Pengembangan bibit padi unggul in hibrida melalui kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan.
3. Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) pasca panen dari kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian.

2.1.7.3.4 Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin melebihi target yang telah ditetapkan.

Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama 5 tahun terakhir, sektor perdagangan menyumbang lebih dari 4 persen terhadap perekonomian Musi Banyuasin. Pada tahun 2021, kontribusi kategori ini mencapai 3,61 triliun rupiah atau sekitar 4,97 persen. Secara umum, laju pertumbuhan sektor perdagangan berfluktuasi selama periode 2017-2021. Laju pertumbuhannya sebesar 5,30 persen di tahun 2017 lalu melambat hingga menjadi sebesar 4,50 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya kegiatan jual beli, terutama akibat pembatasan ekspor dan impor demi mencegahnya penyebaran Virus Covid19, menjadikan sektor ini berkontraksi sebesar 0,37 persen. Pada tahun 2021, kegiatan perdagangan kembali tumbuh dengan laju pertumbuhan sebesar 7,75 persen.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	-	31,4 T	33,68 T	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.3.5 Urusan Perindustrian

Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kabupaten Musi Banyuasin, yang pertama yaitu persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari

tahun 2017 hingga 2021 meningkat setiap tahunnya. Meski demikian, pada realisasinya, selama 5 tahun kenaikan kontribusi pada sektor industri belum cukup signifikan yaitu hanya meningkat sebesar 2,65 persen. Pada pelaksanaannya, pada sektor perindustrian lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM pada sentra industri. Untuk membentuk sebuah sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang mumpuni dan memenuhi standar.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri secara keseluruhan. Realisasi persentase pertumbuhan industri secara keseluruhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Dalam realisasi tahun 2017 pertumbuhan industri secara keseluruhan sebesar 2,93%. Pertumbuhan industri dalam realisasi tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,5% dan di tahun 2020 realisasi mengalami penurunan kembali menjadi 0,71%. Pada tahun 2021, pertumbuhan industri secara keseluruhan kembali meningkat menjadi 1%.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
2	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	2,93	2,5	2,5	0,71	1

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.3.6 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pusat, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pola Transmigrasi Umum dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Artinya pelaksanaan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun unit permukiman transmigrasi (UPT) yang terbina di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1 UPT dengan jumlah transmigran yang terbina sebanyak 185 KK. Unit permukiman transmigrasi (UPT) tersebut berupa UPT Air Balui yang terletak di Kecamatan Sanga Desa.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Transmigrasi Umum (%)	100	100	100	100	100
2	Presentase pembinaan warga transmigran (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.59a
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT Yang Dibina	%
2017	1 UPT	1 UPT	100
2018	1 UPT	1 UPT	100
2019	1 UPT	1 UPT	100
2020	1 UPT	1 UPT	100
2021	1 UPT	1 UPT	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.59b
Jumlah Transmigran yang Terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT Yang Dibina
2017	185 KK	1 UPT
2018	185 KK	1 UPT
2019	185 KK	1 UPT
2020	185 KK	1 UPT
2021	185 KK	1 UPT

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

2.1.7.4.1 Urusan Perencanaan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Urusan Perencanaan Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelelasan program RKPD dalam RPJMD	76%	84,97%	95,71%	92,78%	100%
2	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	80%	80%	86%	91,56%	95%
3	Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD	91%	95,45%	96,3%	97%	100%
4	Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	75%	70%	100%	100%
6	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program prioritas dan terakomodir di RKPD	70%	75%	80%	83,42%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sampai tahun 2021, kinerja kelitbangan di

Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan kegunaannya dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang diambil masih belum optimal. Dari tahun 2017-2021 tiap tahunnya dokumen hasil penelitian yang rekomendasinya menjadi input dalam pengambilan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Urusan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pendayagunaan hasil Kelitbangan	44%	59%	90,38%	-	-
2	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	-	-	-	90%	90%
3	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	-	-	-	75%	75%

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.3 Urusan Keuangan

Persentase laporan keuangan OPD sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dan Persentase Pencairan dana *on schedule* mencapai 100 persen yang artinya 48 OPD telah menyusun laporan keuangan yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab hingga triwulan IV sesuai dengan target, memenuhi prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, serta melakukan pencairan maksimal 2 hari sejak SPM diterima. Adapun untuk persentase data aset yang akurat masih 99,96% atau 0,04% belum akurat berdasarkan penelusuran melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik dilapangan. Pengelolaan

aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja, terutama dalam hal registrasi aset, pengamanan aset baik dari sisi administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Urusan Keuangan Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	78%	72%	75%	78%	N/A
2	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pencairan dana <i>on scedule</i>	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Data Aset yang akurat	100%	100%	100%	100%	99,96%
6	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	7,89%	7,14%	-	-	-
7	Jumlah regulasi terkait peningkatan PAD	1 peraturan	20 peraturan	-	-	-
8	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	-	-	7,58%	9,99%	10,75%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.4.4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaannya perlu difikirkan untuk memanfaatkan peluang-peluang peningkatan kompetensi pegawai (diklat/tugas belajar, dst) menggunakan anggaran APBN. Dalam kerangka mempersiapkan perampingan organisasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa struktur organisasi instansi pemerintah perlu disederhanakan (tepat struktur kaya fungsi).

Tabel 2.63
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Muba
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	72,50%	71,46%	72,05%	72,05%	N/A
2	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	0,55%	1,19%	0,3%	0,2%	N/A
3	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan	95%	97%	99,99%	98,02%	98,12%
4	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	75%	76,25%	78,26%	78,79%	84,85%
5	Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,17%	99,23%	99,25%	99,81%	99,80%
6	Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN	0,63%	0,74%	0,75%	1,07%	1,52%
7	Survey Kepuasan ASN	83,45%	85,21%	85,56%	85,82%	87,00%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Pengawasan

Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang jaminan kualitas atas proses pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good*

Governance). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin sampai pada tahun 2020 masih di skor 3,016 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP unsur pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin pada level 2+ pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.64
Urusan Pengawasan Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	60%	54%	81,25%	100%	125%
2	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
3	Skor Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di Perangkat Daerah	C	C	CC	CC	CC
4	Leveling Kapabilitas APIP	1	2	3	2+	2+

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	39,64%	81,86%	54,82%	77,37%	78%
6	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP	18,65%	20,83%	85,13%	87,24%	-
7	Skor Maturitas SPIP	1	3	3	3,016	3,016
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	-	-	-	3,75	3,43

Sumber: Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Administrasi Pemerintahan

Capaian kinerja urusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Urusan Administrasi Pemerintahan Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemda)	3,07	2,93	3,07	3,40	3,3998*
2	Nilai LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	B	B	B	B	B*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,05	83,66	85,21	85,35	87,05*
4	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	CC	B	B*

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

Keterangan :

* : Nilai Sementara

2.1.8 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.8.1 Fokus Kemampuan Ekonomi daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp 804.338 yang terdiri dari Rp 435.228 konsumsi makanan dan Rp 369.110 konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat menjadi Rp1.130.115 di tahun 2021 yang terdiri dari Rp 590.466 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp 539.649 pengeluaran non makanan.

Tabel 2.66
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Makanan	435.228	505.232	471.468	544.878	590.466
2	Konsumsi Non Makanan	369.110	454.663	383.909	533.715	539.649
Total		804.338	959.895	855.377	1.078.593	1.130.115

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan maupun non makan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup fluktuatif.

Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih rendah atau kurang dari 50 persen. Rasio konsumsi makanan per kapita sebulan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebesar 54,11 persen dan menurun menjadi 52,25 persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi konsumsi non pangan di Kabupaten Musi Banyuasin meskipun sempat turun menjadi 44,88 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 47,75 persen di tahun 2021.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.67
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADHB (Ribu Rp)	64.342,29	68.621,03	71.352,44	74.921,12	77.065,58
2	ADHK (Ribu Rp)	41.791,33	43.036,28	43.742,57	45.037,56	45.516,34
3	Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	72,34	72,00	70,37	70,54	66,53

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan disektor industri dan usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.1.8.2.1 Perhubungan

Pergerakan orang melalui angkutan umum mengalami penurunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2017 jumlah orang terangkut melalui angkutan umum sebesar 1.145 orang/bulan dan menurun pada tahun 2019 mencapai 1.124 orang/bulan. Sedangkan pergerakan orang melalui terminal, pada tahun 2017 mencapai 7.020 orang/bulan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 190.061 orang/bulan.

Tabel 2.68
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.145	1.135	1.124	1.045	-
2	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	7.020	79.568	106.873	62.265	429.720

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2021, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 1.320.332 Ha. Sedangkan luas wilayah perkotaan adalah sebesar 32.517,39 Ha dari keseluruhan kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun di setiap wilayah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Perda RTRW dan dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.69
Penataan Ruang Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Keberadaan Perda RTRW	1	1	1	1	1
2	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	6
3	Luas Wilayah Produktif	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %
4	Luas Wilayah Perkotaan	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.3 Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan dan jasa sebagai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin sehari-hari. Dukungan terhadap keberadaan sarana perdagangan dan jasa ini sangat penting dan perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin sehingga aktivitas perdagangan semakin dinamis.

Tabel 2.70
Perekonomian Kab. Muba Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	157	157	229	235	235
2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	29	33	35	31	32

Sumber: Dispar Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha dan peraturan daerah yang mendukung iklim usaha. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran izin di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 4 hari.

Tabel 2.71
Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kab. Muba Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Lama Proses Perizinan	4 Hari	4 Hari	-	-	-
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 Perda	3 Perda	-	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar dan dibawahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.72
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kab. Muba
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	≥ Sekolah Dasar (SD)	150.050	150.164	159.074	149.906	150.751
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	56.126	51.876	50.022	64.152	64.020
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	100.449	74.015	74.231	94.997	91.674
4	Perguruan Tinggi	15.373	16.448	19.990	24.799	24.881

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.73
Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk Kab. Muba
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk	2,12	2,24	2,26	3,99	-

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari 51,78% pada tahun 2016 menjadi 50,39% di tahun 2020. Dengan demikian Angka Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).

Tabel 2.74
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (%)
Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2016 - 2020

Tahun	Kelompok Umur (%)			Rasio Ketergantungan (%)
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	
2016	30,28	65,88	3,84	51,78
2017	30,03	66,01	3,95	51,49
2018	29,80	66,11	4,09	51,25
2019	29,55	66,21	4,24	51,04
2020	28,97	66,49	4,53	50,39

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2021

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022 TRIWULAN I DAN REALISASI RPJMD

Untuk melihat gambaran kinerja pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I 2022, dapat dilihat dari realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target, tidak memenuhi target maupun yang dibawah target yang telah direncanakan, sesuai sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Kesesuaian antara perencanaan dalam dokumen RKPD 2022 dengan pelaksanaan pembangunan merupakan kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Prioritas - prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebanyak 127 program.

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.75
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
2.	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Sekayu	4
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Satuan Polisi Pamong Praja	3
6.	Sosial	Dinas Sosial	4

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2
2.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6
3.	Perhubungan	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	6

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
5.	Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
8.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4
9.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
10.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata	3
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
12.	Komunikasi dan Informatika	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2
13.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	3
14.	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2
15.	Statistik	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 3. Dinas Perkebunan	1
16.	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
17.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.77
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Pertanian	1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 2. Dinas Perkebunan	7
2.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	4
3.	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4
4.	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3
5.	Pariwisata	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata	3
6.	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Adapun distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Selanjutnya distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.79
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Perencanaan	Bappeda	2
2.	Keuangan	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2
3.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	1
4.	Penelitian dan Pengembangan	1. Bappeda 2. Dinas Perkebunan	1

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	2

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Adapun distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Kewilayahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Kewilayahan

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Kecamatan	Kecamatan dalam Kab. Muba	5

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Selanjutnya distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam **Unsur Pemerintahan Umum** adalah sebagai berikut :

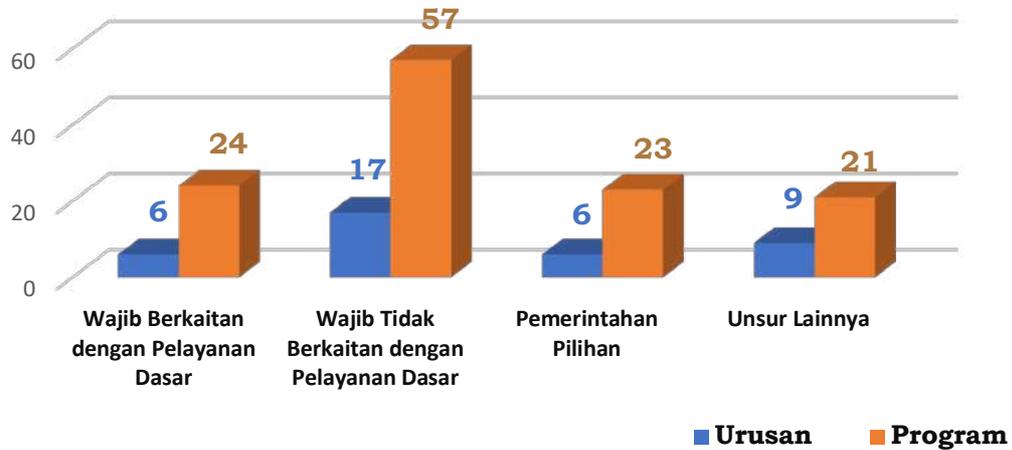
Tabel 2.82
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

NO.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Secara grafis, perbandingan 3 (tiga) Urusan dan Unsur Penunjang diatas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 2.24
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan dan Program



Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mengukur predikat kinerja masing-masing program dengan metode gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai dengan skala peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.83

Tabel Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, dari 127 program yang dilaksanakan diperoleh peringkat kinerja fisik sebagai berikut :

- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **sangat tinggi (0,00%)**;
- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **tinggi (0,00%)**;
- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **sedang (0,00%)**;
- **0 (nol)** program berpredikat kinerja **rendah (0,00%)**.
- **127 (seratus dua puluh tujuh)** program berpredikat kinerja **sangat rendah (100,00%)**.

Dari 127 program tersebut, ada 24 program yang pencapaian kinerja dan penyerapan keuangannya masih 0,00%, yakni :

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator	: ✓ Rasio jaringan irigasi
Kinerja Program	✓ Rasio tersedianya air baku dan bangunan penampung air
Anggaran	: Rp. 26.198.606.140,-
Sub Kegiatan	: 1. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 2. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 3. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 4. Normalisasi/Restorasi Sungai 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa 7. Operasional Unit Pengelola Irigasi
Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan

- Indikator : ✓ Jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang terkoneksi dalam kondisi mantap
- Kinerja
- Program : ✓ Rasio jembatan kondisi mantap
✓ Rasio drainase jalan kondisi mantap
✓ Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun
✓ Rasio panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi
✓ Rasio jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi
✓ Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan
✓ Tercukupinya sarana dan prasarana kebinamargaan
- Anggaran : Rp. 251.508.106.961,-
- Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3. Pembangunan Jalan
4. Rehabilitasi Jalan
5. Pemeliharaan Rutin Jalan
6. Pembangunan Jembatan
7. Rehabilitasi Jembatan
8. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Indikator : ✓ Penerbitan sertifikasi SKT
- Kinerja : ✓ Rekomendasi SIUJK
- Program
- Anggaran : Rp. 588.535.000,-

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Perangkat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator : ✓ Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
Kinerja aman

Program ✓ Penduduk berakses air minum
✓ Desa yang memiliki BPSPAM

Anggaran : Rp. 15.433.714.900,-

Sub Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
2. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator : Satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 8.111.636.000,-

Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat Skala Permukiman

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Pengembangan Permukiman

Indikator : Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 36.933.956.000,-
Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Kawasan Permukiman

Indikator : Persentase Kawasan kumuh yang tertangani
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 200.000.000,-
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator : Rasio rumah layak huni
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 23.292.955.000,-
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator : Bangunan gedung yang tertata
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 78.025.691.576,-

Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator : Ketersediaan tempat pemakaman umum

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 14.545.498.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator : Fasilitasi kasus pertanahan

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 199.987.000,-

Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Indikator : Luas lahan bersertifikat / persentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 6.349.977.000,-

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Indikator : Potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) yang
Kinerja berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan
Program hidup PMKS

Anggaran : Rp. 919.087.500,-

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Sosial

Daerah

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator : Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari
Kinerja tindakan kekerasan

Program

Anggaran : Rp. 150.000.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian
Pangan Lainnya

Perangkat : Dinas Ketahanan Pangan

Daerah

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator : Koperasi sehat

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 449.914.000,-

Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Daerah

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator : Jumlah koperasi baru
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 390.881.000,-
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Daerah

Program Pengembangan UMKM

Indikator : UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 3.845.799.700,-
Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Daerah

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator : Cakupan organisasi pemuda yang aktif
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 5.807.667.826,-
Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah

2. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
3. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Perangkat : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator : Peningkatan jumlah objek wisata
Kinerja

Program

Anggaran : Rp.1.383.749.000,-

Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah

Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator : Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 4.749.113.160,-

- Sub Kegiatan :
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 3. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Program Pembinaan Sejarah

Indikator : ✓ Grup kesenian aktif
Kinerja ✓ Jumlah seni budaya yang dilestarikan
Program
Anggaran : Rp. 449.840.000,-
Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator : Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
Kinerja
Program
Anggaran : Rp. 1.923.534.000,-
Sub Kegiatan : Pemanfaatan Cagar Budaya
Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah

Program Pengelolaan Permuseuman

Indikator : 1. Pembangunan gedung museum
Kinerja 2. Arsip benda/warisan budaya yang terdata dan
Program tertata dengan baik di museum
Anggaran : Rp. 3.700.585.000,-
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : 1. Fasilitasi pembangunan sarana prasarana
Kinerja kelurahan
Program 2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
Anggaran : Rp. 4.170.943.651,-

Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Perangkat : Kelurahan dalam Kab. Muba
Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2022, ada penambahan 8 (delapan) program baru untuk menunjang pencapaian visi misi Bupati Musi Banyuasin seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni :

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sementara itu ada 1 (satu) program yang tidak lagi dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 yakni Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan karena target pada program ini telah tercapai yakni pembinaan warga transmigrasi. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah “Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman” dengan output peserta pelatihan produk unggulan di ex UPT Air Balui. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022
PER TRIWULAN I**

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
1	2	3	4	5									12	16		
1	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100.00%												
			Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100.00%												
			Pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100.00%												
			Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100.00%	99.70	1,428,958,347,707		1,533,601,556,778	22.31	170,660,719,384	22.31	11.13				
			Kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi	100.00%												
			Permasalahan hukum yang dapat ditangani	90.00%												
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan, Renja dan Tapkin			100.00	947,314,298	45 OPD	1,479,978,877	25.00	93,141,687	25.00	6.29			
	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LAKIP, LKPJ dll			100.00	1,122,903,512	47 OPD	1,459,607,846	21.65	170,052,445	21.65	11.65			
	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan kinerja			100.00	67,111,000		48,889,500	10.00	1,620,000	10.00	3.31	Dinas Kesehatan		
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			100.00	794,760,928,355	48 OPD	817,079,328,580	23.43	57,352,810,623	23.43	7.02			
	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji TKS			100.00	11,296,400,000									
	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun Setda Kab. Muba			100.00	74,435,744		89,678,066	10.00	0	10.00	0.00	Sekretariat Daerah		
	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Setda Kab. Muba			100.00	59,462,796	2 OPD	112,900,581	7.82	0	7.82	0.00	Sekretariat Daerah dan Dinas PMD		
	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
	01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya asuransi kendaraan roda 4 (empat)			97.12	1,934,354,768	23 OPD	2,519,026,347	11.52	26,542,000	11.52	1.05			
	01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen inventaris aset			100.00	154,572,248		149,999,924	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa konsultansi updating aplikasi manajemen aset BMD Setda Kab. Muba			100.00	50,501,300		199,092,700	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah		
	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PSH (8 stel); PSL (25 stel); PDH (236 stel); PSR (32 stel); batik (167 stel); pakaian olahraga (53 stel)			23.15	37,520,000	15 OPD	2,094,665,400	19.55	370,510,225	19.55	17.69			
	01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							119,580,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai		78.07	1,683,396,503	42 OPD	5,427,643,060	17.16	792,970,400	17.16	14.61				
	01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Muba		100.00	106,080,648		105,674,951	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah			
	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	ASN yang mengikuti bimtek		71.60	465,052,759	3 OPD	283,440,000	0.00	0	0.00	0.00				
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik		99.85	2,529,178,092	44 OPD	2,924,533,529	16.91	413,509,811	16.91	14.14				
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		99.50	18,516,535,389	45 OPD	19,141,794,938	9.57	1,091,196,405	9.57	5.70				
	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga kantor dan kebersihan		99.92	4,720,392,098	46 OPD	2,947,311,156	12.98	281,265,427	12.98	9.54				
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100.00	9,590,647,044	42 OPD	10,702,339,838	17.96	1,363,822,475	17.96	12.74				
	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan		99.83	6,445,513,808	46 OPD	7,257,630,055	11.00	439,405,898	11.00	6.05				
	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah		99.84	1,517,924,997	45 OPD	1,798,292,000	20.55	217,983,409	20.55	12.12				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					IV				I					
					K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat	99.91		10,721,074,119	45 OPD	12,205,083,780	15.69	1,558,569,882	15.69	12.77		
01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	99.20		24,711,885,775	48 OPD	29,157,959,800	18.75	3,989,513,510	18.75	13.68		
01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						43,992,200	25.00	7,425,000	25.00	16.88	Dinas PMD	
01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan website OPD	100.00		1,041,465,650	4 OPD	1,251,638,908	0.00	0	0.00	0.00		
01.2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>												
01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3 OPD	1,495,400,000	4.34	10,865,100	4.34	0.73	
01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan	83.63		4,648,494,050	20 OPD	16,204,754,370	24.03	391,607,900	24.03	2.42		
01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk kenyamanan kantor	100.00		8,467,235,035	39 OPD	13,818,256,046	1.39	167,493,700	1.39	1.21		
01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						113,368,420	0.00	0	0.00	0.00	Badan Kesbangpol	
01.2.07.07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						2,035,420,475	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan	
01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya						7 OPD	13,766,819,300	0.00	0	0.00	0.00	
01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC (18 unit); laptop (12 unit); printer (13 unit)	100.00		168,686,900	6 OPD	298,790,000	0.00	0	0.00	0.00		
01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ring basket; tenis meja @ (1 unit); gordyn (100m2)	100.00		98,569,990		98,240,000	100.00	98,120,000	100.00	99.88	Dinas Dukcapil	
01.2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>												
01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,500,000	17.00	0	17.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, air, listrik, internet dll	100.00		33,811,487,616	48 OPD	35,259,289,881	25.12	3,867,730,604	25.12	10.97		
01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, pemeliharaan genset dan bahan bakar genset	100.00		22,810,000								
01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium dan gaji non PNS	100.00		188,087,222,370	48 OPD	189,349,193,088	25.44	31,208,022,951	25.44	16.48		
01.2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>												
01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan mobil jabatan; pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100.00		232,787,132	11 OPD	373,360,000	23.86	40,753,639	23.86	10.92		
01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pajak kendaraan, BBM dan pemeliharaan	99.79		16,746,305,284	43 OPD	18,288,245,000	16.62	2,188,519,358	16.62	11.97		
01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel Bagian Umum Setda Kab. Muba	100.00		99,782,000		49,450,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah	
01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pertalite (840 ltr); solar non subsidi (90.000 ltr); pemeliharaan genset (11 unit); pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga; pemeliharaan AS (339 unit); pemeliharaan sound system; pemeliharaan listrik bangunan (1.100m2)	95.75		1,903,366,642	2 OPD	426,090,000	30.16	124,795,000	30.16	29.29	Badan Kesbangpol dan Sekretariat Daerah	

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan dan rehab gedung kantor		99.61	37,824,824,036	26 OPD	22,870,820,230	0.59	75,000,000	0.59	0.33			
	01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		99.54	943,107,172	28 OPD	2,771,411,980	19.73	369,043,400	19.73	13.32			
	01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		97.05	2,098,732,184	9 OPD	3,189,144,020	1.25	10,400,000	1.25	0.33			
	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													
	01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD		99.37	183,332,817,482	3 RSUD; 28 Pkm	226,232,910,000	24.09	50,013,952,625	24.09	22.11			
	01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
	01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						350,000,000	16.67	23,242,560	16.67	6.64			
	01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PSL (10 stel); PDH (14 stel); PSR (10 stel); batik (15 stel)		99.37	317,572,000		350,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah		
	01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600,000,000	24.10	145,000,000	24.10	24.17			
	01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah													
	01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kue (500 paket); minuman (1.500 paket); natura dan pakan natura (191 jenis); pakan ternak rusa (365 paket); VIP prasmanan (1.806 porsi); makan dan snack @ 2.000		100.00	5,493,712,366		5,471,974,850	10.00	370,170,550	10.00	6.76			
	01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Natura dan pakan natura (167 jenis); makan tamu (2.800 porsi); prasmanan (800 porsi); snack VIP (700 kotak)		100.00	1,480,416,687		1,469,876,300	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah		
	01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Makanan dan minuman (188 jenis); snack (3.250 ktk); nasi (925 ktk) parcel buah (770 paket); prasmanan (400 porsi); prasmanan VIP (396 porsi); snack VIP (400 ktk)		100.00	1,423,020,891		1,683,717,995	10.00	113,882,600	10.00	6.76			
	01.2.13	Penataan Organisasi													
	01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen LKjIP (50 buku); naskah akademis (22 buku); perjanjian kinerja (55 buku)		95.00	882,919,197		706,501,518	20.00	20,728,400	20.00	2.93	Sekretariat Daerah		
	01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelayanan publik; SMM ISO 9001 : 2008		95.00	439,994,835		718,078,579	34.77	60,734,786	34.77	8.46	Sekretariat Daerah dan Kec. Lalan		
	01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik); reformasi birokrasi (34 OPD); dokumen laporan (4 dokumen)		95.95	390,579,467		1,245,133,570	34.18	83,861,511	34.18	6.74	Sekretariat Daerah		
	01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LKPJ; LPPD dan laporan kinerja instansi pemerintah		100.00	288,530,582		359,999,858	14.00	49,549,800	14.00	13.76			
	01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan													
	01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Acara kepala daerah/wakil kepala daerah (24 kali); pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (108 kali)		100.00	1,851,350,000		2,680,940,000	2.53	62,500,000	2.53	2.33			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Penerimaan kungker pejabat negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri		100.00	3,058,601,024		3,056,024,800	3.45	69,998,698	3.45	2.29	Sekretariat Daerah			
	01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar (2 kali); tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati (2 laporan)		100.00	234,995,024		286,569,000	22.36	63,564,700	22.36	22.18				
	01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD														
	01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji dan tunjangan DPRD		100.00	34,196,582,515		39,366,842,462	27.99	11,019,896,479	27.99	27.99				
	01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	PSH (90 stel); PSR; PDH; pakaian adat; pakaian olahraga @ (45 stel); pin emas (45 bh)		100.00	1,187,752,500		776,250,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD			
	01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD		100.00	108,680,000		157,500,000	0.00	0	0.00	0.00				
	01.2.16	Layanan Administrasi DPRD														
	01.2.16.01	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat : Badan Kehormatan; Badan Legislasi; Badan Anggaran; Badan Musyawarah; Fraksi; Komisi; Paripurna; Pimpinan		100.00	4,048,708,823		6,554,603,000	25.00	1,422,019,390	25.00	21.69	Sekretariat DPRD			
	01.2.16.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Bahan pangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD; buah-buahan (240 paket)		100.00	2,514,053,000		2,520,000,000	25.00	418,926,436	25.00	16.62				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											22.31	11.13				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
2	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlayannya pendidikan anak usia dini 0 - 6 tahun di PAUD	90.81%	98.94	243,536,137,732		199,402,611,714	10.43	2,438,000,000	10.43	1.22				
			APM SD	100.00%												
			APK SD	101.48%												
			Angka putus sekolah SD	0.01%												
			Angka kelulusan (AL) SD/MI	100.00%												
			Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99.90%												
			APM SMP	100.00%												
			APK SMP	104.42%												
			Angka putus sekolah SMP	0.02%												
			Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100.00%												
			Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99.70%												
			Jumlah kelompok belajar paket C (kelompok)	36												
			Jumlah kelompok belajar non formal	20												
Guru bersertifikasi	90.00%															
Pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	90.00%															
Pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100.00%															

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K	Rp.	K			Rp.
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.
			Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standar kualifikasi Sekolah yang sudah mencapai standar pelayanan minimal (SPM)	78.00%										
				70.50%										
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan gedung SDN		100.00	6,361,961,600	4 paket	5,042,635,780	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas baru	Pembangunan ruang kelas (11 paket), penambahan ruang kelas (3 paket), pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif (4 paket)		99.33	6,561,831,000		21,194,847,480	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan kantor dan WC SDN 2 Bangun Sari Kec. Babat Toman		99.56	494,600,000		1,951,735,000	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan ruang UKS		88.58	321,896,900								
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan ruang perpustakaan		95.07	837,471,900		957,169,990	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan pagar (4 paket); penataan halaman (3 paket); pembangunan mushola, toilet (jamban) @ 1 paket		97.71	1,618,508,000		11,328,651,720	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehab ruang kelas		95.27	18,707,173,400		12,085,645,120	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehab ruang guru		97.76	2,110,096,900								
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab ruang perpustakaan		95.46	1,007,325,500								
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab toilet (jamban) SD		80.81	150,050,700								
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kursi dan meja siswa SD		100.00	15,842,064,560		1,394,090,800	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku tulis (148.500 buku), seragam siswa (6.325 stel); meja dan kursi siswa (Bangub)		93.23	1,924,000,000		1,983,872,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	TIK (38 paket) dan media pendidikan (31 paket)		100.00	9,797,684,000								
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya UN dan US SMP/MTs		100.00	100,000,000		140,241,000	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Seleksi olimpiade saint nasional tingkat SMP		100.00	450,000,000		399,808,000	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Sertifikasi Guru SD (70 org), SMP (54 org), Pengawas SD (7 org), SMP (5 org)		100.00	166,577,600		199,999,940	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terakreditasinya SD (100 SD), terjalinnnya kerjasama Putera Sampoerna Faoundation -School Development Outreach, belanja jasa konsultan pendataan SD		100.00	2,457,876,472		4,581,662,132	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersalurinya BOS		100.00	55,660,634,000		82,771,512,300	25.00	2,438,000,000	25.00	2.95		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					IV				I					
					K	Kp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pelatihan dan Monitoring Dana BOS		100.00	391,838,800		422,371,800	25.00	0	25.00	0.00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						959,196,900	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan RKB (16 paket), penataan halaman; rehab pagar dan pembangunan gapura dan pematangan lahan @ (1 paket) dan pembangunan pagar (2 paket)		98.58	19,429,742,100		7,148,260,000	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						577,735,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						622,139,790	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan musholla (4 paket); pagar (2 paket)		72.90	1,272,460,500		2,430,644,150	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab jamban (1 paket), rehab ruang kelas (16 paket)		99.41	17,007,542,100		3,634,779,970	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehab ruang guru		89.82	854,745,600								
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab ruang perpustakaan SMP		96.55	2,745,758,400								
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehab laboratorium IPA		84.91	547,387,000								
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab toilet/jamban (4 paket), rehab ruang ibadah (1 paket)		82.67	453,945,700								
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Kursi dan meja siswa SMP		100.00	11,059,645,000		844,091,000	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku tulis (148.500 buku), seragam siswa (5.544 stel)		100.00	1,924,059,400		2,183,384,780	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peralatan LAB IPA Fisika dan Biologi @ (3 paket), TIK (10 paket) dan media pendidikan (12 paket); pengadaan alat kesenian (1 paket)		98.73	3,739,434,000		808,905,000	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya UN dan US SMP/MTs		100.00	1,988,730,000		1,988,729,540	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Seleksi olimpiade saint nasional tingkat SMP		100.00	300,000,000		308,239,740	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Diklat calon : Kepsek SD (35 org), Kepsek SMP (30 org), Pengawas SD (10 org), Pengawas SMP (1 org)		100.00	176,914,800		115,373,072	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	SMP yang memenuhi kriteria akreditasi		100.00	271,585,850		610,227,110	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya BOS		100.00	33,708,200,000		28,805,487,700	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Monitoring dana BOS		100.00	139,988,400		143,514,200	0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	Rehabilitasi ruang tata usaha SMPN 1 Sungai Keruh		67.97	199,692,700								
	1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah	Rehab ruang Kepala Sekolah		68.10	188,855,700								
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp.								
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan gedung : TPA (5 paket), PAUD (2 paket), TK (3 paket), pembangunan ruang kelas dan kantor PAUD (1 paket), penataan halaman TK (1 paket), pembangunan ruang guru dan Kepsek TK (4 paket)		93.97	2,899,420,850			707,999,910	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan : area bermain TK (6 paket), toilet/jamban TK (3 paket)		96.98	1,002,443,900			249,999,890	0.00	0	0.00	0.00							
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab : atap TK, ruang kelompok bermain @ (1 paket), ruang kelas TK (9 paket), ruang guru dan Kepsek TK (7 paket)		98.78	2,833,703,000														
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehab jamban TK		83.38	167,377,000														
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat permainan edukatif		100.00	80,000,000														
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya POCIL		100.00	150,000,000			100,000,000	0.00	0	0.00	0.00							
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Kompetensi Tenaga Pendidik TK, KB & PKBM		100.00	183,770,000			183,770,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Akreditasi PAUD		100.00	83,415,400			83,415,400	0.00	0	0.00	0.00							
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersalurinya BOP		100.00	11,519,629,000			453,829,000	0.00	0	0.00	0.00							
1.01.02.2.04	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>																		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Bantuan operasional paket B (298 siswa), paket C (688 siswa)		100.00	3,646,100,000			1,988,646,500	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			
PREDIKAT KINERJA																			
3	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100.00%	96.44	387,398,204,255	117,284,270,002	24.64	27,944,236,495	24.64	23.83								
			<i>Stunting</i> pada balita	11.80%															
			Angka kematian ibu	70/100.000															
			Angka kematian bayi	8/1.000															
			Angka kematian balita	4/1.000															
			Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	100.00%															
			Rasio rumah sakit/satuan penduduk	1.12%															
			Indikator SPM yang mencapai target	80.00%															
			Rasio dokter/satuan penduduk	44.45%															
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00%															
			Tipe kelas rumah sakit rujukan regional JKN wilayah Sumsel	Tipe B															
			Predikat penilaian akreditasi	Paripurna dan JCI															
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Konsultansi perencanaan dan review master plan DED pembangunan gedung IGD @ (2 paket); pembangunan RSUD Sekayu		100.00	129,229,869,650										
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas						2,400,000,000	2.00	0	2.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan rumah dinas PKM (3 paket); rehab rumah dinas PKM (2 paket)		100.00	1,633,974,000		420,000,000	2.00	0	2.00	0.00				
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan ruang bersalin RS Bayung Lencir		100.00	7,827,247,500										
	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Penambahan ruang PKM; penataan halaman PKM		100.00	2,435,107,000		7,931,000,000	2.00	0	2.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehab poskesdes (1 paket); rehab pustu (4 paket); pemasangan listrik 6 pustu dan 4 rumah dinas PKM		96.17	1,294,945,000										
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19		73.76	18,799,370,255		2,825,000,000	0.71	0	0.71	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit		100.00	39,344,968,548		1,497,211,280	0	0	0.00	0.00	RSUD Sekayu			
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Distribusi obat dan perbekalan kesehatan dan BMHP ke Unit Pelayanan Kesehatan (29 PKM); terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan vaksin (80 item)		5.60	8,625,100		4,999,870,230	5.60	8,625,100	5.60	0.17	Dinas Kesehatan dan RSUD Sekayu			
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	BMHP : BTI DBD, covid 19, RDT combo DBD, RO BMHP dan BPH screening, test narkoba multi drug @ (1 jenis); cadridge TCM (4.050 pieces); IVA test (3 item); mouth piece (2 item); PKM (55 item)		100.00	4,606,576,945		999,963,712	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi alat kesehatan PKM; pemeliharaan hepafilter (10 unit)		100.00	428,675,800										
	1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil; penyediaan fasilitas kesehatan ibu dan bayi baru lahir; pembinaan pelayanan ibu dan bayi baru lahir		100.00	571,000,592		100,000,000	48.00	34,917,590	48.00	34.92				
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan bersalin normal (2.457 kasus); resiko tinggi (428 kasus)		100.00	1,215,621,194		70,000,000	20.00	0	20.00	0.00				
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100.00	33,450,000		49,999,954	15.00	0	15.00	0.00				
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Imunisasi lanjut balita, imunisasi lengkap, imunisasi bumil dan WUS		100.00	404,633,611		279,927,530	20.00	0	20.00	0.00				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pembinaan penerapan pelayanan kesehatan anak usia sekolah melalui penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala; pembinaan pelayanan kesehatan peduli remaja		100.00	504,577,762		50,000,000	34.00	3,550,000	34.00	7.10	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pembinaan pelayanan usia reproduksi dan KB		100.00	47,710,252		60,000,000	50.00	0	50.00	0.00				
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peserta yang mengikuti seminar <i>careGiver</i>		100.00	616,588,220		50,000,000	20.00	0	20.00	0.00				
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						50,000,000	3.00	0	3.00	0.00				
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						49,986,000	4.00	0	4.00	0.00				
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan kesehatan pada ODGJ		100.00	10,800,000										
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis		100.00	107,988,240		49,999,810	20.00	7,660,000	20.00	15.32				
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mobile VCT HIV-AIDS; kunjungan ke rumah ODHA dalam rangka pemantauan kepatuhan pengobatan ARV (<i>Anti Retro Viral</i>); monitoring dan evaluasi program serta pembinaan pada Pkm yang memiliki capaian SPM HIV rendah		100.00	119,123,300		99,740,000	27.00	15,690,000	27.00	15.73	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan pada penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		100.00	2,981,531,656										
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelaksanaan vaksinasi COVID-19; pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan Ikutan pasca vaksinasi; jasa pelayanan kesehatan paramedis		88.53	19,271,066,632		4,459,686,160	0.00	0	0.00	0.00				
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk; Rembuk <i>Stunting</i> ; pembinaan kader pembangunan manusia; pengukuran dan publikasi <i>stunting</i> ; pencatatan dan pelaporan intervensi dan hasil; orientasi tatalaksana asuhan gizi buruk petugas di Pkm; pembinaan manajemen suplementasi gizi		99.17	1,579,598,328		149,999,958	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembentukan dan pembinaan pos UKK; pengukuran jamaah haji		100.00	163,056,440		55,000,000	5.00	0	5.00	0.00				
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Verifikasi Kec. SBS; pemeriksaan sampel air di BTKL Palembang (31 sampel); pemantauan dan pengawasan IPAL di Pkm; inspeksi penyehatan udara tanah dan kawasan		86.56	852,313,340		70,000,000	5.00	0	5.00	0.00				
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan promosi kesehatan		100.00	787,618,128										
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan usaha kesehatan tradisional		100.00	59,180,000		70,000,000	0.00	0	0.00	0.00				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Bimtek Surveillance Aktif ke RSUD; mengantar spesimen suspek campak, AFP dan keracunan pangan ke Kab; P.E penyakit berpotensi KLB Pkm ke desa; SKD KLB Kab ke Pkm; verifikasi rumors penyakit potensial KLB dan penyakit PD31		43.92	129,814,055		100,000,000	20.00	0	20.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orientasi dan implementasi Perda KTR ke Kec dan PKM; pembentukan Posbindu; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan program INDRA; OJT program Iva ke PKM		100.00	74,984,904		75,000,000	2.00	1,620,000	2.00	2.16				
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan jesehatan jiwa dan NAPZA		100.00	201,435,626										
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Penyuntikan vaksin haji; pembinaan kesehatan CHJ; intervensi PIS-PK petugas Kab; pembinaan manajemen PKM		29.84	29,843,600		100,000,000	5.00	0	5.00	0.00				
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Edukasi dan motivasi pasien TB MDR untuk memulai pengobatan atau mangkir pengobatan; fogging nyamuk; supervisi sistem pelaporan TB-HIV dan bimbingan teknis program triple eliminasi Pkm dan RSUD Kab. Muba; bimtek layanan PDP, HIV-AIDS; penjangkaran kasus HIV-AIDS dan PIMS pada klinik swasta/DPM yang merupakan wilayah persinggahan; supervisi layanan alat TCM pada 4 Faskes layanan TCM; bimtek deteksi dini kasus kusta pada Pkm tidak ada kasus kusta; PE dan verifikasi rumors penyakit menular; PE dan verifikasi rumors penyakit potensial KLB dan keracunan pangan Kab ke Pkm dan desa; bimtek untuk peningkatan kapasitas petugas Pkm dalam pengendalian DBD		100.00	3,427,469,440		279,698,400	20.00	0	20.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Premi PBU & BP Pemda Kelas III (7 bin); klaim jaminan kesehatan penunjang program JKN		100.00	128,795,693,146	1 OPD, 1 Pkm	70,337,283,949	35.44	24,927,986,145	35.44	35.44	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Air Balui			
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional		100.00	14,350,000										
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan pada forum komunikasi di tingkat Kec		100.00	131,734,802		200,000,000	5.00	18,080,200	5.00	9.04	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Headset, webcam, EKG dan laptop @ (2 unit); USG (1 unit)		100.00	337,895,000										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja jasa tenaga perawat, bidan, petugas radiologi, petugas farmasi, petugas kamar jenazah, penata anastesi, tenaga fisioterap, tenaga elektro medik, perekam medik, petugas sanitarian, dokter umum, dokter spesialis <i>part time</i> , dokter PGDS, tenaga lab, tenaga adm, tenaga akuntansi		100.00	9,409,098,899	2 RSUD	13,343,324,085	12.40	1,655,407,460	12.40	12.41	RSUD Sungai Lilin dan RSUD Bayung Lencir			
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat; pembinaan GERMAS Tk. Desa; sosialisasi lintas sektor eliminasi malaria; sosialisasi konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan <i>stunting</i> ; sosialisasi kecacingan pada lintas sektor; pembentukan dan pemantauan Posyandu Remaja, Posyandu Jiwa, dan Poskestren; orientasi tumbuh kembang/stimulasi deteksi dini intervensi dini tumbuh kembang; penyuluhan dampak Napza di desa; pemeriksaan kesehatan kebugaran olahraga desa; survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit peserta didik; deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu; <i>screening</i> jiwa pada anak sekolah; pemberian obat cacing ke sekolah		100.00	4,652,532,855		10,000,000	0.50	0	0.50	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DED gedung Bank Darah PMI Bayung Lencir; alkes UPTD PMI; DED IPAL PMI; SPAL PMI; mobiler PMI; penataan halaman PMI; belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja Bank Darah PMI Kec Bayung Lencir		100.00	2,355,933,749		5,199,999,874	26.63	1,261,100,000	26.63	24.25				
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Survei akreditasi Pkm; workshop kapasitas tata kelola manajemen mutu; pengukuran indikator mutu/TPMDK; perencanaan perbaikan strategis/PPS Pkm reaktreditasi/TPMDK; penyusunan indikator keselamatan pasien/PIKP Pkm reaktreditasi; penilaian pra survei Pkm reaktreditasi; workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi		82.66	231,132,188		441,579,060	5.00	0	5.00	0.00				
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya investigasi awal		100.00	81,600,000										
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pemantauan kasus penyakit <i>emerging</i>		100.00	11,420,000		60,000,000	16.00	9,600,000	16.00	16.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Ambulance PSC 119; pengadaan aplikasi PSC 119 integrasi ke NCC;		100.00	979,685,000										
	1.02.02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>														
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Implementasi <i>costing</i> SPM tingkat Pkm, monitoring evaluasi dan pelaporan BOK		0.00	0										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengembangan aplikasi SDM; <i>upgrade</i> Sistem Informasi Kesehatan (SELUANG); monitoring, evaluasi dan bimtek kesmas, GERMAS dan program P2P; laptop (12 unit); PC (15 unit); printer scan (25 unit); scanner (10 unit); smart tablet (5 unit); TV interaktif (2 unit); infocus proyektor (3 unit)		100.00	1,553,961,818		250,000,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Monitoring dan evaluasi tenaga dokter internship, PGDS, Nusantara Sehat di Pkm dan RS; monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian di Pkm		100.00	44,401,680		100,000,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Kesehatan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											24.64	23.83				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
4	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Angka kesakitan	24.50%	100.00	2,063,546,023		350,000,000	21.43	0	21.43	0.00				
	1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>														
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar		100.00	1,726,466,441										
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penilaian tenaga kesehata teladan		100.00	48,079,894.00		100,000,000	25.00	0.00	25.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan petugas pengawas pangan (PKP dan DFI); sosialisasi kelas balita; pertemuan review petugas penyuluhan Pkm; bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian		100.00	288,999,688.00		250,000,000	20.00	0.00	20.00	0.00	Dinas Kesehatan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											21.43	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
5	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	100.00%	88.53	205,098,000		57,500,000	30.00	0	30.00	0.00				
			Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi baik	100.00%												
	1.02.04.2.01	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>														
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pembinaan dan pengawasan sarana toko optik; sosialisasi pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha toko optik		100.00	22,850,000										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	Bimtek keamanan pangan; sosialisasi penerbitan sertifikat laik hygiene keamanan pangan; penerbitan sertifikat PIRT		100.00	97,745,000										
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga														
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya pemeriksaan post market		22.00	8,155,000										
	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Sampel makanan produk IRTP (12 sampel); inventarisasi sarana IRTP; pengawasan produk IRT yang bersertifikat P-IRT		100.00	76,348,000		57,500,000	30.00	0	30.00	0.00	Dinas Kesehatan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											30.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
6	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks keluarga sehat	0.60	99.08	617,119,036		347,572,180	10.68	0	10.68	0.00				
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	1.02.05.2.05.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas pengurus pangkalan SBH di Pkm; seminar KIE		100.00	213,329,988		150,000,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pemilihan desa PHBS tingkat Prov; penilaian desa PHBS nominator; sosialisasi Germas tingkat Kec; pembinaan Posyandu balita ke Pkm		100.00	64,588,560		97,572,400	15.00	0	15.00	0.00	Dinas Kesehatan			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pertemuan tingkat Kab dan Kec		99.00	339,200,488		99,999,780	15.00	0	15.00	0.00	Dinas Kesehatan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											10.68	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
7	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi	40,20 m/ha				26,198,606,140	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio tersedianya air baku dan bangunan penampung air	20 buah	84.68	44,912,954,350										
	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan embung		100.00	817,928,000		5,232,590,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						4,900,000,000	0.00	0	0.00	0.00				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.					
					K	Rp.					K	Rp.									
	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehan saluran drainase dan pintu air @ 1 paket		100.00	4,101,726,500		1,000,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Perencanaan irigasi rawa; normalisasi danau; pembangunan bendungan @ (1 paket); perencanaan irigasi sawah (2 paket); normalisasi sungai (5 paket)		100.00	22,652,939,350		11,606,788,000	0.00	0	0.00	0.00									
	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pengairan		100.00	128,280,000		299,994,140	0.00	0	0.00	0.00									
	1.03.02.2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>																			
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa						2,000,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Peningkatan jaringan irigasi		78.64	5,404,413,700															
	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rehabilitasi daerah irigasi		66.29	11,807,666,800		1,159,234,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					
PREDIKAT KINERJA																					
	8	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100.00%	99.96	36,242,084,500	15,433,714,900	0.00	0	0.00	0.00									
			Penduduk berakses air minum	100.00%																	
			Desa yang memiliki BPSMAM	100.00%																	
	1.03.03.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>																			
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan perpipaan (1 paket); pemasangan pipa transmisi (2 paket)		100.00	20,959,564,000		9,004,911,900	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan (3 paket); pembangunan sumur dalam terlindungi (7 paket)		99.81	7,474,918,000															
	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Optimalisasi SPAMS program PAMSIMAS (5 paket); sumur bor dan perlengkapannya (14 paket); pemasangan jaringan air bersih; sumur gali (1 paket)		100.00	7,379,362,500		6,428,803,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di desa Mekar Jadi Kec. Sungai Lilin (reservoir, jaringan perpipaan, sambungan rumah)		100.00	428,240,000															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					
PREDIKAT KINERJA																					

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
					IV		I		I		K				Rp	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
9	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal		100.00	23,944,084,027		8,111,636,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	MCK dan sumur bor; WC @ (1 paket); jamban dan tangki septik skala individual (30 paket)		100.00	20,490,744,000		8,111,636,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tangki septik skala individual perdesaan		100.00	3,453,340,027										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
10	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	75.00%	100.00	42,650,967,000		36,933,956,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan jembatan gantung; pembangunan pedestrian; pembangunan drainase jalan @ (1 paket); peningkatan jalan dusun dan rehab jalan setapak @ (2 paket); pembangunan jalan lingkungan (12 paket); pembangunan jalan setapak (19 paket); peningkatan jalan dusun (30 paket); peningkatan jalan lingkungan (31 paket)		100.00	42,650,967,000		36,933,956,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
11	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan gedung yang tertata	45.00%	99.76	85,605,565,774		78,025,691,576	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan : tugu Muba Berjaya (7 paket); mesjid; pagar mesjid; balai desa @ (5 paket); gapura desa; langgar; pagar TPU; rumah marbot; tangga raja; tempat wudhu @ (2 paket); musholla (8 paket); teras mesjid; teras musholla; halaman kantor Kades; gedung PKK; mapolsek Bayung; kantor PCNU; sekretariat yayasan; kantor camat Jirak Jaya @ (1 paket); balai dusun; gedung BPD; GSG; menara mesjid @ (3 paket); Rehab : mesjid (13 paket); musholla (5 paket); gapura TPU; penataan halaman fasum; penataan halaman mesjid;langgar; mess Polres; rumdin Kejari ; rumdin susdenpom; rumdin Cata Lais; gerbang perbatasan antar Kab @ (1 paket); pagar mesjid; pemasangan plafon mesjid @ (2 paket); renovasi busana (14 paket); DED (10		99.76	85,605,565,774		78,025,691,576	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
12	1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	80.00%	100.00	1,611,671,672		1,481,207,700	6.62	86,615,000	6.62	5.85				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Review penyusunan RP3K; penyusunan RP2KPKPK; penyusunan program dan survey perencanaan teknis bidang perumahan dan permukiman @ (1 keg); koordinasi perencanaan (5 keg)		100.00	1,611,671,672		1,481,207,700	6.62	86,615,000	6.62	5.85	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											6.62	5.85				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
13	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan kabupaten dan Jalan strategis lainnya yang terkoneksi dalam kondisi mantap	79.94%												
			Rasio jembatan kondisi mantap	20 unit												
			Rasio drainase jalan kondisi mantap	68.00%												
			Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun	48 km												
			Rasio panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	75.39%	99.39	536,581,451,799		251,508,106,961	0.00	0	0.00	0.00				
			Rasio jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	20.98%												
			Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1												

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
			Tercukupinya sarana dan prasarana kebinamargaan	64.28%												
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DED jembatan (5 paket); FS jembatan (2 paket); leger jalan (3 paket); sistem aplikasi pelaporan (1 paket)		95.77	6,589,252,000		5,500,000,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey dan perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan		100.00	436,515,000		2,121,799,790	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan (84 paket); lapis ulang; penimbunan jalan; tembok penahan dan pelebaran jalan @ (2 paket); pembangunan jalan (13 paket); pembebasan lahan dan pengadaan tanah @ (1 paket); peningkatan ruas jalan (12 paket); supervisi (11 paket); drainase (5 paket)		99.60	457,890,291,604		194,839,330,332	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Pemeliharaan jalan (4 paket); pemeliharaan ruas jalan (8 paket)		96.96	17,367,550,101		5,549,990,929	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan yang rusak		100.00	11,360,551,090		10,000,000,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan (5 paket); box culvert (1 paket); perbaikan jembatan (2 paket)		99.63	38,732,698,850		29,996,991,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Pemeliharaan jembatan		84.50	2,227,773,901		1,499,994,910	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan jembatan		100.00	1,976,819,253		2,000,000,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
14	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penerbitan sertifikasi SKT Rekomendasi SIUJK	80.00% 100.00%	2.71	31,827,000		588,535,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Bimtek manajemen mutu jasa konstruksi; pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi; bimtek dan pelatihan operator, mandor bangunan gedung, jalan dan jembatan; bimtek dan pelatihan pengawas pelaksana; pembinaan ieknis sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3)		2.14	24,485,900		558,770,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi		24.66	7,341,100		29,765,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
15	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Keberadaan Perda RTRW	1	90.87	3,299,394,036	3,124,996,000	4.21	28,119,200	4.21	0.90					
			Jumlah dokumen rencana tata ruang	5												
			Luas wilayah produktif	81.00%												
			Luas wilayah perkotaan	1.70%												
			Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	327.505,3 m2												
			Ketaatan terhadap RTRW	80.00%												
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota															
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Fasilitasi legislasi RDTR; KLHS Bayung Lencir dan Babat Toman; PK RTRW Kab. Muba 2016 - 2036; RDTR dan PZ Babat Toman dan Bayung Lencir		88.41	2,808,549,150	2,399,996,000	4.20	5,139,200	4.20	0.21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Survey dan pemetaan		100.00	144,395,800	430,000,000	7.19	22,980,000	7.19	5.34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Belanja jasa konsultasi <i>updating</i> data pembangunan berbasis spasial		100.00	86,111,000	10,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang; pembelajaran implementasi pengendalian penataan ruang		100.00	101,868,335											
1.03.12.2.04.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang					85,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi tentang perencanaan tata ruang		100.00	158,469,751	200,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										4.21	0.90					
PREDIKAT KINERJA										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
16	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	90	100.00	9,798,990,364	200,000,000	0.00	0	0.00	0.00					
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh						200,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	1.04.03.2.03.02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Pematangan lahan; pembangunan rumah relokasi daerah rawan bencana; pembangunan rumah untuk relokasi rumah di pinggiran bantaran sungai @ (1 paket); bedah rumah (3 paket); bedah rumah (10 paket)		100.00	9,731,570,000										
	1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Validasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Pelaporan data Aspak		100.00	67,420,364										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
17	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	52	100.00	4,217,837,000		23,292,955,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.04.04.2.01	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	1.04.04.2.01.01	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						23,292,955,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
18	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Ketersediaan tempat pemakaman umum	85	100.00	4,217,837,000		14,545,498,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.04.05.2.01	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>														
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemasangan box culvert; rehab drainase dan kolam retensi @ (1 paket); pembuatan parit induk; pembuatan drainase @ (2 paket); pembangunan parit (10 paket)		100.00	4,217,837,000		14,545,498,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
19	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	100.00	2,182,413,200		4,696,777,250	4.61	60,905,400	4.61	1.30				
	1.05.02.2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pengawasan kepala daerah/pejabat Pemda; pengendalian keamanan lingkungan		100.00	990,239,900		1,189,934,000	8.00	32,505,000	8.00	2.73				
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						53,356,000	10.00	2,600,000	10.00	4.87				
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil patroli kerjasama dengan aparat keamanan, untuk keamanan lingkungan		100.00	226,280,160		259,065,600	3.00	14,250,400	3.00	5.50				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.			
										K	Rp.					
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Asuransi jiwa anggota Damkar (89 org); Satpol-PP (391 org)		100.00	197,329,600		173,086,000	0.00	0	0.00	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja			
	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman; pengamanan Poskotis		100.00	163,252,600		534,450,000	2.00	2,400,000	2.00	0.45				
	1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemeliharaan alat korsik		100.00	53,462,000		1,502,945,000	0.00	0	0.00	0.00				
	1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada						149,940,000	10.00	0	10.00	0.00				
	1.05.02.2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>														
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cetak buku perundang-undangan (40 buku x 3 Kec); spanduk 12m2 (3 bh)		100.00	86,311,540		94,377,650	0.00	0	0.00	0.00				
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Monitoring IMB; kegiatan PEKAT; penerbitan pedagang hewan kaki lima; pemantauan pesta rakyat		100.00	465,537,400		598,725,000	10.00	9,150,000	10.00	1.53	Satuan Polisi Pamong Praja			
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						91,332,000	5.00	0	5.00	0.00				
	1.05.02.2.03	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>														
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS						49,566,000	0.00	0	0.00	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													4.61	1.30		
PREDIKAT KINERJA													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
20	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kab/Kota	1 org/RT	100.00	8,789,947,770		6,445,468,880	12.68	552,302,100	12.68	8.57				
			Jumlah desa tangguh bencana	18												
			Kejadian bencana yang ditanggulangi	100.00%												
	1.05.03.2.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>														
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi		100.00	94,975,000		101,956,800	80.00	0	80.00	0.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1.05.03.2.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>														
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Konsumsi Satgas Linmas bantuan bencana daerah (35 org); peserta pelatihan siaga (98 org); pakaian siaga (196 stel)		100.00	577,639,270		317,022,640	10.00	26,667,900	10.00	8.41	Satuan Polisi Pamong Praja			
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sewa helikopter; seragam lapangan + topi (160 set); sepatu PDL (160 pasang); rompi (160 bh); tenda BPBD (6 unit); velbed (62 bh); motor roda 3 (2 unit); hand trolley (3 unit); hand pallet truck (1 unit); rak besi/metal (3 jenis : 17 unit)		100.00	1,939,988,500		3,293,087,240	4.23	25,128,200	4.23	0.76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					IV				I					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan akses jalan Desa Bayat Ilir - Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir		100.00	4,277,534,900		249,997,000	15.00	22,700,000	15.00	9.08	Bencana Daerah		
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN		100.00	100,000,000		106,500,000	0.00	0	0.00	0.00			
1.05.03.2.03	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>													
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan pada masyarakat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100.00	1,799,810,100		2,084,999,200	23.20	434,531,000	23.20	20.84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						291,906,000	15.00	43,275,000	15.00	14.82	Satpol-PP		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											12.68	8.57		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
21	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab	80.00%	22.98	1,308,661,400	1,814,052,000	8.22	2,000,000	8.22	0.11			
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	85.00%										
1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>													
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasional petugas piket PBK		100.00	1,305,511,400									

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.				
					K	Rp.			K	Rp.										
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1,490,989,000	10.00	2,000,000	10.00	0.13								
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Mobil komando spek CMD-1; mobil pemadam kebakaran spek tangki air 4000 ltr; mobil slip on/fire jeep spek kapasitas 300 s/d 600 ltr; mobil suply air pemadam kebakaran spek tangki air 4000 s/d 500 ltr		0.00	0		247,218,000	0.00	0	0.00	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja							
	1.05.04.2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>																		
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya inspeksi sarana dan prasarana perusahaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran		50.00	3,150,000		75,845,000	0.00	0	0.00	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				
PREDIKAT KINERJA																				
22	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	PMKS yang mendapat layanan Lembaga sosial yang berdaya	100%	100.00	5,717,260,920		3,197,424,900	5.86	77,692,400	5.86	2.43								
	1.06.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>																		
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium PKH (97 org); verifikasi dan validasi penerima bantuan PKH (23.507 KPM)		100.00	293,381,500		414,247,000	5.00	16,124,800	5.00	3.89								
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Verifikasi serta validasi data PBI-JKN KIS		100.00	219,611,900		218,109,000	0.00	0	0.00	0.00								
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Premi bantuan sosial tunai kematian; KUBE (88 klmpok); UEP (78 org)		100.00	4,693,651,720		1,715,335,000	5.00	15,600,000	5.00	0.91	Dinas Sosial							
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan; kampanye sosial hidup bersih; operasional UPT penanggulangan kemiskinan		100.00	481,231,600		809,575,900	10.00	45,967,600	10.00	5.68								
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tindak lanjut penyelesaian masalah kasus terhadap keluarga bermasalah		100.00	29,384,200		40,158,000	0.00	0	0.00	0.00								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				
PREDIKAT KINERJA																				
23	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Disabilitas yang mendapat layanan	90.00%	100.00	3,902,947,964		4,506,178,160	4.64	112,626,117	4.64	2.50								
	1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>																		
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan						76,631,000	0.00	0	0.00	0.00								
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Alat pendengaran (18 bh); kaki palsu (2 bh); kursi roda (54 bh); tangan palsu (1 bh); tongkat buta (26 bh); tongkat ketiak (10 pasang); tongkat struk (8 bh)		100.00	237,920,000		469,149,000	3.00	13,022,400	3.00	2.78								

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K			Rp.
									K	Rp.						
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Operasional UPTD Loka Bina Karya; pelatihan dan keterampilan bagi disabilitas; kegiatan DPC-PPDI; kegiatan upacara peringatan hari Pahlawan		100.00	419,585,800		825,081,370	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Bedah rumah		100.00	2,808,612,421		2,682,288,700	5.00	42,106,000	5.00	1.57				
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Biaya sewa rumah singgah (1 thn); beras 5 kg; gula pasir 3 kg; minyak goreng 3 ltr; susu anlene 3 kotak; tepung terigu 2 kg @ (350 paket)		100.00	284,365,943		292,870,090	20.00	55,248,117	20.00	18.86				
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial														
	1.06.04.2.03.03	Penyediaan Permakanan	Monitoring, evaluasi dan pelayanan pelaksanaan program sembako		100.00	36,485,000										
	1.06.04.2.03.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Laporan rehabilitasi sosial		100.00	45,135,000		48,675,000	5.00	2,249,600	5.00	4.62				
	1.06.04.2.03.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; rakor tim penanggulangan kemiskinan klaster 1; koordinasi daerah bidang sosial sosialisasai Corporate Social Responsibility (CSR)		100.00	70,843,800		111,483,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Sosial			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											4.64	2.50				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
24	1.06.05	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup PMKS	100.00%	100.00	3,665,598,700		919,087,500	0.00	0	0.00	0.00				
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monev PMKS dan PSKS verifikasi dan validasi data mandiri fakir miskin		100.00	1,140,598,700		919,087,500	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Sosial			
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KUBE (150 kimpok); bantuan untuk penyandang disabilitas (469 org)		100.00	2,525,000,000										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
25	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Kelompok bencana alam dan sosial yang terpenuhi lebih kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100.00%	100.00	561,818,050		938,435,000	15.00	110,244,900	15.00	11.75				
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota														
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Bantuan sembako untuk korban bencana untuk 500 org (10 jenis); honorarium Tagana (96 org)		100.00	561,818,050		938,435,000	15.00	110,244,900	15.00	11.75	Dinas Sosial			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.00	11.75				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
26	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	55	100.00	393,230,260		873,288,000	35.00	11,911,400	35.00	1.36				
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)														
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Buku pedoman pencacah (45 buku); buku pedoman PML (10 buku); pelatihan petugas pembangunan ketenagakerjaan		100.00	393,230,260		873,288,000	35.00	11,911,400	35.00	1.36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											35.00	1.36				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
27	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	85.00%	100.00	761,241,500		6,002,761,120	5.00	30,222,900	5.00	0.50				
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi														
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Pembekalan dan pemagangan dalam negeri (64 org); Pelatihan : instalasi penerangan; multimedia; operator boiler tingkat 1 @ (16 org)		100.00	761,241,500		5,808,790,000	5.00	30,222,900	5.00	0.52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja						193,971,120	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											5.00	0.50				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
28	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pekerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja	58.00% 4.24% 68.59%	100.00	367,721,966		868,689,000	23.17	37,873,500	23.17	4.36				
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota														
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Operasional penunjang layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan		100.00	229,880,200		304,394,000	24.90	0	24.90	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						134,320,000	15.00	3,432,000	15.00	2.56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Operasional penunjang layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan		100.00	137,841,766		429,975,000	24.50	34,441,500	24.50	8.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											23.17	4.36				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
29	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja/thn	5.10%	100.00	793,835,400		775,030,000	15.33	48,583,300	15.33	6.27				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	2.07.05.2.01	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen rekomendasi upah minimum Prov dan upah minimum Kabupaten		100.00	165,647,600		225,625,000	24.50	0	24.50	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	2.07.05.2.02	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial (50 kasus); perusahaan yang mendapat pembinaan (50 perusahaan); sidang mediasi (50 kasus)		100.00	504,856,000		378,010,000	10.00	23,235,800	10.00	6.15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan LKS bipartit (50 perusahaan); pembinaan LKS tripartit di Kab. Muba		100.00	123,331,800		171,395,000	15.00	25,347,500	15.00	14.79				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.33	6.27				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
30	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	24	100.00	341,032,237		1,350,000,660	3.10	35,979,200	3.10	2.67				
			Indeks pembangunan gender (IPG)	83,00												
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	66,50												
	2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi PUB bagi PD, Camat, Focal Point PD dan Focal Point Kec		100.00	77,112,337		250,000,160	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						250,000,120	0.00	0	0.00	0.00				
	2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pelaksanaan Hari IBU, Hari Kartini, pelatihan peningkatan keterampilan anggota DWP		100.00	217,589,600		350,000,200	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						500,000,180	8.38	35,979,200	8.38	7.20				
	2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan kepemimpinan		100.00	46,330,300										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											3.10	2.67				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
31	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT perempuan	0,70%	100.00	114,197,900		450,003,520	2.78	950,000	2.78	0.21				
	2.08.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pencegahan KDRT sejak dini; bantuan sembako (13 jenis)		100.00	114,197,900										
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						250,000,110	5.00	950,000	5.00	0.38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.03.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						200,003,410	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											2.78	0.21				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
32	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	13	100.00	222,248,665		400,000,288	2.50	2,709,500	2.50	0.68				
	2.08.04.2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Gebyar PUSPAGA dan parenting		100.00	111,706,291										
	2.08.04.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kg dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,160	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.02.2.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.02.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dampingan pelayanan P2TP2A; visum korban pemerkosaan (18 org); visum luka korban kekerasan (19 org)		100.00	110,542,374		200,000,128	5.00	2,709,500	5.00	1.35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											2.50	0.68				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
33	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Kecamatan layak anak	53,34%	100.00	478,812,172		150,000,000	5.00	0	5.00	0.00				
	2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota						150,000,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											5.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
34	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Kecamatan layak anak	53,34%	100.00	318,150,886		1,040,000,430	7.24	0	7.24	0.00				
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						300,000,210	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi dalam Peringatan Hari Anak Nasional		100.00	160,661,286		425,000,010	0.00	0	0.00	0.00				
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana bermain ramah anak outdoor di 5 Kec; untuk layanan UPPA Polres Muba dan SLB		100.00	157,489,600		215,000,090	35.00	0	35.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100,000,120	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.24	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
35	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	48%	100.00	225,641,600		1,049,999,974	15.00	101,685,000	15.00	9.68				
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium komisioner KPAD		100.00	225,641,600		1,049,999,974	15.00	101,685,000	15.00	9.68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.00	9.68				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
36	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	48%	100.00	5,068,186,160		150,000,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						150,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
37	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan	90,00	100.00	5,068,186,160		9,480,133,600	1.61	71,549,600	1.61	0.75				
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi pangan	87,00													
		Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	198,35													

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
			Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	2.150												
	2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>														
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya data informasi NBM dan PPH serta laporan ketersediaan pangan		100.00	29,730,000		46,951,000	19.60	8,755,000	19.60	18.65	Dinas Ketahanan Pangan			
	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lomba Cipta Menu B2SA		100.00	51,975,000		498,276,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Laporan Bulanan Harga Pangan		100.00	41,171,500		58,720,000	20.00	4,005,000	20.00	6.82				
	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Peserta sosialisasi tentang pemberdayaan lumbung pangan		100.00	39,119,300		46,988,800	20.00	0	20.00	0.00				
	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Gapoktan yang dibina dan pelatihan kelompok pangan olahan kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin		100.00	53,601,000		1,090,166,200	0.23	2,175,000	0.23	0.20				
	2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>														
	2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya rapat teknis dan pleno Dewan Ketahanan Pangan		100.00	29,021,600		46,750,000	20.00	4,020,000	20.00	8.60	Dinas Ketahanan Pangan			
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bertambahnya cadangan pangan		100.00	115,152,700		136,514,000	20.00	2,569,600	20.00	1.88				
	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan beras cadangan (bongkar muat dan pembersihan)		100.00	41,723,200		35,775,000	25.00	2,955,000	25.00	8.26				
	2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>														
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Buku laporan analisis konsumsi pangan dan PPH konsumsi		100.00	51,098,060		78,740,800	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan			
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Belanja uang yang diberikan kepada KWT spesifikasi tahap pembinaan (23 KWT); tahap pengembangan (18 KWT); tahap penumbuhan (63 KWT)		100.00	4,615,593,800		7,441,251,800	1.00	47,070,000	1.00	0.63				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												1.61	0.75			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
38	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa mandiri pangan	41.95%	100.00	58,063,600		93,772,000	23.44	21,035,000	23.44	22.43				
	2.09.04.2.01	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>														
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan data daerah rawan pangan serta penyebabnya sehingga mempermudah untuk intervensi		100.00	29,247,600		46,981,000	17.30	7,665,000	17.30	16.32	Dinas Ketahanan Pangan			
	2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>														
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terdatanya angka kemiskinan		100.00	28,816,000		46,791,000	29.60	13,370,000	29.60	28.57	Dinas Ketahanan Pangan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												23.44	22.43			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
39	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi	5 item	100.00	52,124,200		93,770,400	22.50	10,392,300	22.50	11.08				
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota														
	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Petugas pengambil contoh (PPC) pangan segar yang bersertifikat		100.00	16,303,700		46,845,000	25.00	2,760,000	25.00	5.89	Dinas Ketahanan Pangan			
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan rapid test kit dan alat Lab bahan pangan segar		100.00	35,820,500		46,925,400	20.00	7,632,300	20.00	16.26				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											22.50	11.08				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
40	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Fasilitasi kasus pertanahan	100.00%	100.00	298,342,412		199,987,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan		100.00	298,342,412		199,987,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
41	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Luas lahan bersertifikat / persentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan	80.00%	100.00	4,637,230,124		6,349,977,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan lahan (3 paket); pengadaan tanah untuk pemakaman umum bersama (Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu) Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu dan Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya		100.00	4,538,287,352		6,249,979,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	2.10.05.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi bidang pertanahan		100.00	98,942,772		99,998,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
42	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	75,02	100.00	757,874,055		526,046,000	7.40	27,991,900	7.40	5.32				
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Belanja bahan kimia (29 jenis); kalibrasi (13 item); alat lab HVAS (1 unit); perlengkapan lab lainnya		100.00	561,892,163		126,046,000	15.00	15,425,000	15.00	12.24	Dinas Lingkungan Hidup			
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK; pemantauan kualitas udara dan air sungai		100.00	195,981,892										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp.			
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						400,000,000	5.00	12,566,900	5.00	3.14	Dinas Lingkungan Hidup	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.40	5.32		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
43	2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah kader lingkungan	878 org	100.00	11,545,361,244		9,076,446,300	14.92	1,033,086,700	14.92	11.38		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Aplikasi pelayanan retribusi lab lingkungan; aplikasi e-kinerja; aplikasi pelayanan retribusi kebersihan		100.00	145,040,700		99,592,000	8.00	7,087,900	8.00	7.12		
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bibit tanaman (3 jenis); honor dan THR : petugas taman (127 org), mandor taman (25 org), penjaga taman (9 org), sopir (6 org), petugas lampu hias (5 org); alat listrik (14 jenis); perencanaan teknis (2 paket); operasional RTH; pemeliharaan mesin (5 jenis); pemeliharaan taman (11 paket); revitalisasi gelanggang remaja Sekayu; pembangunan taman depan ruminan bupati; pembangunan taman burung		100.00	11,243,639,302		8,851,204,300	15.00	1,007,181,100	15.00	11.38	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Laporan data dan hasil kegiatan sosialisasi pelaku usaha dan masyarakat		100.00	156,681,242		125,650,000	15.00	18,817,700	15.00	14.98		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											14.92	11.38		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
44	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	100%	100.00	204,871,898		249,080,000	14.54	32,947,738	14.54	13.23		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang dinilai Tim Proper		100.00	92,650,000		123,892,000	6.00	6,750,000	6.00	5.45	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Laporan Koordinasi Penyusunan AMDAL		100.00	112,221,898		125,188,000	23.00	26,197,738	23.00	20.93		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											14.54	13.23		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
45	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	80,00%	100.00	84,122,700		116,000,000	15.00	14,680,000	15.00	12.66		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sekolah berwawasan lingkungan yang dibina		100.00	84,122,700		116,000,000	15.00	14,680,000	15.00	12.66	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.00	12.66				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
46	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penegakan hukum lingkungan	100.00	100.00	110,127,600		124,648,000	8.00	7,495,800	8.00	6.01				
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota														
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan			110,127,600		124,648,000	8.00	7,495,800	8.00	6.01	Dinas Lingkungan Hidup			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											8.00	6.01				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
47	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah Bank sampah aktif	93,36% 80,00%	99.70	23,771,541,684		24,829,983,530	21.45	4,944,574,500	21.45	19.91				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah														
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						160,138,000	15.00	19,602,800	15.00	12.24	Dinas Lingkungan Hidup			
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengawasan penerapan pengurangan sampah dan sumbernya		100.00	176,968,000										
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lokasi penerapan sampah khususnya aspek pemilahan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan TPA		100.00	2,399,002,421		4,299,457,430	10.00	388,337,550	10.00	9.03	Dinas Lingkungan Hidup			
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok pengomposan yang telah dibina		0.00	0		69,863,480	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup			
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya operasional persampahan dan terpeliharanya kebersihan		100.00	21,195,571,263		20,300,524,620	24.00	4,536,634,150	24.00	22.35				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											21.45	19.91				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
48	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan KTP elektronik	88,00%	100.00	2,216,602,580		769,960,385	22.73	24,225,000	22.73	3.15				
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Penduduk rentan administrasi kependudukan dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan		100.00	84,527,860		99,993,910	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	KTP elektronik dan kartu keluarga yang terlayani		100.00	172,552,900		249,999,475	25.00	0	25.00	0.00				
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan administrasi kependudukan; perekaman, pencetakan, penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak; pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		100.00	1,779,216,900										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlayannya permohonan surat keterangan pindah datang WNI (SKDWNI) dari seluruh Kab se Indonesia dan surat keterangan pindah WNI (SKPWNI) di 15 Kecamatan		100.00	46,137,120		69,973,000	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk													
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang terlayani dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam pelayanan keliling		100.00	134,167,800		349,994,000	20.00	24,225,000	20.00	6.92	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											22.73	3.15			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
49	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran Rasio pasangan non muslim yang berakta menikah Rasio penerbitan akta kematian	95% 100% 100%	100.00	221,596,491		599,999,750	28.33	0	28.33	0.00			
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil													
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cetak : blangko Kartu Identitas Anak (KIA)(20.000 keping); formulir (F-1.01) dan (F-1.02) @ (6.000 lbr); formulir tanda terima pendaftaran KK dan KTP-EI (7.750 lbr)		100.00	221,596,491		349,999,920	35.00	0	35.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						149,999,830	15.00	0	15.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil						100,000,000	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											28.33	0.00			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
50	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan Lama pengurusan KTP	85,00% 5 hari	100.00	811,340,075		2,816,565,532	24.18	79,326,100	24.18	2.82			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan kependudukan tahunan (70 buku); laporan bulanan informasi kependudukan (130 buku)		100.00	42,299,000		50,000,000	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan		100.00	137,994,195		160,270,000	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
	2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)		100.00	432,114,200		1,978,999,800	23.00	0	23.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.				
					K	Rp.			K	Rp.										
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						99,999,942	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi perundang-undangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100.00	40,021,880			199,987,800	50.00	79,326,100	50.00	39.67								
	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Akurasi database kependudukan	100.00	10,200,000			50,000,000	0.00	0	0.00	0.00								
	2.12.04.2.04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>																		
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat setelah dikonversi	100.00	148,710,800			74,991,000	10.00	0	10.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						202,316,990	30.00	0	30.00	0.00								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											24.18	2.82								
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								
51	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rasio kepemilikan KTP elektronik	88,00%	100.00	8,718,545,530	129,999,670	45.00	0	45.00	0.00									
	2.12.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>																		
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						129,999,670	45.00	0	45.00	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											45.00	0.00								
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								
52	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks desa membangun Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	0.704	92.92	8,718,545,530	13,736,872,927	2.77	236,983,900	2.77	1.73									
		APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes	100.00%																	
		Penyampaian laporan APBDes yang tepat waktu	100.00%																	
	2.13.04.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>																		
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rakor Pemdes	0.00	0			122,563,565	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Peserta bimtek penyusunan RPJMDes dan RKPDes	100.00	388,780,000			699,999,744	0.00	0	0.00	0.00								
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Sosialisasi kegiatan dana desa APBN; terlaksananya tata kelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES	100.00	582,032,150			1,099,914,200	20.00	156,863,900	20.00	14.26								
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bimtek awal masa jabatan Kepala Desa dan bimtek Sekretaris Desa	100.00	554,790,700			954,119,600	0.00	0	0.00	0.00								
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Pendampingan pengelolaan ADD pada desa; monev kelompok usaha	100.00	593,933,000			1,599,971,000	10.00	80,120,000	10.00	5.01								

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	BUM desa dan lembaga yang dibina		100.00	722,420,000		799,997,840	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan Kades serentak dalam Kabupaten Musi Banyuasin		100.00	5,408,713,080		7,382,276,978	0.00	0	0.00	0.00				
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya profil desa		100.00	83,293,200		193,320,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Sosialisasi inventarisasi aset desa melalui aplikasi SIPADES		100.00	265,407,500		399,977,900	0.00	0	0.00	0.00				
	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Bimtek BPD		0.00	0										
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlacaknya, terukurnya dan terpetanya batas desa; tersedianya informasi data batas wilayah		5.00	19,652,600		265,875,500	0.00	0	0.00	0.00				
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Penilaian dan pembinaan terhadap perkembangan desa/kelurahan; penilaian LPM dan KPM		100.00	99,523,300		218,856,600	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											2.77	1.73				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
53	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM	20 kimpok	100.00	2,437,831,150		5,461,880,436	5.34	176,945,456	5.34	3.24				
			Jumlah PKK yang aktif	20 kimpok												
	2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Uang kehormatan pembina adat		100.00	632,850,000		1,101,288,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Bimtek pengurus BP SPAMS; pelatihan pengurus LPM; sosialisasi penguatan lembaga Posyandu; perlombaan 10 program pokok PKK		100.00	258,951,800		749,939,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bimtek penguatan kelembagaan Posyantek		100.00	182,854,800		899,998,940	0.00		0.00	0.00				
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		100.00	449,394,775		699,999,496	5.00	3,374,900	5.00	0.48				
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pembinaan BBGRM		100.00	286,094,775		449,054,000	5.00	2,800,000	5.00	0.62				
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya penerapan program kerja TP PKK Kab. Muba		100.00	627,685,000		1,561,601,000	15.00	170,770,556	15.00	10.94				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											5.34	3.24				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
54	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Indeks pembangunan berwawasan kependudukan	40,32	100.00	51,311,900		944,356,300	22.67	58,460,240	22.67	6.19				
	2.14.02.2.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						54,823,440	50.00	25,541,440	50.00	46.59				
	2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan						64,493,800	60.00	32,918,800	60.00	51.04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Pengusulan penghargaan Satya Lencana; mengikuti acara Puncak HARGANAS		100.00	51,311,900		233,059,500	0.00	0	0.00	0.00				
	2.14.02.2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota</i>														
	2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan						282,013,760	25.00	0	25.00	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain						134,013,000	25.00	0	25.00	0.00				
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						175,952,800	25.00	0	25.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											22.67	6.19				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
55	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi peserta KB aktif	90,12%												
			Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,50%	100.00	5,405,947,708		2,977,507,603	42.98	773,739,600	42.98	25.99				
			Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB	86,50%												
	2.14.03.2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>														
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Media advokasi dan KIE (5 jenis); media luar ruang (umbul-umbul, spanduk, standing banner dan kalender)		100.00	230.620.000,00		149,510,700	100.00	148,591,500	100.00	99.39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						208,044,000	100.00	0	100.00	0.00				
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						660,102,000	25.00	0	25.00	0.00				
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Biaya operasional : penyuluhan KB; pengolahan data; pembinaan kader; tenaga lini lapangan		100.00	727,230,922										
	2.14.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>														
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						68,361,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Operasional pendataan keluarga Tahun 2021		100.00	41,782,000		178,204,000	100.00	151,800,000	100.00	85.18				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.									
										K	Rp.											
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Honorarium tenaga sub PPKBD		100.00	272,253,019																
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jasa PPKBD (240 org x 10 bln); sub PPKBD (240 org x 10 bln)		100.00	1,178,800,000																
	2.14.03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>																				
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Obat pendamping kontrasepsi (8 jenis); operasional pendistribusian alokon; pperasional registrasi; visitasi Faskes		100.00	154,834,000		209,840,296	100.00	204,017,500	100.00	97.23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Operasional untuk mengadakan pelayanan kepada akseptor KB IUD, implant, MOW dan MOP		100.00	701,001,100																
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rehab gudang obat kontrasepsi; pagar balai penyuluhan KB Kec. Lalan @ (1 paket); LCD proyektor, modem, meja LCD, screen, laptop dan printer @ (16 unit)		100.00	1,098,722,016																
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya pembinaan bagi peserta KB		100.00	69,302,700		210,492,600	75.00	123,815,900	75.00	58.82										
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jasa petugas : klinik KB (132 org); penghubung klinik (15 org); R/R klinik KB Kab (1 org); R/R klinik KB Kec (135 org)		100.00	82,980,800		236,175,000	25.00	36,346,800	25.00	15.39										
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Pembinaan kepada kelompok PIK remaja		100.00	83,950,951		284,789,100	30.00	61,620,000	30.00	21.64	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pelayanan KB keliling dengan mobil unit pelayanan KB		100.00	57,578,500		267,158,000	25.00	47,547,900	25.00	17.80										
	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Biaya tindakan medis operasi pria (MOP) dan medis operasi wanita (MOW)		100.00	99,845,800		260,419,907	0.00	0	0.00	0.00										
	2.14.03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</i>																				
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelayanan KB bekerja sama dengan TNI, PKK dan IBI		100.00	52,260,900		244,411,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pertemuan kelompok kerja di kampung KB; mini loka karya di kampung KB; operasional ketahanan keluarga di kampung KB		100.00	785,405,000																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						
PREDIKAT KINERJA																						
56	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga sejahtera	16,93%	100.00	1,265,414,900		1,355,181,865	22.15	32,517,800	22.15	2.40										
			Pusat informasi konseling (PIK) kesehatan reproduksi remaja	45																		
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,65%																		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.			
					K	Rp.					K	Rp.							
			Bina keluarga balita	30,50%															
	2.14.04.2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>																	
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pembinaan kelompok UPPKS		100.00	93,041,300		220,574,000	25.00	3,747,900	25.00	1.70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KIT siap nikah anti <i>stunting</i> (25 bh); bina keluarga balita (BKB) <i>kit stunting</i> (12 bh)		100.00	481,552,500													
	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						492,592,000	25.00	2,734,400	25.00	0.56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						337,324,480	25.00	22,287,600	25.00	6.61							
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman kesehatan reproduksi dan <i>stunting</i> bagi calon pengantin; edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga		100.00	626,100,000													
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)						117,072,505	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	2.14.04.2.02	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>																	
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan kelompok UPPKS		100.00	64,721,100		187,618,880	20.00	3,747,900	20.00	2.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			
PREDIKAT KINERJA																			
57	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas per tahun	3.00%															
			Fasilitas LLAJ yang direhab	50.00%	87.13	17,238,826,771		10,359,211,519	1.25	92,782,827	1.25	0.90							
			Jumlah rute pelayanan	1															
	2.15.02.2.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>																	
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi terkait rencana pembangunan prasarana jalan ke Kementerian terkait		100.00	50,333,100		99,912,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan						
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan jaringan instalasi PJU (24 paket); pembangunan jaringan <i>solar cell</i> (3 paket); rambu bersuar (APILL); rambu lalu lintas dan rambu pendahulu penunjuk jurus an @(15 bh); patok tikungan (40 bh); kerucut lalu lintas (180 bh)		0.00	0		2,433,138,840	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan						

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.	
					K	Rp.					K	Rp.					
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Lampu LED non <i>smart system</i> : 100 watt (830 bh); 40 watt (1.487 bh); 60 watt (726 bh); 80 watt (735 bh); lampu LED <i>smart system</i> 120 watt (137 bh); material lampu jalan (12 jenis); meterisasi lampu PJU (5 unit); pemeliharaan trafo 25 KVA (11 unit)		98.82	14,773,343,086		5,206,818,299	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	BBM solar (76.538 liter); operasional dan pemeliharaan kendaraan (6 unit)		75.00	257,431,136											
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pagar gedung PKB (211 m); taman gedung PKB (216 m2)		100.00	840,417,500		402,666,000	3.00	10,445,862	3.00	2.59					
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti lulus uji elektronik (BLUE) yang dikeluarkan oleh KEMENHUB		100.00	152,039,124		64,104,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan				
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor		100.00	184,137,536		298,107,000	5.14	7,190,003	5.14	2.41					
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Uji keliling di wilayah Musi Banyuasin		100.00	62,214,090		64,661,000	0.00	0	0.00	0.00					
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan survey dan penyusunan dokumen kajian lalu lintas harian rata-rata; rapat Wahana Tata Nugraha; pelaksanaan forum lalu lintas		43.42	79,117,800		264,207,500	7.14	0	7.14	0.00	Dinas Perhubungan				
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan : <i>traffict kight</i> (1 bh); <i>warning light</i> (5 bh); rambu-rambu lalu lintas darat (393 bh)		100.00	311,691,600		298,540,200	0.00	0	0.00	0.00					
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan															
	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru; pemilihan pelajar pelopor; penyuluhan bagi sopir/juru mudi (ABDIYASA)(50 org); razia gabungan dengan instansi terkait (6x); sosialisasi terkait keselamatan LLAJ (24x)		100.00	528,101,799		1,227,056,680	6.77	75,146,962	6.77	6.12	Dinas Perhubungan				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	
PREDIKAT KINERJA																	
58	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan sungai dan pembangunan pelabuhan sungai	45,00%	100.00	613,004,900		1,961,427,700	0.77	0	0.77	0.00					
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha															
	2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang		100.00	30,330,000		39,960,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perhubungan				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp.			
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau												
	2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan dermaga/tempat tambat kapal sungai dan danau		100.00	444,049,900								
	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						1,658,033,000	0.00	0	0.00	0.00		
	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional KM. Putri Cindai, KM. Banawa dan Jetsky		100.00	138,625,000		263,434,700	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perhubungan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.77	0.00		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
59	2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Kelengkapan peralatan dan perlengkapan bandara	80,00%	100.00	5,496,267,638		6,207,140,000	0.33	19,300,000	0.33	0.31		
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter												
	2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Pembangunan pagar keliling bandara		100.00	5,496,267,638		6,207,140,000	0.33	19,300,000	0.33	0.31	Dinas Perhubungan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.33	0.31		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
60	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	100	100.00	11,408,143,237		12,468,170,133	6.52	284,543,500	6.52	2.28		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						1,129,330,249	15.00	48,143,300	15.00	4.26		
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terpenuhinya Layanan Emergency Call Centre		100.00	347,186,470		293,082,000	10.00	6,003,200	10.00	2.05		
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja pejabat negara/lembaga pemerintah; pembuatan video greating Pemkab Muba; publikasi kegiatan pemerintah Kab. Muba pada media massa dan media elektronik		100.00	8,370,840,782		1,166,838,000	15.00	88,489,500	15.00	7.58		
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kerjasama dengan media online; Muba Expo; penyiaran radio Gema Randik dan Muba TV		100.00	2,392,483,525		214,190,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pendampingan sengketa informasi publik, tersedianya balho, spanduk billboard		100.00	297,632,460		938,225,084	0.00	0	0.00	0.00		
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media						8,172,000,000	5.00	141,907,500	5.00	1.74		
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						199,994,000	15.00	0	15.00	0.00		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah						239,362,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						115,148,800	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													6.52	2.28		
PREDIKAT KINERJA													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
61	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	20.00	100.00	1,716,478,540		2,499,999,813	17.00	142,696,300	17.00	5.71				
			Jumlah/kapasitas mitra komunikasi publik	204												
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jasa bandwidth, pengembangan SIKD seluruh PD		100.00	1,086,858,500		1,799,761,413	15.00	32,379,800	15.00	1.80	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	2.16.03.2.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyusunan master plan dan sosialisasi Smart City; rencana induk SPBE; osialisasi dan evaluasi SPBE; terpeliharanya website/sistem aplikasi pemerintah daerah dan bertambahnya website perangkat daerah		100.00	429,869,740		300,316,400	25.00	52,189,100	25.00	17.38	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	2.16.03.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peta menara telekomunikasi		100.00	199,750,300		399,922,000	20.00	58,127,400	20.00	14.53				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													17.00	5.71		
PREDIKAT KINERJA													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
62	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio jumlah koperasi aktif	98%	100.00	484,483,482		1,352,242,980	10.00	81,628,409	10.00	6.04				
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya koperasi/ KUD yang sehat organisasi		100.00	156,082,882		452,868,000	10.00	33,282,609	10.00	7.35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif dan sehat, lembaga/ kelompok dapat berbadan hukum secara legal		100.00	328,400,600		899,374,980	10.00	48,345,800	10.00	5.38				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													10.00	6.04		
PREDIKAT KINERJA													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
63	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi sehat	25%	100.00	218,474,052		449,914,000	0.00	0	0.00	0.00				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian koperasi dan UKM berpretasi, menghadiri HUT Koperasi tingkat nasional		100.00	218,474,052		449,914,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
64	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi baru	20	98.31	544,639,980		390,881,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang mengikuti bimtek pelatihan pengelolaan koperasi		97.63	387,172,620		390,881,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	2.17.05.2.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro														
	2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi UKM	Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang mengikuti bimtek pelatihan pengelolaan koperasi		100.00	157,467,360										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
65	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing dengan lembaga keuangan lainnya	20	100.00	159,066,000		450,000,000	15.00	51,747,000	15.00	11.50				
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing dengan lembaga keuangan lainnya		100.00	159,066,000		450,000,000	15.00	51,747,000	15.00	11.50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.00	11.50				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
66	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	UKM yang mengakses sistem pendukung Angka pertumbuhan wirausaha baru	100% 2,100	82.97	317,566,700		1,557,744,340	14.52	189,221,390	14.52	12.15				
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Termonitorinya UMKM yang telah mendapat kredit program KUR; pemberian IUMK dan akurasi data kinerja UMKM		90.00	112,691,000		600,540,000	10.00	54,171,400	10.00	9.02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi tentang memproduksi makanan dan minuman halal		85.00	113,725,700		507,204,450	15.00	60,501,500	15.00	11.93	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					IV				I					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku UMKM yang dibina berjalan baik dan usaha berkembang		75.00	91,150,000		449,999,890	20.00	74,548,490	20.00	16.57		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											14.52	12.15		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
67	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	100,00%	100.00	2,050,235,619		3,845,799,700	0.00	0	0.00	0.00		
	2.17.08.2.01	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>												
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bantuan untuk kelompok UKM pertanian, perikanan, pertukangan dan perkebunan; pengadaan peralatan tukang; pengadaan peralatan bengkel otomotif; belanja modal kerja pelaku UMKM		100.00	2,050,235,619		3,845,799,700	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
68	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah deregulasi kebijakan dan insentif penanaman modal	1	100.00	370,160,458		866,093,000	3.52	0	3.52	0.00		
	2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>												
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya deregulasi di bidang pelayanan publik perizinan dan non perizinan		100.00	53,200,600		249,954,750	10.00	0	10.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						74,947,250	7.00	0	7.00	0.00		
	2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>												
	2.18.02.2.02.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku profil potensi dan peluang investasi (156 buku); peta investasi; penyusunan data dan informasi hilirisasi industri komoditi kelapa		100.00	316,959,858		361,394,000	0.04	0	0.04	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						179,797,000	0.04	0	0.04	0.00		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											3.52	0.00		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
69	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan minat investasi	100,00%	100.00	491,246,862		658,800,800	1.63	10,742,100	1.63	1.63		
	2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>												
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan info grafis dan video grafis; Pameran Nasional, Pameran Provinsi, Muba Expo		100.00	491,246,862		658,800,800	1.63	10,742,100	1.63	1.63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											1.63	1.63		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
70	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Penerbitan izin dan non izin sesuai SOP	85.00%		80.61	1,413,446,591	2,245,106,410	11.06	48,648,998	11.06	2.17			
2.18.04.2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>													
2.18.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Belanja aplikasi : e-Pengadaan; Sistem Antrian Berbasis Sistem Komputer; Survei Kepuasan Masyarakat; Tracking, Notifikasi Perizinan dan Upgrade Website			100.00	287,183,900	290,880,600	8.00	13,038,666	8.00	4.48			
2.18.04.2.01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang Perlu diterbitkan Perizinan dan Non perizinan Melalui PATEN Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			68.29	784,042,200	1,476,161,000	11.51	0	11.51	0.00			
2.18.04.2.01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Jumlah pengaduan/saran/masukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan indek kepuasan masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan			100.00	85,048,862	99,945,750	25.00	12,512,833	25.00	12.52			
2.18.04.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Fasilitas Tim Satgas Percepatan Berusaha Terjadinya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			100.00	257,171,629	378,119,060	8.00	23,097,499	8.00	6.11			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												11.06	2.17		
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
71	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional PMA Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional PMDN	1 triliun		46.38	448,349,068	999,938,000	4.40	17,580,000	4.40	1.76			
2.18.05.2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>													
2.18.05.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Jumlah Berita Acara/Laporan perusahaan yang di pantau/diawasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Bimtek LKPM			47.16	150,542,200	349,974,000	4.00	12,300,000	4.00	3.51			
2.18.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Database Perusahaan/Pelaku Usaha Jumlah BA/Laporan Pasilitasi Permasalahan			48.16	268,321,868	449,997,000	4.00	0	4.00	0.00			
2.18.05.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			32.00	29,485,000	199,967,000	6.00	5,280,000	6.00	2.64			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											4.40	1.76				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
72	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional PMA	15	100.00	125,089,500		144,986,500	12.00	5,973,300	12.00	4.12				
			Jumlah investor berskala nasional PMDN	20												
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data		100.00	125,089,500		144,986,500	12.00	5,973,300	12.00	4.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											12.00	4.12				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
73	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda yang bebas narkoba	99,96%	91.84	2,370,610,300		2,652,076,840	5.95	100,120,900	5.95	3.78				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota														
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan kewirausahaan Bidang Perbengkelan		100.00	176,953,000		130,375,400	0.00	0	0.00	0.00				
	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Peserta Penyuluhan tentang bahaya Narkoba		100.00	225,568,100		239,091,200	0.95	2,280,000	0.95	0.95	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan		100.00	106,270,120		404,579,240	0.00	0	0.00	0.00				
	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Peserta pendidikan dan Pelatihan dasar Paskibraka		100.00	1,547,568,000		1,628,893,000	8.03	94,786,000	8.03	5.82				
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Pemuda (30 org); KNPI		60.19	314,251,080		249,138,000	10.00	3,054,900	10.00	1.23	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											5.95	3.78				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
74	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat Provinsi	22,09%	97.79	60,418,179,637		30,341,984,210	10.07	2,021,606,187	10.07	6.66				
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	60,00%												
			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	29,63%												

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
			Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup	1.382 org												
	2.19.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana olahraga yang representatif		95.76	31,692,677,064		10,860,618,000	2.55	248,181,755	2.55	2.29	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota		100.00	411,541,020		963,749,000	0.34	3,267,900	0.34	0.34	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		100.00	1,498,290,200										
	2.19.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>														
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Makan dan Minum pada Fasilitas Pelayanan Pendidikan PPLP-D; Penginapan Atlet PPLP-D; Pakaian Kerja Lapangan		100.00	9,986,459,719		11,096,949,160	25.00	1,770,156,532	25.00	15.95	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.04	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>														
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dana Hibah KONI Kabupaten Muba		100.00	13,945,537,800		4,000,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.05	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>														
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kegiatan Jalan Sehat, Sepeda Sehat, senam bersama dan peringatan HAORNAS		100.00	96,649,000		115,334,050	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Promosi Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin didalam dan Luar Negeri		100.00	2,714,934,834		3,215,395,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Lomba Olahraga Tradisional		100.00	72,090,000		89,939,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											10.07	6.66				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
75	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan organisasi pemuda yang aktif	38.71%	100.00	3,343,335,356		5,807,667,826	0.00	0	0.00	0.00				
	2.19.04.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>														
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dana Hibah Kwarcab Musi Banyuasin		100.00	2,793,479,114		4,783,592,900	0.00	0	0.00	0.00				
	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Peserta Pembinaan Saka Pariwisata		100.00	265,653,902		729,915,382	0.00	0	0.00	0.00				
	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pramuka di Kabupaten Musi Banyuasin, Pembinaan Gudep Pramuka 100%, Monitoring Kwarran 15 Kwarran dan Pembinaan Gudep Pramuka di Sekolah sebanyak 302 Gudep		100.00	284,202,340		294,159,544	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
				K	IV		K		I		K	Rp.			K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00								
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								
76	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya buku statistik daerah	4	100.00	78,761,125	2,105,353,135	16.16	97,814,025	16.16	4.65									
			Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	1																
			Tersedianya Buku Kecamatan dalam Angka	1																
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Data Base Kegiatan Satu Data Kabupaten; Estimasi Data Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Banyuasin - Tersedianya Data Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Setiap Bulan; Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Bidang Perkebunan		100.00	78,761,125	1,682,160,811	18.29	78,761,125	18.29	4.68		Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan							
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral					217,230,400	15.00	19,052,900	15.00	8.77		Dinas Komunikasi dan Informatika							
	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					205,961,924	0.00	0	0.00	0.00									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											16.16	4.65								
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								
77	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	48	100.00	437,101,134	679,359,000	6.35	23,262,400	6.35	3.42									
			Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	2																
			Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	12																
			Rasio kegiatan penting daerah yang didukung dengan pengamanan informasi	15																
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					216,105,000	15.00	23,262,400	15.00	10.76									
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya NSPK Persandian dan Terlaksananya Kontra Penginderaan Ruang Rapat		100.00	135,109,300	106,936,000	10.00	0	10.00	0.00		Dinas Komunikasi dan Informatika							
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya Jasa Pendukung Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati		100.00	182,460,633	356,318,000	0.00	0	0.00	0.00									
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Pendukung Tanda Tangan Elektronik		100.00	119,531,201														
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											6.35	3.42								

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
78	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	79.01	2,499,920,800		4,749,113,160	0.00	0	0.00	0.00				
	2.22.02.2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan kepada pelajar		0.00	0		449,992,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pagelaran seni budaya lintas daerah dan bantuan alat kesenian		81.07	2,233,218,800		3,327,721,350	0.00	0	0.00	0.00				
	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan Festival Randik, video seni dan budaya tradisional, video dokumenter cejarah Musi Banyuasin		100.00	266,702,000		971,399,810	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0.00	0.00			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
79	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Grup kesenian aktif	65.00%				449,840,000	0.00	0	0.00	0.00				
			Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	0	100.00	263,430,000										
	2.22.04.2.01	<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>														
	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pembuatan video : seni, tradisi dan budaya Muba; profil seniman Muba; rekam situs cagar budaya dan rumah tradisional		100.00	263,430,000		449,840,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0.00	0.00			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
80	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	0.70%	100.00	603,593,000		1,923,534,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota														
	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Situs makam : rehab (4 paket), pemeliharaan jalan setapak; pembangunan pagar; penataan halaman kuburan @ (1 paket)		100.00	603,593,000		1,923,534,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
81	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Pembangunan gedung museum Arsip benda/warisan budaya yang terdata dan tertata dengan baik di museum	0 50.00%	99.99	15,603,708,800		3,700,585,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota														
	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Pembangunan museum		99.99	15,603,708,800		3,700,585,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
82	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan bahan pustaka Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	8.50% 3,58%	98.17	2,578,743,566		2,316,201,695	7.01	19,250,000	7.01	0.83				
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Tersedianya perbaruan e-library dan buku elektronik (e-book) sebanyak 1.000 judul buku; peralatan dan mesin untuk layanan perpustakaan (8 jenis)		100.00	359,863,950		243,400,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kunjungan siswa PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA secara reguler ke perpustakaan daerah		85.00	55,944,000		70,095,000	5.00	0	5.00	0.00				
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat di 13 kecamatan yang dibina		100.00	82,719,500		321,658,860	5.00	0	5.00	0.00				
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya koleksi buku perpustakaan		100.00	224,766,000		414,312,000	0.00	0	0.00	0.00				
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pemeliharaan buku perpustakaan		100.00	64,900,000		34,814,000	5.00	0	5.00	0.00				
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						64,430,000	5.00	0	5.00	0.00				
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kunjungan kunjungan mobil pintar/mobil perpustakaan keliling/mobil SIKIB (sekolah dan desa); penerbitan majalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		100.00	133,529,016		148,068,400	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Bangub)	Gedung Perpustakaan Untuk Pondok Pesantren Hidayatul Fudhola Kecamatan Sungai Lilin		100.00	1,492,956,000		680,808,260	5.00	0	5.00	0.00				
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Lomba bercerita yang diikuti oleh 28 orang pelajar SD/MI dalam Kabupaten Musi Banyuasin		100.00	71,335,000		83,503,175	100.00	19,250,000	100.00	23.05				
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bimbingan belajar matematika, bahasa inggris, komputer, membaca, PAUD, TPA, sanggar tari		80.00	92,730,100		205,112,000	5.00	0	5.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.01	0.83				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
83	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	81,00%	100.00	307,403,127		815,116,650	5.00	0	5.00	0.00				
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota														
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah; pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah; penelusuran naskah arsip di OPD		100.00	29,960,000		188,342,640	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota														
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pengelolaan Sistem Informasi dan Kearsipan Daerah		100.00	127,645,127		136,574,040	5.00	0	5.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah; penelusuran naskah arsip di OPD		100.00	149,798,000		490,199,970	5.00	0	5.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											5.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
84	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	23.556,08	100.00	1,972,467,520		2,074,042,265	4.52	14,931,400	4.52	0.72				
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data statistik perikanan tangkap (1 dokumen) pendataan calon penerima bantuan konverter kit berupa mesin perahu pengganti BBM ke BBG (5 kecamatan)		100.00	86,099,840		200,458,320	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan			
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan perahu penangkap ikan beserta mesin dan alat bantu penangkapan ikan berupa jaring, jala dan senter		100.00	1,759,663,980		1,723,583,845	5.00	10,218,200	5.00	0.59				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.				
										K	Rp.						
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terbentuknya koperasi perikanan tangkap		100.00	52,442,400		150,000,100	5.00	4,713,200	5.00	3.14	Dinas Perikanan				
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Perlindungan asuransi nelayan		100.00	74,261,300											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	
PREDIKAT KINERJA																	
85	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)		30.542,90		100.00	4,420,839,929		2,881,322,222	2.26	48,046,200	2.26	1.67			
			Produksi benih (ekor)		2.657.341												
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantuan paket budidaya ikan patin di keramba jaring apung (40 paket); bantuan paket budidaya lele (220 paket); meningkatnya produksi perikanan budidaya (20.714 ton)			1,779,534,884	100.00	847,749,300	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perikanan (1 dokumen); media informasi (434 leaflet); buku informasi (150 buku)			56,073,100	100.00	243,243,400	5.00	11,740,500	5.00	4.83					
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja pompa dan kincir air (7 unit); pakan Ikan untuk produksi benih (2.150.000 ekor)			2,142,111,770	100.00	1,156,570,698	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan				
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan paket pengolahan pakan ikan berbahan baku maggot			330,957,100	100.00	426,520,824	2.72	9,125,300	2.72	2.14					
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Data statistik perikanan budidaya (1 dokumen); pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan (5 kelompok)			112,163,075	100.00	207,238,000	20.00	27,180,400	20.00	13.12					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	
PREDIKAT KINERJA																	
86	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pokwasmas yang aktif		50,00%		100.00	549,528,857		1,338,343,375	2.86	28,098,900	2.86	2.10			
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota															
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bantuan alat tangkap ikan (90 paket); bantuan perahu dan mesin kapal (10 unit); pembinaan POKMASWAS (10 POKMASWAS); restocking ikan lokal (6 danau); sidak destruktive fishing (6 lokasi)			549,528,857	100.00	1,008,442,375	2.16	19,671,000	2.16	1.95	Dinas Perikanan				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp.			
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota						329,901,000	5.00	8,427,900	5.00	2.55	Dinas Perikanan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											2.86	2.10		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
87	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk olahan perikanan (ton) Angka konsumsi ikan	225,11 37,79%	100.00	910,049,900	1,361,934,300	3.63	35,726,900	3.63	2.62			
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil												
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Konsumsi Ikan (37,05%); bantuan ikan segar bagi Ibu-ibu hamil dan menyusui bagi masyarakat miskin (6.000 kg untuk 200 orang)		100.00	319,143,400								
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Laporan Monev Poklahsar (1 laporan); pelatihan Poklahsar dan bantuan paket pengolahan ikan bagi masyarakat miskin (2 angkatan @ 30 orang)		100.00	590,906,500	1,361,934,300	3.63	35,726,900	3.63	2.62	Dinas Perikanan		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											3.63	2.62		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
88	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah objek wisata	56	100.00	5,293,237,000	1,383,749,000	0.00	0	0.00	0.00			
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Danau Ulak Lia Sekayu		100.00	5,293,237,000	1,383,749,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											0.00	0.00		
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
89	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	46.406	93.75	2,340,887,064	1,618,000,000	17.65	224,337,159	17.65	13.87			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan wisata Kuliner; Pemilihan Kuyung Kupek Musi Banyuasin		93.75	2,340,887,064	1,618,000,000	17.65	224,337,159	17.65	13.87	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata		
	3.26.03.2.01.03	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik		100.00	99,840,000								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											17.65	13.87		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
90	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	2 klmok	100.00	1,509,352,482		2,841,029,000	7.32	170,616,300	7.32	6.01			
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jenis dan Paket Wisata Unggulan dan sosialisasi Pokdarwis		100.00	1,509,352,482		2,841,029,000	7.32	170,616,300	7.32	6.01	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												7.32	6.01		
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
91	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi padi	1,07%											
			Peningkatan produksi jagung	1,90%											
			Peningkatan produksi cabe	1,00%											
			Peningkatan produktivitas padi	1,00%											
			Peningkatan produktivitas jagung	0,67%											
			Peningkatan produktivitas cabe	2,83%											
			Penyediaan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan	1,20%											
			Penyediaan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan	1,40%											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian													
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida; data pestisida dan pupuk @ (15 kecamatan); rapat sosialisasi, koordinasi dan evaluasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida terdapatnya kawasan pengembangan		54.98	798,911,789		1,585,706,000	54.98	798,911,789	54.98	50.38	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan		
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terciptanya kawasan pengembangan cabai besar (25 ha); terciptanya kawasan pengembangan tanaman cabai rawit (5 ha); monitoring		11.93	34,494,500		1,829,513,721	11.93	34,494,500	11.93	1.89			
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota													
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	terbinanya kelompok penangkar benih padi (2 kelompok); produksi padi (50 ton); benih padi in hibrida label ungu (2.000 kg); insektisida (195 liter); pupuk NPK (4.766 kg).		19.69	288,320,368		2,061,764,456	19.69	288,320,368	19.69	13.98	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan		
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan tanaman perkebunan		19.69	39,956,000		39,916,600	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perkebunan		
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Monitoring ternak sapi bantuan pemerintah		100.00	69,090,000		50,000,000	20.00	8,600,000	20.00	17.20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan		
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Meningkatkan kualitas SDM peternak (100 org); pembibitan dan perawatan ternak melalui inseminasi buatan (3.000 ekor); pengembangan		100.00	3,539,967,048		2,722,706,200	2.29	62,481,300	2.29	2.29			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												18.92	14.39		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
92	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kelompok tani yang telah menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	70,00%	98.47	6,930,033,423	5,125,252,999	0.83	24,618,400	0.83	0.48					
			Luas areal tanaman perkebunan (Ha)	499.955												
			Promosi atas hasil produksi pertanian (event)	3												
3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian														
	3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Terlaksananya pengukuran atau pemetaan luas lahan baku sawah (1 dok); tersusunnya laporan curah hujan (12 bln)		100.00	419,575,340										
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Partisipasi pada Muba EXPO; event promosi potensi dan produk perkebunan (2 event)		8.44	9,958,400	319,844,927	8.44	9,958,400	8.44	3.11		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan			
3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian														
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Sumur Bor untuk Kel. Tani		100.00	599,997,450	1,149,941,200	0.00	0	0.00	0.00		Dinas Perkebunan			
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Air untuk Kelompok Tani		100.00	839,999,975	814,954,400	0.00	0	0.00	0.00		Dinas Perkebunan			
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan kontruksi jalan produksi kawasan perkebunan (3 paket); pembangunan jalan usaha tani (JUT) dengan koral (3 paket)		100.00	992,479,477	599,780,720	0.18	900,000	0.18	0.15		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan			
	3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan pintu air saluran drainase tersier untuk pertanian		100.00	1,080,438,600	950,000,000	1.03	9,050,000	1.03	0.95		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan			
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Embung pertanian (8 paket); sumur bor (3 paket) gedung BPP Jirak Jaya		100.00	2,987,584,181	1,290,731,752	0.37	4,710,000	0.37	0.36		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0.83	0.48			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
93	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kasus penyakit ternak yang tertangani	100,00%	100.00	2,155,545,345	1,070,434,150	26.06	249,366,000	26.06	23.30					
			Peningkatan produksi daging	3,00%												
			Peningkatan produksi telur	2,93%												
3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	meningkatkan tingkat kesehatan hewan dan produktivitas sebanyak 80% dari jumlah hewan yang dilakukan pengobatan (6.400 ekor); pelayanan kesehatan hewan keliling		100.00	352,710,400	349,999,700	55.00	189,839,600	55.00	54.24		Dinas Tanaman			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.	
					K	Rp.			K	Rp.							
	3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Surveillance penyakit jembrana dan brucellosis; surveillance wabah penyakit unggas @ (1.000 ekor); surveillance penyakit parasit darah (350 ekor); surveillance penyakit		100.00	351,879,545		374,986,450	12.00	24,291,600	12.00	6.48	Pangan, Hortikultura dan Peternakan				
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner															
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan hygiene dan sanitasi di lingkungan peternakan rakyat; pengawasan pemotongan temak di RPH		100.00	81,138,200		195,448,000	12.00	18,996,600	12.00	9.72	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan				
	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu pangan asal hewan		100.00	49,887,500		150,000,000	12.00	16,238,200	12.00	10.83					
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan															
	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pembangunan kandang ayam (5 unit); kantor SPR (3 unit); rumah kompos (1 unit)		100.00	1,319,929,700											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																26.06	23.30
PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
94	3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas tanam puso karena serangan OPT dan DPI	2,00%	87.64	5,924,846,982		836,937,550	3.70	26,165,000	3.70	3.13					
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana pengendalian bencana	100,00%													
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Monitoring terhadap OPT (15 kecamatan); fungisida (850 kg); insektisida pengerek batang (500 kg); insektisida untuk keong (900 ltr); rodentisida (1.000 ltr); traktor roda 4 (3 unit); peningkatan pengetahuan petani untuk mengendalikan hama penyakit tanaman; peningkatan pengetahuan petani untuk mengendalikan OPT @ (25 org)		100.00	2,187,075,982		441,938,500	3.04	13,430,000	3.04	3.04	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan				
	3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Excavator Type PC210 (2 Unit); Pengadaan Truk Self Loading (Tronton) (1 unit)		81.75	3,692,771,000		349,999,050	5.00	12,735,000	5.00	3.64					
	3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data non OPT (banjir dan kebakaran); peta daerah rawan kebakaran dan lokasi sumur bor dan embung		100.00	45,000,000		45,000,000	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perkebunan				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																3.70	3.13
PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
95	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase lahan perkebunan yang bersertifikat	3.277	100.00	326,256,720		574,889,604	10.00	40,184,400	10.00	6.99					

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pelepasan areal HPKP menjadi APL yang berbasis lahan perkebunan rakyat (15.000 ha); sertifikasi lahan perkebunan milik rakyat (2.000 persil); penilaian usaha perkebunan (17 perusahaan); rapat ganggauan usaha perkebunan (20 kali)		100.00	326,256,720		574,889,604	10.00	40,184,400	10.00	6.99	Dinas Perkebunan			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											10.00	6.99				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
96	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Penyuluh yang bersertifikat Peningkatan kelas kelompok tani Peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	19,00% 21,00% 2,75%	100.00	702,599,472		7,695,991,278	8.27	240,099,752	8.27	3.12				
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peserta bimtek kostratani (35 org); monitoring kegiatan penyuluh dan dokumentasi data simluhtan (15 kecamatan); pertemuan penyuluh pertanian dan peternakan tingkat kabupaten (237 org); laporan programa penyuluhan kabupaten dan BPP (15 laporan)		100.00	499,402,720		599,999,788	13.60	36,903,000	13.60	6.15	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan			
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peserta sarasehan petani nelayan tingkat kabupaten (13 org); sekolah lapang pertemuan penyuluh (80 petani); terfasilitasinya kemitraan		100.00	27,578,400		1,849,705,685	18.60	27,578,400	18.60	1.49	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan			
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Belanja operasional pelaksana penyuluh non PNS (127 org); belanja operasional pelaksana penyuluh THL-TBPP (21 org);		100.00	175,618,352		5,246,285,805	4.02	175,618,352	4.02	3.35				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											8.27	3.12				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
97	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	8,50%	100.00	8,562,713,500		273,326,000	10.90	0	10.90	0.00				
	3.30.02.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						105,350,000	20.00	0	20.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						167,976,000	5.20	0	5.20	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											10.90	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
98	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	8,50%	100.00	8,562,713,500		5,668,901,000	7.51	0	7.51	0.00				
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen master plan Pasar Randik Sekayu (1 dokumen); pembebasan lahan Pasar Randik (10.000 m ²); sarana pendukung Pasar Randik (315 m ²); pagar area parkir Pasar Randik (70 m); rehab kantor UPTD Pasar Randik (110 m ²); 1 penertiban dan pengamanan Pasar Randik; los pasar Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin (18,9 m ²); pengawasan sarana distribusi perdagangan (15 kec)		100.00	8,351,220,400		5,368,907,000	6.56	0	6.56	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya														
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pedagang kaki lima dan asongan yang diawasi mutu dagangannya		100.00	211,493,100		177,048,000	31.00	0	31.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						122,946,000	15.00	0	15.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.51	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
99	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menurunnya keluhan konsumen	75.00%	81.02	1,067,320,800		1,176,572,000	10.00	10,435,000	10.00	0.89				
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota														
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Termonitornya harga dan stok bahan pokok; terlaksananya pengawasan barang pokok dan strategis		75.00	100,853,300		230,936,000	10.00	0	10.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya paket sembako murah		82.00	966,467,500		945,636,000	10.00	10,435,000	10.00	1.10				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											10.00	0.89				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
100	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	32 triliun	94.82	6,455,121,740		3,947,225,625	8.30	307,486,800	8.30	7.79				
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Peserta pelatihan hilirisasi karet (10 org); bahan dan peralatan hilirisasi karet (1 paket); gedung promosi gambo Muba (657 m ²)		100.00	5,291,684,640										
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Pameran produk unggulan Musi Banyuasin di tingkat Nasional		90.00	870,249,000		1,380,171,875	17.15	235,400,000	17.15	17.06				
	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya Event Milenial Bussines Creatif Twenty One		100.00	279,587,800		1,628,489,000	0.90	0	0.90	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	3.30.05.2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Terlaksananya Event Pameran JFW di Jakarta		10.00	13,600,300		938,564,750	8.13	72,086,800	8.13	7.68				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											8.30	7.79				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
101	3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Temuan sidak yang ditindaklanjuti	35.00%	100.00	383,268,400		573,550,000	7.14	39,614,500	7.14	6.91				
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan														
	3.30.06.2.01 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kalibrasi peralatan UTTP (40 jenis); pelayanan tera/tera ulang alat UTTP (15 kecamatan)		100.00	215,770,400		409,768,000	10.00	39,614,500	10.00	9.67	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.30.06.2.01 .02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/penyuluhan UTTP metrologi legal		100.00	167,498,000		163,782,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.14	6.91				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
102	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	8.50%	100.00	695,323,000		3,572,266,100	2.88	11,030,700	2.88	0.31				
			Sentra IKM yang nilai tambahnya meningkat	8.50%												
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
	3.31.02.2.01 .04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Master Plan Kawasan Industri Hijau		100.00	385,464,400		1,954,814,700	4.83	4,713,200	4.83	0.24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	3.31.02.2.01 .05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Telaksananya fasilitas kemasan		100.00	193,618,000		1,617,451,400	0.53	6,317,500	0.53	0.39				
	3.31.02.2.01 .06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi dokumen RIPIDA Kab. Muba		100.00	116,240,600										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											2.88	0.31				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
103	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan industri secara keseluruhan	3,50%	100.00	94,242,200		150,016,500	20.00	0	20.00	0.00				
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota														
	3.31.03.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan perizinan hak merk dan izin halal		100.00	94,242,200		150,016,500	20.00	0	20.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											20.00	0.00				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
			Jumlah pertumbuhan sentra IKM (sentra)	200												

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
104	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah IKM yang di fasilitasi teknologi dan kemampuan wirausaha	15	100.00	250,074,400					11.50	0	11.50	0.00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota													
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									6.00	0	6.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data informasi industri kabupaten (1 dokumen); website e-commerce		100.00	250,074,400					21.00	0	21.00	0.00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													11.50	0.00	
PREDIKAT KINERJA													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
105	3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Transmigran umum yang ditempatkan	100.00%	100.00	159,009,600					5.00	14,975,200	5.00	2.00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Pembekalan relokasi warga transmigrasi UPT JUD Nganti SP3		100.00	159,009,600					5.00	14,975,200	5.00	2.00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														5.00	2.00
PREDIKAT KINERJA														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
	3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembinaan warga transmigrasi	100.00%	100.00	98,526,350									
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian													
	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Peserta pelatihan produk unggulan di ex UPT Air Balui		100.00	98,526,350									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															
PREDIKAT KINERJA															
106	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten	100,00%	84.01	19,880,127,512					15.02	663,996,800	15.02	4.88	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan													
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemngkatan MUB dari MUBI MUBD (2 kegiatan); data perkembangan kecamatan persiapan (1 kec); data rencana, terukur dan terpasangnya pilar batas antara Kab. Muba dengan kabupaten lain (2 segmen); fasilitasi		100.00	1,021,193,146					3.00	8,507,100	3.00	0.37	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			100.00	156,667,245					4.00	19,413,200	4.00	3.52	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terdatanya data-data rupa bumi berupa unsur alam dan unsur buatan dalam wilayah Kab. Muba		100.00	162,547,856					9.00	42,478,278	9.00	8.01	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan STQ tingkat Kabupaten (859 org), STQ tingkat Provinsi (40 org), MTQ tingkat Kabupaten, MTQ		79.96	15,614,382,220					16.60	98,766,800	16.60	2.44	Sekretariat Daerah

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K Rp.		K	Rp.			K	Rp.
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						3,090,731,841	16.60	230,190,000	16.60	7.45				
	4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>														
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas	100.00	407,671,484			410,809,368	30.00	32,068,425	30.00	7.81				
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyelesaian sengketa hukum (5 kasus); penyelesaian sengketa hukum antar daerah (30 kasus)	100.00	1,220,434,955			1,685,057,250	30.00	187,298,497	30.00	11.12	Sekretariat Daerah			
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kemudahan informasi dokumentasi produk hukum daerah (5 jenis); kesadaran hukum bagi narapidana (P. Sekayu (40 ora); terciptanya	100.00	466,638,593			159,149,900	30.00	15,274,500	30.00	9.60				
	4.01.02.2.04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>														
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terjalinnnya koordinasi kerjasama antar daerah	85.00	524,358,895			416,786,000	10.00	30,000,000	10.00	7.20				
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terfasilitasinya kerjasama luar negeri meliputi kerjasama daerah dengan pemerintah daerah dan lembaga luar negeri	30.00	89,422,509			240,732,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat Daerah			
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terjalinnnya koordinasi kerjasama antar daerah	70.00	216,810,609			164,826,000	0.00	0	0.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											15.02	4.88				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
107	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah													
			Jumlah BLUD yang terbina	87.93	2,703,287,232			5,252,095,812	10.02	101,482,723	10.02	1.93				
			Jumlah BUMD yang terbina													
			Jumlah kerjasama antar wilayah	7												
	4.01.03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>														
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terbinanya BLUD dan BUMD	100.00	208,030,600											
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terkendalnya inflasi daerah (1 laporan); laporan inflasi daerah (12 laporan)	100.00	333,020,900			380,927,500	15.00	17,894,400	15.00	4.70				
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pengawasan UKM	100.00	236,620,859			350,039,000	10.00	17,414,400	10.00	4.97	Sekretariat Daerah			
	4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						119,090,000	0.00	0	0.00	0.00				
	4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						300,062,000	15.00	38,268,200	15.00	12.75				
	4.01.03.2.02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>														
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen standar bahan dan upah pekerjaan konstruksi; dokumen standar harga bahan; dokumen fasilitasi serah terima pekerjaan	100.00	337,918,600			995,895,400	5.00	0	5.00	0.00				
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	konstruksi (600 paket); verifikasi kontak status kegiatan konstruksi	100.00	288,389,300			591,858,912	10.00	0	10.00	0.00	Sekretariat Daerah			
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring dan pemantauan fisik kegiatan pembangunan (15 kecamatan); workshop pendampingan	100.00	44,705,000			94,025,000	5.00	0	5.00	0.00				
	4.01.03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.	
					K	Rp.			K	Rp.							
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya (95 paket); konstruksi (500 paket); barang (48 paket)		100.00	378,594,207		821,513,000	16.67	12,905,723	16.67	1.57	Sekretariat Daerah				
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Telaksananya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik		100.00	481,620,514		269,830,000	37.06	0	37.06	0.00					
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan pemahaman aparatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah		17.86	30,430,052		250,618,000	8.19	0	8.19	0.00					
	4.01.03.2.04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>															
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						190,090,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						788,150,000	0.00	0	0.00	0.00			Sekretariat Daerah		
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Fasilitasi permasalahan SDA (10 kali); monitoring dan evaluasi eksploitasi SDA (10 laporan); pemetaan potensi SDA (10 kec)		46.00	363,957,200		99,997,000	18.00	15,000,000	18.00	15.00					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												10.02	1.93				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
108	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Raperda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	100,00%	100.00	17,021,870,166		25,317,537,320	16.30	2,504,495,900	16.30	9.89					
			Pembuatan risalah rapat tepat waktu	200,00%													
			Rapat-rapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD	300,00%													
			Informasi kegiatan DPRD yang diakses anggota DPRD dan masyarakat	400,00%													
	4.02.02.2.01	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>															
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya rancangan Peraturan Daerah		100.00	1,722,092,441		2,749,158,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD				
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya raperda inisiatif yang akuntabel		100.00	161,870,000		320,640,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.02.02.2.02	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>															
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS		100.00	812,056,200		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD				
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS		100.00	362,236,950		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD		100.00	501,098,015		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan		100.00	211,855,800		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD		100.00	586,981,500		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00					
	4.02.02.2.03	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>															

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp.								
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		100.00	622,614,300		1,381,654,000	0.00	0	0.00	0.00	Sekretariat DPRD						
	4.02.02.2.04	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>																	
	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek untuk 45 orang anggota DPRD		100.00	532,855,400		1,559,104,000	4.69	73,127,500	4.69	4.69							
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya gaji untuk kelompok pakar dan tim ahli DPRD		100.00	312,000,000		864,000,000	25.00	18,000,000	25.00	2.08	Sekretariat DPRD						
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya gaji untuk tenaga ahli fraksi		100.00	480,000,000		480,000,000	25.00	80,000,000	25.00	16.67							
	4.02.02.2.05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>																	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD		100.00	38,960,000		380,400,000	0.37	1,425,000	0.37	0.37	Sekretariat DPRD						
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses anggota DPRD		100.00	1,574,835,200		1,654,489,200	50.00	127,197,500	50.00	7.69							
	4.02.02.2.07	<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>																	
	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersedianya liputan radio, televisi, media harian, advetorial, mungguan dan media online dan jasa pembuatan stand		100.00	2,651,968,266		4,120,898,120	20.00	140,000,000	20.00	3.40	Sekretariat DPRD						
	4.02.02.2.08	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>																	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya study komparatif alat kelengkapan dewan		100.00	6,450,446,094		4,898,924,000	42.15	2,064,745,900	42.15	42.15	Sekretariat DPRD						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			
PREDIKAT KINERJA																			
	109	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	65														
				Keselarasn program RKPD dalam RPJMD	100,00%	100.00	2,172,276,960	2,867,074,690	27.49	245,672,212	27.49	8.57							
				Keselarasn program kabupaten dengan program nasional	90,00%														
	5.01.02.2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>																	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen perencanaan dan laporan triwulanan program kegiatan yang bersumber dana non APBD		100.00	252,434,000		253,508,000	20.00	4,714,300	20.00	1.86							
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah		100.00	142,729,400		203,270,000	70.00	3,375,000	70.00	1.66							
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang RKPD		100.00	211,628,900		351,180,000	70.00	87,889,200	70.00	25.03	Bappeda						
	5.01.02.2.01.05.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Arah kebijakan pembangunan Kab. Muba Tahun 2022; perubahan RKPD Kab. Muba 2021; RKPD Kab. Muba Tahun 2022		100.00	310,107,732		359,944,000	31.03	73,024,650	31.03	20.29							
	5.01.02.2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>																	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen analisis data sosial budaya dan pembangunan manusia		100.00	101,107,500		164,077,000	30.00	13,817,700	30.00	8.42							

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah kab. Muba (1 aplikasi); data hasil koordinasi dan					115,205,000	0.00	0	0.00	0.00	Bappeda			
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah kab. Muba (1 aplikasi); data hasil koordinasi dan		100.00	232,148,000		379,215,440	15.00	12,880,100	15.00	3.40				
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah kab. Muba (1 aplikasi); data hasil koordinasi dan													
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pengelolaan sistem informasi pembangunan (15 kecamatan); penyerahan DIPA tahun 2022 (1 kali); rapat koordinasi pelaksanaan laporan pelaksanaan forum CSR Kab. Muba TA. 2021 (1 dokumen); laporan pelaksanaan kegiatan	100.00	421,025,996		370,023,750	11.49	38,551,662	11.49	10.42					
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Pengelolaan sistem informasi pembangunan (15 kecamatan); penyerahan DIPA tahun 2022 (1 kali); rapat koordinasi pelaksanaan laporan pelaksanaan forum CSR Kab. Muba TA. 2021 (1 dokumen); laporan pelaksanaan kegiatan	100.00	90,762,900		224,282,000	25.00	11,419,600	25.00	5.09		Bappeda			
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan sistem informasi pembangunan (15 kecamatan); penyerahan DIPA tahun 2022 (1 kali); rapat koordinasi pelaksanaan laporan pelaksanaan forum CSR Kab. Muba TA. 2021 (1 dokumen); laporan pelaksanaan kegiatan	100.00	410,332,532		446,369,500	7.39	0	7.39	0.00					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											27.49	8.57				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
110	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program/kegiatan PD yang sesuai dengan dokumen perencanaan	90,00%	100.00	1,698,842,130		3,185,642,552	22.43	324,251,500	22.43	10.18				
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; laporan Rencana Aksi Nasional Desa, Daerah, bidang													
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; laporan Rencana Aksi Nasional Desa, Daerah, bidang	100.00	74,154,800		163,733,000	30.00	22,969,000	30.00	14.03					
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	100.00	182,609,500		339,465,000	40.00	70,526,000	40.00	20.78		Bappeda			
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	penanggulangan kemiskinan Kab. Muba; rapat koordinasi Tim	100.00	297,024,900		424,362,800	30.00	26,153,700	30.00	6.16					
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Buku analisis ekonomi daerah; laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang													
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku petunjuk umgungann daerah kaur	100.00	80,385,000		156,426,000	28.00	12,761,300	28.00	8.16		Bappeda			
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku petunjuk umgungann daerah kaur	100.00	242,232,700		149,915,000	30.00	14,547,000	30.00	9.70					
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	fasilitasi program/kegiatan AMP di Kab. Muba (Sanimas, Nawasis, STBM, Kelanjutan SPAM, PPSM, ALS); dokumen pemuktahiran SSK Kab													
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan pelaksanaan kegiatan pendukung program IPDMIP di Kab. Muba	100.00	274,599,870		346,379,000	10.00	2,356,600	10.00	0.68					
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Integrasi data geospasial daerah; aplikasi geospasial Kab. Muba; simpul jaringan informasi	100.00	168,780,560		393,425,800	30.00	85,430,800	30.00	21.71		Bappeda			
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Integrasi data geospasial daerah; aplikasi geospasial Kab. Muba; simpul jaringan informasi	100.00	112,096,100		815,058,952	10.00	26,000,000	10.00	3.19					

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
5.01.03.2.03.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pasmitas kegiatan yang mendukung capaian target penurunan emisi gas rumah kaca/perubahan iklim; koordinasi perencanaan dan		100.00	266,958,700		396,877,000	20.00	63,507,100	20.00	16.00			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											22.43	10.18			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
111	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat laporan keuangan daerah OPD yang menerapkan anggaran berbasis 100% 63.473 Kinerja (ABK) Pencairan dana on schedule Laporan keuangan OPD sesuai Standar 100% 100.000 Akuntansi Pemerintah (SAP)	WTP 100% 100% 100%	100.00	78,373,929,333		287,061,910,085	21.62	61,461,073,692	21.62	21.41			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA-PPAS Induk		100.00	166,787,950		174,999,767	10.20	0	10.20	0.00			
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan-KUA; dokumen Perubahan-PPAS		100.00	129,588,825		175,000,000	9.60	0	9.60	0.00			
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersedianya RKA yang valid dan sesuai setelah di verifikasi		100.00	84,737,200		99,802,700	16.75	16,717,500	16.75	16.75			
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya RKA perubahan yang valid dan sesuai setelah di verifikasi		100.00	24,000,000		73,839,985	0.00	0	0.00	0.00			
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersedianya DPA yang valid dan sesuai setelah di verifikasi		100.00	27,723,600		99,924,000	5.00	0	5.00	0.00			
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya DPPA yang valid dan sesuai setelah di verifikasi		100.00	19,736,200		73,906,007	0.00	0	0.00	0.00	BPKAD		
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 Tersusunnya Raperda Pra, Pasca dan Perda		100.00	414,291,058		599,907,000	0.00	0	0.00	0.00			
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup penjabaran APBD TA. 2022 Tersusunnya Raperda Pra, Pasca dan Perda		100.00	507,385,025		500,000,114	20.00	36,983,100	20.00	7.40			
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Sistem Penganggaran Elektronik (1 aplikasi); leaflet (2.000 lbr); standing banner (4 bh); buku profil APBD Induk dan Perubahan 2021; buku saku APBD Induk dan Perubahan 2021. @ (1.00 buku); dokumen ASB		100.00	473,099,626		449,999,850	25.00	16,892,300	25.00	3.75			
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah													
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penerbitan SP2D : Gaji, UP, GU, TU, LS, Nihil, SKPP (7 dokumen); dokumen Kajian Investasi Daerah (1 dokumen)		100.00	669,560,652		599,999,809	10.00	18,241,580	10.00	3.04			
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						129,999,943	20.00	25,575,855	20.00	19.67	BPKAD		
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan : (DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, NTPN, Dana Kelurahan)		100.00	114,697,202		119,999,812	30.00	0	30.00	0.00			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					IV				I					
					K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
5.02.02.2.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perbup sistem dan proseduur pelaksanaan APBD; Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah		100.00	103,196,353								
5.02.02.2.03		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>												
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						149,999,618	15.00	4,945,000	15.00	3.30		
5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-IO dan Beban						149,714,347	0.00	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan realisasi APBD Kab. Muba (12 laporan); laporan realisasi APBD semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kab. Muba (2 laporan)		100.00	251,124,286		359,999,518	25.00	10,699,000	25.00	2.97		
5.02.02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Muba		100.00	128,655,613		299,999,583	90.00	187,968,472	90.00	62.66		
5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020; Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2020		100.00	363,157,875		369,999,600	30.00	45,055,581	30.00	12.18	BPKAD	
5.02.02.2.03.07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						99,999,846	6.32	6,322,800	6.32	6.32		
5.02.02.2.03.09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi		100.00	182,429,019		199,999,763	0.00	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.03.10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						199,999,794	0.00	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						249,999,649	5.00	0	5.00	0.00		
5.02.02.2.03.12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						274,999,790	10.00	9,267,095	10.00	3.37		
5.02.02.2.04		<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>												
5.02.02.2.04.03		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pembayaran bunga utang pinjaman kepada BUMN (PT.SMI)		100.00	15,843,408,598		10,040,682,467	36.00	3,552,099,425	36.00	35.38	BPKAD	
5.02.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	ADD; ADDK; Pengembalian Biaya Lelang Lebak Lebung		100.00	57,390,615,996		268,389,137,700	21.38	57,390,615,996	21.38	21.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPKAD	
5.02.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja tidak terduga		100.00	1,018,853,800		2,500,000,000	0.00	0	0.00	0.00	BPKAD	
5.02.02.2.05		<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>												
5.02.02.2.05.02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan program aplikasi database Simda Keuangan Perangkat Daerah		100.00	460,880,455		429,999,917	31.59	135,840,088	31.59	31.59	BPKAD	
5.02.02.2.05.03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						249,999,506	5.00	3,849,900	5.00	1.54		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											21.62	21.41		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
112	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data aset yang akurat	100,00%	100.00	1,771,014,356		2,237,687,000	14.31	287,889,872	14.31	12.87				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah														
	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						199,737,000	0.00	0	0.00	0.00				
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penetapan status BMD, reklasifikasi aset, pengalihan status penggunaan BMD (3 laporan); pengembangan aplikasi BMD (2 aplikasi)		100.00	191,609,684		249,610,000	6.05	15,099,400	6.05	6.05				
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi aset gedung / bangunan Pemkab Muba (300 unit); inventarisasi aset tanah Pemkab Muba (150 persil)		100.00	140,959,200		155,339,000	0.00	0	0.00	0.00				
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penarikan kendaraan dinas dari mantan pejabat/DPRD; pengukuran dan persertifikat tanah Pemda (300 sertifikat); penyimpanan BPKB kendaraan Pemda (10 BPKB)		100.00	637,189,920		701,107,000	3.66	25,658,040	3.66	3.66				
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian untuk pencatatan BMD, pemanfaatan BMD, pemindatanganan BMD dan ganti rugi BMD		100.00	130,535,100		146,520,000	4.83	7,069,800	4.83	4.83		BPKAD		
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						92,170,000	35.00	0	35.00	0.00				
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Hibah barang masuk dan keluar BMD (3 dokumen); P3D ke Pemprov Sumsel (1 dokumen); pemanfaatan BMD; pemusnahan BMD;		100.00	325,244,400		316,000,000	11.71	36,996,500	11.71	11.71				
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan BMD (6 dokumen); Penyusunan kertas kerja rekonsiliasi barang milik daerah (2 laporan); penyusunan laporan realisasi rincian belanja modal (12 laporan)		100.00	59,972,600		83,268,000	5.00	4,100,000	5.00	4.92				
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan laporan BMD tahunan unaudited, laporan BMD tahunan audited, laporan BMD penyusunan unaudited, laporan penyusunan BMD audited, laporan BMD semesteran dan laporan BMD penyusutan semesteran		100.00	285,503,452		293,936,000	67.69	198,966,132	67.69	67.69				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												14.31	12.87			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
113	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	7,87%	100.00	3,865,252,873		5,521,440,180	7.13	373,502,999	7.13	6.76				
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Koordinasi/ rekonsiliasi, penerimaan pendapatan dana bagi hasil		100.00	120,542,400		349,944,000	8.00	24,865,200	8.00	7.11				

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perbup pajak daerah (2 perbup); perda pajak daerah (2 perda); PKS pajak daerah (3 PKS); aplikasi e-potensi pajak daerah (1 aplikasi)		100.00	222,990,706		249,983,420	14.00	34,983,699	14.00	13.99	BP2RD			
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi pajak daerah (3 kecamatan); Gebyar Pajak Daerah (1 kali)		100.00	457,257,840		599,999,760	6.00	35,680,000	6.00	5.95				
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data OP/WP (2.000 OP/WP); surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang terdistribusi ke wajib pajak (9 jenis WP); tervalidasinya data SPPT PBB (40.000 OP/WP)		100.00	550,294,746		822,838,000	9.00	69,566,600	9.00	8.45				
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengembangan aplikasi SIMPATDA; pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak daerah, E-BPHTB, host to host dan jaringan server yang baik		100.00	152,721,026		206,796,000	6.00	10,965,800	6.00	5.30				
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tercetaknya SPPT; terlayannya wajib pajak PBB dengan baik (10.000 WP)		100.00	106,358,034		160,472,000	0.00	0	0.00	0.00				
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang terdistribusi ke wajib pajak (3.000 SKPD/SKPKDB); terdistribusinya SPPT PBB P2 ke wajib pajak (250.000 SPPT PBB W2)		100.00	650,717,929		848,793,000	7.00	55,440,000	7.00	6.53				
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah yang baik (9 jenis pajak daerah); terlayani dengan baik wajib pajak PBB dan BPHTB (10.000 WP)		100.00	290,872,660		382,693,000	9.00	32,251,000	9.00	8.43				
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan realisasi pendapatan daerah yang akuntabel, transparan dan terukur		100.00	29,996,500		599,969,000	6.00	35,255,500	6.00	5.88				
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah ketetapan PBB tertagih, jumlah ketetapan BPHTB tertagih; terselenggaranya kegiatan penagihan pajak daerah Dalam Kab. Muba		100.00	508,016,074		749,961,000	9.00	64,154,100	9.00	8.55				
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan evaluasi pendapatan yang akurat dan akuntabel (4 laporan); terbitnya Surat Keputusan Penghapusan dan Laporan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB (1 dokumen); tercapainya target penertiban pajak daerah; pengawasan pajak daerah yang		100.00	775,484,958		549,991,000	2.00	10,341,100	2.00	1.88				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											7.13	6.76				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
			Penempatan ASN sesuai dengan standar jabatan	96,00%												
			JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	65,00%												

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Target RPJMD pada Tahun 2022	IV		I		K		Rp			
				K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
114	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,32%	100.00	6,121,606,246	K	6,087,448,000	21.66	866,626,157	21.66	14.24		
			Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	0,68%										
			Survey Kepuasan ASN	86,75%										
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersedianya formasi penerimaan (CPNS dan PPPK di lingkungan Pemkab. Muba		100.00	642,562,143		949,993,000	14.35	0	14.35	0.00		
	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pengambilan sumpah terhadap PNS		100.00	58,394,000		200,045,000	6.55	7,040,000	6.55	3.52		
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Proses persetujuan teknis dalam penerbitan SK pensiun / pemberhentian PNS tepat waktu		100.00	42,614,140		49,983,000	3.15	0	3.15	0.00		
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi klaim jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PNS; koordinasi kegiatan kelembagaan profesi ASN		100.00	50,495,398		75,002,000	2.20	0	2.20	0.00		BKPSDM
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertatanya arsip pegawai baik hardcopy maupun elektronik, update data untuk PNS di Pemkab Muba		100.00	217,081,135		120,031,000	3.75	0	3.75	0.00		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN												
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN						250,050,000	10.00	13,179,600	10.00	5.27		
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS		100.00	144,363,345		250,506,000	34.00	81,734,492	34.00	32.63		BKPSDM
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pelantikan pejabat struktural dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional (3 kali); Rapat/Sidang Baperjakat (6 kali)		100.00	137,814,088		275,327,000	20.00	11,177,500	20.00	4.06		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN												
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Seleksi jabatan tinggi Pratama (OPD); seleksi uji kompetensi/job fit bagi pejabat yang telah menduduki jabatan (2022)		100.00	494,607,162								
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS tugas belajar dan ikatan dinas		100.00	1,633,345,890		2,250,000,000	32.57	715,496,200	32.57	31.80		
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	ASN yang mempunyai kompetensi bahasa asing dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (70 orang) ternewhina persuarata		100.00	2,196,836,000		950,000,000	8.23	7,821,100	8.23	0.82		BKPSDM
	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						165,123,000	7.00	11,356,000	7.00	6.88		
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengadaan aplikasi e-kinerja dan pengembangan aplikasi e-absen (2 aplikasi); laporan penilaian kinerja PNS		100.00	243,420,987		166,742,000	5.54	8,586,465	5.54	5.15		
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya		100.00	29,958,200		67,624,000	20.00	0	20.00	0.00		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terkelolanya kasus-kasus pelanggaran disiplin dan penetapan hukuman disiplin PNS	100.00	100,734,300		116,217,000	24.56	1,695,000	24.56	1.46	BKPSDM				
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terkelolanya kasus perceraian PNS dan penetapan keputusan izin perceraian	100.00	32,261,058		80,296,000	25.00	8,539,800	25.00	10.64					
	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya laporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN	100.00	97,118,400		120,509,000	85.00	0	85.00	0.00					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											21.66	14.24				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
115	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil inovasi yang diimplementasikan Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	90.00% 90.00%	100.00	2,363,725,390	1,113,037,145	6.02	37,935,700	6.02	3.41					
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan														
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Fasilitasi Dewan Riset Daerah; fasilitasi Indikasi Geografis (IG) Gambir Gindesug; pilot project budidaya ikan dan pembuatan nako		100.00	454,728,020	343,156,000	0.00	0	0.00	0.00	Bappeda				
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan														
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kerjasama pemasaran karet lateks perkebunan; pelatihan dan intercropping gambir sebagai tanaman sela pada kebun karet dengan nola		100.00	192,155,120	99,549,520	0.00	0	0.00	0.00	Dinas Perkebunan				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi														
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perancangan rumah; pemasangan Litbang dgn Institusi/lembaga lain (3 lembaga); fasilitasi pembangunan jaringan gas bumi utk rumah		100.00	1,716,842,250	670,331,625	10.00	37,935,700	10.00	5.66	Bappeda				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											6.02	3.41				
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
116	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perangkat daerah yang memperoleh nilai LKJIP minimal B Skor Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di Perangkat Daerah Skor survey indeks persepsi anti korupsi (IPAK) Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti PD yang telah menerapkan SPIP	90,00% BB 4 80,00% 90,00%	100.00	4,931,895,382	5,515,817,870	20.60	1,114,025,158	20.60	20.20					
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal														
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan hasil pemeriksaan UPD; pengawasan dan pembinaan PNS terpadu; evaluasi SAKIP; evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG); evaluasi		100.00	1,497,747,384	1,632,599,830	15.80	257,905,870	15.80	15.80					

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan hasil : pemeriksaan sekoian negeri dan swasta; pengawasan terhadap optimalisasi PAD;		100.00	798,142,960		998,820,090	21.91	218,883,770	21.91	21.91	Inspektorat			
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan hasil reviu LKPJ		100.00	97,972,500		99,999,780	6.16	6,157,500	6.16	6.16				
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan hasil reviu LKPD		100.00	98,165,100		99,999,910	100.00	77,505,910	100.00	77.51				
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa		100.00	999,941,000		1,000,000,110	21.91	219,133,600	21.91	21.91				
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan hasil : evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal; evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal		100.00	399,248,966		399,999,970	47.15	188,597,650	47.15	47.15				
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara / daerah		100.00	99,743,200		149,999,940	5.65	8,476,620	5.65	5.65	Inspektorat			
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan hasil : pemeriksaan khusus; penanganan pengaduan masyarakat		100.00	940,934,272		1,134,398,240	12.11	137,364,238	12.11	12.11				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												20.60	20.20			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
117	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistansi	Kapabilitas APIP Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yg bersertifikasi	3 98,00%	100.00	2,011,597,516		2,059,400,882	13.69	281,856,230	13.69	13.69				
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											Inspektorat			
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan dokumen PKPT berbasis resiko dan SOP		100.00	99,503,900		99,999,820	17.55	17,550,000	17.55	17.55				
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Sistem informasi pengawasan yang andal		100.00	199,374,000		200,450,000	0.00	0	0.00	0.00				
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistansi														
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan hasil : pengawasan reformasi birokrasi; penilaian zona integritas; evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah		100.00	435,623,064		513,949,870	15.10	77,612,530	15.10	15.10				
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan hasil : pengendalian gratifikasi; pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; koordinasi supervisi pencegahan korupsi; survei indeks persepsi anti korupsi (IPAK); evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan		100.00	695,877,921		649,999,640	18.37	119,427,500	18.37	18.37				
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan hasil : pengelola LHKASN; survei penilaian integritas; kapabilitas APIP; penilaian angka kredit		100.00	581,218,631		595,001,552	11.31	67,266,200	11.31	11.31				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												13.69	13.69			

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
																IV		I									
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH														
118	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan PATEN	100,00%	99.70	4,842,031,808	9,769,910,004	11.20	748,664,976	11.20	7.66																
			Fasilitasi batas wilayah/desa	100,00%																							
			Fasilitasi TORA	100,00%																							
			Fasilitasi kegiatan Kab di Kec	100,00%																							
			Kunjungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	100,00%																							
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																									
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27,000,000	10.00	0	10.00	0.00			Kec. Lawang Wetan														
7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah dan fasilitasi koordinasi kegiatan kabupaten	100.00	4,044,341,941	15 Kec	7,975,179,700	13.69	681,170,000	13.69	8.54		Kec dalam Kab. Muba														
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																									
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	97.58	797,689,867	14 Kec; 13 Kel	1,767,730,304	6.87	67,494,976	6.87	3.82		Kec dan Kel. dalam Kab. Muba														
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												11.20	7.66														
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH														
119	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana kelurahan	100,00%	96.51	3,774,089,417	4,170,943,651	0.00	0	0.00	0.00																
			Fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%																							
			7.01.032.01													Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
			7.01.032.01.03													Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kelurahan	100.00	256,113,495								
			7.01.032.02													Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
7.01.032.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	92.31	1,795,847,540	13 Kelurahan	2,123,481,891	0.00	0	0.00	0.00		Kel dalam Kab. Muba														
7.01.032.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100.00	1,722,128,382		2,047,461,760	0.00	0	0.00	0.00																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0.00	0.00														
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH														
120	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	100.00%	100.00	0	643,687,000	4.25	7,050,000	4.25	1.10																
			7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
			7.01.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			15 Kec	643,687,000.00	4.25	7,050,000.00	4.25	1.10		Kec. Dalam Kab. Muba												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												4.25	1.10														

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.
					K	Rp.					K	Rp.				
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
121	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	100.00%	100.00	0	486,047,000	2.36	0	2.36	0.00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					13 Kec	486,047,000	2.36	0.00	2.36	0.00	Kec. Dalam Kab. Muba			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												2.36	0.00			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
122	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	100.00%	100.00	0	624,826,000	4.68	15,000,000	4.68	2.40					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					285,946,000	2.54	2,250,000.00	2.54	0.79		Kec. Dalam Kab. Muba			
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					338,880,000	6.49	12,750,000	6.49	3.76					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												4.68	2.40			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
123	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	100.00%	100.00	203,299,400	849,740,840	26.47	26,323,600	26.47	3.10					
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					599,880,840	31.50	26,323,600	31.50	4.39					
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan kesadaran dan bela negara di kalangan masyarakat; Gugus tugas GNRM; pembinaan dan fasilitasi forum pembauran kebangsaan; pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan		100.00	203,299,400	199,908,000	14.00	0	14.00	0.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					49,952,000	0.00	0	0.00	0.00					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												26.47	3.10			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
124	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	75.00%	75.76	2,912,024,500	4,476,151,000	36.78	0	36.78	0.00					

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.		
										K	Rp.				
		Serta Budaya Politik	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	28 kali											
	8.01.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan</i>													
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bantuan hibah kepada KPU dan Partai Politik		73.96	2,739,640,000		3,413,630,000	40.00	0	40.00	0.00			
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol; sosialisasi peningkatan kesadaran politik dan demokrasi		100.00	92,751,000		712,541,000	36.00	0	36.00	0.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi; monitoring fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah		100.00	79,633,500		349,980,000	7.00	0	7.00	0.00			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											36.78	0.00			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
125	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ormas, LSM dan OKP yang lulus verifikasi	100.00%	100.00	68,184,400		325,274,000	33.00		4,926,200	33.00	1.51		
	8.01.04.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>													
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan dan verifikasi administrasi Ormas		100.00	68,184,400		325,274,000	33.00		4,926,200	33.00	1.51		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											33.00	1.51			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
126	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terselenggaranya fasilitasi FKUB dan P4GN	100.00%	100.00	240,539,800		488,385,000	9.00		17,037,900	9.00	3.49		
	8.01.05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>													
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas; pemetaan wilayah rawan peredaran gelap narkotika ; penyelesaian permasalahan di masyarakat dan pembiaian FKUB kecamatan		100.00	240,539,800		488,385,000	9.00		17,037,900	9.00	3.49		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											9.00	3.49			
PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
127	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Angka penurunan konflik sosial	85.00%	100.00	1,916,819,480		714,988,349	24.36		0	24.36	0.00		

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Di-Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	IV		K	Rp.	I		K	Rp.			K	Rp.
					K	Rp.			K	Rp.						
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial														
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah						124,999,532	37.50	0	37.50	0.00				
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sosialisasi bahaya radikalisme; pelatihan anggota SATLAK PUSKOMIN; fasilitasi kewaspadaan dini daerah; pendataan dan pengawasan orang asing		100.00	1,916,819,480		199,999,798	20.00	0	20.00	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						239,999,770	14.50	0	14.50	0.00				
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						149,989,249	35.00	0	35.00	0.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												24.36	0.00			
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Kesesuaian antara target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2021 tercermin pada **Tabel 2.84** berikut ini:

Tabel 2.84

Capaian Target Indikator Kinerja Umum Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3	4	133,33
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,35	99,24
		3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	3	2,82	94,00
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas	4.	Persentase Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya yang Terkoneksi Dalam Kondisi Mantap	79,28	72,29	91,18
		5.	Persentase KK yang Terlayani Air Bersih	92	87,51	95,12
		6.	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi (air Limbah) yang Layak	95	81,26	85,54
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	7.	Pertumbuhan Ekonomi	2,40-2,70	3,42	78,95
		8.	Indeks Desa Membangun	0,704	0,704	100
		9.	Indeks Gini	0,31	0,326	95,09
4	Menurunkan Angka Kemiskinan	10.	Angka Kemiskinan	14,25	15,84	88,84
		11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	3,99	111,28
		12.	Nilai Tukar Petani	100,10	113,15	113,08
5.	Meningkatnya indeks pembangunan manusia	13.	Indeks Pembangunan Manusia	70,99	68,1	98,03
6.	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	14.	Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi	93,97	91,48	97,35

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
			muda minimal ditingkat provinsi terhdap generasi muda yang dibina			
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,78	73,11	97,77
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16.	Indeks Pembangunan gender (IPG)	83,00	82,90	99,88
		17.	Persentase Kecamatan Layak anak	46,67	53,34	114,29
9.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Disabilitas	18.	Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	78,00	84,12	107,85

Sumber: LKJip Tahun 2021, diolah

Dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021, 15 Indikator menunjukkan capaian $\geq 91\%$. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan berjalan dengan sangat baik. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan penuh dari kepemimpinan Kepala Daerah beserta jajarannya, disamping itu dalam proses awal perencanaan sampai pada berakhirnya masa pelaksanaan tahun anggaran, program-program tersebut telah melalui serangkaian telaah, evaluasi dan koordinasi seluruh pihak sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing instansi. Hal itu perlu

dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik. Penyerapan keuangan Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Musi Banyuasin dari total anggaran sebesar Rp. 3,482 miliar sampai Triwulan I 2022 belum terdapat penyerapan (0%). Anggaran tersebut untuk membiayai 127 program yang terbagi dalam 2.982 kegiatan yang tersebar di 47 PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rincian realisasi fisik dan keuangan Belanja Langsung per Perangkat daerah Tahun 2022 sampai dengan bulan Mei dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.85
Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per Perangkat Daerah s.d Mei Tahun 2022

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			
		APBD (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI (Rp)	(%)	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	836,517,990,899.00	209,457,134,591.00	25.04	39.31
2	DINAS KESEHATAN	265,937,698,702.00	68,534,279,980.00	25.77	30.50
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	239,065,356,435.00	101,702,003,549.00	42.54	47.98
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN	22,586,144,752.00	10,276,050,644.00	45.50	45.50
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR	28,757,179,333.00	5,785,909,801.00	20.12	20.19
6	PUSKESMAS NGULAK	2,036,633,700.00	404,347,800.00	19.85	20.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			
		APBD (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI (Rp)	(%)	
7	PUSKESMAS BABAT TOMAN	2,051,916,000.00	353,017,629.00	17.20	17.20
8	PUSKESMAS ULAK PACEH	1,999,881,300.00	338,922,144.00	16.95	16.95
9	PUSKESMAS TANAH ABANG	738,956,400.00	179,889,367.00	24.34	25.00
10	PUSKESMAS LUBUK BINTIALO	617,318,100.00	110,551,980.00	17.91	17.90
11	PUSKESMAS BUKIT SELABU	481,899,564.00	81,852,005.00	16.99	25.00
12	PUSKESMAS CINTA KARYA	900,963,900.00	166,800,207.00	18.51	15.00
13	PUSKESMAS SUKA DAMAI	675,042,156.00	205,891,929.00	30.50	30.50
14	PUSKESMAS SIDO RAHAYU	677,271,000.00	196,670,343.00	29.04	29.04
15	PUSKESMAS TEBING BULANG	1,819,728,300.00	381,221,401.00	20.95	30.00
16	PUSKESMAS JIRAK	951,984,300.00	229,415,554.00	24.10	24.10
17	PUSKESMAS BALAI AGUNG	2,470,641,300.00	699,764,100.00	28.32	28.32
18	PUSKESMAS LUMPATAN	2,357,112,600.00	577,346,563.00	24.49	24.49
19	PUSKESMAS LAIS	2,091,010,200.00	453,252,222.00	21.68	35.00
20	PUSKESMAS GARDU HARAPAN	875,487,900.00	146,329,249.00	16.71	16.71
21	PUSKESMAS TELUK KIJING	945,962,700.00	192,765,951.00	20.38	21.00
22	PUSKESMAS TANJUNG KERANG	1,409,166,600.00	255,688,086.00	18.14	18.14
23	PUSKESMAS SUNGAI LILIN	2,947,935,600.00	696,229,821.00	23.62	24.00
24	PUSKESMAS SRI GUNUNG	863,150,400.00	192,409,643.00	22.29	20.00
25	PUSKESMAS KARYA MAJU	1,282,243,800.00	309,048,941.00	24.10	40.00
26	PUSKESMAS MEKAR JAYA	627,262,500.00	106,373,535.00	16.96	20.00
27	PUSKESMAS BAYUNG LENCIR	3,523,193,400.00	781,171,637.00	22.17	23.00
28	PUSKESMAS SUKA JAYA	1,053,321,300.00	217,766,212.00	20.67	35.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			
		APBD (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI (Rp)	(%)	
29	PUSKESMAS PENINGGALAN	1,212,098,380.00	259,456,051.00	21.41	22.00
30	PUSKESMAS SUMBER HARUM	721,057,500.00	216,928,549.00	30.08	35.00
31	PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR	702,943,500.00	163,039,904.00	23.19	23.19
32	PUSKESMAS BANDAR AGUNG	861,132,000.00	197,425,897.00	22.93	22.93
33	PUSKESMAS KARANG MUKTI	1,337,595,600.00	214,406,745.00	16.03	16.03
34	PUSKESMAS AIR BALUI	347,284,000.00	108,663,218.00	17.72	17.72
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	321,508,268,417.00	10,697,900,053.00	3.33	4.06
36	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	210,141,465,757.00	3,037,751,388.00	1.45	2.85
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15,000,263,940.00	1,746,862,390.00	11.65	41.60
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34,494,523,850.00	8,034,776,786.00	23.29	36.92
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16,178,346,933.00	3,609,808,150.00	22.31	29.53
40	DINAS SOSIAL	30,319,306,699.00	3,403,014,886.00	11.22	16.66
41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19,779,066,026.00	2,855,100,169.00	14.43	26.81
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,382,288,141.00	2,147,451,172.00	20.68	36.73
43	DINAS KETAHANAN PANGAN	19,930,799,563.00	1,857,932,340.00	9.32	18.52
44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52,177,285,861.00	12,154,009,691.00	23.29	28.44
45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18,553,857,657.00	3,696,677,899.00	19.92	38.53
46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27,613,275,055.00	3,120,027,074.00	11.30	15.73
47	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	23,147,090,695.00	5,402,921,495.00	23.34	37.41
48	DINAS PERHUBUNGAN	25,589,477,806.00	3,796,031,503.00	14.83	21.59
49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27,125,438,424.00	3,064,805,935.00	11.30	33.39
50	DINAS KOPERASI, USAHAN KECIL DAN MENENGAH	16,416,941,885.00	1,196,896,311.00	7.29	10.84

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			
		APBD (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI (Rp)	(%)	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18,631,506,639.00	3,893,663,272.00	20.90	34.71
52	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA	56,710,815,126.00	9,378,649,909.00	16.54	22.15
53	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	13,143,122,364.00	2,095,918,728.00	15.95	26.58
54	DINAS PERIKANAN	21,095,556,926.00	2,434,316,320.00	11.54	22.88
55	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	49,505,318,709.00	11,651,119,942.00	23.54	29.59
56	DINAS PERKEBUNAN	28,171,925,880.00	3,061,853,592.00	10.87	20.44
57	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	30,271,671,738.00	5,051,907,762.00	16.69	26.43
58	SEKRETARIAT DAERAH	131,837,059,596.00	28,468,105,410.00	21.59	26.13
59	SEKRETARIAT DPRD	103,957,974,049.00	29,334,707,441.00	28.22	36.42
60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31,166,842,296.00	5,202,420,730.00	16.69	33.22
61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	524,906,903,772.00	202,663,733,781.00	38.61	39.46
62	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	38,334,271,929.00	6,417,226,609.00	16.74	36.56
63	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	17,648,375,978.00	3,621,931,821.00	20.52	33.51
64	INSPEKTORAT	28,860,877,013.00	7,154,269,551.00	24.79	34.47
65	KECAMATAN SEKAYU	10,534,831,969.00	2,919,307,444.00	27.71	40.18
66	KECAMATAN LAIS	5,755,542,089.00	1,399,218,825.00	24.31	30.91
67	KECAMATAN BABAT TOMAN	5,510,206,437.00	1,324,588,664.00	24.04	31.05
68	KECAMATAN KELUANG	5,000,067,139.00	1,305,557,374.00	26.11	36.49
69	KECAMATAN SANGA DESA	5,895,651,296.00	1,356,004,556.00	23.00	35.87
70	KECAMATAN PLAKAT TINGGI	3,847,007,199.00	958,637,363.00	24.92	40.22
71	KECAMATAN BATANGHARI LEKO	3,666,066,083.00	1,194,886,094.00	32.59	39.47
72	KECAMATAN SUNGAI KERUH	3,926,606,186.00	750,301,977.00	19.11	33.61

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG			
		APBD (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI (Rp)	(%)	
73	KECAMATAN SUNGAI LILIN	5,419,864,686.00	1,346,751,164.00	24.85	35.61
74	KECAMATAN BAYUNG LENCIR	6,805,100,443.00	1,550,460,871.00	22.78	37.59
75	KECAMATAN LALAN	4,961,599,088.00	948,407,167.00	19.11	30.42
76	KECAMATAN TUNGKAL JAYA	4,319,922,290.00	1,035,206,063.00	23.96	32.44
77	KECAMATAN LAWANG WETAN	4,706,026,518.00	1,257,551,207.00	26.72	37.88
78	KECAMATAN BABAT SUPAT	3,681,033,778.00	619,878,868.00	16.84	21.22
79	KECAMATAN JIRAK JAYA	3,444,669,905.00	930,540,677.00	27.01	33.17
80	KELURAHAN SERASAN JAYA	697,999,703.00	24,998,192.00	3.58	3.58
81	KELURAHAN SOAK BARU	697,983,916.00	15,900,007.00	2.28	5.73
82	KELURAHAN BALAI AGUNG	697,999,756.00	25,327,915.00	3.63	3.63
83	KELURAHAN KAYUARA	697,999,770.00	21,232,710.00	3.04	3.04
84	KELURAHAN BABAT	697,788,003.00	10,178,000.00	1.46	3.58
85	KELURAHAN MANGUN JAYA	697,817,173.00	4,752,000.00	0.68	3.22
86	KELURAHAN KELUANG	697,994,917.00	0	0.00	0.00
87	KELURAHAN NGULAK I	697,965,460.00	0	0.00	6.21
88	KELURAHAN NGULAK	697,964,729.00	0	0.00	3.75
89	KELURAHAN SUNGAI LILIN	697,947,183.00	3,121,660.00	0.45	2.87
90	KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA	697,958,000.00	4,089,032.00	0.59	2.29
91	KELURAHAN BAYUNG LENCIR	697,996,569.00	0	0.00	0.00
92	KELURAHAN BAYUNG LENCIR INDAH	697,996,569.00	735,500.00	0.11	2.95
TOTAL.....		3,480,858,056,699.00	813.393.567.336	23.34	30.55

Sumber: SIPP Mubakab.go.id, diolah

Dalam upaya penanganan Covid-19, total alokasi penggunaan APBD tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 95.850.256.583,- yang terdiri dari:

- a. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 43.010.270.644,- realisasi sebesar Rp33.783.159.867,- (78,5%)
- b. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 11.369.375.665,- realisasi Rp. 10.208.887.624,- (89,8%)
- c. Penyediaan Social Safety Net sebesar Rp. 9.654.586.000,- realisasi Rp. 7.457.401.720,- (77,2%).

Adapun kegiatan penanganan Covid 19 terdiri dari sebagai berikut.

1. Kesehatan

- a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Pengadaan Obat;
- c. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
- e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);

- h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Insentif Tenaga Kesehatan);
 - i. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi ;
 - j. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi
2. Dampak Ekonomi
- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (gabungan kegiatan KWT dan penyebarluasan)
 - b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - d. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Teknologi
3. Social Safety Net
- a. Padat Karya
 - b. Asuransi Kematian
 - c. Pemberian beras
 - d. Pemberian sembako melalui e-warung

1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan yang ditemui oleh Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan urusan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Tetapi hal itu saling terkait satu dengan lain, sehingga penyelesaian dari setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan perangkat daerah yang lain dalam rangka mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi kelanjutan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena beberapa permasalahan hanya bisa diselesaikan oleh perangkat daerah yang lain, bukan pelaksana kegiatan, sehingga sangat diperlukan sinergitas dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikut beberapa masalah yang bisa diidentifikasi antara lain :

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat *mandatory*. Adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan capaian dari target tersebut (*gap expectation*) itulah yang disebut permasalahan pembangunan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan

kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki telah berupaya melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan dengan sebaik-baiknya, namun pada sisi lain pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang akan mempengaruhi pembangunan daerah. Mengamati dan mencermati kondisi terkini dan peluang ke depan dapat diidentifikasi permasalahan daerah. meliputi:

Ada 5 (lima) isu strategis yang diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu:

1. Penurunan ketimpangan antar wilayah;
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
5. Pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, Ada 10 (sepuluh) isu strategis yang diangkat, yaitu :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan;

2. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi;
3. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan produktivitas pertanian dan Nilai Tukar Petani;
5. Pengembangan energi baru dan terbarukan;
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi;
8. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar;
9. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan;
10. Pengembangan sosial budaya dan olahraga.

Berdasarkan isu strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dan capaian kinerja pembangunan, dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
- 2) Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 4) Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian ;
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan ;
- 6) Pemulihan pasca Pandemi Covid-19

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok

kebijakan RPJPD Tahap Keempat dan isu strategis serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Rancangan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

TUJUAN PEMBANGUNAN

1) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Angka Kemiskinan
- Indeks Gini
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Pertumbuhan Ekonomi
- Indeks Pelayanan Infrastruktur

2) Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia

3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN PEMBANGUNAN

(1) Meningkatkan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Pengeluaran per kapita

(2) Menyediakan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

(3) Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

(4) Meningkatkan Produktivitas Sektor Usaha, Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

- Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

- Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

(5) Meningkatkan Kesejahteraan Para Petani

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Nilai Tukar Petani

(6) Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih

- Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak

- Persentase Kawasan Kumuh Tertangani

(7) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(8) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

(9) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Usia Harapan Hidup (UHH)

(10) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

- Opini BPK RI Terhadap LKPD

(11) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dari 3 (tiga) Tujuan dan 11 (sebelas) Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan dan 19 (sembilan belas) Indikator Sasaran yang harus dicapai setiap tahunnya. Beberapa target indikator tujuan yang harus dicapai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25
2	Angka Kemiskinan	15,05
3	Indeks Gini	0,306
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,17
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8
6	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C
8	PDRB Per Kapita ^{*)}	132,16 ^{**)}

Sumber : RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

**) Tambahan Indikator Makro sesuai PP Nomor 13 tahun 2019*

***))Berdasarkan hasil proyeksi sementara, Analisis Indikator Makroekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2021*

Tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden/Wakil Presiden RI Terpilih. Berdasarkan sasaran pokok RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu : *“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”*. Adapun Tema RPJMN 2020-2024 adalah : *“Indonesia*

Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” dengan 12 (dua belas) Arah Kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah :
 - 1.1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
 - 1.2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
- (2) Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah :
 - 2.1. Peningkatan konektivitas antar-wilayah;
 - 2.2. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN).
- (3) Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah :
 - 3.1. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan, dan SDM Aparatur);
 - 3.2. Percepatan pemenuhan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal;
 - 3.3. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah;
 - 3.4. Peningkatan kemudahan perizinan;
 - 3.5. Pengembangan kerja sama antar daerah, kolaborasi multi pihak, serta meningkatkan kualitas SDM;
 - 3.6. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
- (4) Pengelolaan urbanisasi;

4.1 Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.

(5) Pemanfaatan ruang;

5.1 Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Selanjutnya, menyelaraskan dengan Arah Kebijakan yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan 16 (enam belas) Indikator Sasaran dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 -2023, yaitu sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Maju Ekonomi Kerakyatan
 - 1.1. Pertumbuhan ekonomi;
 - 1.2. Pengeluaran per kapita;
 - 1.3. PDRB per kapita;
 - 1.4. Rasio Gini;
 - 1.5. Inflasi.

2. **Sasaran 2** : Maju Investasi, Industri dan Perdagangan
 - 2.1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
 - 2.2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan;
 - 2.3. Realisasi PMA;

- 2.4. Realisasi PMDN;
- 2.5. Neraca Perdagangan.
3. **Sasaran 3** : Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan
 - 3.1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;
 - 3.2. Nilai Tukar Petani;
 - 3.3. Nilai Tukar Nelayan;
 - 3.4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).
4. **Sasaran 4** : Maju Kesejahteraan Masyarakat
 - 4.1. Angka Kemiskinan;
 - 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.
5. **Sasaran 5** : Maju Akses Energi
 - 5.1. Rasio Desa Berlistrik.
6. **Sasaran 6** : Maju Kesehatan Masyarakat
 - 6.1. Angka Usia Harapan Hidup.
7. **Sasaran 7** : Maju Akses Pendidikan Berkualitas
 - 7.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah;
 - 7.2. Angka Harapan Lama Sekolah.
8. **Sasaran 8** : Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak
 - 8.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

- 8.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 8.3. Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak.
- 9. **Sasaran 9** : Maju Pelayanan Publik Berkualitas
 - 9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - 9.2. Indeks Inovasi Daerah.
- 10. **Sasaran 10**: Maju Pembangunan yang Transparansi dan Akuntabel
 - 10.1. Nilai SAKIP
 - 10.2. Opini BPK.
- 11. **Sasaran 11** : Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas
 - 11.1. Indeks Persepsi Korupsi.
- 12. **Sasaran 12** : Maju Kualitas Lingkungan Hidup
 - 12.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- 13. **Sasaran 13** : Maju Infrastruktur dan Konektivitas
 - 13.1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak;
 - 13.2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak;
 - 13.3. Persentase kondisi jalan mantap;
 - 13.4. Persentase akses internet.

14. **Sasaran 14** : Maju Stabilitas Keamanan,
Ketertiban dan Kehidupan Beragama

14.1 Persentase penurunan konflik sosial.

15. **Sasaran 15** : Maju Seni, Budaya dan Pariwisata

15.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara;

15.2. Jumlah Wisatawan Nusantara;

15.3. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda
(WBTB) yang ditetapkan.

16. **Sasaran 16** : Maju Pemuda dan Olahraga

16.1. Peringkat Sumsel pada PON 2020;

16.2. Jumlah Pemuda Berprestasi.

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tema/fokus pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam RKPD. Adapun Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2023 adalah :
“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”.

Untuk mendukung Tema Pembangunan Tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan **4 (empat) Prioritas Daerah** sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

PRIORITAS DAERAH 1 :

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian*)	Target Capaian Indikator Sasaran	
			2021	2022	2023
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp/kapita	10.140	10.371	10.602
2	Nilai Tukar Petani	%	NA	91,00	93,00
3	Angka Kemiskinan	%	15,84	15,55	15,05
4	Indeks Gini	indeks	0,326	0,316	0,306

Sumber : RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

PRIORITAS DAERAH 2 :

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian*)	Target Capaian Indikator Sasaran	
			2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,42	3,50-4,00	3,75-4,25
2	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	%	4,21	4,21	3,38
3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	2,65	2,65	1,76
4	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	%	7,75	7,75	0,70
5	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	%	6,67	6,67	0,79

Sumber : RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

PRIORITAS DAERAH 3 :

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian*)	Target Capaian Indikator Sasaran	
			2021	2022	2023
1	Indeks Pelayanan Infrastruktur	Indeks	NA	80,15	85,44
2	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	72,29	65,04%	68,62%
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	%	87,51	90,60%	95,20%
4	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	%	81,26	84,80%	92,50%
5	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	%	NA	100%	78,97%
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,11	65,01%	65,51%

Sumber : RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

PRIORITAS DAERAH 4 :

MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian*)	Target Capaian Indikator Sasaran	
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68.1	68,64	69,17
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	C	C
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	3,99	3,9	3,8
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Indeks	69,18	69,18	69,71
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,05	90	91

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian*)	Target Capaian Indikator Sasaran	
			2021	2022	2023
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Indeks	2,82	2,97	3,1025
7	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,29	12,45	12,60
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,63	7,69	7,74
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,84	68,96	69,08
10	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks		B	BB
11	Opini BPK RI terhadap LKPD	Indeks	WTP	WTP	WTP

Sumber : RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Memperhatikan permasalahan, kondisi dan situasi yang akan dihadapi pada tahun rencana, serta mempertimbangkan hasil pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun sebelumnya, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masalah Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk

perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Selama periode 1976 sampai 1993, telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut Baswir, (1997: 23), Sumodiningrat, (1998: 90).

Secara sosio ekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama kurun waktu 15 tahun terakhir (tahun 2007-2021) tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35% dibandingkan

tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 15,84% pada tahun 2021 atau turun sebesar 17,76%.

Walaupun tingkat kemiskinan dapat terus ditekan, tetapi penurunannya sangat lambat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019-2021 tingkat kemiskinan hanya dapat diturunkan 0,57%. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk menurunkan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Upaya penurunan tingkat kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak ringan. Kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan harga bahan pokok sedangkan disisi lain merosotnya harga komoditas utama Kabupaten Musi Banyuasin seperti karet dan sawit, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya dari komoditas tersebut sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Disamping itu juga disebabkan meningkatnya garis kemiskinan dan tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Globalisasi dan Pasar Bebas

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran.

Musi Banyuasin memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang sudah, sedang dan belum dikembangkan sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Musi Banyuasin perlu meningkatkan penggalan potensi Sumber Daya Alam melalui pengembangan program penelitian dan pengembangan (Litbang) pada dinas-dinas terkait.

Era globalisasi yang mengandung arti kompetitif, potensi sumber daya alam dan sumber daya lokal yang melimpah perlu ditingkatkan dari memiliki keunggulan komparatif menjadi memiliki keunggulan kompetitif melalui pengembangan inovasi IPTEK, reformasi Teknologi Informasi untuk memenuhi standar-standar internasional, investasi dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Berlakunya perdagangan bebas, khususnya ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA) bukan tidak mungkin akan berdampak negatif terhadap industri pengolahan barang jadi terutama yang memproduksi barang-barang yang bersifat substitusi dengan barang-barang produksi China. Oleh karena itu selain mengupayakan peningkatan kualitas serta daya saingnya di pasar domestik maupun global juga harus diupayakan kebijakan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang lebih transparan, efektif dan efisien antara negara-negara anggota untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan bebas.

c. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian serta menetapkan kebijakan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menciptakan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat adalah asas desentralisasi yang dioperasionalkan dalam konsep otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi menuntut kemandirian di dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat mengiringi proses reformasi dan demokratisasi yang sedang tumbuh. Hal ini menuntut adanya perubahan sikap mental seluruh komponen masyarakat, utamanya dimulai dari sikap mental aparat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi aparat yakni sebagai penyelenggaraan pembangunan bertindak selaku manager dan fasilitator (fungsi pengaturan/regulator), senantiasa berupaya meningkatkan kinerja masyarakat menuju pada tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi tanpa menjadikan ketergantungan terhadap bantuan (fungsi pendorong/katalisator), sebagai pamong yang senantiasa berbaur dengan masyarakat sehingga permasalahan masyarakat dapat dipahami secara mendalam dan pemecahannya dapat cepat dan tepat (fungsi penyedia/fasilitator)

Sangat disadari bahwa belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dapat dirasakan masih belum adanya

persamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya mengakibatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara nyata sebagaimana diharapkan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan SDM masih memiliki ketergantungan terhadap pusat sehingga masih bersifat sentralistik dan dualistik. Semua ini menyebabkan timbulnya inefisiensi dan distorsi yang dalam banyak hal bersifat kontra produktif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

d. Masalah Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia nomer 4 Tahun 1982, Pasal 1 butir 1)

Perkembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai pengembangan diberbagai macam sektor antara lain sektor pertambangan, pertanian, ekonomi, sosial, dan jasa. Tentunya perkembangan suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah

lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Perkembangan suatu wilayah diharapkan turut berlandaskan aspek lingkungan sehingga aspek kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maupun secara regional tentunya akan menimbulkan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan, permukiman, industri dan eksploitasi pertambangan dan hasil hutan dalam waktu tidak terlalu lama akan mengganggu keseimbangan alam jika tidak ada penanganan secara proporsional. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu baik dalam lingkup lokal, regional, maupun lingkup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang multisektoral serta kompleks wilayah yang bervariasi.

Dengan kondisi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dan dilalui sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Dawas perlu suatu pengelolaan sistem air yang baik, karena dengan kondisi demikian dapat menyebabkan terjadinya banjir di wilayah tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS) melalui konsep *"one river-one plan-one management"* sehingga kawasan yang mempunyai fungsi konservasi untuk mencegah erosi yang berakibat pada proses pendangkalan sungai dapat terhindarkan.

Seringnya terjadi longsor pinggiran sungai yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana maupun daerah permukiman masyarakat harus segera diatasi dengan membangun bangunan pengaman pinggiran sungai. Luasnya wilayah hutan dan adanya hutan rawa gambut di Merang Kapahiyang dapat menjadi potensi terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan terutama di hutan rawa gambut maka perlu dijaganya suatu sistem tata air dengan menutup kembali parit-parit yang ada dan menghindari adanya penebangan liar.

Potensi migas dan batubara yang cukup melimpah di Kabupaten Musi Banyuasin selain sebagai suatu potensi sekaligus akan memberikan suatu permasalahan berkaitan dengan proses eksplorasi penambangan. Untuk itu diharapkan sebelum proses eksplorasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penambangan harus terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan sehingga dampak lingkungan yang lebih luas yang pada akhirnya akan memberikan dampak buru terhadap masyarakat dapat dihindari.

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam

yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

1. Isu Global/ Internasional

Implementasi MEA akan dimulai tanggal 31 Desember 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN.

Hal ini akan membuka peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi tidak saja oleh Pemerintah tetapi juga oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu meningkatkan kesiapan terutama mengedukasi masyarakat tentang peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk merebut pasar kerja lokal maupun pasar kerja regional.

Isu terakhir yang mengemuka yaitu masuknya tenaga kerja Tiongkok ke pasar kerja Indonesia. Efek ini jika tidak disikapi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil bahkan bersertifikat maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tinggi.

2) Sustainable Development Goals (SDGs)

Memberikan arah tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap

air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

- a. Penghapusan Kemiskinan
- b. Penghapusan Kelaparan
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
- d. Pendidikan Berkualitas
- e. Kesetaraan Gender
- f. Air Bersih dan Sanitasi
- g. Energi Bersih dan Terjangkau
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
- i. Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif
- j. Penurunan Kesenjangan
- k. Kota Inklusif Dan Berkelanjutan
- l. Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan
- m. Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana
- n. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut
- o. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
- p. Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh
- q. Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*".

3) Pergeseran Pusat Ekonomi Dunia dari Kawasan Eropa-Amerika ke Kawasan Asia Pasifik

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menyebabkan negara berkembang menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) negara berkembang diperkirakan akan mencapai 43,8% pada tahun 2019. Hal ini mengakibatkan aliran modal asing akan bergeser ke negara-negara Asia dan Amerika Latin. Dampak lain yang akan dihadapi adalah harga komoditas secara umum akan menurun sementara harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019.

2. Isu Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2017-2022. Kebijakan moratorium PNS memberikan tantangan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah untuk mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.
- b. Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum
Pemberantasan korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan

bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra- ordinary crime). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan.

Strategi dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

c. Melawan Terorisme dan Narkoba

Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945.

Selain terorisme, persoalan yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Derasnya arus transportasi antar negara dan antar wilayah menyebabkan mudahnya jaringan pengedar narkoba memasuki wilayah yang dianggapnya lemah dari pengawasan aparat. Dalam keterbatasan ekonomi masyarakat sering memilih jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu kelompok pengguna juga sudah merambah ke berbagai kalangan baik pelajar dan mahasiswa, kalangan artis, aparat yang bersentuhan langsung, pegawai dan pejabat pemerintahan dan sebagainya.

Terorisme dan narkoba merupakan musuh besar bangsa saat ini yang harus diantisipasi jika negara ini ingin kuat dan sejahtera. Terorisme mengganggu stabilitas bangsa dan ekonomi negara, sementara narkoba merusak masa depan generasi bangsa dan pemicu kejahatan lainnya.

d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Desa

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sasaran pembangunan nasional khususnya pembangunan ketahanan air, infrastruktur dan konektivitas terdapat sasaran pembangunan strategis nasional seperti: waduk dari 21 ke 49 waduk, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 9,136 juta hektar menjadi 10 juta hektar, rasio elektrifikasi 81,5 - 96,6, kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 ha - 0 ha, kekurangan tempat tinggal dari 7,6 juta - 5 juta, akses air minum layak dari 70% - 100% akses sanitasi layak dari 60,9% - 100%, kondisi mantap

jalan nasional 94% - 98%, pengembangan jalan nasional 38.570 km - 45.592 km, pengembangan jalan baru 1.202 km - 2.650 km, pengembangan jalan tol 807 km - 1.000 km, panjang jalur kereta api 5.434 km - 8.692 km, pengembangan pelabuhan 278 - 450, jumlah bandara 237 - 252, kabupaten/kota yang dijangkau broadband 82% - 100%, jumlah dermaga penyeberangan 210 - 275, pangsa pasar angkutan umum perkotaan 23%- 32%.

Kebijakan Pemerintah yang perlu disikapi antara lain percepatan pembangunan desa dan wilayah tertinggal, terpencil dan terluar. Paradigma baru membangun Indonesia dari pinggiran atau desa sangat rasional bila dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah penduduk miskin perdesaan. Kebijakan yang populis ini sudah mulai ditindaklanjuti sejak tahun 2015 dengan ditandai adanya alokasi dana desa hingga 10%. Dana tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang keduanya masuk dalam struktur APBD. Dapat dipastikan setiap desa akan menerima sekitar Rp. 500 - Rp. 1 milyar per tahun tergantung karakteristik desa masing-masing. Dana yang cukup besar tersebut harus tepat sasaran dan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan bukan menjadi persoalan baru.

e. Dampak Pandemi Covid-19

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami

ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19.

Permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global value chain*).

Berbagai kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, seperti stimulus pajak dan permodalan, restrukturisasi kredit, bahkan diskon dan pembebasan biaya listrik rumah tangga. Namun distribusi stimulus tersebut nyatanya belum tepat sasaran dan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Contohnya insentif pajak yang diberikan bagi dunia usaha. Penyerapan anggaran yang relative masih rendah juga disebabkan tidak semua kegiatan terpusat di Kemenkes, ada juga di Gugus Tugas Covid-19 (kini menjadi Satgas Covid-19) dan tersebar di beberapa tempat. Selain itu belum terkoordinasinya proses Melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan

realisasi stimulus oleh pemerintah dari anggaran negara dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tidak berada pada level negatif.

3. Isu Regional

- Penelaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penurunan angka kemiskinan
- b. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi
- c. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani
- e. Pengembangan energi baru dan terbarukan
- f. Pengembangan sumber daya manusia
- g. Optimalisasi reformasi birokrasi
- h. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar
- i. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan
- j. Pengembangan sosial budaya dan olahraga

4. Isu Daerah Perbatasan

- Penelaahan RPJMD Kabupaten Perbatasan

Agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya maka, perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Perbatasan lainnya.

Dari beberapa isu strategis Kabupaten perbatasan dapat disimpulkan isu- isu utama pada masing-masing daerah perbatasan yang menjadi perhatian dan bahan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin kedepan sebagai berikut:

1. Isu Kemiskinan
2. Isu Penyediaan Infrastruktur Dasar masyarakat
3. Isu Pendidikan dan Kesehatan
4. Isu Peningkatan Tatakelola Pemerintahan
5. Isu Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

5. Isu Pengembangan Kota

City branding diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian visi Kabupaten Musi Banyuasin. *City branding* merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan image sebuah kota atau daerah beserta isinya (budaya, obyek wisata, produk barang, layanan jasa, dan sebagainya) di dalam benak target pasar (investor, tourist, talent, event) kota dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi dan berbagai media lainnya, agar kota tersebut dikenal secara luas baik regional, nasional bahkan internasional. “Sekayu kota wisata olahraga yang ramah lingkungan” sebagai *city branding* Kota Sekayu merupakan trigger untuk peningkatan perekonomian kabupaten Musi Banyuasin Khususnya Kota Sekayu. Kota wisata olahraga ini dilatarbelakangi oleh kekayaan alam di Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa event wisata yang dilaksanakan di kabupaten musu banyuasin.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

“Arah Kebijakan Keuangan Daerah ditujukan untuk Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan dengan menjaga tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan”

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai di tahun 2023 berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan. Disamping itu juga menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Pembangunan ekonomi di tahun 2023 merupakan bagian fundamental dari proses yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. Kondisi ekonomi ke depan diperkirakan berangsur mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksikan mulai mengalami peningkatan dan lepas dari tekanan besar setelah sebelumnya terkena akibat dampak dari pandemi Covid-19. Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah dan kebijakan untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada RKPD Tahun 2023 ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2023 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2023.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat dampak Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Musi Banyuasin mampu tumbuh sebesar 3,42 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, dan sinergi yang baik antar pihak dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 3.1

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba-Provinsi-Nasional
Tahun 2017-2021 (%)**

	2017	2018	2019	2020	2021
Muba	3,02	3,23	4,57	-0,04	3,42
Provinsi	5,51	6,04	5,71	-0,11	3,58
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba MuBa dalam angka, 2022, diolah

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2017-2019, dan menurun pada tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat menjadi 3,42 persen. Hampir semua lapangan usaha (sektor) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin meskipun masih di bawah tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 53,67 persen (angka ini menurun dari 54,18 persen di tahun 2017). Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,69 persen (angka ini menurun dari 12,74 persen di tahun 2017) disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 10,69 persen (angka ini meningkat dari 9,19 persen di tahun 2017). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 7,85% (angka ini menurun dari 8,32 persen di tahun 2017) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,97 persen (angka ini meningkat dari 4,57 persen di tahun 2017).

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Musi Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedua sektor ini ditambah dengan sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya untuk ditingkatkan dimasa mendatang sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkat, disamping sektor-sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan

Tabel 3.2

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,74	11,70	11,19	12,00	11,69
B	Pertambangan dan Penggalian	54,18	54,87	55,36	52,43	53,67
C	Industri Pengolahan	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,32	8,02	7,79	8,09	7,85

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,29	0,30	0,31	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,16	0,18	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,25	0,26	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,94	1,88	1,95	1,84
L	Real Estate	1,88	1,98	2,06	2,22	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,35	3,13	3,43	3,32
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,83	1,96	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,33	0,34	0,39	0,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,58	0,63	0,60
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Musi Banyuasin tahun 2021, di antaranya adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalan sebesar 53,67%;
- 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,69%;
- 3) Industri Pengolahan sebesar 10,69%
- 4) Konstruksi sebesar 7,85%
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,97%

Tabel 3.3

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.137,78	7.119,72	7.371,60	7.911,97	8.493,84
B	Pertambangan dan Penggalian	30.352,65	33.392,11	36.682,99	34.574,36	38.989,39
C	Industri Pengolahan	5.150,33	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,41	28,14	28,39	33,15	36,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,12	11,44	12,14	13,26	13,79
F	Konstruksi	4.659,23	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560,76	2.846,87	3.175,05	3.318,61	3.613,09
H	Transportasi dan Pergudangan	155,77	178,24	200,56	201,61	201,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,93	99,91	119,31	122,68	131,37
J	Informasi dan Komunikasi	128,72	149,64	174,02	202,29	221,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,35	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.335,06
L	Real Estate	1.055,13	1.204,69	1.355,54	1.462,02	1.593,72
M,N	Jasa Perusahaan	20,96	23,98	27,52	28,55	28,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999,14	2.037,72	2.071,30	2.264,15	2.409,79
P	Jasa Pendidikan	1.067,77	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,45	199,92	225,73	259,73	283,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	301,55	336,52	379,21	418,28	432,58
Produk Domestik Regional Bruto		56.020,03	60.861,46	66.089,04	65.943,88	72.640,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/ Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebagai indikator penting, data PDRB dapat dilihat dari pendekatan sisi penyediaan (PDRB sektoral) dan PDRB sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah:

1. Dari sisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sub sektoral lapangan usaha. Tahun 2017 nilai PDRB sebesar Rp56.020,03 milyar meningkat menjadi Rp72.640,74 milyar pada tahun 2021. Begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 nilai PDRB sebesar Rp41.341,25 milyar meningkat menjadi Rp46.128,39 milyar
2. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Musi Banyuasin tahun 2021 ditunjang oleh lapangan usaha sektor sekunder yaitu sektor informasi dan komunikasi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 9,35% dari Rp125,74 milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp137,5 milyar pada tahun 2021, sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,75% dari

Rp1.388,14 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp1.495,77 milyar pada tahun 2021

3. Bila ditinjau dari *share* PDRB atas dasar harga berlaku Musi Banyuasin ditunjang oleh lapangan usaha sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2021 *share* sektor pertambangan dan penggalian sebesar 58,73% dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,69%.

Sektor tersier juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin pada tahun 2021, 3 sektor lapangan usaha tersier yang tertinggi di antaranya yaitu, 1) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 7,78% dari tahun sebelumnya, 2) Sektor *real estate* tumbuh sebesar 7,74%, 3) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 6,68%.

Tabel 3.4

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.596,46	5.632,86	5.721,21	5.862,32	6.109,33
B	Pertambangan dan Penggalian	24.944,13	25.588,54	26.823,40	26.379,81	27.093,26
C	Industri Pengolahan	2.845,44	3.169,24	3.435,11	3.478,64	3.570,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,94	10,37	10,89	12,31	13,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	6,27	6,51	6,96	6,99

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
F	Konstruksi	2.813,48	2.890,10	3.026,09	3.103,38	3.216,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.281,11	1.333,30	1.393,26	1.388,14	1.495,77
H	Transportasi dan Pergudangan	86,95	95,00	102,75	101,38	101,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,87	46,95	52,29	52,13	55,61
J	Informasi dan Komunikasi	88,71	98,76	110,14	125,74	137,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726,62	746,92	768,24	791,56	813,94
L	Real Estate	621,71	678,66	727,39	761,01	819,92
M,N	Jasa Perusahaan	12,72	13,63	14,80	14,87	14,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.195,25	1.235,87	1.248,12	1.299,99	1.380,82
P	Jasa Pendidikan	731,30	767,00	802,22	818,57	872,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,11	126,58	134,61	147,57	159,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	216,64	230,16	243,37	260,27	267,63
Produk Domestik Regional Bruto		41.341,25	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.128,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/ Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.

Tabel 3.5

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator	2017		2018		2019		2020		2021		2022	2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05-5,25	3,02	5,25-5,4	3,21	6,4-5,6	4,57	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	2,50-3,00	3,75-4,25
PDRB/kapita ADHB (Rp. Juta)	-	88,95	-	95,3	-	101,39	-	106,21	-	115,84	-	132,16
PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	-	65,64	-	6,82	-	68,74	-	71,84	-	73,56	-	-
Tingkat Kemiskinan (%)	17,21	16,75	15,60	16,52	14,20	16,41	15,20	16,13	14,25	15,84	13,20	15,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,20	5,20	5,01	4,91	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	4,24	3,8
IPM	66,96	66,96	70,60	67,57	69,88	67,83	68,17	67,69	69,47	68,10	70,77	69,17
Indeks Gini	0,25	0,27	0,25	0,33	0,25	0,31	0,34	0,32	0,31	0,326	0,316	0,306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, Muba dalam angka, 2022, diolah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2014 -

2018 tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan output di Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan nilai investasi yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2016 nilai ICOR berada pada posisi 15,58 dan pada tahun 2018 turun menjadi 11,43.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Banyuasin menurun sebanyak 0,8% dan artinya tingkat kesempatan kerja meningkat sebanyak 0,8%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk lebih rendah pada tahun 2019-2021 jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan serta wilayah kabupaten yang berbatasan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan

internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain:

1. Isu strategis pembangunan di luar Kabupaten Musi Banyuasin

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat berkontraksi pada tahun 2020. Namun Covid-19 masih tetap harus diwaspadai dimana perkembangan virusnya menjadi lebih kuat dan penyebarannya menjadi lebih cepat ditandai dengan munculnya varian delta dan omicron.

b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) neraca pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan

mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten;

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari US\$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%;

d. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha.

Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui;

e. Tuntutan Pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan

dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas;

f. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya

3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Musi Banyuasin mempunyai modal dasar pembangunan yaitu berupa sumber daya alam dan pertanian/perkebunan yang berlimpah, sumber daya manusia dan iklim investasi yang kondusif. Potensi energi di Musi Banyuasin yaitu batu bara mempunyai cadangan batu bara 3.491,71 juta ton, potensi minyak bumi mempunyai cadangan 299.129,60 MSTB, dan cadangan gas bumi mencapai 4.546,23 BSCF. Potensi pertanian/perkebunan di Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Produksi Komoditas Perkebunan
di Kabupaten Musi Banyuasin

Komoditas	2017		2018		2019		2020		2021	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)								
Karet	210.201	288.035	207.450	155.254	210.201	210.364	208.212	211.072	208.212	213.466
Kelapa Sawit	48.561	504.245	42.352	366.868	48.561	431.793	43.616	436.584	43.070	432.588
Kelapa	3.840	2.626	3.848	3.136	3.840	3.143	4.540	3.276	4.541	3.275,4
Gambir	210	270	220	272	210	270	137,13	9,54	137,13	9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba MuBa dalam angka, 2022, diolah

empat komoditas perkebunan terbesar yang ada di Musi Banyuasin adalah, karet, kelapa sawit, kelapa, dan gambir. Namun Penunjang terbesar ialah Karet dan Kelapa Sawit. Produksi Karet pada tahun 2021 sebesar 213.466 ton dengan luas lahan sebesar 208.212 Ha sedangkan total produksi kelapa sawit sebesar 432.588 ton dengan luas lahan 43.070 Ha. Komoditas lain yang menjadi andalan adalah kelapa

dan gambir dengan total produksi tahun 2021 untuk kelapa sebesar 3.275,4 ton dengan luas lahan 4.541 Ha sedangkan total produksi gambir sebesar 9,54 ton dengan luas lahan 137,13 Ha.

Namun umumnya komoditas kelapa sawit dan karet sebagian diekspor dalam bentuk barang setengah jadi, meskipun sudah ada pengolahan minyak goreng (kelapa sawit) atau bahan vulkanisir ban (karet) tetapi masih sebagian kecil dari total produksi.

Sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam berlimpah khususnya di sektor pertanian/perkebunan dan pertambangan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun yang perlu diperhatikan adalah komoditas pertanian rentan terpengaruh oleh harga komoditas dunia khususnya subsektor perkebunan sehingga nilainya akan sangat bergantung pada perkembangan perekonomian global. Berbeda jika ekspor dalam bentuk barang jadi yang harganya lebih stabil daripada dalam bentuk barang mentah ataupun setengah jadi yang rentan dengan aksi para spekulan. Musi Banyuasin mengeksport komoditas pertanian khususnya perkebunan dalam bentuk barang mentah dan produk setengah jadi, jika terjadi fluktuasi harga pasar di dunia yang dipengaruhi oleh perekonomian negara pengguna komoditas tersebut maka akan sangat mempengaruhi harga maupun jumlah beli dari komoditas tersebut yang akan berdampak negatif terhadap tingkat

pendapatan masyarakat Musi Banyuasin khususnya petani subsektor perkebunan.

Strategi dan arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dijabarkan di bawah ini;

- 1) Pemulihan kebijakan ekonomi melalui ketahanan UMKM
 - a. Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin;
 - b. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM.
- 2) Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing
 - a. Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian.
 - b. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan.
- 3) Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi
 - a. Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi).
 - b. Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan.
 - c. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar.
- 4) Pengembangan Pariwisata
 - a. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata.
 - b. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan.

- c. Mengembangkan wisata olahraga, religius, kuliner dan budaya.
 - d. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata.
- 5) Optimalisasi pengelolaan pertambangan
- a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang.
 - b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti :

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencakup seluruh kebutuhan;
- 3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
- 4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;

5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Desa (DAD), Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan sekitar 70% dari APBD utamanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 50% dari APBD. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan

proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari Rp3.941.909.794.940 pada tahun 2019, menurun menjadi Rp3.540.659.694.225 pada tahun 2020, dan menurun kembali menjadi Rp3.510.691.709.632 pada tahun 2021. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2019-2021 terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan yang negatif yaitu -5,51 persen.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 mencapai Rp286.594.847.515, naik menjadi Rp353.989.261.395 pada tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp377.346.398.574. Realisasi pendapatan transfer mencapai Rp3.366.601.427.302 pada tahun 2019, turun menjadi Rp2.909.333.422.093 pada tahun 2020, dan mengalami penurunan

kembali menjadi Rp2.804.111.596.486 pada tahun 2021. Untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 mencapai Rp288.713.520.123, turun menjadi Rp277.337.010.737 pada tahun 2020, dan kembali meningkat mencapai Rp329.233.714.572 pada tahun 2021. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2019-2021 untuk pendapatan asli daerah 15,06 persen, pendapatan transfer -8,60 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 7,39%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada pendapatan transfer dengan pos akun Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 29,57 persen dan pertumbuhan terendah terdapat pada Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar -15,04 persen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
4	PENDAPATAN	3.941.909.794.940	3.540.659.694.225	3.510.691.709.632	-5,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	286.594.847.515	353.989.261.395	377.346.398.574	15,06
4.1.1	Pajak Daerah	69.943.956.305	79.220.521.196	79.315.580.439	6,69
4.1.2	Retribusi Daerah	6.812.210.395	12.201.663.299	8.022.396.031	22,43
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.600.521.898	15.206.508.321	17.341.957.795	9,10
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	195.238.158.916	247.360.568.578	272.666.464.308	18,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.366.601.427.302	2.909.333.422.093	2.804.111.596.486	-8,60
4.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.405.793.795.815	1.908.963.956.440	1.851.636.079.750	-11,83
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.430.383.000	376.024.938.000	372.756.063.000	-3,13
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.109.018.487	331.728.204.653	292.571.213.639	-0,63
4.2.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	227.973.390.000	232.888.342.000	233.443.654.097	1,20
4.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	35.294.840.000	59.727.981.000	53.704.586.000	29,57
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	288.713.520.123	277.337.010.737	329.233.714.572	7,39
4.3.1	Pendapatan Hibah	89.360.190.356	132.725.329.580	107.950.732.347	14,93
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	172.871.938.767	99.704.327.227	111.916.782.665	-15,04
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	26.481.391.000	44.907.353.930	109.366.199.560	106,56

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2019-2021

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 April 2022 dibandingkan dengan target pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun s.d 30 April 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Berjalan (Rp)	Realisasi (%)
4	PENDAPATAN	3.728.908.554.012	687.245.168.822	18,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	387.921.077.000	103.720.758.086	26,74
4.1.1	Pajak Daerah	90.755.404.000	29.511.357.944	32,52
4.1.2	Retribusi Daerah	7.915.942.000	1.042.138.170	13,17
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.500.000.000	19.065.474.112	108,95
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	271.749.731.000	54.101.787.860	19,91
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.340.650.194.012	583.524.410.736	17,47
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.236.021.828.012	566.870.244.043	17,52
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.628.366.000	16.654.166.693	15,92
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	337.283.000	-	-
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	337.283.000		-

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan berkontribusi realisasinya terhadap pendapatan daerah selama periode tahun 2019 sampai tahun 2021 berasal dari dana bagi hasil dengan proporsi setiap

tahunnya sebesar 61,03 persen pada tahun 2019, 53,92 persen pada tahun 2020, dan 52,74 persen pada tahun 2021. Proporsi tersebut diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam setiap tahun anggaran lalu dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.9
Persentase Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
4	PENDAPATAN	100	100	100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,27	10,00	10,75
4.1.1	Pajak Daerah	1,77	2,24	2,26
4.1.2	Retribusi Daerah	0,17	0,34	0,23
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,37	0,43	0,49
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,95	6,99	7,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	85,41	82,17	79,87
4.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	61,03	53,92	52,74
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,08	10,62	10,62
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	7,61	9,37	8,33
4.2.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	5,78	6,58	6,65
4.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,90	1,69	1,53
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,32	7,83	9,38
4.3.1	Pendapatan Hibah	2,27	3,75	3,07
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4,39	2,82	3,19
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	0,67	1,27	3,12

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yang didapat dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dalam APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.10

**Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
4	PENDAPATAN	106,87	115,36	97,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92,66	106,97	102,24
4.1.1	Pajak Daerah	89,63	122,85	94,33
4.1.2	Retribusi Daerah	75,81	145,82	80,49
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	98,65	88,38	95,98
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94,10	102,70	106,11
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	108,66	116,53	96,14
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	107,14	116,14	95,67
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142,69	125,14	102,55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91,82	112,73	110,40
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	91,82	112,73	110,40

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Prognosis pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada beberapa regulasi, yaitu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022; (2) Prognosis pendapatan berdasarkan RPJPD 2005-2025; (3) Prognosis pendapatan pada RPD tahun 2023-2026; (4) serta

prognosis pendapatan berdasarkan hasil kajian. Pada penyusunan RKPD Tahun 2023 dasar prognosis pendapatan yang digunakan adalah Peraturan bupati RPD tahun pertama, selain itu juga memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun 2022, pendapatan daerah ditargetkan pada nilai Rp3.209.005.733.000, dengan komposisi sumber pendapatan Rp388.258.361.000 dari pendapatan asli daerah (PAD), Rp2.723.426.373.000 dari pendapatan transfer dan Rp97.320.999.000 dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2023 diperkirakan mencapai angka Rp2.790.518.902.000 turun sebesar 13,04 persen dari pendapatan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pendapatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Prognosis pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.790.518.902.000 yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp.373.551.175.000, pendapatan transfer Rp2.319.264.716.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp97.703.011.000. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Prognosis Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Prognosis Tahun 2022 (Rp)	Prognosis Tahun 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN	3.209.005.733.000	2.790.518.902.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	386.258.361.000	373.551.175.000
4.1.1	Pajak Daerah	90.755.404.000	83.420.404.000
4.1.2	Retribusi Daerah	7.915.942.000	7.525.360.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.500.000.000	19.000.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	272.087.015.000	263.605.411.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.725.426.373.000	2.319.264.716.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.610.921.007.000	2.190.641.697.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.505.366.000	128.623.019.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.320.999.000	97.703.011.000
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	97.320.999.000	97.703.011.000

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di

daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2019-2021. Penerimaan pajak pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp83,420 milyar. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2019-2021 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp7,525 miliar. Hal ini disebabkan makin efektif dan gencarnya upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sumber ini. Begitupun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp19 miliar pada tahun 2023. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp263,605 miliar pada tahun 2023.

Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp2,190 triliun pada tahun 2023. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp128,623 miliar. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk APBD telah memenuhi persyaratan minimal 10% Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yaitu sebesar Rp222,44 miliar.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2023 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 78,50 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih bergantung pada sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah

(jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD).

Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- *Review* Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;

- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;
- b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
 - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diupayakan pemungutan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara elektronifikasi.
 - Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2018-2021 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan realisasi belanja daerah

Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dari Rp3.647.212.439.376 pada tahun 2019, turun menjadi Rp3.377.578.658.990 pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi Rp3.836.457.605.910 pada tahun 2021. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2019-2021 terjadi pertumbuhan realisasi belanja sebesar 3,10 persen.

Realisasi belanja operasi pada tahun 2019 sebesar Rp2.056.860.843.111, naik pada tahun 2020 menjadi Rp2.130.974.496.837, dan mengalami peningkatan kembali menjadi Rp2.271.258.011.014. Kemudian untuk realisasi belanja modal pada tahun 2019 sebesar Rp1.102.419.234.360, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp790.704.925.338, dan kembali meningkat menjadi Rp1.097.177.454.587 pada tahun 2021. Untuk realisasi belanja tak terduga pada tahun 2019 sebesar Rp913.265.205, kemudian meningkat menjadi Rp1.355.789.200 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp1.018.853.800 pada tahun 2021. Kemudian untuk belanja transfer pada tahun 2019 sebesar Rp487.019.096.700, turun menjadi Rp454.543.447.614 pada tahun 2020, dan naik pada tahun 2021 menjadi Rp467.003.286.509.

Pada tahun 2022 belanja ditetapkan sebesar Rp2.977.118.265.337 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp2.140.470.846.671, belanja modal sebesar Rp571.753.774.966,

belanja tak terduga sebesar Rp1.500.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp263.393.643.700.

Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2019-2021 untuk belanja operasi 5,09 persen, belanja modal 5,24 persen, belanja tak terduga 11,80 persen, dan belanja transfer -1,96 persen. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar 49,24 persen dan pertumbuhan terendah terdapat pada belanja subsidi sebesar -20,96 persen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 3.12

Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
5	BELANJA	3.647.212.439.376	3.377.578.658.990	3.836.457.605.910	3,10
5.1	BELANJA OPERASI	2.056.860.843.111	2.130.974.496.837	2.271.258.011.014	5,09
5.1.1	Belanja Pegawai	858.976.786.766	849.507.001.011	953.392.507.260	5,56
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.114.150.758.470	1.194.092.445.914	1.269.485.693.192	6,74
5.1.3	Belanja Bunga	16.711.549.766	19.894.751.077	15.843.408.598	-0,66
5.1.4	Belanja Subsidi	29.222.046.831	46.193.540.000	0,00	-20,96
5.1.5	Belanja Hibah	37.401.701.278	20.975.758.835	32.224.901.964	4,86
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	398.000.000	311.000.000	311.500.000	-10,85
5.2	BELANJA MODAL	1.102.419.234.360	790.704.925.338	1.097.177.454.587	5,24
5.2.1	Belanja Modal Tanah	20.694.462.248	5.600.217.924	11.586.787.866	16,98
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.349.881.211	193.872.858.388	184.093.954.709	8,69
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.751.861.760	137.607.537.296	315.940.503.064	49,24
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	698.687.426.440	417.611.575.380	572.304.162.158	-1,59
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.935.602.701	36.012.736.350	13.252.046.790	-9,39
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	913.265.205	1.355.789.200	1.018.853.800	11,80
5.4	BELANJA TRANSFER	487.019.096.700	454.543.447.614	467.003.286.509	-1,96

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2019-2021

Adapun realisasi belanja daerah sampai dengan 30 April 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 30 April 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Berjalan (Rp)	Realisasi (%)
5	BELANJA	3.525.059.934.831	577.733.381.946	16,39
5.1	BELANJA OPERASI	2.350.596.944.591	410.700.742.847	17,47
5.1.1	Belanja Pegawai	1.103.923.240.024	241.110.507.929	21,84
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.319.392.100	162.788.135.493	13,30
5.1.3	Belanja Bunga	10.040.682.467	3.552.099.425	35,38
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	
5.1.5	Belanja Hibah	11.913.630.000	3.250.000.000	27,28
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	-	
5.2	BELANJA MODAL	688.578.566.540	25.681.078.225	3,73
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9.481.239.475	-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.615.339.893	2.863.076.375	1,90
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.068.006.849	22.818.001.850	10,86
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	303.204.546.323	-	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.209.434.000	-	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000	-	
5.4	BELANJA TRANSFER	483.384.423.700	141.351.560.874	29,24

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Prognosis 2022 (Rp)	Prognosis 2023 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	2.140.470.846.671	2.020.722.684.072
5.1.1	Belanja Pegawai	987.512.734.265	1.014.307.967.107
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.116.870.421.542	980.819.546.965
5.1.3	Belanja Bunga	10.040.682.467	4.700.000.000
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	25.322.008.397	20.695.170.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	725.000.000	200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	571.753.774.966	444.009.725.525
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.770.420.475	13.560.615.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.859.189.044	76.726.312.638
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.886.490.240	114.399.910.884
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	305.833.757.023	235.490.782.603
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.259.348.315	3.832.1104.400
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000	1.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	263.393.643.700	222.448.242.700
	Jumlah Belanja	2.977.118.265.337	2.688.680.652.297

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran kesehatan kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji, penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Pendidikan : Rp.604.519.194.949 (21,43%)
- Anggaran Kesehatan : Rp.378.934.383.586 (13,43%)
- Infrastruktur Publik : Rp.712.230.279.378 (25,25%)

b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkannya pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang

diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Selanjutnya Pembiayaan Neto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit APBD.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin

dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

a. Dari sisi sumber penerimaan daerah antara lain:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000;

b. Dari sisi sumber pengeluaran daerah antara lain:

- Pembentukan dana cadangan Pilkada dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000
- Penyertaan modal daerah sebesar dianggarkan Rp25.000.000.000, dengan rincian untuk PDAM Tirta Randik sebesar Rp15.000.000.000, PT. Petro Muba Holding sebesar Rp5.000.000.000, dan PT. Bank Sumsel Babel Rp5.000.000.000.
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.91.838.249.703.

Tabel 3.15

**Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2019	2020	2021
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	493.229.904.303	691.747.536.094	819.314.146.595
6.1.1	Penggunaan Silpa	247.489.457.842	591.786.528.942	675.605.322.695
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	245.740.446.461	99.961.007.152	143.708.823.900
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	196.140.730.925	179.223.248.634	221.812.445.858
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000.000	12.500.000.000	82.963.150.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	146.140.730.925	166.723.248.634	138.849.295.858

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2019-2021

Adapun realisasi pembiayaan daerah pada tahun berjalan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

**Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 30 April 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Berjalan (RP)	Realisasi (%)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.739.631.865	22.668.285.750	29,93
6.1.1	Penggunaan Silpa	53.071.346.115	22.668.285.750	42,71
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	22.668.285.750	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	279.588.251.046	59.555.448.682	21,30
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	32.600.000.000	27.600.000.000	84,66
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	246.988.251.046	31.955.448	0,01

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Adapun proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Prognosis 2022 (Rp)	Prognosis 2023 (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000	30.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	30.000.000.000
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	276.887.467.663	40.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	212.228.121.663	15.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	64.659.346.000	25.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	91.838.249.703

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD

Dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin selain dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin didukung juga dari dana keuangan non APBD Kabupaten sebagai berikut:

1. APBN (Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama)

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah kabupaten, atau kota, dan/atau desa. Dana tugas pembantuan kabupaten/kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot

alokasi dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian daerah dalam pengelolaan APBD menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah serta perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan proporsi pembagian pagu alokasi provinsi dan kabupaten/kota, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik di daerah;
- mendorong daerah untuk memenuhi *mandatory spending* sekurang-kurangnya 25 persen DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
- mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU; serta mendukung kebijakan yang

dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah, perbaikan dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan kualitas SDM dan daya saing di daerah.

Sejak tahun 2019, terdapat DAU Tambahan yang dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan. Dukungan pendanaan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik. Pemerintah Daerah tetap harus menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai amanat PP No.17/2018 tentang Kecamatan. Dukungan keuangan bagi kelurahan melalui DAU tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, serta mempercepat penanganan permasalahan pembangunan di perkotaan pada umumnya, dan di kelurahan pada khususnya, melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar dan penguatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang

terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional. Untuk tahun 2022, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi.

DAK Fisik Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Reguler terdiri dari 7 (tujuh) Bidang antara lain: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan dan KB; (3) Bidang Jalan; (4) Bidang Air Minum; (5) Bidang sanitasi dan (6) Bidang Perumahan dan pemukiman.

DAK Fisik Penugasan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. DAK Fisik Penugasan untuk Destinasi Pariwisata Prioritas Sentra Industri Kecil dan Menengah terdiri dari bidang pariwisata, industri kecil menengah, jalan, lingkungan hidup, perdagangan dan UMKM. Sedangkan DAK Fisik Penugasan untuk pengembangan *food estate* dan sentra produksi pangan terdiri dari bidang pertanian, kelautan perikanan, irigasi, kehutanan, jalan dan perdagangan. DAK Fisik Penugasan untuk peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terdiri dari bidang transportasi perdesaan, transportasi laut, dan jalan.

DAK Fisik Afirmasi diarahkan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti kabupaten tertinggal, perbatasan

negara, pulau-pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. DAK Fisik Afirmasi terdiri dari 7 (tujuh) bidang antara lain: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan; (3) bidang sanitasi; (4) bidang air minum; (5) bidang perumahan dan permukiman; (6) bidang transportasi perdesaan dan (7) bidang transportasi laut.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat beberapa kaidah-kaidah perubahan kebijakan DAK Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Jenis DAK menjadi : DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah ;
- DAK bersifat penugasan sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM sebelumnya, didanai melalui skema DAK Reguler akan didukung melalui “bagian DAU yang ditentukan penggunaannya”;
- Dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dianggarkan secara tahunan;
- Tidak ada kewajiban dana pendamping 10%;
- Pengalihan Belanja K/L yang menjadi urusan daerah ke DAK jika daerah berkinerja baik;
- Perencanaan dan pengalokasian DAK disinergikan dengan pendanaan lain.

Hal ini memberikan implikasi sebagai berikut:

- DAK bersifat Penugasan sehingga harus memiliki lokasi prioritas selektif (tidak ada jenis “regular” atau dialokasikan untuk seluruh daerah). Perlu dipetakan bidang SPM yang diintervensi melalui DAU (yang ditentukan penggunaannya) agar tidak duplikasi;
- Ada penetapan target kinerja per-daerah;
- Sinergi berbagai sumber pendanaan, termasuk kebijakan tematik terintegrasi.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Non fisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah, antara lain: (1) bantuan operasional sekolah (BOS); (2) bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD); (3) tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus; (4) tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; (5) tunjangan profesi guru (TPG) PNSD; (6) dana bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan; (7) bantuan operasional kesehatan (BOK); (8) bantuan operasional keluarga berencana (BOKB); (9) dana pelayanan administrasi kependudukan; (10) dana peningkatan kapasitas koperasi; usaha kecil dan menengah (p2ukm); (11) bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS); (12)

dana pelayanan kepariwisataan dan (13) dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2022 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non fisik, antara lain melalui pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit *cost*; pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja; penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Non fisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Non fisik di daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka arah kebijakan DAK Non Fisik Tahun 2023 menjadi :

- Melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan Pendidikan dan kesehatan sesuai target Prioritas Nasional;
- Memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional;
- Meningkatkan sinergi pendanaan DAK Non Fisik dengan sumber pendanaan lainnya.

4. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:

- Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD;
- Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah; dan
- Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan, kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan *mandatory spending* dan pelaporan.

5. Dana Desa APBN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Umum Dana Desa APBN adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat

miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan Tujuan khusus Dana Desa APBN meliputi :

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- 4) Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD);
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Adapun arah kebijakan khusus Dana Desa tahun 2023 sebagai berikut:

- Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi

kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antar wilayah;

- Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan produktivitas melalui (i) diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif; (ii) perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang layak termasuk untuk mendanai kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama; serta (iii) peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa;
- Meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran Dana Desa dalam fungsi sebagai jaring pengaman sosial, termasuk untuk penguatan pendataan registrasi sosial;
- Meningkatkan akses transportasi desa, akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistic di desa;
- Memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang yaitu prasarana ekonomi berupa pasar desa dan UMKM serta prasarana lingkungan berupa pengelolaan dan daur ulang persampahan dan ketahanan bencana;
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar terutama untuk fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan

keluarga, penanganan wabah penyakit dan respons terhadap covid-19 serta perluasan jaringan air minum dan air bersih serta jaringan listrik/energi terbarukan berskala desa.

Besaran anggaran yang diterima oleh Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2016-2021
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Keterangan
1	2016	143.055.161.000	100	227 Desa
2	2017	181.802.790.000	100	227 Desa
3	2018	194.512.079.000	100	227 Desa
4	2019	227.973.390.000	100	227 Desa
5	2020	232.888.342.000	100	227 Desa
6	2021	233.515.285.000	99,97	227 Desa

Sumber: DPMD Kab. Musi Banyuasin, 2022

6. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya Melalui Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat

melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan – perusahaan melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat mereka melakukan usaha.

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin setiap

tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data laporan dari perusahaan yang masuk ke Sekretariat Forum MSH-CSR Kabupaten Musi Banyuasin, Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014–2021 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015-2021

No	Tahun	Program			Jumlah
		Pengembangan Infrastruktur	Pemberdayaan Masyarakat	Hubungan Komunitas	
1	2015	25.514.392.762	5.369.919.593	5.580.614.101	36.500.452.864
2	2016	24.211.716.268	1.275.356.000	3.016.029.733	28.503.102.001
3	2017	10.224.493.495	1.005.129.816	2.741.093.409	13.970.716.720
4	2018	1.860.012.643	1.004.140.104	3.766.569.197	6.630.721.944
5	2019	6.226.859.931	13.799.392.443	14.873.985.235	34.900.237.609
6	2020	2.223.775.631	735.327.475	12.314.095.553	15.273.198.659
7	2021	6.751.657.333	5.920.608.410	21.918.463.052	34.590.728.795

Sumber: Bappeda Kab. Musi Banyuasin, 2014-2021



BAB IV

SASARAN DAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 serta sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026, dinamika pandemi Covid-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka

pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam tahun pelaksanaan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 dan pemilihan Kepala Daerah serentak ditetapkan pada bulan Februari 2024, sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003-2026 serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Menengah) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 yang ditetapkan dengan perkada. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode transisi sebelum Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 pada tanggal 14 Maret 2022 atau Minggu ketiga bulan Maret 2022.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah: “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025”.

4.1.1. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan untuk memberikan arahan terhadap pembangunan kabupaten secara umum dan memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum dalam RPD Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global;

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur keberhasilan pada tahun 2023, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Adapun indikator masing – masing tujuan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Indikator Tujuan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Angka Kemiskinan	15,05
		2) Indeks Gini	0,306
		3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8
		4) Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25
		5) Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	7) Indeks Reformasi Birokrasi	C

Sumber: RPD Kab. Muba 2023-2026, diolah

Adapun tambahan indikator makro sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 adalah PDRB Per Kapita yang diproyeksi pada tahun 2023 sebesar 132,16 dengan berdasar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sesuai analisis indikator makroekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, terdapat 3 (tiga) Tujuan Utama Pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator pencapaian tujuan yaitu: Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Disamping itu, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada Tahun 2023, diharapkan Angka Kemiskinan Kab. Musi Banyuasin menurun mencapai angka 15,05 persen. Angka ketimpangan pendapatan/ Indeks Gini dapat menurun hingga menjadi 0,306 pada akhir tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun pada angka

3,8 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 3,75-4,25 persen. Indeks Pelayanan Infrastruktur meningkat menjadi 85,44 persen pada tahun 2023. Dan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkat pada tahun 2023 menjadi 69,17 persen serta Indeks Reformasi Birokrasi menjadi C. dan PDRB Per kapita sebesar 132,16.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran –sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;

3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;
6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur kinerja sasaran digunakan indikator sasaran, Indikator sasaran ditampilkan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Tahun 2023

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Peningkatan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.602
2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71
3	Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4	Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	1) Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76
		2) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70
		3) Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79
5	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	93,00
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	1) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%
		2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%
		3) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%
		4) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%
8	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1) Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74
9	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08
10	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1) Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB
		2) Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025

Sumber: RPD Kab. Muba 2023-2026, diolah

Keterkaitan isu strategis, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3

Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran - Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian - Pemulihan pasca pandemi covid-19 	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 setiap tahun dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.371	10.602	10.883	11.064	11.295	11.295
		Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76	70.76
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (ADHK)	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34	4,34
		Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai	Laju Petumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31	2,31

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
		Penopang Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	7,75	0,70	1,05	1,40	1,75	1,75
			Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82	1,82
		Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	91	93,00	95,00	97,00	100,00	100,00
		Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	65,04%	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%	80,10%
			Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih	90,60%	95,20%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak	84,80%	92,50%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
			Persentase kawasan kumuh tetangani	100%	78,97%	58,17%	37,50%	0%	0%
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,01%	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,45	12,60	12,76	12,91	13,07	13,07
			Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91	7,91
		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45	69,45
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Peningkatan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	92	92	90
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	3,1025	3,235	3,3675	3,5	2,97

Tabel 4.5

Penyelarasan Target Indikator makro Kab. Muba – Prov. Sumsel – Nasional Tahun 2020-2024

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi					Indikator Pembangunan	RPJMD - RPD Kab. Musi Banyuasin				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,8	5,9	6,1	6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-6,0	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,00-2,50	2,40-2,70	3,50 - 4,00	3,75 - 4,25	4,00 - 4,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	11,50	10,70	9,90	9,20	9,20	Tingkat Kemiskinan (%)	15,20	14,25	15,55	15,05	14,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,20	4	3,8	3,4	3,1	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,01	3,87	3,75	3,62	3,62	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,62	4,44	3,9	3,8	3,65
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11-72,21	72,28-72,95	73,41-73,46	74,77	74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,08	71,75	72,42	73,09	73,09	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,17	69,47	68,64	69,17	69,71
5	Rasio Gini/Indeks Gini	0,379-0,381	0,377-0,379	0,376-0,378	0,375-0,378	0,360-0,474	Rasio Gini	0,354	0,353	0,352	0,35	0,35	Rasio Gini	0,34	0,31	0,316	0,306	0,296

Sumber: RPJMN, RPJMD Prov Sumsel, RPD. diolah

Tabel 4.6

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD – RPJMD Provinsi – RPJM Nasional

No	RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024	
	Tujuan	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1	Peningkatan daya beli masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
		a.	Pengeluaran perkapita	Pengeluaran Per Kapita	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)	Menurunnya Pengangguran
		a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3	Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

No	RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
	Tujuan	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
		a. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(ADHK)	Nilai tukar Petani	Pertumbuhan PDRB
		4 Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri dan Perdagangan)	Meningkatnyan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor dan Daya Saing
		a. Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
		b. Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (ADHK)	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan
		c. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (ADHK)		Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum
		5 Peningkatan kesejahteraan para petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		a. Nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani	

No	RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
	Tujuan	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
		6	Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Konektivitas Wilayah
		a.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)	
		b.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	
		c.	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Rumah tangga dengan akses sanitasi	
		d.	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	
		7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
		a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	

No	Tujuan	RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
		Sasaran / Indikator		Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	8	Peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)	Terpenuhinya Layanan Dasar
		a.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
		b.	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah
		9	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)	Terpenuhinya Layanan Dasar
		a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia Harapan hidup	Usia Harapan hidup
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	10	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
		a.	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB
		b.	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini BPK	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP
		11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
		a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Konten Informasi Publik
		b.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Inovasi Daerah	

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

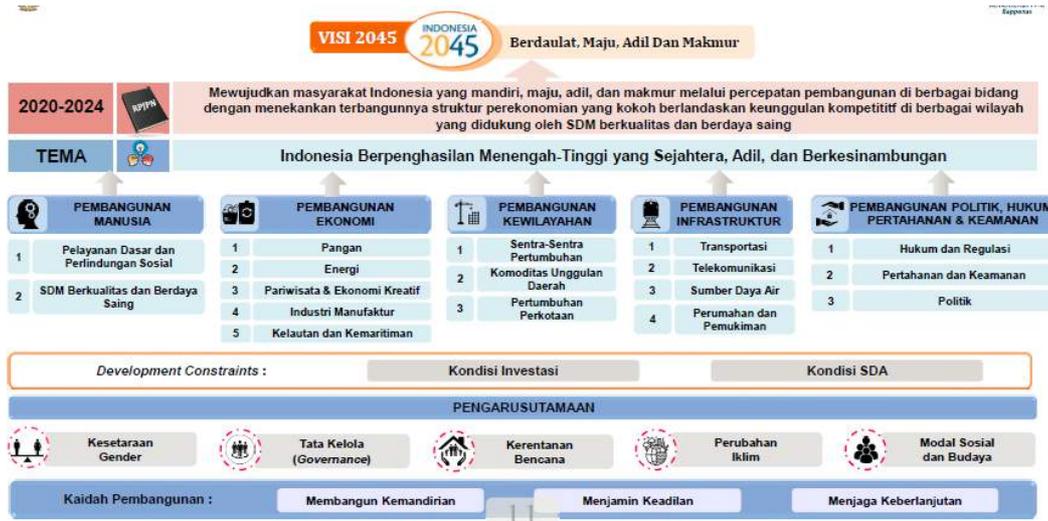
Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 disusun dengan mempedomani RPJMN 2020-2024 termasuk agenda pembangunan nasional serta RKP Tahun 2023.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023.
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2020-2024.
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dalam Rancangan RKP Tahun 2023.
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1.
KERANGKA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020. Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap akhir yang menentukan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Dokumen RPJPN Tahun 2005–2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing." Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024, RPJMN Tahun 2020–2024 menetapkan Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020–2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2023

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2021, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Capaian pada tahun 2021 sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045.

Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Gambar 4.2.
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong

peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelligence (AI) dan big data, disrupti rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau (green recovery).

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah:

**“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.3.
Tema Pembangunan RKP Tahun 2023



Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni :

10. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
11. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan,
12. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*,
13. Mendorong pemulihan dunia usaha,
14. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
15. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim),

16. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan

17. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

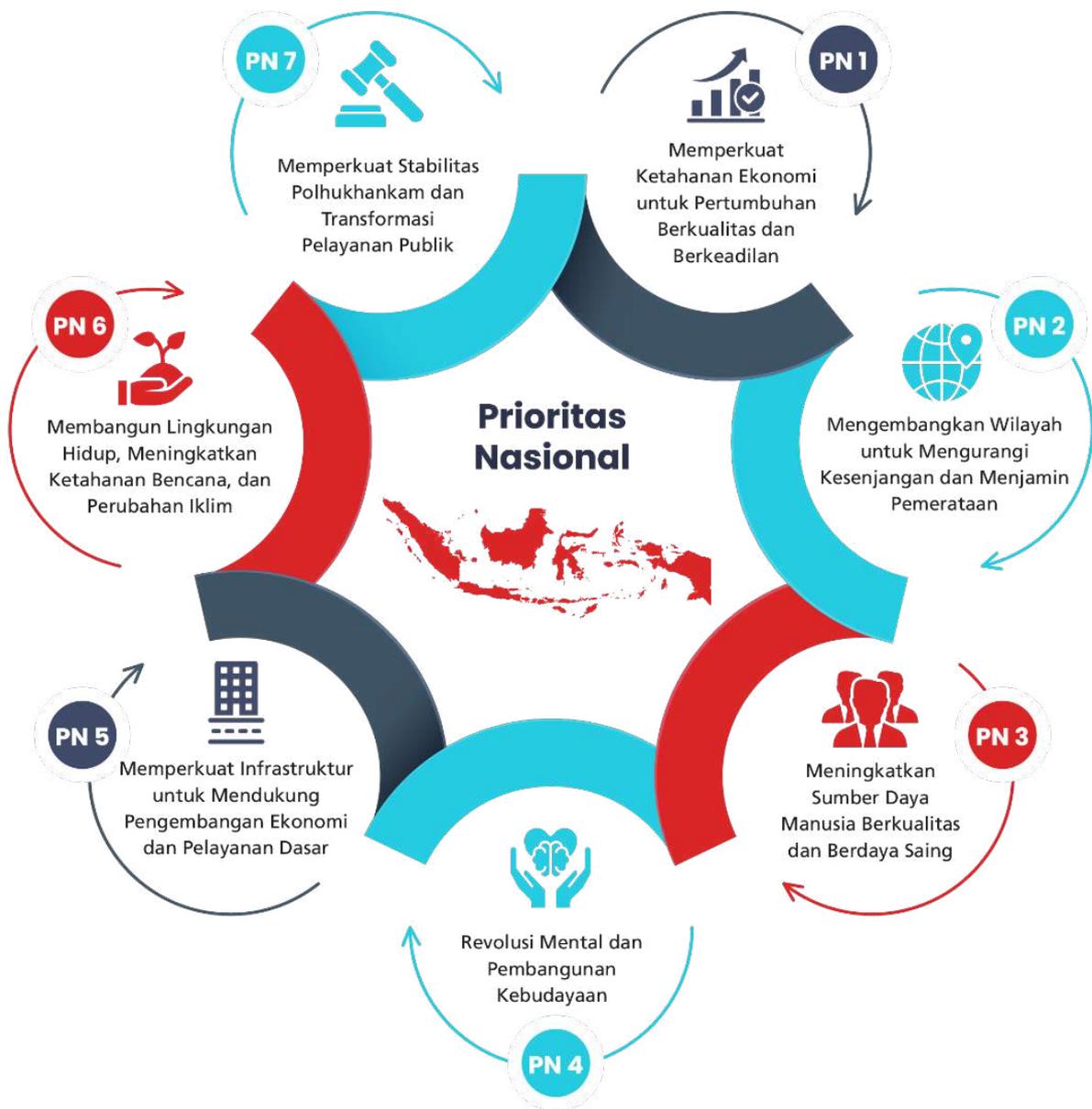
Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi

pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.

Gambar 4.4.
Prioritas Nasional RKP Tahun 2023



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan Program Prioritas Nasional 1 sebagai berikut :

- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT);
- Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan;
- Peningkatan pengelolaan kemaritman, perikanan, dan kelautan;
- Penguatan kewirausahaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
- Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialiasasi;
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan Program Prioritas Nasional 2 sebagai berikut :

- Pembangunan Wilayah Sumatera;
- Pembangunan Wilayah Jawa – Bali;
- Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- Pembangunan Wilaya Kalimantan;

- Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku;
 - Pembanguna Wilayah Papua.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Program Prioritas Nasional 3 sebagai berikut :
- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
 - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - Pengentasan Kemiskinan;
 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Program Prioritas Nasional 4 sebagai berikut:
- Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

- Meningkatkan Pemajuan dan Pelstarian Kebudayaan ntuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
 - Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial;
 - Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan Program Prioritas Nasional 5 sebagai berikut :
- Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - Infrastruktur Ekonomi;
 - Infrastruktur Perkotaan;
 - Energi dan Ketenagalistrikan;
 - Transformasi Digital;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan Program Prioritas Nasional 6 sebagai berikut :
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Program Prioritas Nasional 6 sebagai berikut :

- Konsolidasi Demokrasi;
- Optomalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- Penegakan Hukum Nasional;
- Rreformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Masing-masing Prioritas Nasional Tahun 2022 memiliki sasaran, program prioritas dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Uraian masing-masing prioritas nasional disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Prioritas Nasional Tahun 2023

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
A	PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan						
1	SASARAN PN 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan						
1.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)	9,18	11,20	11,70	15,70	17,90	~23,00
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,4	86,3	87,2	92,4	94,0	95,2

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.3	Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	11	11	11	11	11	11
2	SASARAN PN 1 : Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian						
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27	2,93	2,89	3,75	3,21 ^{b)}	3,23 ^{b)}
2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3,64	1,8	1,84	3,6-3,8	3,9-4,2	4,0-4,1
2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	5,81	0,73	5,45	4,00-6,00	8,51	8,71
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	3,8	-2,93	3,39	5,30-5,70	5,4-6,0 ^{d)}	8,10
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1 ^{a)}) (%)	19,70	19,80	19,25	19,90	20,60 ^{f)}	21,00
2.6	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c) ^{a)}) (US\$ Miliar)	18,45	3,46	0,55	0,86-1,71	1,76-6,08	10,70-16,11
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1 ^{a)}) (%)	4,8	4,0	4,2 ^{g)}	4,3	4,4	4,5
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang) ^{e)}	2,47	-0,30	2,60	2,6-3,1	2,7-3,1	2,7-3,0
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,4	-4,9	3,8	5,4-6,3	6,4-7,1	5,8-7,7
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,60	3,61	35,11	8,45	11,18	10,10

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,9	-7,70	24,0	5,1-5,5	6,0-7,3	6,2
2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1) ^{a)} (%)	9,76	8,33	9,1 ^{c)}	8,44	10,2-10,6 ^{d)}	10,22-10,71 ^{d)}
B	PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan						
1	SASARAN PN 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)						
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) ^{a)}	3,87	-0,82	4,86	5,19	6,07-6,66	7,90
1.2	IPM KTI (nilai min-maks) ^{b)}	60,84-76,61	60,44-76,24	60,62-76,88	62,06-78,11	62,54-78,18	1.2
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%) ^{c)}	11,60	11,99	10,97	11,46	10,97	1.3
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun) ^{a)}	5,24	-2,29	3,34	4,99-5,33	5,1-5,6	6,30
2.2	IPM KBI (nilai min-maks) ^{b)}	69,57-80,76	69,69-80,77	69,90-81,11	70,51-82,99	70,48-82,43	71,90-84,23
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%) ^{c)}	8,61	9,74	9,23	8,64	7,3-7,9	6,33
C	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.						
1	SASARAN PN 3 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan						
1.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28 ¹⁾	2,40 ²⁾	2,24 ³⁾	2,21	2,19	2,10

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17 ⁴⁾	98,00 ⁴⁾	99,00 ⁵⁾	99,00	99,00	100,00
2	SASARAN PN 3 : Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk						
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial(%):						
	2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61 ⁶⁾	82,07 ⁶⁾	86,96 ⁶⁾	87,00	91,00	98,00
	2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 ⁴⁾	65,10 ⁴⁾	64,31 ⁴⁾	75,00	78,00	80,00
3	SASARAN PN 3 : Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan						
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)(per 100.000 kelahiran hidup)	305 ¹⁾	230 ^{a)}	217 ^{b)}	205	194	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB)(per 1.000 kelahiran hidup)	24,00 ²⁾	20,6 ^{a)}	19,50 ^{b)}	18,60	17,6	16,00
3.3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67 ⁷⁾	24,10 ^{a)}	24,37 ⁷⁾	18,40	17,50	14
3.4	Insidensi <i>tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)	312 ⁸⁾	301 ⁸⁾	252 ^{b)}	231	211	190
3.5	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 ⁹⁾	320 ⁹⁾	347 ⁹⁾	365	385	405
3.6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	368 ⁹⁾	401 ⁸⁾	415 ⁹⁾	458	482	514
3.7	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80 ^{q0)}	21,80 ^{a)}	21,80 ^{b)}	21,80	21,80	21,80
3.8	Persentase merokok penduduk usia	9,10 ^{q0)}	9,10 ^{a)}	9,10 ^{b)}	8,90	8,80	8,70

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
	10–18tahun (%)						
3.9	Nilai rata-rata hasil PISA:						
	3.7.1 Membaca (nilai)	371 ¹¹⁾	371 ^{a)}	394 ^{b)}	394	394	396
	3.7.2 Matematika (nilai)	379 ¹¹⁾	379 ^{a)}	385 ^{b)}	385	385	388
	3.7.3 Sains (nilai)	396 ¹¹⁾	396 ^{a)}	399 ^{b)}	399	399	402
3.10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	8,75 ⁴⁾	8,90 ⁴⁾	8,97 ⁴⁾	9,13	9,24	9,36
3.11	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95 ⁴⁾	12,98 ⁴⁾	13,08 ⁴⁾	13,57	13,22	13,30
4	SASARAN PN 3 : Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda						
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	62,72 ¹²⁾	66,89 ¹²⁾	66,89 ¹²⁾	69,87	71,66	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,07 ⁴⁾	91,06 ¹³⁾	91,10-91,15 ^{b)}	91,11-91,22	91,17-91,37	91,24-91,54
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	52,67 ¹⁴⁾	51,00 ¹⁴⁾	54,00 ¹⁴⁾	55,61	56,65	57,67
5	SASARAN PN 3 : Meningkatkan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40 ⁴⁾	31,85 ⁴⁾	35,83 ⁴⁾	36,00	38,00	40,00
6	SASARAN PN 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing						
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 ¹⁵⁾	44,35 ¹⁵⁾	45,69 ¹⁵⁾	46,87	48,00	49,75
6.2	Jumlah PT yang masuk kedalam <i>world class university</i> (PT):						
	6.2.1 Top 200	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0	0	1

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6.2.2 Top 300	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	1	1	2
	6.2.3 Top 500	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2	2	3
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 ¹⁵⁾	40,02 ¹⁵⁾	40,39 ¹⁵⁾	41,92	43,00	43,10
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85 ¹⁷⁾	85 ¹⁷⁾	87 ¹⁷⁾	80–85	75–80	75–80
C	PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
1	SASARAN PN 4 : Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya						
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30 ^{a)}	69,57 ^{a)}	70,78 ^{a)}	71,96	73,13	74,29
1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	74,00 ^{a)}	75,53 ^{a)}	76,78 ^{a)}	77,93 ^{a)}	79,08	80,16
2	SASARAN PN 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan						
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91	54,65	58,21 ^{a)}	59,71	61,20	62,70
3	SASARAN PN 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial						
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62 ^{a)}	0,63 ^{a)}	0,64	0,65	0,65
4	SASARAN PN 4 : Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,22 ^{a)}	72,39 ^{a)}	74,70	75,00	75,80
5	SASARAN PN 4 : Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa						
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,94	53,01 ^{c)}	57,00	59,00	61,00

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	20,71 ^{c)}	22,00	22,10	22,10
6	SASARAN PN 4 : Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11	61,63	63,03 ^{a)}	65,70	68,37	71,04
E	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						
1	SASARAN PN 5 : Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar						
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	65,10	67,88	70 ¹⁾
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	5,00	5,00	10,00	19,65
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	30,00	31,72	33,72	35,00	37,50	38,92
2	SASARAN PN 5 : Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar						
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km)	2,30	2,16	2,22	2,09	2,08	1,90
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)(%)	23	24	25	26	26	27
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91	91,16	94
2.4	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)(%)	85,73	86	87	88	89	90
3	SASARAN PN 5 : Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan						

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6
3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	63,24	- 2)	68,20	70,77	73
4	SASARAN PN 5 : Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan						
4.1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,89	99,20	99,45	~100	~100	~100 ³⁾
4.2	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik(kWh/Kapita)	1.084	1.089	1.123	1.268	1.336	1.400
4.3	Penurunan Emisi GRK SektorEnergi (Juta ton)	54,8	64,4	69,50	91	116	142
5	SASARAN PN 5 : Meningkatnya layanan infrastruktur TIK						
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	97,25	97,50	96,10	98,50	99	100
F	PN 6 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						
1	SASARAN PN 6 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
1.1	Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) (nilai)	66,56	70,27	71,45 ^{b)}	69,22	69,48	69,74
2	SASARAN PN 6 : Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim						
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	n.a. ^{a)}	0,42	0,60 ^{b)}	0,91	1,10	1,25

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	SASARAN PN 6 : Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline						
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	23,46	25,51 ^{b)}	23,55*	26,87	27,02 ^{c)}	27,27 ^{c)}
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	32,08 ^{b)}	23,40*	21,54	22,507 ^{c)}	23,22 ^{c)}
G	PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
1	SASARAN PN 7 : Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal						
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾ (nilai)	74,92	73,66	77,72	78,06	78,37	78,66
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kontendan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²⁾ (%)	69,43	70,4	77,23	75	78	79
2	SASARAN PN 7 : Optimalnya Kebijakan Luar Negeri						
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³⁾ (nilai)	95,20	96,58	112,06	96,30	96,77	97,07
3	SASARAN PN 7 : Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap						
3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,54 ^{a)}	0,565 ^{b)}	0,56 ^{b)}	0,57 ^{b)}	0,58 ^{b)}
4	SASARAN PN 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai) ⁴⁾	3,63	3,84	3,79	3,80 ^{c)}	3,90 ^{c)}	4,00 ^{c)}
5	SASARAN PN 7 : Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia						
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) ⁵⁾	100	100	100	100	100	100

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2023

4.2.3 Telaahan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah RPJMD pada tahun keempat pelaksanaannya dan disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024. Namun pelaksanaan setiap program dan kegiatan sangat membutuhkan konsistensi yang harus secara cerdas disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.

Dengan pendekatan pembangunan wilayah, memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Menyelaraskan dengan Arah Kebijakan yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan 16 (enam belas) Indikator Sasaran dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Maju Ekonomi Kerakyatan
 - 1.1. Pertumbuhan ekonomi;
 - 1.2. Pengeluaran per kapita;
 - 1.3. PDRB per kapita;
 - 1.4. Rasio Gini;
 - 1.5. Inflasi.

2. **Sasaran 2** : Maju Investasi, Industri dan Perdagangan
 - 2.1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
 - 2.2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan;
 - 2.3. Realisasi PMA;
 - 2.4. Realisasi PMDN;
 - 2.5. Neraca Perdagangan.
3. **Sasaran 3** : Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan
 - 3.1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;
 - 3.2. Nilai Tukar Petani;
 - 3.3. Nilai Tukar Nelayan;
 - 3.4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).
4. **Sasaran 4** : Maju Kesejahteraan Masyarakat
 - 4.1. Angka Kemiskinan;
 - 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.
5. **Sasaran 5** : Maju Akses Energi
 - 5.1. Rasio Desa Berlistrik.
6. **Sasaran 6** : Maju Kesehatan Masyarakat
 - 6.1. Angka Usia Harapan Hidup.
7. **Sasaran 7** : Maju Akses Pendidikan Berkualitas
 - 7.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah;
 - 7.2. Angka Harapan Lama Sekolah.
8. **Sasaran 8** : Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak
 - 8.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - 8.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - 8.3. Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak.
9. **Sasaran 9** : Maju Pelayanan Publik Berkualitas
 - 9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - 9.2. Indeks Inovasi Daerah.
10. **Sasaran 10** : Maju Pembangunan yang Transparansi dan Akuntabel
 - 9.3. Nilai SAKIP
 - 9.4. Opini BPK.

11. **Sasaran 11** : Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas
 - 11.1. Indeks Persepsi Korupsi.
12. **Sasaran 12** : Maju Kualitas Lingkungan Hidup
 - 12.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
13. **Sasaran 13** : Maju Infrastruktur dan Konektivitas
 - 13.1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak;
 - 13.2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak;
 - 13.3. Persentase kondisi jalan mantap;
 - 13.4. Persentase akses internet.
14. **Sasaran 14** : Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama
 - 14.1. Persentase penurunan konflik sosial.
15. **Sasaran 15** : Maju Seni, Budaya dan Pariwisata
 - 15.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara;
 - 15.2. Jumlah Wisatawan Nusantara;
 - 15.3. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan.
16. **Sasaran 16** : Maju Pemuda dan Olahraga
 - 16.1. Peringkat Sumsel pada PON 2020;
 - 16.2. Jumlah Pemuda Berprestasi.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang;
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2023 serta rancangan isu strategis, maka rancangan tema pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 diarahkan pada “**Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan**”. Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) Prioritas Daerah sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH 1:

Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;

PRIORITAS DAERAH 2:

Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;

PRIORITAS DAERAH 3:

Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

PRIORITAS DAERAH 4:

Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.

Dengan mengacu kepada isu strategis yang telah disusun dan berdasarkan hasil evaluasi di Bab II maka selanjutnya ditetapkan program prioritas RKPD seperti pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Isu Strategis dan Program Prioritas RKPD Tahun 2023

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD	Program Prioritas RKPD Tahun 2023
1	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
2	Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Pengembangan Umkm
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyuluhan Pertanian			
3	Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD	Program Prioritas RKPD Tahun 2023
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penanggulangan Bencana Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemasaran Pariwisata Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengelolalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Kepegawaian Daerah

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD	Program Prioritas RKPD Tahun 2023
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Sumber: RPD Kab Muba Tahun 2023-2026, diolah

Sebagai upaya pencapaian target dan sasaran maka Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dapat digambarkan pada matriks program prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas RKPD Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	PD YANG MELAKSANAKAN
1	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran Perkapita - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Indeks Gini - Angka Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	PD YANG MELAKSANAKAN
2	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pengembangan Umkm - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan - Program Promosi Penanaman Modal - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi - Nilai Tukar Petani (NTP) - Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) - Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK) - Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK) - Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Sosial - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	PD YANG MELAKSANAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Penyuluhan Pertanian 		
3	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Kawasan Pemukiman - Program Pengembangan Pemukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap - Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih - Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak - Persentase Kawasan Kumuh Tertangani - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM - Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	PD YANG MELAKSANAKAN
4	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengelolalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Pengelolaan Keuangan Daerah. - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pengangguran Terbuka - Indeks Pembangunan Manusia - Harapan lama Sekolah (HLS) - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Usia Harapan Hidup (UHH) - Persentase Penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Persepsi Anti Korupsi - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) - Persentase Kecamatan Layak Anak - Persentase Disabilitas yang Mendapat Layanan - Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah - Opini BPK RI terhadap LKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata - Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Inspektorat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Dinas Perhubungan - DPMPSTSP - BKPSDM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Kesbangpol - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Bappeda - BPPRD - BPKAD

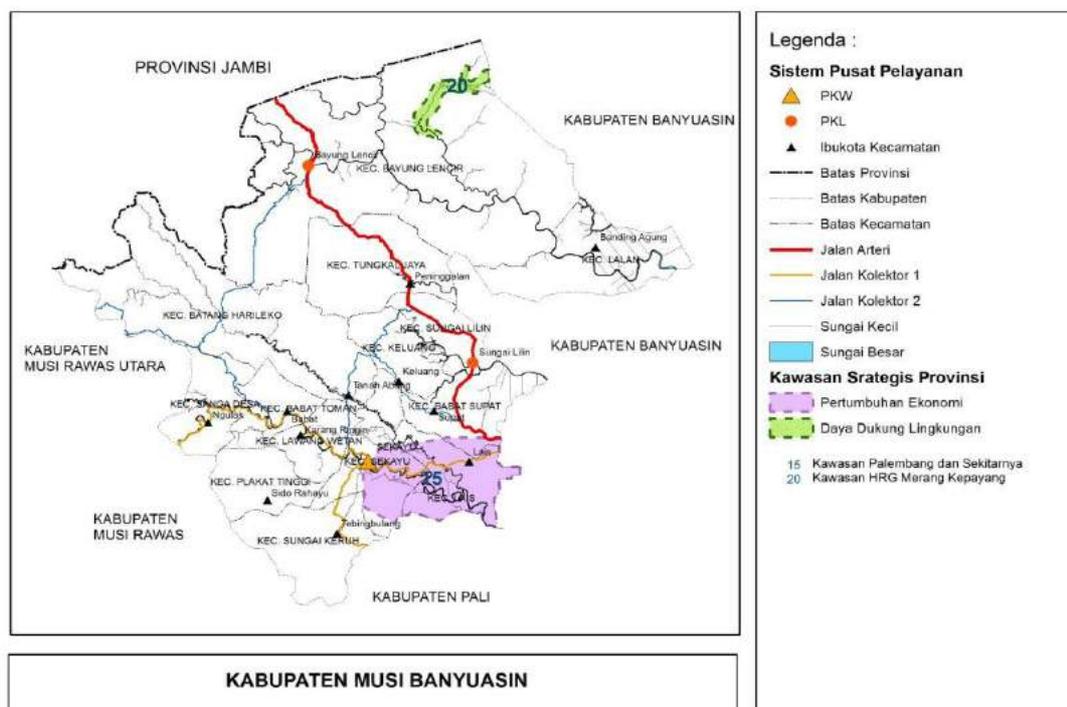
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	PD YANG MELAKSANAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Kepegawaian Daerah - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Aplikasi Informatika - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 		

Sumber: RPD Kab. Muba 2023-2026 , diolah

Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 1 PKW (Sekayu) dan 2 PKL (Bayung Lencir dan Sungai Lilin) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perekonomian terbesar kedua setelah Palembang (diukur dari PDRB ADHB) dan diperkirakan semakin berkembang karena berada dalam Koridor Ekonomi Sumatera. Musi Banyuasin memiliki banyak komoditas unggulan, diantaranya pertambangan, karet, perikanan, palawija, padi, dan peternakan sapi. Secara sektoral, sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang banyak juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan serta penyediaan tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peningkatan produktivitas pertanian khususnya melalui pengelolaan jaringan irigasi.
- Penurunan angka kemiskinan.

Gambar 4.5
Peta Kabupaten Musi Banyuasin



Sejak tahun 2018, di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan sistem PATEN sebagai bentuk implementasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan sektor komoditi utama yaitu perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain dengan membangun pabrik pengolahan aspal karet lateks bekerjasama dengan pusat penelitian karet dan PT. Jaya Trade Indonesia merupakan bentuk hilirisasi komoditas karet.

Sebagai bahan bakunya diambil dari petani karet di kabupaten Musi Banyuasin atau daerah sekitarnya. Pada tahun 2020, pabrik aspal karet Musi Banyuasin resmi beroperasi. Pabrik ini dapat memproduksi dari sebesar 155.303 ton karet akan dihasilkan 636 ribu ton lateks serta 318 ribu ton lateks pekat, maka potensi serapan lokalnya adalah 4,1 juta ton aspal karet. Maka dari itu, Kabupaten Musi Banyuasin mampu memenuhi kebutuhan aspal karet nasional yang diperkirakan saat ini sebesar 1,6 juta ton. Melalui deversifikasi dan hilirisasi komoditas karet petani karet dapat memiliki peluang dan pilihan dalam pengolahan komoditi karet.

Pada Perpres No.109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan sebagai lokasi pengembangan teknologi biohidrokarbon berbasis kelapasawit (pengembangan teknologi produksi ivo dan bensin sawit dengan katalis merah putih yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat). Program strategis Nasional ini terintegrasi dengan program peremajaan sawit rakyat yang dimulai dan diresmikan presiden jokowidodo pada 2017 sampai saat ini sudah tertanam 15.000 ha dan 5.000 ha yang sudah panen. Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan ITB memprakarsai produksi bioenergi berbasis biohydrocarbon menggunakan katalis merah putih. MUBA ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan

co-processing sebesar 20% di pertamina plaju untuk menghasilkan bensin bio-hidro karbon (awal tahun 2021).

Diproyeksikan Musi Banyuasin mampu berkontribusi terhadap kebutuhan bioenergi nasional sebesar 1.79% di tahun 2030. Saat ini Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan kelembagaan rantai pasok yaitu mendirikan Kerjasama TUM (Total Usaha Mandiri) yang terdiri dari Private, KUD dan BUMD) yang saat ini sudah melibatkan 24 KUD.

Dengan adanya rencana Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) –Tempino – Jambi melewati kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 132 Km, melewati 6 Kecamatan dan 27 desa. Rencana jalan tol ini di integrasikan dengan kawasan segitiga emas (*golden triangle*) kabupaten musu banyuasin merupakan kawasan strategis pendukung pertumbuhan ekonomi dan merupakan ruas jalan penghubung ke pusat kota sekayu serta ke kabupaten sekitar (kab.Pali, kab.Musirawas, dan provinsi Jambi). Total investasi infrastruktur jalan strategis pada segitiga emas adalah sebesar 457,57 milyar .

Tujuan pembangunan kawasan industri adalah mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industry dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup. **Faktor pendukung dalam pembangunan kawasan industri antara lain :**

1. Berlimpah komoditas perkebunan dan mendorong industry pengolahan hasil perkebunan dalam satu kawasan
2. Memaksimalkan potensi sda (migas dan batubara) dan perkebunan
3. Meminimalisir dampak lingkungan dari pengembangan industri
4. Rencana lokasi kawasan industri terletak di Kecamatan Sungai Lilin.

Tahapan yang sudah dan akan dilakukan untuk pembangunan kawasan industri adalah :

Tahun 2020 : Penyusunan *Feasibility Study*

Tahun 2021 : Penyusunan Master Plan, Penyiapan Skema Pembiayaan, Penunjukan PT. Bina Karya sebagai Pemrakarsa Pembangunan Kawasan, Penyusunan Masterplan Kawasan Industri.

Tahun 2022 : direncanakan revisi RTRW untuk memasukkan lokasi kawasan industri di RTRW 2016- 2036.

Kabupaten Musi Banyuasin telah merintis proses pengelolaan data geospasial pada tahun 2018 melalui MoU Inisiatif Satu Peta di Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan WRI Indonesia yang kemudian disusul dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Informasi Geospasial dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah, dikeluarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 57 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 661/KPTS-BAPPEDA/2018 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kedua peraturan ini menjadi landasan hukum implementasi Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan tuntutan percepatan dan ketepatan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pengelolaan data geospasial dengan melibatkan 17 OPD teknis dan telah menghasilkan 225 data geospasial yang 55 diantaranya telah tersedia secara online dan dapat diakses oleh publik. Kami tentu belum berpuas diri, dalam rangka meningkatkan produksi data geospasial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong peningkatan kapasitas SDM yang didampingi oleh ketersediaan teknologi melalui kebijakan anggaran data geospasial yang porsinya meningkat tiap tahun.

Data geospasial yang dihasilkan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga proses *advice planning*.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang menyusun mekanisme integrasi antara Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Integrasi kedua kebijakan ini diharapkan dapat memperkaya ketersediaan data baik tabular maupun geospasial di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan memberikan sumbangsih data secara nasional.

Dalam rangka penyelarasan antara pusat dan daerah maka Penyusunan Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 telah disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2023 dengan
Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2023 dan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMSEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KAB. MUBA	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Rp. 42.193.534.722,-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 54.705.361.467,-	
Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Rp. 382.422.852.427,-	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rp. 956.493.991.368,-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Ranwal RKP 2023, P-RPJMD Prov Sumsel 2018-2023, RPD Kab. Muba 2023-2026, diolah

4.3. PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Musi Banyuasin Tahun 2023 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan :

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2023 dan RPJMN 2020-2024 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. Mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memperhatikan capaian kinerja tahun 2021 dan rencana target capaian Tahun 2023;
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
5. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Arah Kebijakan Pendanaan dan Kebijakan Belanja APBD

Kab. Muba "**Money Follow Program**" diprioritaskan untuk :

1. Pos Belanja Wajib dan Mengikat (Belanja Pegawai / Gaji);
2. Belanja wajib berdasar Undang-Undang (Pendidikan, Kesehatan dan Pengurangan Kemiskinan);
3. Belanja dalam rangka pencapaian prioritas RKPD 2023;
4. Belanja dalam rangka penanggulangan pandemi *covid-19* ;
5. Belanja untuk kepentingan publik, kepentingan yang luas dan strategis.

Pada tabel 4.11 dibawah ini, dijelaskan konsistensi sasaran, indikator kinerja dari prioritas daerah tahun 2023 dan RPD tahun pelaksanaannya:

Tabel 4.11

KONSISTENSI SASARAN, INDIKATOR KINERJA, PRIORITAS DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN RPD TAHUN PELAKSANAAN

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,8 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,8 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,62 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91,36 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,75 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,2 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	57,35 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60,38 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Angka kematian bayi	7/1000 KH	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Angka kematian ibu	64/100000 KH	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	40 Aplikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1 RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	2 PKM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	29 PKM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10 Dokumen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2 Dokumen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	12 Dokumen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	85 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	95 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase ketersediaan BMHP	90 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat esensial	86 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prevalensi stunting pada balita	16 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	80 %	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehatan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	65 %	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehatan
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	40 %	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Dinas Kesehatan
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	177.638 Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase desa yang melaksanakan PHBS	25 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS tempat kerja	45 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Sehat	83 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	55 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Peripaan)	80 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKP	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	80 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	59,26 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani	59,26 %	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	55 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	30 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	70 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	30 %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	25 %	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	30 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	25 %	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase PSU Yang dibangun / direhab	20 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1 orang/RT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Satuan Polisi Pamong Praja
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100 %	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Satuan Polisi Pamong Praja
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Layanan	77,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase Disabilitas yang mendapat Layanan	93,26 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	8 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Dinas Sosial
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	50 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	24,1 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60 %	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertama	7,8 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,7 Indeks	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	26 Jumlah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0,009 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1 Jumlah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	2 Jumlah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
74	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak	1 Jumlah	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	4 Jumlah	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
76	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Kecamatan Layak Anak	66,6 %	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	0,013 %	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	50 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
79	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Tingkat Konsumsi Energi Perkapita/Hari	2.090 Kkal/Kap/Hari	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan
80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	23 Desa	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	90 %	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	45,5 %	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	83,8 %	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
84	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup
85	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	67,05 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Luasan RTH yang dikelola	20 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Dinas Lingkungan Hidup
87	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Dinas Lingkungan Hidup
88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH	100 %	PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				Dinas Lingkungan Hidup
89	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Dinas Lingkungan Hidup
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100 %	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Dinas Lingkungan Hidup
91	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100 %	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup
92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan sampah	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Lingkungan Hidup
93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa Tertata	35 %	PROGRAM PENATAAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
98	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	6 Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
99	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	75 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	150 Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	15 Lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,3 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	7,70 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	65,69 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	65 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	41 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan
110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	84 %	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Dinas Perhubungan
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	83 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				Dinas Perhubungan
112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika
113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	55 %	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Dinas Komunikasi dan Informatika
114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah koperasi aktif	80 Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah Koperasi sehat	70 Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	5 Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPd	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPd	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	5 Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah UMK yang berdaya saing	200 UMK	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	13 UMK	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	88,03 Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Minat Investasi	60 %	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	2550 Jumlah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	88,76 Nilai	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	85 %	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi investasi PMA	1,8 T Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi investasi PMDN	1,5 T Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	3 Dok Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,94 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	32,98 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	17,16 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,28 Unit / 1000 penduduk	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	12,02 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Perkebunan
134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Komunikasi dan Informatika
136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi dan Informatika
137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 Kali	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	48 %	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	48 Unit	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi	294 Unit	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah	4 %	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,7 %	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	81 %	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5 Keg.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap	23.484 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	23.484 Ton		Dinas Perikanan
146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya	25.772 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	25.772 Ton		Dinas Perikanan
147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	60 %	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	60 %		Dinas Perikanan
148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Konsumsi Ikan	52,44 Kg/Kap/Th	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	52,44 Kg/Kap/Th		Dinas Perikanan
149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5 %	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5 %		Dinas Perikanan
150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah objek wisata	64 Unit	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	36.102 Orang	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah pelaku usaha pariwisata	383 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,55 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Dinas Perkebunan
154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,55 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Perkebunan
156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	15 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	25 %	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,55 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Dinas Perkebunan
159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	55,00 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya	2,35 %	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				Dinas Perkebunan
161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	2,35 %	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Perkebunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	11 %	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	9,4 %	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	30,88 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	100 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase peningkatan volume penjualan produk	7,5 %	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase UTPP Bertanda Tera Sah	41,00 %	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Mitra Usaha	4 Mitra Usaha	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	1 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	1 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	9,75 %	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SII/Nas	22 Unit Usaha	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	22	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	49 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
175	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan	13 Dokumen	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
176	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	14 Dokumen	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
177	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	210 Kasus	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
178	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu	300 pasang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
179	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	800 orang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
180	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	747 Dokumen	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
181	SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9 Dokumen	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
182	SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3 Dokumen	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
183	SEKRETARIAT DAERAH	Terbinanya Sarjana Bina Desa	45 Orang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
184	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring Dn evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
185	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	18 Laporan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	4 Dokumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
187	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	2.059 Dokumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
188	SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah rekomendasi izin pertambangan	2 Dokumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
189	SEKRETARIAT DAERAH	Laporan Inflasi secara periode	7 Laporan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
190	SEKRETARIAT DAERAH	Standar Satuan Harga (SSH)	3 Dokumen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
191	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	85 %	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat DPRD
192	PERENCANAAN	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
193	PERENCANAAN	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	90 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
194	PERENCANAAN	Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan	70 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
195	PERENCANAAN	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90 %	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
196	KEUANGAN	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
197	KEUANGAN	Persentase Pencairan Dana On Schedul	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
198	KEUANGAN	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
199	KEUANGAN	Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
200	KEUANGAN	Persentase Data Aset Yang Akurat	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
201	KEUANGAN	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13,84 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13,84 %		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
202	KEPEGAWAIAN	Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja baik	99,82 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
203	KEPEGAWAIAN	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	85,50 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
204	KEPEGAWAIAN	Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,49 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
205	KEPEGAWAIAN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,15 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
206	KEPEGAWAIAN	Survey Kepuasan ASN	87,25 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
207	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	90 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
208	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	90 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	INSPEKTORAT DAERAH	Opini terhadap laporan keuangan pemma	WTP Predikat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
210	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	40 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
211	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	67 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
212	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	85 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
213	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	80 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
214	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Inspektorat
215	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Maturitas SPIP	3,15 Skor	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Inspektorat
216	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda	CC Skor	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Inspektorat
217	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Babat Supat
218	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Toman)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Babat Toman
219	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Batanghari Leko
220	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Bayung Lencir
221	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Jirak Jaya
222	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Keluang
223	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Lais
224	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Lalan
225	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Lawang Wetan
226	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Plakat Tinggi
227	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sanga Desa)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Sanga Desa
228	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Sekayu

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Sungai Keruh
230	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Sungai Lilin
231	KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Tungkal Jaya
232	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Babat Toman	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Babat Toman
233	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Bayung Lencir	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Bayung Lencir
234	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Keluang	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Keluang
235	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Sanga Desa
236	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Sekayu
237	KECAMATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sungai Lilin	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Sungai Lilin
238	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Supat	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Babat Supat
239	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Babat Toman	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Babat Toman
240	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Batanghari Leko	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Batanghari Leko
241	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Bayung Lencir	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Bayung Lencir
242	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Jirak Jaya
243	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Keluang
244	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Lais
245	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Ialan	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Lalan
246	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Lawang Wetan
247	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Plakat Tinggi
248	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Sanga Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sekayu	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Sekayu
250	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Sungai Keruh
251	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Sungai Lilin
252	KECAMATAN	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Tungkal Jaya
253	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Babat Supat
254	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Toman)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Babat Toman
255	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Batanghari Leko
256	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Bayung Lencir
257	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Jirak Jaya
258	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Keluang
259	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Lais
260	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Lalan
261	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Lawang Wetan
262	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Plakat Tinggi
263	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sanga Desa)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Sanga Desa
264	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sekayu)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Sekayu
265	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Sungai Keruh
266	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Sungai Lilin
267	KECAMATAN	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Tungkal Jaya
268	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Babat Supat
269	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Toman	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Babat Toman
270	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Batanghari Leko
271	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Bayung Lencir
272	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Jirak Jaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Usuran	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Keluang
274	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Lais
275	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lalan	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Lalan
276	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Lawang Wetan
277	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat Tinggi	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Plakat Tinggi
278	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Sanga Desa
279	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Sekayu
280	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Sungai Keruh
281	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Sungai Lilin
282	KECAMATAN	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungal Jaya	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Tungal Jaya
283	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	26 %	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
284	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
285	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100 %	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
286	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	na %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
287	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	na %	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %		
292	KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %		
296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %		
297	KEUANGAN	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %		
298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	KEUANGAN	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		
300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %		
301	KEUANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %		
302	KEPEGAWAIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %		

Sumber: SIPD, diolah

Dari tabel rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan pendukung prioritas nasional di atas, dapat diidentifikasi pendanaan prioritas daerah RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.12.

Pendanaan Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Musi Banyuasin

PRIORITAS	URAIAN	ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD (Rp)	% TERHADAP RKPD 2023
1	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	42.193.534.722	2,94%
2	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	54.705.361.462	381%
3	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	382.422.852.427	26,63%
4	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	956.493.991.368	66,62%
T O T A L		1.435.815.739.979	

Dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran pada kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kebijakan Penanganan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid -19
Tahun 2023

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Memperkuat program jaminan sosial dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar dan memberikan jaminan penghasilan dasar	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang mendapat layanan	1,290,665,400	Dinas Sosial
2	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang meningkatnya kesejahteraan Sosial (PMKS)	300,009,000	Dinas Sosial
3	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	32,999,998,000	Dinas Sosial
4	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas yang mendapat layanan	4,249,448,322	Dinas Sosial
5	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirusahaan	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih	1,768,547,000	Disnakertrans

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
6	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirusahaan	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja		Disnakertrans
7	Menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui program-program pelatihan dan penempatan kerja	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pekerja yang ditempatkan	856,057,000	Disnakertrans
		Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	1,328,810,000	Disnakertrans
		Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		Disnakertrans
JUMLAH					42,793,534,722	

Sumber: SIPD. diolah.

Tabel 4.14
Kebijakan Penanganan Transformasi Sosial Dampak Covid -19
Tahun 2023

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi yang Prima dan Religius	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	193.971.120	Disnakertrans
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi yang Prima dan Religius	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	304.394.000	Disnakertrans
3	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Operasional pelayanan puskesmas	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	693.632.091	Dinkes
4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rasio penduduk yang bekerja	6.308.790.000	Disnakertrans
5	Peningkatan ketahanan ekonomi rakyat untuk penurunan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Persentase menurunnya keluhan konsumen	945.636.000	Dinas Perdagangan dan perindustrian
JUMLAH					Rp. 8.446.423.211	

Sumber: SIPD. diolah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,999,900	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,999,612	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,419,200	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,000,000	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,000,000	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,999,800	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	452,100,000	
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
								Pengadaan Mebel	92,421,000	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	763,941,400	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39,903,500,000	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USS)	0	
								Penambahan Ruang Kelas Baru	11,648,792,900	
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	523,789,000	
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	293,422,000	
								Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,050,225,700	
								Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16,232,618,480	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	337,033,080	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	
								Pengadaan Mebel Sekolah	2,999,850,000	
								Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	50,000,000	
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	411,849,400	
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,049,999,900	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,069,588,000	
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,093,290,000	
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77,250,299,000	
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	326,275,200	
								Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1,624,035,000	
								Penambahan Ruang Kelas Baru	4,355,263,000	
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	
								Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	
								Pembangunan Laboratorium	507,165,000	
								Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0	
								Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,579,792,200	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,105,684,400	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	299,673,600	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	549,986,900	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	
								Pengadaan Mebel Sekolah	2,250,000,000	
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,108,448,000	
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000	
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,719,574,800	
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	594,167,400	
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,680,700,000	
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	136,734,800	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	0	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	0	
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1,319,600,000	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Vang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional	2,462,369,000	
								Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	508,425.000	
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan	300,000,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Informasi Sejarah		
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya	631,949,800	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Oaerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1,174,099,500	
JUMLAH									49,999,900	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100,000,000	
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100,000,000	
								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100,000,000	
JUMLAH									100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sunqai Lilin

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7,284,644,752	
JUMLAH								7,284,644,752		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7,449,000,002	
JUMLAH								7,449,000,002		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Nqulak

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,076,050,604	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									2,076,050,604	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Babat Toman

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,257,107,600	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Investigasi Awai Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
JUMLAH									2,257,107,600	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Tanah Abang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,210,000,000	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH									1,210,000,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Lubuk Bintialo

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	679,049,910	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									679,049,910	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Cinta Karya

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	991,460,290	
JUMLAH									991,460,290	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Suka Damai

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	816,801,009	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
JUMLAH									816,801,009	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Sido Rahayu

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	755,800,500	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
								JUMLAH	755,800,500	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Tebing Bulang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,001,701,130	
JUMLAH									2,001,701,130	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Jirak

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,160,548,089	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									1,160,548,089	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Balai Aqung

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,734,530,660	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
JUMLAH								3,734,530,660		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Lumpatan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,685,755,907	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKSM)	0	
JUMLAH									2,685,755,907	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Lais

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,300,111,220	
JUMLAH									2,300,111,220	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Gardu Harapan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0018 Puskesmas Teluk Kijing

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,040,933,970	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		0	
JUMLAH									1,040,933,970		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 Puskesmas Tanjung Kerang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
JUMLAH									0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0020 Puskesmas Sungai Lilin

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,242,729,160	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
								JUMLAH	3,242,729,160	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0021 Puskesmas Sri Gununa

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	991,200,650	
JUMLAH									991,200,650	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0022 Puskesmas Karya Maju

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
JUMLAH									0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0023 Puskesmas Mekar iava

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	689,988,750	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
JUMLAH									689,988,750	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0024 Puskesmas Bayung Lencir

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,875,512,740	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	0	
								Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
								JUMLAH	3,875,512,740	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0025 Puskesmas Suka Jaya

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0026 Puskesmas Peninqqalan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,363,308,887	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
								JUMLAH	1,363,308,887	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0027 Puskesmas Sumber Harum

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
								JUMLAH	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0028 Puskesmas Berojaya Timur

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	828,713,850	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									828,713,850	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0029 Puskesmas Bandar Agung

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.0030 Puskesmas Karang Mukti

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	0	
								Investigasi Awai Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUM BER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	
JUMLAH									0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0031 Puskesmas Air Balui

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian luar Biasa (KLB)	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	382,012,223	
								Operasional Pelayanan Puskesmas	37,395,000	
								Investigasi Awai Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	
JUMLAH									0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	0	
								Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	
								Pengadaan Obat, Vaksin	0	
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10,372,934,408	
JUMLAH									0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,100,000,000	
								Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	500,000,000	
								Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	250,000,000	
								Normalisasi/Restorasi Sungai	6,300,000,000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	600,000,000	
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	619,330,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2,649,269,600	
								Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1,465,000,000	
								Pengelolaan Leger Jalan	3,800,000,000	
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2,100,000,000	
								Pembangunan Jalan	161,367,388,093	
								Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,740,000,000	
								Rehabilitasi Jalan	3,600,000,000	
								Pemeliharaan Rutin Jalan	6,950,000,000	
								Pembangunan Jembatan	28,752,000,000	
								Rehabilitasi Jembatan	2,350,000,000	
								Pemeliharaan Rutin Jembatan	2,500,000,000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0	
							Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rind Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	350,000,000	
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	300,000,000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	600,000,000	
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,729,169,838	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,468,278,000	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66,125,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,000,000	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000,000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	100,000,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,063,591,424	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,114,986,097	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599,790,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202,433,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,872,120	
								JUMLAH	1,100,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5,549,993,000	
								Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,369,958,490	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	8,449,987,000	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	400,000,000	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1,481,207,600	
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	17,008,823,000	
JUMLAH									5,549,993,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,712,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,630,000	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	199,949,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,025,620,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306,000,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,880,000	
JUMLAH									44,712,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0	
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300,000,000	
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	76,377,300	
							Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57,639,250	
								Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0	
								Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	219,895,823	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,755,141	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,398,855	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153,241,500	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157,364,928	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,120,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,984,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,359,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	98,534,660	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,816,000	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,446,500,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,130,000	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,083,030,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	12,200,000	
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	692,006,000	
								Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	28,050,000	
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	192,182,000	
								Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99,193,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Peningkatan Kapasitas SOM Satuan Palisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	172,636,000	
								Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	160,485,000	
								Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	149,919,250	
								Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0	
								Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	97,050,000	
							Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	499,452,000	
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,220,999,370	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	98,104,500	
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	78,380,000	
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,999,798	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,999,798	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,145,286,516	
JUMLAH									0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,762,604,826	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	102,589,000	
JUMLAH									4,762,604,826	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,605,419,860	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	290,805,000	
								Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	201,908,000	
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	610,592,400	
								Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38,544,000	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300,009,000	
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	32,999,998,000	
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	606,600,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37,250,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95,886,000	
								Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,010,220	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,022,200	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,031,740	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199,996,800	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,971,500	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,896,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399,957,000	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19,300,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	0	
								Pengadaan Mebel	93,484,200	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229,380,000	
								Pemeliharaan Mebel	0	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,972,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72,940,000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	134,118,000	
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Casar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	0	
								Penyediaan Alat Bantu	170,052,200	
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	149,999,972	
								Pemberian Layanan Kedaruratan	2,979,992,400	
								Pemberian Layanan Rujukan	320,129,750	
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	44,595,000	
								Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	584,679,000	
JUMLAH									6,605,419,860	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	378,010,000	
								Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	171,395,000	
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	404,578,100	
								Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	0	
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	149,271,200	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	227,484,000	
								JUMLAH	378,010,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84,710,000	
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	214,656,400	
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	159,995,000	
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	811,270,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	
JUMLAH								84,710,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	200,000,000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	46,964,000	
								Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	198,276,000	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	96,955,000	
								Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	58,640,000	
								Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	47,275,600	
								Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Tako Tani Indonesia	89,989,500	
							Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	137,560,000	
								Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35,912,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	43,449,000	
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	78,740,700	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2,122,866,700	
						PROGRAM PENGANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	46,964,000	
							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	46,826,000	
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	71,850,900	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,186,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,440,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,702,713,032	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40,730,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53,625,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96,636,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,660,310	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221,000,790	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55,974,692	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149,844,963	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,789,845	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,310,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322,171,000	
								Oukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30,900,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	129,893,700	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,232,000	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418,000,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151,910,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224,785,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	24,400,000	
								JUMLAH	200,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,999,620	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	
							Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,928,000	
							Administrasi Umum Perangkat Oaerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,998,416	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,246,911	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74,986,272	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,043,131	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	370,845,399	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,980,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399,999,000	
							Pengadaan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan Pemerintah Oaerah	Pengadaan Mebel	99,733,500	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364,459,632	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454,100,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263,240,000	
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	215,301,440	
								Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	499,974,649	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	99,497,000	
								Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16.258,040.515	
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SOM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	125,788,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	123,408,000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	125,130,000	
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah	149,862,000	
								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	99,735,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	124,718,000	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4,915,172,700	
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	69,642,200	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	18,600,808,000	
JUMLAH									46,999,620	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,999,800	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,999,870	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	37,030,000	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penataan Pendaftaran Penduduk	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	0	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	238,998,930	
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	0	
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	
								JUMLAH	49,999,800	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.13.4.01.0.00.15.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Sub Unit Organisasi : 2.13.4.01.0.00.15.0000 Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43,925,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,926,978	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,920,120	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74,996,139	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299,991,730	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,045,854	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,975,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,935,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355,511,000	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	223,950,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91,031,600	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	24,794,600	
						PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0	
								Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	0	
								Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	886,536,800	
								Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	179,984,000	
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	340,730,948	
								Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	739,427,976	
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	132,270,000	
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	890,502,600	
								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	
								Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	
JUMLAH									43,925,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIEProgram KKBPK	140,928,221	
								Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	110,736,600	
								Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	82,257,588	
								Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	104,707,605	
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	142,398,000	
								Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	
								Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	124,953,000	
								Peningkatan Kesertaan KB Pria	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	
								Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	167,207,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,998,520,191	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42,075,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149,950,934	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	175,540,000	
								Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	
								Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	
								Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	
								JUMLAH	140,928,221	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	295,159,250	
								Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	703,431,600	
JUMLAH									295,159,250	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10,395,105,293	
							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	821,346,530	
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	391,042,000	
JUMLAH									10,395,105,293	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	450,000,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,997,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,991,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,999,650	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149,997,558	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,022,792	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,000,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,996,000	
								JUMLAH	450,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47,417,000	
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	300,527,625	
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	67,050,390	
								Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	558,732,000	
								Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60,569,780	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	72,377,520	
JUMLAH									47,417,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52,728,750	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
								Pengadaan Mebel	99,979,000	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	379,992,300	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	20,007,106,450	
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	79,400,000	
								Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	10,265,832,000	
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7,500,000,000	
								Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	0	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	0	
								Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2,000,000,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengembangan Kapasitas SOM Kepramukaan Tingkat Daerah	350,008,000	
								Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	349,993,436	
								Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	0	
JUMLAH									52,728,750	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,728,085,718	
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	149,992,000	
JUMLAH									50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	448,802,232	
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	686,239,350	
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	413,134,760	
								Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	199,578,000	
								Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	338,007,800	
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	336,739,900	
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	342,188,557	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528,682,600	
								Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	548,012,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Harang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	56,571,150	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,713,791	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,564,119	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,175,365	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208,803,955	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71,086,953	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24,900,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	39,960,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439,749,000	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39,600,000	
								JUMLAH	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	227,831,948	
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,999,522	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,998,478	
							Administrasi Keuangan Perangkat Oaerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,942,037,727	
							Administrasi Barang Milik Oaerah pada Perangkat Oaerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88,191,250	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Oaerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97,818,750	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217,892,368	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,966,600,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	505,120,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,991,000	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi	1,842,719,465	
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,811,251,732	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan(Tanaman)	393,202,000		
							Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	2,161,683,000		
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	246,971,000		
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	389,705,549		
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	640,870,940		
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	623,706,000		
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	164,447,559		
								Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176,081,000		
								Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Prociuk Hewan	70,481,000	
								Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	91,773,000		
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	207,675,000		
JUMLAH									227,831,948		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	58,938,659	
								Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9,903,965,622	
								Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	45,000,000	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	269,828,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,087,560	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,162,780	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52,440,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25,900,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92,846,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332,295,400	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717,800,000	
JUMLAH									58,938,659	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdaqanqan dan Perindustrian

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Oaerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38,750,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101,084,000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	462,216,100	
								Pameran Dagang lokal	289,377,000	
								Peningkatan Citra Prociuk Ekspor	75,030,000	
								JUMLAH	38,750,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,389,023,768	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,901,790,000	
								Pemeliharaan Mebel	0	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,600,000,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,322,401,150	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	232,946,000	
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	401,088,070	
								JUMLAH	26,389,023,768	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi: 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.235,120,942	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41,625,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96,504,000	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	764,736,350	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,652,800,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205,250,000	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	865,920,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	610,384,258	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156,500,000	
							Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6,463,247,600	
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,520,000,000	
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	1,502,114,000	
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,502,114,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pembahasan APBD	927,582,000	
								Pembahasan APBD Perubahan	927,582,000	
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,502,114,000	
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,502,114,000	
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	190,200,000	
								Pelaksanaan Reses	2,092,419,540	
							Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1,700,246,244	
							Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,159,220,880	
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,759,312,000	
								JUMLAH	7,235,120,942	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	108,091,000	
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	144,763,189	
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145,805,520	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	89,079,600	
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	149,848,200	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	578,207,200	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	461,678,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	
								Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	136,517,202	
								Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	
								JUMLAH	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,999,978		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,999,990		
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	161,276,000	
									Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	49,440,000	
									Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47,660,000	
								Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Oaerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	294,805,358	
									Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	
							PROGRAM PENGELOLAAN HARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Oaerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	
									Penatausahaan Barang Milik Daerah	143,148,128	
									Inventarisasi Barang Milik Daerah	154,458,082	
									Pengamanan Barang Milik Daerah	601,667,748	
									Penilaian Barang Milik Daerah	71,915,366	
								Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	79,457,222		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	185,935,246	
								Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82,717,536	
								Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	292,365,670	
								Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	
JUMLAH								24,999,978		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499,276,250	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	332,299,800	
								Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,993,800	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	212,002,000	
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	325,019,135	
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	406,204,900	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70,000,100	
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	410,000,000	
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160,000,000	
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P8BP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	138,500,000	
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	425,160,000	
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	206,000,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	344,182,000	
								Penagihan Pajak Daerah	397,396,000	
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	59,979,000	
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	300,000,000	
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	59,996,000	
								Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	90,000,000	
								JUMLAH	25,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Sub Unit Organisasi: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,600,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,908,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Oaerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,075,685,481	
							Administrasi Barang Milik Oaerah pada Perangkat Oaerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46,282,500	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35,450,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94,355,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,985,811	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,904,458	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53,677,930	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198,900,678	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148,055,130	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Oaerah	Pengadaan Mebel	99,386,520	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205,795,739	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418,000,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,480,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,300,000	
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500,000,000	
								Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	120,000,000	
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50,011,000	
								Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	70,000,000	
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60,044,000	
								Mutasi dan Promosi ASN		
								Pengelolaan Mutasi ASN	149,794,000	
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	219,908,000	
								Pengelolaan Promosi ASN	199,821,000	
								Pengembangan Kompetensi ASN		
								Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	
								Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	1,179,861,000	
								Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Oiklat	699,890,000	
								Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	0	
								Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0	
								Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
								Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	117,071,000	
								Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	70,090,000	
								Pembinaan Disiplin ASN	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	136,014,000	
								Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	44,609,000	
								Evaluasi Disiplin ASN	93,402,000	
								JUMLAH	24,600,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,431,015,458	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59,562,500	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55,950,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	256,996,000	
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	200,000,000	
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	156,300,000	
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	352,103,200	
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	250,000,000	
								JUMLAH	14,431,015,458	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Oaerah	Pengadaan Mebel	66,306,750	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,200,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,854,650	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,313,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,121,793,951	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	192,742,326	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Oaerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,031,871	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18,000,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Oaerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,968,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	19,968,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44,140,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Oesa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18,000,000	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18,000,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20,000,000	
								JUMLAH	66,306,750	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0001 Kelurahan Serasan Java

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299,999,922	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299,999,811	
								JUMLAH	0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0002 Kelurahan Soak Baru

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,999,852	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299,999,922	
								JUMLAH	0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0003 Kelurahan Balai Agung

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299,995,770	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299,999,928	
								JUMLAH	299,995,770	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0004 Kelurahan Kayuara

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300,000,000	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299,999,900	
								JUMLAH	300,000,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251,309,000	
						PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,056,040	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21,131,100	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,988,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,988,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,044,908,942	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18,882,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47,060,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,998,217	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,553,489	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,562,670	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,517	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,999,864	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,996,620	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	14,944,830	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,121,548	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,500,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14,625,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8,775,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15,110,400	
								JUMLAH	251,309,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	17,766,000	
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,835,000	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,971,423	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,568,690	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,998,615	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,958,991	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,954,000	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10,800,000	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,984,000	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,004,000	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,336,000	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307,500,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,080,000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	74,725,200	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,020,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15,115,740	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13,280,000	
								JUMLAH	17,766,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0001 Kelurahan Babat

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299,450,250	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299,948,588	
								JUMLAH	299,450,250	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0002 Kelurahan Manqun Java

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299,546,820	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299,988,038	
JUMLAH									299,546,820	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,002,000	
								Administrasi Keuangan Perangkat Oaerah	3,459,471,884	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Oaerah	12,802,000	
								Administrasi Umum Perangkat Oaerah	9,995,261	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,648,096	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,997,898	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,062,110	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,827,266	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,050,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,965,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	34,077,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,030,000	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,000,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77,160,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	25,150,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323,770,000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.533,094	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,650,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	31,450,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11,300,000	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9,000,000	
JUMLAH									20,000,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,362,466	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	344,988,000	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238,013,900	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	
JUMLAH									99,362,466	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	
								Pengadaan Mebel	53,053,338	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108,240,000	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	257,450,000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17,815,500	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,813,997,410	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,972,717	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,991,282	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,999,753	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,995,621	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,999,920	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,007,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,908,900	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180,200,000	
JUMLAH									0	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
								Pengadaan Mebel	66,878,400	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	129,302,800	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,588,500	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,530,000	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12,015,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		4,500,000	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		10,706,100	
JUMLAH									0		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9,920,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10,850,000	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,106,958,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12,325,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		47,355,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5,059,050	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39,725,900	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4,995,540	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor		49,791,900	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14,997,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	97,800,000	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,564,209	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139,300,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,980,000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,460,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	141,450,000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9,917,200	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	29,825,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29,825,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	23,935,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	29,730,000	
JUMLAH									9,920,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin
 Sub Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Oaerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17,150,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42,355,000	
							Administrasi Umum Perangkat Oaerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,283,975	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,988,431	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,993,068	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,007,215	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	48,657,960	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,234,416	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263,600,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,860,000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	255,225,269	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15,000,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15,000,000	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15,000,000	
JUMLAH									20,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin
 Sub Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.37.0001 Kelurahan Sungai Lilin

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,000,000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300,000,000	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	
								JUMLAH	100,000,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,000,000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300,000,000	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	
JUMLAH									100,000,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir Sub Unit
 Organisasi: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12,100,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,460,000	
JUMLAH									12,100,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,772,613,783	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42,750,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,182,500	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,444,300	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,312,700	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,294,300	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,231,400	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,795,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	74,760,000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203,371,000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,630,167	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,800,000	
							Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13,410,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11,920,000	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11,920,000	
JUMLAH									2,772,613,783	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,220,000	
JUMLAH									15,220,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,300,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15,300,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14,568,750	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34,230,000	
JUMLAH									15,300,000	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,988,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,988,000	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9,780,000	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49,935,000	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,913,410	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,672,063	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,676,555	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,016,699	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,006,900	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,992,180	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166,989,510	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	
								Pengadaan Mebel	80,271,549	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	241,924,080	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,555,000	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,562,040	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17,482,500	
JUMLAH									14,988,000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN **2023**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Musi Banyuasin
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023					
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6,937,500	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,460,000	
								JUMLAH	6,937,500	



BAB V

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN

DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

“Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, empat Prioritas Daerah Tahun 2023 menjadi koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2023”

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/111/BAPPEDA/SE/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Arah Kebijakan Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 diarahkan untuk **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”** dengan prioritas daerah sebagai berikut :

1. **Prioritas Daerah 1:** Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;

2. **Prioritas Daerah 2:** Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
3. **Prioritas Daerah 3:** Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. **Prioritas Daerah 4:** Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan beban Masyarakat;
2. Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC;
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan tata Kelola kelembagaan pertanian dan perikanan;
4. Penumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan;
5. Percepatan pelaksanaan program TORA;
6. Optimalisasi Perencanaan yang berbasis Satu Data Muba untuk; Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Jalan Kabupaten, Air Minum, Sanitasi, pemukiman Kumuh dan Kawasan;
7. Peningkatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
8. Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan;
9. Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan;
10. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba;
11. Peningkatan Akses terhadap Layanan publik.

Adapun target indikator tujuan dan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 5.1
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Angka Kemiskinan	15,05
		Indeks Gini	0,306
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8
		Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25
		Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	C

Sumber: RPD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Selain target indikator tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, terdapat juga target capaian indikator makro sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu PDRB Per Kapita pada tahun 2023 sebesar 132,16 berdasarkan hasil proyeksi analisis indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 serta target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berikut disampaikan capaian SPM pada tahun 2021:

Tabel 5.1a

Rencana Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA LAYANAN SPM	JENIS	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
			3	4	5
	2		PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. MUSI BANYUASIN		108.310.321.085	101.855.660.764	94.04%
1 .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	1 . Penambahan Ruang Kelas Baru		6.695.300.000	6.582.981.000	98.32%
	2 . Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		9.800.000.000	9.797.684.000	99.98%
	3 . Pengembangan Karir Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1.325.000.000	166.577.600	12.57%
	4 . Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		6.423.760.000	6.363.835.280	99.07%
	5 . Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas		20.341.044.755	19.136.807.250	94.08%
	JUMLAH		44.585.104.775	42.047.885.130	94.31%
2 .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	1 . Pengadaan Perlengkapan Siswa		1.950.000.000	1.924.871.200	98.71%
	2 . Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		3.938.020.000	3.914.824.200	99.41%
	3 . Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		1.988.730.000	1.808.492.880	90.94%
	4 . Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.700.000.000	176.914.800	10.41%
	5 . Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		650.028.800	271.565.850	41.78%
	6 . Penambahan Ruang Kelas Baru		19.659.097.000	19.209.154.811	97.71%
	7 . Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas		17.228.263.500	17.092.737.100	98.85%
	JUMLAH		47.114.139.300	44.335.560.841	94.10%
3 .	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	1 . Pengadaan Perlengkapan PAUD		80.000.000	80.000.000	100.00%
	2 . Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		42.958.000	42.958.000	100.00%
	3 . Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		80.000.000	80.000.000	100.00%
	4 . Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		150.000.000	149.265.700	99.51%
	5 . Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		183.770.000	98.766.940	53.74%
	6 . Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		83.415.000	98.766.940	53.74%
	7 . Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2.997.963.210	2.921.564.920	97.45%
	8 . Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung/Ruang Guru PAUD		2.710.640.800	2.643.212.200	97.51%
	JUMLAH		6.328.747.010	6.092.463.160	96.27%

NO	INDIKATOR KINERJA JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	TOTAL SERAPAN
4 .	Pengelolaan Pendidikan Normal/Kesetaraan		
	1 . Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.646.100.000	3.241.666.253
	JUMLAH	3.646.100.000	3.241.666.253
5 .	Kegiatan Lainnya		
	1 . Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	394.024.000	326.546.900
	2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	912.644.000	837.471.900
	3 . Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.680.886.000	1.618.508.000
	4 . Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	750.000.000	609.800.180
	5 . Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	2.898.676.000	2.745.758.400
	JUMLAH	6.636.230.000	6.138.085.380
	JUMLAH KESELURUHAN	108.310.321.085	101.855.660.764

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR SPM	TARGET 2020	REALI-SASI
1	2	3	4
A	PELAYANAN KESEHATAN DASAR		
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	98,04 %
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	98,54 %
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	100,29 %
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	95,61 %
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	94,49 %
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	98,85 %
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	98,00 %
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	99,70 %
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	98,63 %
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100 %	97,60 %
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang TB	100 %	94,55 %
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV	100 %	92,29 %

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.3
Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan
Umum Tahun 2021

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. MUSI BANYUASIN				84,62%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah warga yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari-hari			87,94%
	Jumlah yang harus dilayani :	* jumlah total yang harus dilayani 644.832	* jumlah total yang terlayani 567.290	* yang belum terlayani 77.542	87,97 %
		Jumlah Warga yang berhak mendapat layanan (1)	Jumlah warga yang terlayani (2)	Jumlah yang Belum terlayani (3)	87,92%
	1. Pelayana n SPAM Jaringan Perpipaan	386.899	341.310	45.589	88,22%
	2. Pelayana n SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	257.933	225.980	31.953	87,61%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			81,30%
	* Jumlah yang harus dilayani :	* jumlah total yang harus dilayani 644.832	* jumlah total yang terlayani 523.990	* yang belum terlayani 120.842	81,26%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
		Jumlah Warga yang berhak mendapat layanan (1)	Jumlah warga yang terlayani (2)	Jumlah yang Belum terlayani (3)	
					81,34%
	1. Pelayanan penyediaan dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima: masyarakat yang bermukim diwilayah SPALDT	10.000	8.125	1.875	81,25%
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	540.456	438.487	101.969	81,13%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	3. Pelayanan SSPAD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	122.236	99.794	22.442	81,64%

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.4
Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan
Rakyat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. MUSI BANYUASIN			72,92%
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		62,50%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Huni Bagi Korban Bencana Kab/ Kota				
	Jumlah yang harus dilayani :	* jumlah total yang harus dilayani 20	* jumlah total yang terlayani 20	* yang belum terlayani 0	100 %
		Jumlah Yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang Belum terlayani (3)	25,00%
	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	2. Rehabilit asi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	3. Pembang unan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	4. Pembang unan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi Korban Bencana	20	20	0	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			83,33%
	* Jumlah yang harus dilayani :	* jumlah total yang harus dilayani	* jumlah total yang terlayani	* yang belum terlayani	100%
		154	154	0	
		Jumlah total yang harus layanani (1)	Jumlah total yang terlayani (2)	Jumlah yang Belum terlayani (3)	66,67%
	1. Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	9	9	0	100%
	2. Subsidi Uang Sewa	0	0	0	0%
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni	145	145	0	100%

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.5
Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum
Linmas Tahun 2021

Indikator SPM	Target	Capaian (%)	Pembiayaan		
1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (Penegakan Perda)	100%	100	1	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				KEGIATAN	ANGGARAN
			-	KEGIATAN Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota DENGAN SUB KEGIATAN Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	598.227.000,-
2 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	97	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				KEGIATAN	ANGGARAN
			-	KEGIATAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota DENGAN SUB KEGIATAN Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.452.114.000,-

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.6
Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Bencana Daerah Tahun 2021

No	Indikator kinerja (Kegiatan)	Jenis Layanan SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT		
			Target (Jumlah yang harus dilayani) *Jiwa	Realisasi (Jumlah yang Terlayani) *Jiwa	Total Pencapaian %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota.	1) Identifikasi dan Pemetaan terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana;	321.065	321.065	100
		2) Identifikasi Warga yang Berpotensi menjadi Korban Bencana;	173.808	173.808	100
		3) Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana;	114.698	114.698	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	1) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	173.808	173.808	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	1) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	8.435	8.435	100
		2) Pendataan terhadap Warga yang Terkena/Menjadi Korban Bencana;	8.435	8.435	100
		3) Melakukan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Respon Cepat Darurat Bencana;	184	184	100
		4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;	8.435	8.435	100
		5) Respon Cepat KLB Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas;	184	184	100
		6) Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana.	8.435	8.435	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2021. diolah.

Tabel 5.7
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Sosial
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	URAIAN PERHITUNGAN	CAPAIAN 2021
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}} \times 100\%$	
2	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100
		$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$	

Sumber: Laporan SPM Kab. Muba Tahun 2020. diolah.

Adapun target pemenuhan SPM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan
Pagu Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Pada RKPD Kab. Muba
Tahun 2023

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah (USB)	15,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(SD/Mi,SMP /MTs)				Penambahan Ruang Kelas Baru	11,248,795,400	
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,150,825,000	
							Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	15,532,645,480	
							Pengadaan Mebel Sekolah	2,999,850,000	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	411,849,400	
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,049,999,900	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,069,588,000	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,093,290,000	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82,052,299,000	
							Peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS SD	326,275,200	
				100%	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1,624,035,000	
							Penambahan Ruang Kelas Baru	2,864,970,000	

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	299,673,600	
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,552,273,000	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,105,684,400	
							Pengadaan Mebel Sekolah	2,250,000,000	
							Pembangunan Labortorium	507,165,000	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,875,848,000	
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,719,574,800	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	594,167,400	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35,268,700,000	
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	136,734,800	

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	1,990,700,000	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase terlayannya pendidikan anak usia dini 0-6 tahun di PAUD	100%	Pengelolaan Proses Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200,000,000	
							Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung/R uang Kelas/Ruang Guru PAUD	350,967,600	
							Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan PAUD	422,068,200	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	85,000,000	
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	139,381,500	
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	80,000,000	
2	Kesehatan	Pelayanan dalam bidang kesehatan yang bersifat promotif dan pencegahan/p reventif		100%	Program sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota	Gernas dan PHBS	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100,000,000	DINKES

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa							
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3,999,998,000	PERKIM
						Pembangunan Baru SPAMBukaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	26,759,997,000		
100%				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	33,041,909,500		
100%				Program pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	458,770,000		
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Pogram peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	2,502,800,000	PERKIM
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (Penegakan Perda)	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	692,006,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							28,050,000		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota							192,182,000		
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasa yang Bernuansa Hak Asasi Manusia							172,636,000		

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Kerjasama antar Lembagada n Kemitraan dalamTeknik Pencegaha n danPenang anan Gangguan Ketentram an danKeterti ban Umum	160,485,000	
							Pengadaan dan Pemelihara an Sarana dan Prasarana Ketentram an dan Ketertiban Umum	149,919,250	
							Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pencegakan Peraturan Daerah dan Perkada	97,050,000	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamat an dan evakuasi korban kebakaran tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	85%	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Pemadama n dan Pengendali an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	1,220,999,370	Satuan Polisi Pamong Praja
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegaha n, Penanggul angan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	98,104,500	
	Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penyediaan Permakana n	76,631,000	DINSOS

No.	SPM BIDANG	Jenis Pelayanan SPM	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	170,052,200	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	149,999,972	
							Pemberian Layanan Kedaruratan	2,979,992,400	
							Pemberian Layanan Rujukan	320,129,750	
			Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota						
TOTAL								261,874,072,622	

Sumber: SIPD. diolah.

Tabel 5.9

**Kebijakan Penanganan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid -19
Tahun 2023**

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Memperkuat program jaminan sosial dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar dan memberikan jaminan penghasilan dasar	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang mendapat layanan	1,290,665,400	Dinas Sosial
2	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang meningkatnya kesejahteraan Sosial (PMKS)	300,009,000	Dinas Sosial
3	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	32,999,998,000	Dinas Sosial
4	Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas yang mendapat layanan	4,249,448,322	Dinas Sosial

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirusahaan	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih	1,768,547,000	Disnakertrans
6	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirusahaan	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja		Disnakertrans
7	Menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui program-program pelatihan dan penempatan kerja	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pekerja yang ditempatkan	856,057,000	Disnakertrans
		Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	1,328,810,000	Disnakertrans
		Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		Disnakertrans
JUMLAH					42,793,534,722	

Sumber: SIPD, diolah

Tabel 5.10

Kebijakan Penanganan Transformasi Sosial Dampak Covid -19 Tahun 2023

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi yang Prima dan Religius	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	193.971.120	Disnakertrans
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi yang Prima dan Religius	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	304.394.000	Disnakertrans
3	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Operasional pelayanan puskesmas	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	693.632.091	Dinkes
4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rasio penduduk yang bekerja	6.308.790.000	Disnakertrans
5	Peningkatan ketahanan ekonomi rakyat untuk penurunan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Persentase menurunnya keluhan konsumen	945.636.000	Dinas Perdagangan dan perindustrian
JUMLAH					Rp. 8.446.423.211	

Sumber: SIPD, diolah

Tabel 5.11

**Sasaran Program Prioritas
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
1	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
			Pengumpulan Sumbangan dalam	Dinas Sosial

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
	Menurunkan Angka Kemiskinan		Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Dinas Tanaman Pangan,

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Hortikultura dan Peternakan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Dinas Perdagangan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Perindustrian
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
				Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar	Badan Penanggulangan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Penanggulangan Bencana	Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Bidang Kesehatan	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Kualitas Keluarga	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Keuangan Daerah.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Badan Perencanaan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua OPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua OPD
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua OPD

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Layanan Administrasi DPRD	Semua OPD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua OPD
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semua OPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua OPD
			Penataan Organisasi	Semua OPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua OPD
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Semua OPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua OPD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua OPD
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Dinas Kependudukan

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Administrasi Kependudukan	dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sekayu

Tabel 5.12

**Pendanaan dan lokasi per Program Prioritas untuk Prioritas Daerah I :
“MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN”**

Prioritas Daerah 1 RKPD 2023	Program Pendukung	Jumlah Kegiatan Prioritas	Jumlah Sub Kegiatan Prioritas	Sumber Dana	Alokasi Pendanaan	Total Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	3	6	APBD Kab. Musi Banyuasin	1.290.665.400	42.193.534.722
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	2		33.300.007.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	2	6		4.249.448.322	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1		6.749.762.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	2	3		856.057.000	
	Program Hubungan Industrial	2	3		1.328.810.000	

Tabel 5.13

**Pendanaan dan lokasi per Program Prioritas untuk Prioritas Daerah II :
“MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN UNTUK
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI”**

Prioritas Daerah 2 RKPD 2023	Program Pendukung	Jumlah Kegiatan Prioritas	Jumlah Sub Kegiatan Prioritas	Sumber Dana	Alokasi Pendanaan	Total Pendanaan
Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	15	APBD Kab. Musi Banyuasin	12.336.636.514	54.705.361.467
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4	5		8.246.449.773	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	5		2.920.922.352	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	3		1.250.334.440	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	7		3.200.151.492	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	4		1.168.949.600	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1	1		450.000.000	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	1	3		500.000.000	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1	1		350.000.000	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	3		214.978.300	
	Program Pengembangan UMKM	1	1		1.305.431.865	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	1		507.625.000	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2	3		7.590.136.482	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	4		4.346.321.539	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	2	2		441.976.000	
	Program Promosi Penanaman Modal	1	1		300.527.625	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3	4		2.185.592.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	3		1.395.552.238	
Program Penyuluhan Pertanian	1	5	5.993.776.247			

Tabel 5.14

**Pendanaan dan lokasi per Program Prioritas untuk Prioritas Daerah III :
“MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Prioritas Daerah 3 RKPD 2023	Program Pendukung	Jumlah Kegiatan Prioritas	Jumlah Sub Kegiatan Prioritas	Sumber Dana	Alokasi Pendanaan	Total Pendanaan
Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	1	11		264.785.834.883	382.422.852.427
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	2		30.759.995.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	1		33.041.909.500	
	Program Kawasan Permukiman	1	1		600.000.000	
	Program Pengembangan Perumahan	1	1		2.199.993.000	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	-	-		-	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	1		399.970.000	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	1		14.107.825.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	2		248.538.000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	1		124.718.000	
	Program Penanggulangan Bencana	4	17		5.629.036.240	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	3		6.483.325.515	
	Program Pengelolaan Persampahan	1	3		23.315.631.200	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	2		726.076.089	

Tabel 5.15

**Pendanaan dan lokasi per Program Prioritas untuk Prioritas Daerah IV :
“MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Prioritas Daerah 4 RKPD 2023	Program Pendukung	Jumlah Kegiatan Prioritas	Jumlah Sub Kegiatan Prioritas	Sumber Dana	Alokasi Pendanaan	Total Pendanaan
Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Pendidikan	4	28		188.502.360.680	956.493.991.368
	Program Pemasaran Pariwisata	1	1		1.044.997.350	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	4		400.000.000	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	2		409.995.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	39		113.249.247.626	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	2		93.790.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	-	-		-	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1	2		370.000.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4	11		2.956.628.500	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	3		550.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	1		133.583.200	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	3	3		150.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	5	18		228.022.098.668	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	15		3.604.439.135	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	3		3.707.235.600	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	9		2.166.759.723	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3	3		497.479.482	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15	48		1.523.837.584.651	

Prioritas Daerah 4 RKPD 2023	Program Pendukung	Jumlah Kegiatan Prioritas	Jumlah Sub Kegiatan Prioritas	Sumber Dana	Alokasi Pendanaan	Total Pendanaan
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1		102.589.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	9		2.019.975.633	
	Program Kepegawaian Daerah	4	15		3.960.392.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	4		758.729.690	
	Program Aplikasi Informatika	3	3		11.607.493.823	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4	9		11.006.670.298	
	Program Pendaftaran Penduduk	1	1		392.134.190	
	Program Pencatatan Sipil	1	1		238.998.930	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	8		1.628.204.264	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	2		7.770.530.798	

Terkait dengan target penurunan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 menjadi 13.20 persen dari kondisi tahun 2020 yang sebesar 16.13%. perlu kinerja penurunan persentase kemiskinan yang cukup tinggi dengan dukungan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk pengurangan angka kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 5.16

**Alokasi Kegiatan Strategi Penurunan Kemiskinan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2022**

No.	Sub Kegiatan	Penerima Manfaat	Alokasi Dana 2020 (Rp.)	Alokasi Dana 2021 (Rp.)	Alokasi Dana 2022 (Rp.)	OPD Pelaksana	Lokasi
1	Penyediaan Jamban / Tankisepdik Bagi Masyarakat yang Kurang mampu	157 KK	1.200.000.000	55.694.300.000	-	Dinas Perkim	Kab. Muba
2	Penyediaan cincin sumur bagi sumber air minum yang tidak terlindungi	670 KK	3.750.000.000	23.770.700.000	-	Dinas Perkim	
3	Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan (Bis Sekolah)	Kab. Muba	600.000.000	-	-	Dishub	Kab. Muba
4	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	11000 siswa	556.000.000	2.024.920.000	1.983.385.000	Disdik	
5	Pengadaan pakaian seragam sekolah	7000 siswa	1.145.944.000	2.025.920.000		Disdik	Kab. Muba
6	Integrasi JAMKESDA ke JKN/BPJS Kesehatan (UHC)	60.000 jiwa	55.000.000.000	70.000.000.000	69.999.999.949	Dinkes	
7	Pasar Murah Sembako	Kab. Muba	1.300.000.000	1.384.240.000	945.636.000	Disperindag	Kab. Muba
8	Penyelenggaraan Santunan Kematian	195.347 org	2.833.700.000	2.753.375.000	-	Sekda	
9	Penanganan Kasus Hukum Masyarakat Miskin	20 kasus	1.027.190.000	960.667.000	1.685.057.250	Sekda	Kab. Muba
10	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kab. Muba	675.570.000	395.000.000	349.994.000	Disdukcapil	
11	Pendampingan UMKM untuk mendapatkan Fasilitas Permodalan	260 UMK	100.000.000	209.140.000	600.540.000	Dinas Koperasi	Kab. Muba

No.	Sub Kegiatan	Penerima Manfaat	Alokasi Dana 2020 (Rp.)	Alokasi Dana 2021 (Rp.)	Alokasi Dana 2022 (Rp.)	OPD Pelaksana	Lokasi
12	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	5 Desa di 2 Kecamatan	100.000.000	97.500.000	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
13	Pelatihan Kelompok Pangan Olahan	Kab. MUBA	92.315.000	50.000.000	1.090.166.200	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Muba
14	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Jalan Usaha Tani)	Petani Kec. Lalan	576.000.000	2.561.000.000	-	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan	
15	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	10 kelompok	655.000.000	250.000.000	249.996.320	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan	Kab. Muba
16	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija (Benih dan Pupuk)	Petani Kec. Lalan	650.000.000	560.000.000	-	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan	
17	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja (Pelatihan Tata Boga Ibu rumah tangga dan remaja)	16 orang	120.000.000	342.388.000	2.543.519.000	Disnaker	Kab. Muba
18	Pelatihan Produk Unggulan di Unit Permukiman Transmigrasi	60 orang	69.000.000	1.271.549.000	-	Disnaker	
19	Monitoring Perikanan Tangkap/pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	70 orang	200.000.000	2.038.837.000	-	Dinas Perikanan	Kab. Muba
20	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	60 orang Calon Usaha Pemula	160.000.000	202.000.000	3.495.799.700	Dinas Koperasi	
21	Pengembangan industri kecil dan menengah untuk komoditi daerah	40 Peserta Pelatihan Souvenir Berbahan Karet dan 20 Peserta berbahan Limbah Kayu	200.000.000	2.695.412.000	1.650.000.000	Disperindag	Kab. Muba
22	Pengembangan industri kecil dan menengah untuk komoditi daerah	40 Peserta Pelatihan Souvenir Berbahan Karet dan 20 Peserta berbahan Limbah Kayu	200.000.000	118.160.000	350.000.000	Disperindag	
23	Pendampingan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil	1500 UMK	182.000.000	221.140.000	307.204.620	Dinas Koperasi dan UKM	Kab. Muba
24	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	10 orang	177.560.000	2.769.300.000	-	Dinas Tenaga Kerja	
25	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi	Kab. Muba 2 event	500.000.000	150.000.000	664.895.600	Dinas Perkebunan	Kab. Muba

No.	Sub Kegiatan	Penerima Manfaat	Alokasi Dana 2020 (Rp.)	Alokasi Dana 2021 (Rp.)	Alokasi Dana 2022 (Rp.)	OPD Pelaksana	Lokasi
	pertanian/perkebunan tepat guna						
26	Pendampingan Usaha dan Pemasaran produk	60 orang	498.000.000	891.000.000	1.161.911.310	Dinas Perikanan	
27	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kab. Muba	-	10.143.150.000	1.150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	Kab. Muba
Jumlah			72.568.279.000	183.579.698.000	88.128.108.629		

Sumber: sipp.mubakab.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 serta Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 5.18 berikut ini:

Tabel 5.17
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun s.d April 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp.)	
		2021	2022
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.346.398.574,74	388.258.361.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	79.315.580.439	90.755.404.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	8.022.396.031	7.915.942.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.341.957.795	17.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	272.666.464.308	272.087.015.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.025.394.578.711	2.723.426.373.000
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.804.111.596.486	2.623.921.007.000
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.851.636.079.750	-
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	372.756.063.000	-
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	292.571.213.639	-
4.2.1.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	233.443.654.097	-
4.2.1.5	Dana Insentif Daerah (DID)	53.704.586.000	-

No	Uraian	Realisasi (Rp.)	
		2021	2022
4.2.2	Transfer antar Daerah	221.282.982.225	99.505.366.000
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.916.782.665	-
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	109.366.199.560	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	107.950.732.347	97.320.999.000
4.2.1.6	Pendapatan Hibah	107.950.732.347	97.320.999.000
TOTAL		3.510.691.709.632	3.209.005.733.000

Sumber: BPKAD, diolah

Tabel 5.18

Realisasi Belanja

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sd. April 2022

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)	
		2021	2022
5.1	BELANJA OPERASI	2.271.258.011.014	2.115.018.164.922
5.1.1	Belanja Pegawai	953.392.507.260	965.901.185.024
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.269.485.693.192	1.126.762.667.431
5.1.3	Belanja Bunga	15.843.408.598	10.040.682.467
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	32.224.901.964	11.913.630.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	311.500.000	400.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.097.177.454.587	593.505.673.332
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.586.787.866	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.093.954.709	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315.940.503.064	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.304.162.158	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.252.046.790	-
5.3	Belanja Tak Terduga	1.018.853.800	2.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	467.003.286.509	263.393.643.700
Total		3.836.457.605.910	2.974.417.481.954

Sumber: BPKAD, diolah

Tabel 5.19
Struktur RKPD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

No	Uraian	Prognosis Tahun 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN	2.790.518.902.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	373.551.175.000
4.1.1	Pajak Daerah	83.420.404.000
4.1.2	Retribusi Daerah	7.525.360.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.000.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	263.605.411.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.319.264.716.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.190.641.697.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.623.019.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.703.011.000
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	97.703.011.000
5	BELANJA	2.688.680.652.297
5.1	BELANJA OPERASI	2.020.722.684.072
5.1.1	Belanja Pegawai	1.014.307.967.107
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	980.633.906.965
5.1.3	Belanja Bunga	4.700.000.000
5.1.4	Belanja Subsidi	20.695.170.000
5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	
5.2	BELANJA MODAL	444.009.725.525
5.2.1	Belanja Modal Tanah	13.560.615.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.726.312.638
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.399.910.884
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.490.782.603
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.832.104.400
5.3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	222.448.242.700
	Surplus/(Defisit)	101.838.249.703

No	Uraian	Prognosis Tahun 2023 (Rp)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.838.249.703
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	91.838.249.703
	PEMBIAYAAN NETTO	(101.838.249.703)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0
	Total APBD	2.820.518.902.000

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 serta RKP tahun 2023 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja di tahun 2023. Berikut ini merupakan rekapitulasi dan penjabaran pada program dan kegiatan prioritas

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Tabel 5.20

**Rekapitulasi Pagu RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023**

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD (RP.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	610,090,578,149
2	Dinas Kesehatan	385,232,161,528
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	162,372,934,408
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	276,384,029,911
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	156,587,876,889
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,737,431,218
7	Satuan Polisi Pamong Praja	21,107,089,689
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,374,279,612
9	Dinas Sosial	49,469,020,011
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17,785,727,920
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,720,199,267
12	Dinas Ketahanan Pangan	10,301,471,132
13	Dinas Lingkungan Hidup	54,163,987,420
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,746,144,547
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,338,913,019
16	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	10,857,840,876
17	Dinas Perhubungan	16,948,688,479
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	32,371,637,178
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9,886,607,563
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13,537,925,569
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	59,158,130,895
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12,606,763,775
23	Dinas Perikanan	14,836,939,575
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	39,611,707,443
25	Dinas Perkebunan	31,619,997,692
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	28,855,810,888
27	Sekretariat Daerah	114,017,315,007

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD (RP.)
28	Sekretariat DPRD	91,645,015,570
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21,249,193,577
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	248,269,058,889
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	26,489,900,770
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	13,324,159,247
33	Inspektorat	21,989,561,186
34	Kecamatan Sekayu	11,678,407,877
35	Kecamatan Lais	4,362,476,677
36	Kecamatan Babat Toman	6,724,411,564
37	Kecamatan Keluang	5,350,805,975
38	Kecamatan Sanga Desa	6,431,608,310
39	Kecamatan Plakat Tinggi	3,050,982,941
40	Kecamatan Batanghari Leko	3,233,331,722
41	Kecamatan Sungai Keruh	3,307,358,699
42	Kecamatan Sungai Lilin	6,428,367,642
43	Kecamatan Bayung Lencir	6,417,466,218
44	Kecamatan Lalan	3,924,506,150
45	Kecamatan Tungkal Jaya	3,371,564,589
46	Kecamatan Lawang Wetan	3,831,356,739
47	Kecamatan Babat Supat	3,229,363,694
48	Kecamatan Jirak Jaya	2,650,544,601
		2.688.680.652.297

Sumber: SIPD, diolah.

Adapun rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
											Nasional	Daerah								
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1,174,099,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Siswa dan Mahasiswa Berprestasi	1 Laporan	6,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	2	1									282,995,998,740							675,701,486,623		
1	2	1									198,846,437,301							466,691,237,087		
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	125,000,000							11 Dokumen	180,000,000	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	1 Laporan	80,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	168,670,712,350							8 Dokumen	190,260,000,000	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100 Orang/bulan	168,670,712,350	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	1100 Orang/bulan	190,000,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	120,000,000							100 %	350,580,000	
1	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	140,580,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Laporan	35,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	374,250,000							11 Dokumen	1,075,000,000	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	274,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kesehatan di kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	350,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kesehatan di kabupaten Musi Banyuasin	4 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan pengadministrasian umum	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	1,180,000,000							11 Dokumen	1,128,095,957	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	60,997,266	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	220,541,625	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	50,989,434	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	240,567,632	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	130,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	130,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan serta Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di fasilitas kesehatan	%		%	70 %	100,000,000						70 %	5,985,111,319	
1 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit, Fasilitas kesehatan lainnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	20 Unit	99,690,844	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan jasa penunjang perkantoran	%		%	100 %	27,317,487,951						100 %	27,130,244,000	
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,029,287,951	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya	1 Laporan	2,118,744,000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,288,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya	1 Laporan	24,991,500,000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana yang dilakukan pemeliharaan	%		%	100 %	958,987,000						100 %	1,499,095,000	
1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				50 Unit	699,070,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50 Unit	699,070,000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190,025,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	190,025,000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69,892,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						83,049,561,439							200,420,348,936	
		Angka kematian bayi	KH			7/1000 KH							7/1000 KH		
		Angka kematian ibu	KH			64/100000 KH							64/100000 KH		
		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	Aplikasi			40 Aplikasi							40 Aplikasi		
		Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	RS			1 RS							1 RS		
		Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	PKM			2 PKM							2 PKM		
		Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	PKM			29 PKM							29 PKM		
		Jumlah Operasional Rumah Sakit	RS			3 RS							3 RS		
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dokumen			10 Dokumen							10 Dokumen		
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dokumen			2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	Dokumen			12 Dokumen							12 Dokumen		
		Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	%			100 %							100 %		
		Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	%			95 %							95 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
						100 %							100 %			
						100 %							100 %			
						16 %							16 %			
1	2	2	2.01			80 %	27,014,561,439						80 %	90,860,000,000		
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3,400,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	6 Unit	2,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Tanjung Agung Utara Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Air Balui Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Sri Gunung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	6 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	10,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Sungai Lalin Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1,600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Kejuang, Karya Maja Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	4 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
						88.76184630113 M2	290,340,000									
							9,660,000									
								Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir								
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	4,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	3 Unit	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
							3 Unit	2,000,000,000								
							3 Unit	2,000,000,000								
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 paket	20,000,000,000	Dinas Kesehatan
							30 Unit	600,000,000								
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Valsin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	2,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Paket	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1,114,561,439	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	%	%	100 %	55,735,000,000				100 %	108,895,348,936	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.392 Orang	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	14.392 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.738 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	13.738 Orang	260,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.084 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	13.084 Orang	260,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57562 Orang	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	57562 Orang	760,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116288 Orang	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	116288 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377871 Orang	60,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	377871 Orang	470,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49200 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	49200 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121228 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	121228 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya percepatan dan deteksi dini program hipertensi di posbindu	29 Puskesmas						29 Puskesmas			
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36283 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	36283 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pemantauan Deteksi Dini Program Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas	29 Puskesmas						29 Puskesmas			
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1350 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1350 Orang	170,000,000	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Keswa Dalam pelayanan Deteksi Dini ODGJ dengan Menggunakan SIMKESWA	29 Puskesmas						29 Puskesmas			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
		Terlaksananya Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Sekolah dan Puskesmas				205 Sekolah						205 Sekolah				
		Terlaksananya Deteksi Dini Program Indera di Wilayah Kerja Puskesmas				29 Puskesmas						29 Puskesmas				
		Terlaksananya Kegiatan bimbingan teknis petugas Pengelola program P2PML puskesmas				12 Puskesmas						12 Puskesmas				
		Terlaksananya Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Eradikasi Frambusia tingkat Kabupaten				1 kali						1 kali				
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Indra)				268742 orang						268742 orang				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	60,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Di 14 Kecamatan	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	14 Kecamatan		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	14 Kecamatan		
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	300 Orang	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	300 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes & Sekolah	100 %								100 %		
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
								Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Sungai Lili								
								Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir								
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2,200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	6,230,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang akan menjadi PPK BLUD	1 Puskesmas		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Puskesmas		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Puskesmas	550,000,000							18 Puskesmas	850,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			200,000,000						400,000,000		
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
					[+] Upgrade Aplikasi SELIANG, SIMPEK, E-Presensi		1 Paket	200,000,000								
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang mendapatkan izin sesuai dengan kelas C dan D	2 RS	100,000,000						2 RS	265,000,000	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Unit	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rumah Sakit	29 Unit	135,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	80 %	550,000,000						80 %		
					Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	65 %								65 %	5,294,750,000	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktek sesuai standar	80 %	50,000,000						80 %	120,000,000	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 %	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	100 %	60,000,000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai di FKTP dan FKTL	%		%	80 %	100,000,000				80 %	4,842,000,000			
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%		%	65 %	400,000,000				65 %	332,750,000			
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			116 Orang	400,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	116 Orang	332,750,000	Dinas Kesehatan	
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Alat Kesehatan sesuai standar	%		%	85 %	150,000,000					85 %	1,044,390,000		
					Persentase ketersediaan BMHP	%		%	0 %						0 %			
					Persentase ketersediaan obat esensial	%		%	90 %						90 %			
					Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	%		%	40 %						40 %			
1	2	4	2.02	Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase alat-alat kesehatan yang telah di kalibrasi dan sesuai standar	%		%	85 %	50,000,000				85 %	100,000,000			
1	2	4	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perilaku Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	%		%	40 %	50,000,000				40 %	100,000,000			
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan DAM yang memiliki sertifikat laik higiene			10 unit	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	10 unit	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	%		%	40 %	50,000,000				40 %	264,000,000			
1	2	4	2.06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	91,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	keluarga		keluarga	177638 keluarga	400,000,000					177638 keluarga	2,250,760,600		
					Persentase desa yang melaksanakan PHBS	%		%	25 %						25 %			
					Persentase PHBS tempat kerja	%		%	45 %						45 %			
					Persentase rumah sehat	%		%	83 %						83 %			
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	100,000,000				4 Dokumen	483,000,000				
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa, PHBS, Keluarga dan Rumah Tangga	1 Dokumen	483,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gernas	%		%	100 %	200,000,000				100 %	948,760,600			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 5 2.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	2 Dokumen	426,918,000	Dinas Kesehatan
1 2 5 2.02 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				177638 Keluarga	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	177638 Keluarga	521,842,600	Dinas Kesehatan
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Bimtek dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat	%		%	100 %	100,000,000						100 %	819,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kader Kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	819,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											26,484,644,752		43,444,770,000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	RS		RS	1 RS	19,200,000,000						1 RS	23,000,000,000	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	19,200,000,000						1 Unit Kerja	23,000,000,000	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	19,200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Sungai Lalin Jaya	Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Unit Kerja	23,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RS		RS	1 RS	7,284,644,752						1 RS	20,444,770,000	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajakan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7,284,644,752						1 Dokumen	20,444,770,000	
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit				100 %	7,284,644,752	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Sungai Lalin Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Rumah Sakit Sungai Lalin Kabupaten Musi Banyuasin	100 %	20,444,770,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											31,649,000,002		40,465,000,000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan		Bulan	12 Bulan	24,200,000,000						12 Bulan	26,620,000,000	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Kebutuhan BLUD	Bulan		Bulan	12 Bulan	24,200,000,000						12 Bulan	26,620,000,000	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	24,200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Pendapatan dari BLUD			RSUD Bayung Lencir	1 Unit Kerja	26,620,000,000	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Operasional Pelayanan Rumah sakit	Bulan		Bulan	12 Bulan	7,449,000,002						12 Bulan	13,845,000,000	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajakan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Operasional RSUD Bayung Lencir	Bulan		Bulan	12 Bulan	7,449,000,002						12 Bulan	13,845,000,000	
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	7,449,000,002	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	RSUD Bayung Lencir	1 Dokumen	13,845,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2,076,050,604		3,243,685,134	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%		%	100 %	2,076,050,604						100 %	2,179,853,134	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	meningkatkan pelayanan BLUD Puskesmas	%		%	100 %	2,076,050,604						100 %	2,179,853,134	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,076,050,604	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Staf dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Ngulak	1 Unit Kerja	2,179,853,134	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2,257,107,600		4,781,131,600	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit		unit	1 unit	2,257,107,600					1 unit	2,482,818,360		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit	1 Unit	2,257,107,600					1 Unit	2,482,818,360		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,257,107,600	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat Toman, Mangun Jaya Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Sereka Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Sugi Raya Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Sugi Waras Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Beruge Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Muara Puhung Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Bangun Sari Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Toman Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Kasmaran Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Sungai Angit Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Srimulyo Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Pangkalan Jaya	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Seluruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Babat Toman	1 Unit Kerja	2,482,818,360	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%		%	100 %	2,199,869,430					100 %	2,419,856,373		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas	%		%	100 %	2,199,869,430					100 %	2,419,856,373		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,199,869,430	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacih Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacih Jaya Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Tanjung Durian Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napal Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Rantau Kasih Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Karang Ringin I Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Karang Ringin II Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Teberau Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Bumi Ayu Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Karang Waru Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Karang Anyar Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Rantau Panjung Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Simpang Sari Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Pandan Dulang	Pendapatan dari BLUD		Pegawai dan Masyarakat Di sekitar Wilayah Kerja Puskesmas Ulak Pacih	1 Unit Kerja	2,419,856,373	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit		unit	1 unit	1,210,000,000					1 unit	1,363,808,887		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit	1 Unit	1,210,000,000						1 Unit	1,363,808,887	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,210,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Talang Leban Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Lubuk Bah Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Saut Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanjung Bali Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Pinggip Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Pengaturan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang	1 Unit Kerja	1,363,808,887	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											679,049,910		1,859,297,810	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	679,049,910						1 Unit	679,049,910	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	679,049,910						1 Unit Kerja	679,049,910	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	679,049,910	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Lubuk Bintalo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Staf dan Masyarakat diwilayah kerja UPT Puskesmas Lubuk Bintalo	1 Unit Kerja	679,049,910	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											530,089,520		1,645,547,050	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	530,089,520						1 Unit	583,098,472	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit	1 Unit	530,089,520						1 Unit	583,098,472	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	530,089,520	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Bukit Sejahtera Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Bukit Pangkuasaan Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Talang Bahuh Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Sungai Napal Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Bukit Selabu Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Ulak Kembang	Pendapatan dari BLUD			Seluruh Pegawai Puskesmas dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bukit Selabu	1 Unit Kerja	583,098,472	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											991,460,290		2,223,584,919	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	991,460,290						1 Unit	1,091,126,319	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit	1 Unit	991,460,290						1 Unit	1,091,126,319	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	991,460,290	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sungai Medak Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sungai Batang Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Rimba Ukur Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Lih Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sialang Agung Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Cinta Karya Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Iir Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Talang Phase	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Cinta Karya	1 Unit Kerja	1,091,126,319	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP-JMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,061,077,372							
1	2	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						898,481,110							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%		%	100 %	816,801,009							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit	1 Unit	816,801,009							
1	2	1	2.10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	816,801,009	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sehuruh Pegawai Puskesmas dan Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Suka Damai	1 Unit Kerja	898,481,110	Dinas Kesehatan
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,017,449,409							
1	2	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						855,690,500							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Tercapainya Pelayanan dan Penunjang BLUD Puskesmas Sidorahayu	%		%	100 %	755,800,500							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	755,800,500							
1	2	1	2.10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	755,800,500	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sehuruh Staf dan Masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Sidorahayu	1 Unit Kerja	855,690,500	Dinas Kesehatan
								Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Didistribusikan				0 Paket							0 Paket	
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,589,363,683							
1	2	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,201,871,243							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,001,701,130							1 Unit Kerja
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,001,701,130							12 Bulan
1	2	1	2.10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,001,701,130	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Staf Puskesmas Tebing Bulang dan Seluruh Masyarakat yang berobat di UPT Puskesmas Tebing Bulang	1 Unit Kerja	2,201,871,243	Dinas Kesehatan
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,331,434,929							
1	2	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,276,602,901							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	1,160,548,089							100 persen
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunangan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	1,160,548,089							1 unit kerja
1	2	1	2.10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,160,548,089	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sehuruh Staf dan Masyarakat diwilayah Kerja UPT Puskesmas Jirak	1 Unit Kerja	1,276,602,901	Dinas Kesehatan
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,786,199,743							
1	2	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,481,436,793							
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	%		%	100 %	3,734,530,660							100 %
1	2	1	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	3,734,530,660							1 unit kerja
1	2	1	2.10	1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,734,530,660	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sehuruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Balai Agung	1 Unit Kerja	4,481,436,793	Dinas Kesehatan
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		orang	974 orang								974 orang
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,169,446,459							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	2	1					100 %	2,685,755,907					100 %	2,766,328,584		
1	2	1	2.10				1 Unit	2,685,755,907					1 Unit	2,766,328,584		
1	2	1	2.10	1			1 Unit Kerja	2,685,755,907	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kawu Ara Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bahangu Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Muara Teladan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bandar Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan 2 Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bahangu Timur	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Puskesmas Lumpatan dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lumpatan	1 Unit Kerja	2,766,328,584	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2,300,111,220	4,133,615,861
1	2	1					1 unit	2,300,111,220					1 unit	2,530,122,342		
1	2	1	2.10				1 Unit	2,300,111,220					1 Unit	2,530,122,342		
1	2	1	2.10	1			1 Unit Kerja	2,300,111,220	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	1 Unit Kerja	2,530,122,342	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													770,574,805	847,632,285
1	2	1					1 Unit Kerja	770,574,805					1 Unit Kerja	847,632,285		
1	2	1	2.10				1 Unit Kerja	770,574,805					1 Unit Kerja	847,632,285		
1	2	1	2.10	1			1 Unit Kerja	770,574,805	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Tanjung Agung Barat	Pendapatan dari BLUD	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Unit Kerja	847,632,285	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1,040,933,970	2,458,228,461
1	2	1					100 %	1,040,933,970					100 %	1,353,214,161		
1	2	1	2.10				1 Unit Kerja	1,040,933,970					1 Unit Kerja	1,353,214,161		
1	2	1	2.10	1			1 Unit Kerja	1,040,933,970	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Teluk Kijing II	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh pegawai dan masyarakat wilayah kerja puskesmas teluk-kijing	1 Unit Kerja	1,353,214,161	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1,509,166,800	3,122,792,282
1	2	1					1 Unit	1,509,166,800					1 Unit	1,609,166,800		
1	2	1	2.10				1 Unit	1,509,166,800					1 Unit	1,609,166,800		
1	2	1	2.10	1			1 Unit Kerja	1,509,166,800	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Tanjung Kerang Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Langkap Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Gajah Mati Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Sumber Jaya Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Tenggulang Baru Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Seratus Lapan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Ramba Jaya	Pendapatan dari BLUD		Seluruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat diwilayah Puskesmas Tanjung Kerang	1 Unit Kerja	1,609,166,800	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
								Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Gajah Muda										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2						3,242,729,160						5,654,777,516					
1	2	1					3,242,729,160					100%	3,567,002,076					
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	Unit	1 Unit				1 Unit	3,567,002,076				
						Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	Unit	1 Unit				1 Unit					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3,242,729,160	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Puskesmas Sungai Lilin dan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin	1 Unit Kerja	3,567,002,076	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bulan	Bulan	12 Bulan					12 Bulan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2						991,200,650							2,314,156,350				
1	2	1					991,200,650							1 unit	1,138,384,822			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedia BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit	unit	1 unit					1 unit	1,138,384,822			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	991,200,650	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sri Gunung	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1,138,384,822	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2						1,410,468,180							2,617,938,863				
1	2	1					1,410,468,180							1 Unit	1,551,514,998			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	Unit	Unit	1 Unit					1 Unit	1,551,514,998			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,410,468,180	Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Tenggaro, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Tanjung Dalam, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Dawas, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Sumber Agung, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Karya Maju, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Tegai Mulyo, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Mulyo Asih, Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Sridamai	Pendapatan dari BLUD	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sehuruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Karya Maju	1 Unit Kerja	1,551,514,998	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2						689,988,750							1,821,782,290				
1	2	1					689,988,750							1 unit	758,987,625			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang BLUD FKTP	Unit	Unit	1 Unit					1 Unit	758,987,625			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	689,988,750	Kab. Musi Banyuasin, Keuang. Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sehuruh Pegawai Puskesmas dan Masyarakat wilayah kerja Puskesmas mekar jaya	1 Unit Kerja	758,987,625	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2						3,875,512,740							6,041,768,214				
1	2	1					3,875,512,740							100%	4,263,064,014			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	Unit	1 Unit					1 Unit	4,263,064,014			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	3,875,512,740	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,263,064,014	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1,173,033,930		1,301,262,323				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%		%		100 %	1,173,033,930						100 %	1,301,262,323	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas	%		%		100 %	1,173,033,930						100 %	1,301,262,323	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1,173,033,930	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Sukajaya	Pendapatan dari BLUD	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan masyarakat di sekitar wilayah kerja puskesmas sukajaya	1 Unit Kerja	1,301,262,323	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1,363,308,887		2,423,036,123				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit		unit		1 unit	1,363,308,887						1 unit	1,363,308,887	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang menyediakan pelayanan dan penunjang BLUD FKTP	Unit		Unit		1 Unit	1,363,308,887						1 Unit	1,363,308,887	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1,363,308,887	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Penanggalan, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Suka Damai, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Berlian Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Simpang Tungkajaya, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Pangkalan Tungkajaya, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Sinar Tungkajaya	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Seluruh Pegawai dan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Penanggalan	1 Unit Kerja	1,363,308,887	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														983,986,000		1,082,384,600				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%		%		100 %	983,986,000						100 %	1,082,384,600	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD Puskesmas	%		%		100 %	983,986,000						100 %	1,082,384,600	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	983,986,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Sumber Harum	Pendapatan dari BLUD	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas sumber harum	1 Unit Kerja	1,082,384,600	Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														828,713,850		2,685,358,184				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk Yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%		%		100 %	828,713,850						100 %	828,713,850	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas	%		%		100 %	828,713,850						100 %	828,713,850	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	828,713,850	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Beji Mulyo, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Bero Jaya Timur, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Pandan Sari, Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Margo Mulyo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Pegawai dan Masyarakat Diwilayah Kerja Puskesmas Berojaya Timur	1 Unit Kerja	828,713,850	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														933,262,060		2,344,729,866				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Bandar Agung Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Bandar Agung	Persen		Persen		100 Persen	933,262,060						100 Persen	1,026,588,266	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		1 Unit Kerja	933,262,060						1 Unit Kerja	1,026,588,266	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	933,262,060	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Bandar Agung	Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Staf dan Masyarakat di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Bandar Agung	1 Unit Kerja	1,026,588,266	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1,471,355,160	2,652,402,776		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kinerja Pegawai BLUD Puskesmas Karang Mukti	bulan		bulan	12 bulan	1,471,355,160						12 bulan	1,618,490,676	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatkan Kinerja Pegawai BLUD Puskesmas Karang Mukti	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,471,355,160						12 Bulan	1,618,490,676	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1,471,355,160	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Staff Puskesmas Karang Mukti	12 Bulan	1,618,490,676	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											419,407,223	452,883,640		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	419,407,223						100 %	432,313,640	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ibu bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	419,407,223						100 %	432,313,640	
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	382,012,223	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Air Balai	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Ibu Bersalin	1 Dokumen	420,213,640	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	37,395,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Air Balai	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Ibu Bersalin	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											162,372,934,408	319,179,227,734		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		%	100 %	152,000,000,000						100 %	261,909,000,000	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terperuhnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan		Bulan	12 Bulan	152,000,000,000						12 Bulan	167,210,000,000	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	152,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD RSUD Sekayu dan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin	1 Unit Kerja	167,210,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe Kelas Rumah Saldit Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumatera Selatan	Kelas		Kelas	Paripurna Kelas	10,372,934,408						Paripurna Kelas	56,610,227,734	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terperuhnya Jumlah Bulan Pelayanan Rumah Sakit	Bulan		Bulan	12 Bulan	10,372,934,408						12 Bulan	11,410,227,734	
	Terperuhnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	10,372,934,408	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD RSUD Sekayu dan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	11,410,227,734	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											270,186,582,073	1,065,080,400,000		
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	34,056,290,676						100 %	44,090,000,000	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	75,000,000						8 Dokumen	60,000,000	
1 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	11,545,493,035						12 Bulan	13,500,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 3 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	14,178,577,521						12 Bulan	15,750,000,000	
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	13,063,591,424	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	13,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,114,986,097	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	100 Unit	1,511,095,120						100 Unit	1,890,000,000	
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				25 Unit	599,790,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	25 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Aparatur Sipil Negara	22 Unit	960,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	202,433,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	108,872,120	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	16,446,636,514						100 %	51,199,000,000	
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	14,295,000,000						100 %	47,320,000,000	
1 3 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Diausun				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		[-] Penyusunan DED Pembangunan Tembok Penahan Sungai Air Gemuruh Desa Lumpatan, Kec. Sekayu				14129022.22222222 Paket	254,322,400								
		[-] Administrasi Penunjang Kegiatan					45,677,600								
1 3 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Diausun				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		[-] Penyusunan Rencana Teknis Potensi Air Tanah di Kecamatan Sekayu, Lais, Keluang dan Lawang Wetan				25240133.33333333 Paket	454,322,400								
		[-] Administrasi Penunjang Kegiatan					45,677,600								
1 3 2 2.01 6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				3 Unit	1,100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	3 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
						1.02949112038009 Unit	326,541,200								
						1.01814134879424 Unit	322,941,200								
						1.18901846544783 Unit	377,141,200								
							73,376,400								
1	3	2	2.01	7		3 Titik	900,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	3 Titik	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
						0.23213951126717 3 Ha	129,841,200								
						0.23213951126717 3 Ha	129,841,200								
						1.02477490685184 Ha	573,181,200								
							67,136,400								
1	3	2	2.01	9		0.3 KM	750,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	0.3 KM	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
1	3	2	2.01	10		1 KM	500,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 KM		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	11		6 Unit	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	6 Unit		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	24			400,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
1	3	2	2.01	25			1,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
1	3	2	2.01	46		48.3 KM	6,300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	48.3 KM	39,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 3 2 2.01 56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	1 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	120,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	12 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	30 Orang	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				9 Dokumen	225,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	9 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	20 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	1 Unit	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 KM	600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	6 KM	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	2,151,636,514					100 %	3,879,000,000		
1 3 2 2.02 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				5 Dokumen	482,306,514	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	5 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		[+] Penyusunan Data Informasi dan perencanaan Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan kabupaten musi banyuasin				1 Paket	436,628,914								
		[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					45,677,600								
1 3 2 2.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 KM	1,050,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	6 KM	920,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 2 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				56 Orang	619,330,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	56 Orang	1,159,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terwujudnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	217,483,654,883					100 %	966,316,400,000		
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	217,483,654,883					100 %	966,316,400,000		
1 3 10 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				7 Dokumen	2,649,269,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	7 Dokumen	3,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		[+] Penyusunan DED (Detailed Engineering Design) Jembatan Gantung Desa Eplu, Kec. Lais				94561000 Rupiah	94,561,000								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
						292230000 Rupiah	292,230,000									
						392230000 Rupiah	392,230,000									
						492230000 Rupiah	492,230,000									
						592230000 Rupiah	592,230,000									
							785,788,600									
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	10000 M ²	1,465,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	10000 M ²	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							1 Paket	92,230,000								
							1 Paket	92,230,000								
							4125 M2	165,000,000								
							12500 M2	500,000,000								
							750 Meter x 20 Meter	600,000,000								
								15,540,000								
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	3 Dokumen	3,800,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	2,820,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								992230000 Rupiah								
								992230000 Rupiah								
								892230000 Rupiah								
								892230000 Rupiah								
								31,080,000								
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	6 Dokumen	2,100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								497779500 Rupiah								
								497779500 Rupiah								
								1,104,441,000								
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1044.49 KM	161,367,388,093	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	1044.49 KM	744,056,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
							1,930,817,000	545,530,000							
							1,930,817,000	495,530,000							
							2,505,716,000	346,280,000							
							2,412,104,000	1,992,959,000							
							2,101,752,000	1,995,530,000							
							1,402,942,000	2,992,959,000							
							1,536,685,000	2,030,459,000							
							2,552,212,000	2,030,459,000							
							2,189,890,000	571,530,000							
							2,676,982,000	875,530,000							
							2,618,342,000	1,992,959,000							
							2,427,833,000	995,086,000							
							2,371,039,000	977,306,000							
							2,203,990,000	1,195,530,000							
							2,412,104,000	995,530,000							
							2,264,014,000	1,245,530,000							
							2,484,906,000	745,530,000							
							2,210,586,000	745,530,000							
							2,203,990,000	995,530,000							
							2,264,014,000	695,530,000							
							2,264,014,000	745,530,000							
							2,676,982,000	1,295,530,000							
							2,189,890,000	296,280,000							
							1,163,099,000	995,086,000							
							2,930,188,000	1,245,530,000							
							2,474,224,000	995,086,000							
							2,478,562,000	1,992,959,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Toman, Kec. Babat Toman	2,210,586,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 3 Desa Tanjung Dalam, Kec. Keluang	2,412,104,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Sukalali, Kec. Sungai Keruh	2,427,833,000	1,095,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Linggo Sari Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	2,264,014,000	321,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Mekar Jadh Dengan Aspal Hotmix, Kec. Sungai Lilin	2,123,480,000	1,445,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Ulak Paceh Jaya Dengan Beton, Kec. Lawang Wetan	2,203,990,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 6 Desa Tenggara, Kec. Keluang	2,412,104,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Pagar Kaya, Kec. Sungai Keruh	2,427,833,000	1,095,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 3 Village IX Desa Teluk Kijing 3 Dengan Beton, Kec. Lais	2,484,906,000	1,495,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Bumi Kencana Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	2,264,014,000	296,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Talang Fase Dengan Beton, Kec. Lawang Wetan	2,203,990,000	2,192,959,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun I Desa Warga Mulya Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	2,474,224,000	995,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun I - Dusun VI Desa Lais Dengan Beton, Kec. Lais	2,484,906,000	196,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun II Desa Bukit Indah Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	2,474,224,000	995,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun I, II dan V dari Simpang Porda Menuju Motor 3 Desa Sungai Angit Dengan Beton, Kec. Babat Toman	2,210,586,000	595,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun III Desa Warga Mulya Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	2,474,224,000	995,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun III Menuju Jalan Lintas Desa Mulyo Rejo Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	2,264,014,000	695,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun II ke Dusun III Menuju Wahana Tirto Mulyo Desa Tegal Mulyo Dengan Beton, Kec. Keluang	2,412,104,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun II Simpang Juhari Desa Bumi Kencana Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	2,264,014,000	395,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Tanjung Agung Timur, Kec. Lais	2,484,906,000	745,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun IV Mulyo Asih Dengan Beton, Kec. Keluang	2,412,104,000	1,245,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Dusun V Ramba Rompok Desa Langkap Dengan Beton, Kec. Babat Supat	2,202,026,000	196,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Keluang - Sp. Selabu	4,607,097,000	1,992,959,000							
							[-] Peningkatan Jalan Kelurahan Ngulak Dengan Beton, Kec. Sanga Desa	2,676,982,000	995,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Kertapati menuju Jalan Mitra Ogan Desa Toman, Kec. Babat Toman	2,472,048,000	1,295,530,000							
							[-] Peningkatan Jalan Lingkar Luar Narsito Dusun II Desa Bumi Kencana, Kec. Sungai Lilin	2,264,014,000	196,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun II Desa Sido Rejo, Kec. Keluang	2,412,104,000	995,086,000							
							[-] Peningkatan Jalan Menuju Molam Dusun II Desa Warga Mulya Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	2,474,224,000	246,280,000							
							[-] Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Umum Dusun 4 RT. 23 Desa Bero Jaya Timur Dengan Beton, Kec. Tungkai Jaya	2,207,311,000	225,280,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
						0.88926306386779 8 Unit	995,530,000									
						0.87932520418698 Unit	680,530,000									
						0.85149133888615 3 Unit	994,180,000									
						0.36923492899463 9 Unit	314,086,000									
						0.22585720160235 8 Unit	195,530,000									
						5.04650232331067 Unit	6,987,700,000									
						1.10527424367279 Unit	1,495,530,000									
						0.72639011409563 Unit	995,530,000									
						1.26165882662599 Unit	1,495,530,000									
						1.10887844585706 Unit	995,530,000									
						2.05475609330644 Unit	1,590,223,000									
						2.00071625908114 Unit	195,530,000									
						3.143486196008 Unit	325,530,000									
						3.4984134683401 Unit	346,196,000									
						1.07040060143916 Unit	239,196,000									
						2.08668775820497 Unit	815,223,000									
							114,312,000									
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	60 M	2,350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	60 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 M	2,500,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	50 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	209,997,190	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Orang		Orang					200 Orang	930,000,000	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terpenuhinya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	200 Orang	Orang					200 Orang	500,000,000	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tenaga Kerja Terampil Konstruksi	200 Orang	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	%		%					100 %	2,545,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	650,000,000					100 %	650,000,000		
1 3 12 2.01 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	[+] Proses Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Muba					303280000 Rupiah	303,280,000								
	[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						46,720,000								
1 3 12 2.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				200 Orang	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	200 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	600,000,000					100 %	995,000,000		
1 3 12 2.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				15 Dokumen	600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Aparatur Sipil Negara 15 Dokumen	995,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	750,000,000					100 %	750,000,000		
1 3 12 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengakatan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengakatan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 12 2.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				35 Kali	550,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	35 Kali	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6,197,447,838					28,715,559,000			
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lampu Jalan dalam kondisi baik	%		%	87,53 %	6,197,447,838					87,53 %	28,715,559,000		
2 15 2 2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Unit		Unit	500 Unit	6,197,447,838					500 Unit	28,715,559,000		
2 15 2 2.02 2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1031 Titik	1,729,169,838	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat 1031 Titik	8,715,559,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ Desa Karang Ringin II, Kec. Lawang Wetan					19.7219987 Titik Lampu	125,000,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ Desa Lais, Kec. Lais					23.6663984 Titik Lampu	150,000,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi PUJ Desa Sialang Agung, Kec. Plakat Tinggi					36.1575235 Titik Lampu	229,170,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ di Desa Cipta Praja Kecamatan Kluang					44 Titik Lampu	402,734,640								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ Di Desa Suka Makmur Kecamatan Plakat Tinggi					23 Titik Lampu	145,776,300								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi PUJ di Dusun 3 dan Dusun 5 Desa Bandar Jaya, Kec. Sekayu					23.6663984 Titik Lampu	150,000,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ di Dusun 1 - 7 Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa					50 Titik Lampu	316,905,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi RUJ RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Desa Muara Bahar, Kec. Bayung Lencir					5.2066076 Titik Lampu	33,000,000								
	[+] Pembangunan Jaringan Instalasi PUJ RT. 04, RT. 05 Desa Muara Bahar, Kec. Bayung Lencir					3.4710717 Titik Lampu	22,000,000								
	[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						154,583,898								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Titik Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				8600 Titik	4,468,278,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat	8600 Titik	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
						117,735,269,779						74,818,125,000							
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Peripaan)	%	%		80 %	7,919,951,490						80 %	43,420,000,000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Peripaan)	%	%		80 %	7,919,951,490						80 %	43,420,000,000	
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				40 Liter/Detik	5,549,993,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	40 Liter/Detik	34,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					[+] Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Lais Kecamatan Lais					3930 Meter	1,194,720,000								
					[+] Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Rimba Ukur Kecamatan Selayu					1150 Unit	349,600,000								
					[+] Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi dalam Kec. Selayu					3300 Meter	3,999,600,000								
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						6,073,000								
1	3	3	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				2248 Rumah Tangga	2,369,958,490	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	2248 Rumah Tangga	9,420,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman					0.42 Unit	55,087,620								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Desa Teluk Kijing II Kec. Lais					2 Unit	703,502,000								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa					1 Unit	182,832,000								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Dusun 1 Desa Suka Makmur (SP4) Kecamatan Plakat Tinggi					1 Unit	134,415,000								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Dusun 2 Desa Ulak Kembang Kecamatan Batang Hari Leko					0.68 Unit	94,375,840								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Kampung I dan III Desa Eplil Kecamatan Lais					0.71 Unit	96,555,030								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya Kelurahan Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin					4 Unit	694,968,000								
					[+] Pembangunan Sumur Bor dan Perengkapannya di Perumahan Khusus Dusun 2 Desa Letang Kec. Babat Supat					2 Unit	345,796,000								
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						62,427,000								
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	%	%		80 %	8,241,901,500						80 %	10,000,000,000	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	%	%		80 %	8,241,901,500						80 %	10,000,000,000	
					Pembangunan/ Penyediaan Sistem	Jumlah MCK yang di bangun				20 unit		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun	Masyarakat	20 unit		Dinas Perumahan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
							210 M1	243,810,000							
							233 M1	243,019,000							
							210 M1	243,810,000							
							237 M1	243,162,000							
							281 M1	293,083,000							
							181 M1	194,575,000							
							471 M1	494,550,000							
							201 M1	194,367,000							
							514 M1	497,038,000							
							153 M1	147,951,000							
							1091 M1	1,137,913,000							
							320 M1	344,000,000							
							307 M1	339,235,000							
							273 M1	293,475,000							
							460 M1	483,000,000							
							307 M1	296,869,000							
							273 M1	293,475,000							
							154 M1	165,550,000							
							1474 M1	1,711,314,000							
							330 M1	354,750,000							
							186 M1	193,068,000							
							170 M1	193,460,000							
							170 M1	193,460,000							
							170 M1	193,460,000							
							170 M1	193,460,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
						685.310344827 M2	397,480,000								
						59.9102564102 M	140,190,000								
						129.0265486725 M	291,600,000								
						123.96610169 M	292,560,000								
						81.31223628 M	192,710,000								
						60.2161016949 M	142,110,000								
						172.3333333 M	392,920,000								
						60.2161016949 M	142,110,000								
						60.2161016949 M	142,110,000								
						76.6334661354 M	192,350,000								
						160.94605809 M	387,880,000								
						1857.32484076 M3	291,600,000								
						90.755064456 M2	492,800,000								
						37.7452107279 M2	197,030,000								
						107.3913043 M2	592,800,000								
						44.449367088 M2	280,920,000								
						74.2247619 M2	389,680,000								
						164.280510018 M2	90,190,000								
						169.139194139 M2	92,350,000								
						319.6470588 M2	190,190,000								
						244.2631578 M2	139,230,000								
						156.5438596 M2	89,230,000								
						1118.2641509 M2	592,680,000								
						3329.729729 M3	492,800,000								
						3407.39726 M3	497,480,000								
						77.10797612 M2	142,110,000								
						77.10797612 M2	142,110,000								
						442.41469816 M2	842,800,000								
						127.493593 M2	497,480,000								
						78.1613938 M2	170,470,000								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
							104.9618736 M2	192,710,000							
							181.9493807 M2	337,880,000							
							77.7287581699 M2	142,710,000							
							803.94184168 M2	1,492,920,000							
							241.8441273 M2	440,640,000							
							100.9316101238 M2	187,430,000							
							133.5459043 M2	242,920,000							
							74.7244094488 M2	142,350,000							
							76.14559386 M2	397,480,000							
							77.72875816 M2	142,710,000							
							178.7493593 M2	697,480,000							
							100.971128608 M2	192,350,000							
							1386.71848973 M2	2,497,480,000							
							74.2247619 M2	389,680,000							
							186.6842105 M2	993,160,000							
							2562.142491 M2	9,997,480,000							
							105.810885 M2	192,470,000							
							47.40996168 M2	247,480,000							
							55.5825427 M2	292,920,000							
							91.7020484 M2	492,440,000							
							76.0949367 M2	480,920,000							
							54.7865169 M2	292,560,000							
							254.917293233 M2	1,356,160,000							
							574.229885 M2	2,997,480,000							
							26.825187969 M2	142,710,000							
							28.555379746 M2	180,470,000							
							95.30268199 M2	497,480,000							
							60.272151898 M2	380,920,000							
							191.0881226 M2	997,480,000							
							28.62658227 M2	180,920,000							
							373.8611632 M2	1,992,680,000							
							363.430656934 M2	1,991,600,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						861.58620689 M2	4,497,480,000										
						392.5506329 M2	2,480,920,000										
						37.7452107279 M2	197,030,000										
						34.84601449 M2	192,350,000										
						382.6590038 M2	1,997,480,000										
						478.44444444 M2	2,497,480,000										
						467.8260869 M2	247,480,000										
						420.491228 M2	239,680,000										
						431.0386079 M2	792,680,000										
						122.46025104 M	292,680,000										
						109.5044247 M2	247,480,000										
							885,600,000										
1	3	9												30%		1,000,000,000	
1	3	9	2.01											30%		1,000,000,000	
1	3	9	2.01	1		1 Dokumen	1,481,207,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen		1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4															343,108,923,610	
1	4	1												100%		10,902,991,110	
1	4	1	2.01											100%		74,959,912	
1	4	1	2.01	1		0 Dokumen											
1	4	1	2.01	1		1 Dokumen	49,999,912	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen		68,999,726	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.01	6		3 Laporan	24,960,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	3 Laporan		75,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.02											100%		7,365,145,641	
1	4	1	2.02	1		61 Orang/bulan	7,365,145,641	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	61 Orang/bulan		8,240,459,672	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.03											100%		92,295,000	
1	4	1	2.03	2		4 Dokumen	92,295,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba	4 Dokumen		200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.05											100%		137,935,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 4 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				61 stel	38,125,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	61 stel		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	99,810,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	0 Orang	350,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang							20 Orang		
1 4 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,279,298,995						100 %	2,361,746,825	
1 4 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	59,256,562	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	10 Jenis	181,489,485	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	199,967,998	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	460,285,887	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	74,959,771	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	122,866,673	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,004,251	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	484,290,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	149,992,413	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	257,714,875	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen	30,250,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50,008,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	119,920,680	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400,076,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	604,928,610	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20,034,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100,050,960						100 %	200,000,000	
1 4 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	100,050,960	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba	4 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,085,708,482						100 %	1,518,671,000	
1 4 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	435,408,482	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba	12 Laporan		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	10																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			
																8,140,800,000		3,825,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
		[+] Jasa Konsultansi Pembebasan Lahan TPU Dusun 6 Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan				1 Paket	75,000,000										
		[+] Pembebasan Lahan TPU Dusun 6 Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan				1 Paket	295,500,000										
		[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					352,775,000										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1					100 %	8,484,772,278					100 %	11,877,000,000			
1	5	1	2.01				100 %	63,342,000					100 %	80,000,000			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	44,712,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfarmasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	2 Dokumen	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	18,630,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfarmasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	4 Laporan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perkantoran	%	100 %	3,747,327,060					100 %	4,992,000,000		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	3,747,327,060	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	32 Orang/bulan	4,992,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran	100 %	0 %	199,949,000					100 %	200,000,000		
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	199,949,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfarmasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100 %	305,733,500					100 %	270,000,000		
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		170 Orang/Stel	154,262,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	170 Orang/Stel	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	151,471,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	2 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	%	100 %	938,123,182					100 %	1,111,000,000		
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	20,037,700	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	48,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	153,079,440	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	242,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	50,025,440	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	42,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	250,029,760	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	182,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	99,999,842	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	121,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		5 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	5 Dokumen	33,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	40,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	4 Laporan	46,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230 Laporan	299,951,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	230 Laporan	397,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		%	100 %	74,325,828								
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			21 Unit	74,325,828	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	21 Unit	145,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran	%		%	100 %	1,799,471,708								
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	274,071,708	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	12 Laporan	494,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,525,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	12 Laporan	3,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	1,356,500,000								
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	1,025,620,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	28 Unit	1,046,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	306,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Unit	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	24,880,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	2 Unit	39,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	5,252,658,940								
1	5	3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Data Kebencanaan yang Akurat	%		%	100 %	400,023,489								
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen	100,022,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat	1 Dokumen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			200 Orang	300,001,009	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat	200 Orang	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Koordinasi & Pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas	%		%	100 %	1,678,491,850								
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen	75,084,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	1 Dokumen	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	349,878,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	1 Dokumen	3,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			10 Jenis	345,072,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	10 Jenis	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Kawasan	450,006,950	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin	1 Kawasan		Badan Penanggulangan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
		Kesiapsiagaan	dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Pihak Terkait			Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	108,450,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	50 Orang	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Premi Asuransi bagi Pegawai Non PNS (TRC)	133 Orang								133 Orang		
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	99,999,300	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	2 Dokumen	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600 Orang	250,001,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat dan Pihak Terkait	600 Orang	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	%						100 %	2,300,000,000	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1,467,679,601	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	80 Orang	206,010,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	80 Orang	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80 Orang	200,660,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	80 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	299,997,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	2 Laporan	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	1 Dokumen	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	%						100 %	2,000,000,000	
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	299,957,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	3 Desa	600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen		
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	20 Laporan	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	20 Laporan	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JTU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	299,840,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	BPPD Kabupaten Musi Banyuasin, Masyarakat, dan Pihak Terkait	1 Dokumen	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
							21,107,089,689								29,956,362,069	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukakan sangat tepat	%	%						100 %	17,242,255,269	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
1	5	1	2.01			100 %	49,999,596					100 %	49,999,596				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%										
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	24,999,798	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	2 Dokumen	24,999,798	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	24,999,798	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	3 Laporan	24,999,798	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 %	9,145,286,516					100 %	9,145,286,516		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71 Orang/bulan	9,145,286,516	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	71 Orang/bulan	9,145,286,516	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	277,535,073					100 %	277,535,073		
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	57,639,250	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	1 Paket	57,639,250	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pengadaan perlengkapan pengusungan			71 stel							71 stel		
					Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas			4 jenis							4 jenis		
					Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas			8 kali							8 kali		
					Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas			21 Orang							21 Orang		
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Latihan Bersama Korps Musik		34 Orang							34 Orang		
					Pelatihan korps musik			45 Orang	219,895,823	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	45 Orang	219,895,823	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Korvik			23 Unit							23 Unit		
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	1,019,223,424					100 %	1,012,849,804		
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7 jenis	200,755,141	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	7 jenis	200,755,141	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat kebersihan dan Peralatan rumah Tangga		20 Jenis	41,398,855	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	20 Jenis	41,398,855	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		52 jenis	153,241,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	52 jenis	146,867,880	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak		19 jenis							19 jenis		
					Tersedianya Penggandaan			10000 Lembar	157,364,928	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	10000 Lembar	157,364,928	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Buku-buku peraturan perundang-undangan		2 jenis	21,120,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	2 jenis	21,120,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan minum rapat		17 kali							17 kali		
					makan dan minum tamu			20 kali	49,984,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	20 kali	49,984,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		185 kali							185 kali		
					Terlaksananya Perijinan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			40 kali	395,359,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	40 kali	395,359,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100 %	98,534,660					100 %	98,534,660		
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 jenis	98,534,660	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	4 jenis	98,534,660	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	5,479,316,000					100 %	10,663,316,000		
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Tagihan Listrik,Air, dan Internet		7 bulan	32,816,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	7 bulan	32,816,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional		Daerah						
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS			6 bulan	5,446,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	6 bulan	10,630,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS		480 orang								480 orang		
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	1,172,360,000						100 %	1,372,360,000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan pejabat Eselon II			1 Unit	77,130,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	1 Unit	77,130,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan pejabat Eselon III			1 unit							1 unit		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Damkar			14 Unit							14 Unit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Roda Dua (Motor Patrol)			10 Unit							10 Unit		
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Roda Empat			6 Unit	1,083,030,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	6 Unit	1,083,030,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Roda Enam			1 Unit							1 Unit		
						Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional			14 Unit							14 Unit		
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC			20 Unit	12,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Satpol PP	20 Unit	12,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketertarikan, dan Keindahan) di Kabupaten	%	%	100 %	2,090,973,250						100 %	2,166,275,750	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	1,591,521,250						100 %	1,617,257,750	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Peminaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman untuk menjaga ketertiban dan keamanan			9 Kali							9 Kali		
						Pengawasan Kepala Daerah			75 Kali	692,006,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	75 Kali	692,006,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pengendalian Keamanan Lingkungan			90 Kali							90 Kali		
						Pos yang ditempati petugas Satpol PP			12 Pos							12 Pos		
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tersedianya Petugas Satgas Pengamanan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			11 Bulan	28,050,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	11 Bulan	28,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Patroli Kerjasama dengan Aparat Keamanan, untuk keamanan lingkungan dalam Kabupaten Musi Banyuasin			10 Bulan	192,182,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	10 Bulan	192,182,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Laporan Hasil Patroli Kerjasama dengan Aparat Keamanan, untuk keamanan lingkungan dalam Kabupaten Musi Banyuasin			120 kali							120 kali		
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterteraman dan Ketertiban Umum			1 Dokumen	99,859,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	1 Dokumen	99,859,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Ansuransi Pegawai Non PNS (Satpol PP)			391 Orang	172,636,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	391 Orang	172,636,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Jumlah Poskotis yang ditepati Petugas Sat Pol PP			6 Pos	160,485,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	6 Pos	160,485,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Keterteraman dan Ketertiban Umum Lainnya			7 Jenis	149,919,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	7 Jenis	149,989,750	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
						0 Dokumen						0 Dokumen									
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya dokumen SOP ketertraman Masyarakat Tersedianya petugas layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada Tersedianya petugas layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada						10 Bulan	97,050,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Pol PP	10 Bulan 25 Orang	97,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%		%	100 %	499,452,000								100 %	499,452,000	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya operasi pelaksanaan penegakan produk hukum daerah Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya operasi pelaksanaan penegakan produk hukum daerah Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya operasi pelaksanaan penegakan produk hukum daerah Kabupaten Musi Banyuasin				5 Perda 12 Bulan 100 Kali	499,452,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	5 Perda 12 Bulan 100 Kali	499,452,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
						Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier CPNS				0 Orang									0 Orang		
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Orang/RT		Orang/RT	1 Orang/RT	376,377,300								1 Orang/RT	3,402,480,800	
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya pakaian anggota linmas pengaman Pilpres, Pleg dan pilkadasung Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen 5662 etel 10 jenis				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen 5662 etel 10 jenis	2,809,030,500	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	376,377,300								100 %	376,377,300	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	tersedianya Non PNS satgas linmas bantuan bencana daerah tersedianya PNS satgas linmas bantuan bencana daerah				25 Orang 10 Orang	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Ildin	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	25 Orang 10 Orang	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana				12 Kali	76,377,300	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Ildin	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	12 Kali	76,377,300	Satuan Polisi Pamong Praja		
						Tersedianya Petugas yang mempunyai kompetensi tentang SAR				2 kali									2 kali		
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%		%	85 %	1,397,483,870								85 %	1,397,483,870	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	%		%	100 %	1,319,103,870								100 %	1,319,103,870	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Petugas Pilet PBK (Non PNS) Petugas Pilet PBK (PNS) Tersedianya dana untuk Asuransi Pegawai Non Pns (Damkar) Tersedianya Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran				89 Orang 18 Orang 89 Orang 107 Orang	1,220,999,370	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	89 Orang 18 Orang 89 Orang 107 Orang	1,220,999,370	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terperuhnya peralatan pendukung penanggulangan bahaya kebakaran				5 Jenis	98,104,500	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	5 Jenis	98,104,500	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%		%	100 %	78,380,000								100 %	78,380,000	
						Pendataan Objek Retribusi Apar				24 Kali		Kab. Musi Banyuasin		Memperkuat Stabilitas	Prioritas Daerah 4 :				24 Kali		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional		Daerah								
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Sarana dan Prasarana untuk pencegahan Bahaya Kebakaran dalam Kab. Muba				24 Kali	78,380,000	Kab. Muba, Sekayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Satpol PP	24 Kali	78,380,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
											16,374,279,612									
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	%			100 %	6,845,608,436						100 %	8,497,362,000		
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	%			100 %	63,775,000						100 %	51,000,000		
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	38,935,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	4 Dokumen	25,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	24,840,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	4 Laporan	25,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,762,604,826						12 Bulan	5,500,000,000		
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4,762,604,826	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan TKS Badan Kesbangpol	37 Orang/bulan	5,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional yang di Aturansikan	Unit		Unit	4 Unit	28,136,000						4 Unit	50,000,000		
8	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	28,136,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Perentase Peningkatan Kinerja Aparatur	%			100 %	91,625,000						100 %	105,000,000		
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	41,625,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SDM Kesbangpol	2 Paket	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SDM Kesbangpol	8 Orang	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Layanan Administrasi Perkantoran	%			100 %	876,409,060						100 %	738,000,000		
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	25,007,190	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	18 Paket	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	157,876,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	10 Paket	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				31 Paket	47,822,270	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	31 Paket	32,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				59 Paket	160,182,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	59 Paket	165,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	49,999,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	10 Paket	52,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	31,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	20,804,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	14 Laporan	17,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	384,717,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	100 Laporan	360,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%			100 %	183,351,500						100 %	666,500,000		
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				62 Unit	183,351,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan Dinas, Mebel, Peralatan Kantor Lainnya	62 Unit	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
8	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	%	%	%	100 %	401,504,300					100 %	647,862,000		
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	132,904,300	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	137,862,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	268,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	510,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	%	100 %	438,202,750					100 %	739,000,000		
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	226,011,750	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang dan Aset Milik Daerah	4 Unit	185,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	199,991,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang dan Aset Milik Daerah	1 Unit	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20 Unit	12,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Barang dan Aset Milik Daerah	20 Unit	24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	%	%	100 %	254,997,000					100 %	787,500,000		
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta terfasilitasinya gugus tugas GNRM dan FPK	Bulan	Bulan	12 Bulan	254,997,000					12 Bulan	787,500,000		
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			215 Orang	188,312,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda dan Pelajar	215 Orang	525,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			70 Orang	46,752,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda dan Pelajar	70 Orang	215,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			4 Laporan	19,933,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemuda dan Pelajar	4 Laporan	47,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	8,342,811,000					8 Dokumen	3,045,170,000		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Bantuan Hibah Parpol/Lemaga serta Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan Tersedianya Laporan Stabilitas Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	8,342,811,000					12 Bulan	3,045,170,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 1 3 2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	6,695,170,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Parpol dan Lembaga Pemerintahan Lainnya	1 Dokumen	1,695,170,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				975 Orang	595,845,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Parpol dan Lembaga Pemerintahan Lainnya	975 Orang	750,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				40 Orang	88,736,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Parpol dan Lembaga Pemerintahan Lainnya	40 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 3 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				365 Laporan	963,060,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Parpol dan Lembaga Pemerintahan Lainnya	365 Laporan	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	%	%		100 %	102,589,000						100 %	350,000,000	
8 1 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi serta Pendaftaran dan Pembinaan Ormas dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Bulan		Bulan	12 Bulan	102,589,000						12 Bulan	350,000,000	
8 1 4 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	102,589,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformatif Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Ormas dalam Kab. Muba	100 Orang	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	%		100 %	255,891,000						100 %	472,500,000	
8 1 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi pada Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Bulan		Bulan	12 Bulan	255,891,000						12 Bulan	472,500,000	
8 1 5 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				125 Orang	255,891,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Tokoh Agama	125 Orang	472,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	%	%		100 %	572,383,176						100 %	819,000,000	
8 1 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Deteksi Dini dan Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik	Bulan		Bulan	12 Bulan	572,383,176						12 Bulan	819,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
8 1 6 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	125,499,948	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dalam Kab. Muba	200 Orang	173,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 1 6 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	181,899,974	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dalam Kab. Muba	50 Orang	210,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 1 6 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	227,983,239	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dalam Kab. Muba	3 Laporan	262,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 1 6 2.01 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	37,000,015	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dalam Kab. Muba	2 Dokumen	173,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											134,843,817,526				
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%		100 %	10,022,299,289						100 %	23,428,205,526		
1 6 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	%	%		100 %	74,940,000						100 %	110,000,000		
1 6 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	49,940,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur, publik	3 Dokumen	55,000,000	Dinas Sosial
1 6 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur, publik	3 Laporan	55,000,000	Dinas Sosial
1 6 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang		60 Orang	6,605,419,860						60 Orang	7,845,905,526		
1 6 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	6,605,419,860	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,845,905,526	Dinas Sosial
1 6 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepegawaian perangkat daerah yang menggunakan administrasi kepegawaian	%	%		100 %	127,136,000						100 %	700,000,000		
1 6 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				50 orang/stel	31,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	50 orang/stel	200,000,000	Dinas Sosial
1 6 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	95,886,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	4 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana pendukung kegiatan perangkat daerah yang digunakan	%	%		100 %	1,205,185,460						100 %	1,855,000,000		
1 6 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Peralatan Listrik dan Elektronik				20 Jenis	91,010,220	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur, publik	20 Jenis	300,000,000	Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
1	6	2	2.01			Adat Terpencil (KAT)	Persentase pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	Kecamatan		Kecamatan	3 Kecamatan	134,118,000				3 Kecamatan	200,000,000	
1	6	2	2.01	2		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	14 Kecamatan	200,000,000	Dinas Sosial	
1	6	2	2.02			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota yang dikumpulkan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	14,698,000				15 Kecamatan	20,000,000	
1	6	2	2.02	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Publik dan lembaga	9 Kecamatan	20,000,000	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	1,141,849,400				15 Kecamatan	1,725,542,000	
1	6	2	2.03	1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Pendamping PKH) Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan PKH			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	90 Orang 23976 KPM	457,433,000	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03	2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	15 Orang 15 Kecamatan	218,109,000	Dinas Sosial	
1	6	2	2.03	4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bansos terencana Penunjang kegiatan Karang Taruna Penunjang kegiatan SLRT			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	4 Panti 12 Bulan 12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Sosial	
						[] ATK Peserta Rakor Karang Taruna seKab. MUBA												
						[] ATK Peserta Rakor Karang Taruna se Sumatera Selatan												
						[] Bantuan Sosial Terencana Panti Asuhan At-Tagwa												
						[] Bantuan Sosial Terencana Panti El-Nuza												
						[] Bantuan Sosial Terencana Panti Hari Kurnia												
						[] Bantuan Sosial Terencana Panti Nurul Huda												
						[] Administrasi Penunjang Kegiatan												
1	6	2	2.03	5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Laporan tertanganinya kasus klien Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Kasus Terhadap Keluarga Bermasalah			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2 Laporan 40 Kasus	38,544,000	Dinas Sosial	
1	6	4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia, serta gepeng di luar panti sosial	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	4,249,448,322				15 Kecamatan	6,192,646,000	
1	6	4	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia, gepeng yang mendapat bantuan sosial	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	3,620,174,322				15 Kecamatan	5,232,646,000	
1	6	4	2.01	3		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS	62 Orang	250,000,000	Dinas Sosial	
1	6	4	2.01	5		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	PMKS	10 Orang 12 Bulan	149,999,972	Dinas Sosial	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Terlaksananya Kegiatan DPC_PPD1 dengan baik dan Berjalan Lancar				12 Bulan					Berdaya Saing			12 Bulan		
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Bedah Rumah atau RS-KTLH bagi PMKS								87 Unit		
		Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar dan Keterbelakangan Mental				20 Orang								20 Orang		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	2,979,992,400	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS		0 Orang	4,185,679,000	Dinas Sosial
		Terminasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				20 Orang								20 Orang		
		[+] Belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa uang (Bedah Rumah)				87 Orang / Paket / Pekerjaan	2,610,000,000									
		[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					369,992,400									
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Belanja Sewa Rumah Singgah								1 Rumah		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	320,129,750	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban	PMKS		290 Orang	400,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan napa diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan sosial		Kecamatan	Kecamatan					15 Kecamatan	960,000,000	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota								100 %		
		Monitoring PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial				15 Kecamatan	44,595,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napa diluar panti sosial		15 Kecamatan	160,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Adanya komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat								12 Bulan		
		Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial				5 LKKS	584,679,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napa diluar panti sosial		5 LKKS	800,000,000	Dinas Sosial
		Terlaksananya kegiatan upacara 10 november dan peringatan kesejahteraan veteran dan janda veteran				55 Orang								55 Orang		
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah		Kecamatan	Kecamatan					15 Kecamatan	102,101,336,000	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS dan masyarakat miskin (DTKS) yang menerima bantuan sosial		Kecamatan	Kecamatan					15 Kecamatan	102,101,336,000	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota								0 Keluarga		
		socialisasi verifikasi dan validasi mandiri data DTKS dan Move Verval data mandiri DTKS				15 Kecamatan	300,009,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS dan masyarakat miskin (DTKS)		15 Kecamatan	1,000,000,000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								0 Keluarga		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan pelaksanaan program sembako BPNP				15 Kecamatan	32,999,998,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PMKS dan masyarakat miskin (DTKS)		15 Kecamatan	100,101,336,000	Dinas Sosial
		Persentase masyarakat kurang mampu (DTKS) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				10675 orang								10675 orang		
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana		%	%					100 %		
		Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana				15 Kecamatan	606,600,000							15 Kecamatan	1,176,088,000	
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana yang dibantu		Kecamatan	Kecamatan					15 Kecamatan	1,176,088,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pemberian Tali Asih bagi Anggota Tagana				96 Orang	606,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat yang terkena bencana	96 Orang	1,176,088,000	Dinas Sosial	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
						17,636,456,720							43,621,087,700							
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat	%		%	100 %	8,277,249,620						100 %	18,417,112,700		
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	59,560,000						100 %	110,000,000		
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	39,610,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	4 Dokumen	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	19,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Belanja Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,867,917,567						100 %	6,040,578,700		
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	5,867,917,567	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	47 Orang/bulan	6,040,578,700	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	26,385,000						100 %	30,000,000		
2	7	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	26,385,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersejadinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	73,125,000						100 %	345,555,000		
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	30,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	1 Paket	70,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	43,125,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	3 Orang	82,815,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersejadinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,010,414,403						100 %	1,032,149,000		
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,997,286	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	127,564,974	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	1 Paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	49,667,731	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	1 Paket	80,100,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	135,026,283	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	180,600,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	104,322,129	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	233,222,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	24,960,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,962,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	12 Laporan	9,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	537,914,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	12 Laporan	504,227,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	737,858,740						100 %	1,271,400,000	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	333,658,740	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	404,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	771,400,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	501,988,910						100 %	8,187,430,000	
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	113,210,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	4 Unit	149,290,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	361,838,910	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	4 Unit	8,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			17 Unit	26,940,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	17 Unit	38,140,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	404,578,100						1 Dokumen	700,000,000	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen RTK	%	%	100 %	404,578,100						100 %	700,000,000	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan			1 Dokumen	404,578,100	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	0	1 Dokumen	480,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	%	24,10 %	6,769,762,000						24,10 %	20,900,000,000	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	%	%	100 %	6,769,762,000						100 %	20,250,000,000	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			52 Orang	6,769,762,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	0	52 Orang	20,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
						Tersedianya Mekanisme Rapat			30 Kali							30 Kali		
						Tersedianya Seragam Panitia Kegiatan			50 Stel							50 Stel		
						Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi dengan SKK Migas			1 Kegiatan							1 Kegiatan		
						Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Kedaireka			1 Kegiatan							1 Kegiatan		
						Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Pelatihan			1 Kegiatan							1 Kegiatan		
						Terselenggaranya Pendampingan BPKP dan Inspektorat			2 Kegiatan							2 Kegiatan		
						Terselenggaranya Program Pemagangan Peserta Pelatihan			52 orang							52 orang		
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	%	42,60 %	856,057,000						42,60 %	1,963,975,000	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terperuhnya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	227,484,000						100 %	500,000,000	
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat Fasilitas Layanan ULD			50 orang	227,484,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	0	50 orang	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%	%	100 %	628,573,000						100 %	1,463,975,000	
						Terlaksananya Tenaga Kerja yang ditempatkan	orang	orang	800 orang							800 orang		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif												
										Nasional	Daerah															
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online							1 Dokumen	134,320,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka	0	1 Dokumen	134,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi					
						1 Dokumen							1 Dokumen													
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Bursa Tenaga Kerja Khusus Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)							24 Unit BKK	494,253,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	24 Unit BKK		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi					
						1850 Orang							1850 Orang													
						Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asling							15 Perusahaan													
						Rekrutmen / Job Canvasing							10 Kali													
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	%					41,00 %	1,328,810,000									41,00 %	1,640,000,000		
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpeenuhinya Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	%	%					100 %	779,405,000									100 %	890,000,000		
						Tersedianya Dokumen Pengesahan Peraturan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan Laporan Peserta Jamsostek	Dokumen	Dokumen					3 Dokumen										3 Dokumen			
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen Pencatatan PKB							10 Dokumen	779,405,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	0	10 Dokumen	890,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi					
						Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan							10 Dokumen										10 Dokumen			
						Dokumen Rekomendasi UMK							1 Dokumen										1 Dokumen			
						FGD Ketenagakerjaan (Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan KSB dan PKS)							1 Dokumen										1 Dokumen			
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							1 Laporan										1 Laporan			
						Jumlah Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan							7000 orang											7000 orang		
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhi Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	%	%					100 %	549,405,000									100 %	750,000,000		
						Tersedianya Laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, LKS Tripartit dan LKS Bipartit	%	%					100 %											100 %		
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan							35 Perkara	378,010,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Tenaga Kerja dan Pihak Perusahaan di Kab. Muba		35 Perkara	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
						Tersedianya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota							1 Dokumen										1 Dokumen			
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Bipartit yang dibina dan terbentuk							16 Lembaga	171,395,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan pendapatan dan mengurangi Beban	Tenaga Kerja dan Pihak Perusahaan di Kab. Muba		16 Lembaga	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina							1 Lembaga										1 Lembaga			
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									149,271,200										1,910,600,000		
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	%					22 %	149,271,200										22 %	1,710,600,000	
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Bersal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	%					100 %	149,271,200										100 %	1,710,600,000	
3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkomang)							1 Dokumen	149,271,200	Kab. Musi Banyuasin, Sangai Desa, Jud II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Unit Permukiman Transmigrasi JUD Nganti		1 Dokumen	1,710,600,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									8,720,199,267											12,448,853,694	
						Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat cepat	%	%					100 %											100 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
										Nasional					Daerah								
2	8	1				100 %	5,739,575,992						100 %	6,178,853,694									
2	8	1	2.01			100 %	64,592,000						100 %	90,000,000									
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	44,720,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															3 laporan	3 laporan							
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	19,872,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															4 laporan	4 laporan							
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,004,630,641						100 %	4,170,353,694									
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	4,004,630,641	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Orang/bulan	4,170,353,694	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															12 bulan	12 bulan							
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,960,000						100 %	106,500,000									
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	21,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 %	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	8	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	84,710,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	0 Orang	61,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															2 orang	2 orang							
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	943,926,915						100 %	938,000,000									
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	19,982,920	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Paket	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															20 jenis	20 jenis							
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	147,195,300	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Paket	225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															22 unit	22 unit							
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	49,996,295	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya			0	0 Paket	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															20 jenis	20 jenis							
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 Paket	261,808,400	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Paket	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															44 jenis	44 jenis							
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Paket	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															45500 pengandaan	45500 pengandaan							
															7 jenis	7 jenis							
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen	24,960,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	23,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
															3 jenis	3 jenis							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				248 eksemplar						248 eksemplar				
2	8	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	100 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	299,984,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Laporan	390,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun							1 tahun			
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pembangunan Gedung Baru	1 unit	74,755,200						1 unit	80,000,000	
2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebel kantor	100 %	74,755,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	100 %	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%						100 %	508,600,000		
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	78,601,236	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Laporan	140,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan							12 bulan			
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	195,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Laporan	368,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang							16 orang			
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%						100 %	285,400,000		
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	0 Unit	183,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Unit	190,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit							5 unit			
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	55,580,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m2							1240 m2			
2	8	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	32,330,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPPPA Kab. Muba	0 Unit	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 genset							1 genset			
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 unit							21 unit			
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	jumlah						26 jumlah	1,950,000,000		
					Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PFRG	jumlah	26 jumlah	850,421,100					26 jumlah			
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan.	%						100 %	350,000,000		
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PFRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan dan anak	0 Perangkat Daerah	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Perencana nadi PD	150 Orang							150 Orang			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional		Daerah						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG				4 kali							4 kali					
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota				48 PD							48 PD					
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	600,421,100			100 %	1,400,000,000				
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				300 orang	198,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan didesa	300 orang	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota yaitu				3 kegiatan, Pelatihan									
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0 Organisasi	402,421,100	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan didesa	0 Organisasi	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Kegiatan									
					Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				7 ormas Perempuan									
					Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat				7 jenis KIE									
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%		%	0,009 %	438,968,525				0,009 %	725,000,000			
					Upaya pencegahan Kekerasan terhadap perempuan, Sosialisasi, Damangan, Home Visit dan bantuan sembako				4 kegiatan									
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	214,656,400				100 %	300,000,000			
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	214,656,400	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan dan anak	0 Orang	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan				50 %									
					Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota				100 %									
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	224,312,125				100 %	250,000,000			
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				14 kecamatan	224,312,125	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan	14 kecamatan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota				250 orang/paket									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP-JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	8	4				jumlah	1 jumlah	133,583,200					1 jumlah	1,105,000,000	
							1 kegiatan						1 kegiatan		
2	8	4	2.02			%	100 %	133,583,200					100 %	255,000,000	
2	8	4	2.02	1			100 orang	133,583,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	keluarga	100 orang	255,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							100 orang						100 orang		
							100 orang						100 orang		
2	8	5				jumlah	1 jumlah	99,999,950					1 jumlah	100,000,000	
2	8	5	2.01			%	100 %	99,999,950					100 %	100,000,000	
2	8	5	2.01	2			100 %	99,999,950	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	perempuan dan anak	100 %	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6				%	100 %	409,995,000					100 %	880,000,000	
2	8	6	2.01			%	100 %	250,000,000					100 %	655,000,000	
2	8	6	2.01	2			500 orang	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anak dalam wilayah kab. Muba	500 orang	655,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							4 jenis						4 jenis		
							1 kegiatan						1 kegiatan		
							100 orang						100 orang		
							200 orang						200 orang		
2	8	6	2.02			%	100 %	159,995,000					100 %	225,000,000	
2	8	6	2.02	1			8 paket SBRA	159,995,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anak dalam wilayah Kab. Muba	8 paket SBRA	225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7				%	0,013 %	1,047,655,500					0,013 %	1,510,000,000	
2	8	7	2.01			%	100 %	811,270,000					100 %	1,250,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0	0 Perangkat Daerah	1,050,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
						Operasional KPAD untuk melaksanakan upaya Perlindungan Khusus Anak termasuk pelaksanaan Dampingan Anak berhadapan dengan Hukum							12 bulan			811,270,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	12 bulan	
						Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / kota							12 bulan							12 bulan		
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan focus pada pencegahan, penanganan korban yang terintegrasi sosial	%		%				100 %	236,385,500			100 %	160,000,000				
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT/Bidang PPA untuk layanan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus						anak	12 bulan	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
						Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							15 kecamatan						15 kecamatan			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																					
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																				
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%					100 %	89,626,000			100 %	150,000,000			
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	52,186,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							5 Laporan	37,440,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	5 Laporan	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			Orang			40 Orang	4,702,713,032						40 Orang	6,291,000,000	
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%				100 %							100 %		
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							40 Orang/bulan	4,702,713,032	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	40 Orang/bulan	6,291,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%		%				100 %	40,730,000						100 %	66,000,000	
2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							4 Dokumen	40,730,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	4 Dokumen	66,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			Orang			12 Orang	150,261,000						12 Orang	550,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	53,625,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang	96,636,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	4 Orang	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			Laporan	12 Laporan	930,651,600						12 Laporan	1,485,000,000	
						Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%			%	100 %							100 %		
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	29,660,310	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	221,000,790	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	5 Paket	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	55,974,692	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	149,844,963	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	67,789,845	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	2 Paket	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	28,310,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	322,171,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	30,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			Unit	4 Unit	129,893,100						4 Unit	180,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah	%	%	%	100 %							100 %		
2 9 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	129,893,100	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	10 Unit	180,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	534,232,000						12 Laporan	1,150,000,000	
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	%	%	100 %							100 %		
2 9 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	116,232,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	418,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	850,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	%	100 %	401,095,000						100 %	710,000,000	
2 9 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				4 Unit	151,910,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	4 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	224,785,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	2 Unit	255,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	24,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	40 Unit	155,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian Pangan	%	%	%	50 %	200,000,000						50 %	750,000,000	
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Jenis		Jenis	3 Jenis	200,000,000						3 Jenis	750,000,000	
		Jumlah Lambung Pangan yang Tersedia	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
2 9 2 2.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lambung Pangan	Jumlah lambung pangan yang tersedia				2 Unit	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	2 Unit	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi				
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi energi perkapita/hari	KKal/Kap/Hari		KKal/Kap/Hari	2090 KKal/Kap/Hari	2,956,628,500						2090 KKal/Kap/Hari	6,857,786,800	
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		Laporan	15 Laporan	538,100,100						15 Laporan	2,058,415,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	46,964,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Laporan	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	198,276,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Laporan	229,410,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	96,955,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	135,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	58,640,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				6 Unit	47,275,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	6 Unit	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				10 Unit	89,989,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	10 Unit	1,274,005,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengelolaan cadangan pangan kabupaten	Ton Ton			15 Ton 15 Ton	173,472,000							15 Ton 15 Ton	485,000,000	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11.32 Ton	137,560,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	11.32 Ton	360,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				22.6 Ton	35,912,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	22.6 Ton	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Komoditas pangan lokal yang ditetapkan harga minimum	Laporan Komoditas			1 Laporan 3 Komoditas	43,449,000							1 Laporan 3 Komoditas	150,000,000	

Kode	Kategori	Sub Kategori	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
												Nasional					Daerah		
2	9	5	2.01	5				1 Dokumen	71,850,900	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															54,163,987,420	141,550,010,000	
2	11	1	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat	%	%	100 %	12,447,679,916						100 %	22,805,010,000			
2	11	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6 Laporan	71,999,620						6 Laporan	115,000,000			
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan (Renstra dan Renja)		2 Laporan	46,999,620	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	2 Laporan	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan (Laporan Keuangan, LKPI, LAKIP, LPPD)		4 Laporan	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	4 Laporan	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perkantoran	%	%	100 %	9,257,076,285						100 %	14,500,000,000			
2	11	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan	9,257,076,285	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	12 bulan	14,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	%	100 %	49,917,250						100 %	70,000,000			
2	11	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	49,917,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapaiannya Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	%	%	100 %	158,896,750						100 %	309,750,000			
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Serta Atribut kelengkapannya		85 Setel	58,968,750	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	85 Setel	59,750,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		8 Orang	99,928,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	8 Orang	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Adm	%	%	100 %	1,390,099,129						100 %	2,060,500,000			
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		11 Jenis	29,998,416	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	11 Jenis	48,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	199,246,911	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	0 Paket	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dan perlengkapan Kantor, Drone, GPS Garmin		20 Jenis							20 Jenis				
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perlengkapan kantor lainnya (AC)		10 Unit							10 Unit				
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		25 Jenis	74,986,272	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	25 Jenis	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				57 Jenis	300,043,131	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	57 Jenis	425,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Jenis	310,845,399	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	11 Jenis	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Harian				16 Jenis	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	16 Jenis	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Rapat				880 Kotak	49,980,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	880 Kotak	22,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Mekanis Minum Rapat				100 Kali	399,999,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup	Prioritas Daerah 3 : Membangun	0	100 Kali	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	99,733,500						100 %	350,000,000	
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				1 Unit	99,733,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	1 Unit	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Bulan		Bulan	12 Bulan	818,559,632						12 Bulan	2,350,000,000	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				12 Bulan	364,459,632	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi/Keuangan, Sopir, Resepsionis, Keamanan Kantor dan Tenaga Teknis				12 Bulan	454,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	1,600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	601,397,750						100 %	3,049,760,000	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas yang terpelihara				5 Unit	263,240,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	5 Unit	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	138,164,820	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	3 Unit	2,475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199,992,930		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	1 Unit	199,760,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%		%	65,01 %	715,276,089						65,01 %	1,545,000,000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai	Laporan		Laporan	2 Laporan	715,276,089						2 Laporan	1,545,000,000	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terpeliharanya Alat Pemantauan Kualitas Air ONLMO (Peralatan dan Bangunan)				1 Kegiatan	215,301,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	1 Kegiatan	645,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Tersedianya Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				1 Laporan							1 Laporan		
						Tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai				1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Alat Pengujian Kualitas Air dan Udara				6 Unit							6 Unit		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Uji Lab untuk Uji Emisi sumber tidak bergerak Jumlah Dokumen yang dilasmanakan Jumlah Pengambilan Contoh Uji Jumlah Pengujian Contoh Uji Terjaganya Laboratorium Analisis Kesehatan (Suplemen) Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium Tersedianya Bahan Kimia									2 Unit 36 Dokumen 500 Contoh Uji 1000 Contoh Uji 1120 Orang/Hari 22 Unit 45 jenis	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH yang Dikelola	%		%	20%	16,483,325,515				20%	80,700,000,000				
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan	Lokasi		Lokasi	8 Lokasi	16,483,325,515				8 Lokasi	80,700,000,000				
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Tersedianya Dokumen IKPLHD				1 Dokumen	99,497,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup,	Prioritas Daerah 3 : Membangun	Pemerintah Daerah,	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bertambahnya luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan di Kabupaten Perawatan RTH Kawasan Perkotaan yang telah dibangun				61000 m2 412585.05 m2	16,258,040,515	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	61000 m2 412585.05 m2	80,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					[-] Jasa Konsultansi Perencanaan (Reviu Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Bayung Lencir)					12500000 Rupiah	100,000,000									
					[-] Jasa Konsultansi Pengawasan (Pengawasan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Bayung Lencir)					100000000 Rupiah	400,000,000									
					[-] Jasa Pelaksana Konstruksi (Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Bayung Lencir)					19000 M2	9,500,000,000									
					[-] Administrasi Penunjang Kegiatan						6,258,040,515									
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Kader Lingkungan Hidup				128 Orang	125,788,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	128 Orang	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mengajukan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%		%	100%	248,538,000						100%	350,000,000		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhi Syarat Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Dokumen Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	248,538,000						1 Dokumen	350,000,000		
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Permohonan Izin Lingkungan				1 Dokumen	123,408,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pengawasan Terhadap Usaha dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Jumlah Laporan Koordinasi penerapan sanksi PPLH				1 Dokumen 1 Laporan	125,130,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengawasan Terhadap Usaha dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen 1 Laporan	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Lembaga/Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	%		%	100%	249,597,000						100%	550,000,000		
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata	Desa		Desa	1 Desa	249,597,000						1 Desa	550,000,000		
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Terkait PPLH				6 Sekolah	149,862,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Lembaga / Masyarakat	6 Sekolah	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	11	8	2.01	4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Penerima Penghargaan Program Kampung Istim			15 Desa	99,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Retahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Lembaga / Masyarakat	15 Desa	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang Dicapai	%	%	100 %	309,230,000						100 %	850,000,000	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pantau Adipura	Lokasi	Lokasi	41 Lokasi	309,230,000						41 Lokasi	850,000,000	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Desa Musi Banyuwasin Hijau (IDMH)			216 Dokumen	309,230,000	Kab. Musi Banyuwasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0		850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		1 Penghargaan										
						Jumlah Titik Pantau Adipura		41 Titik Pantau										
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan diluar Pengadilan / Melalui Pengadilan	%	%	100 %	124,718,000						100 %	300,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Laporan Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan	Kasus	Kasus	24 Kasus	124,718,000						24 Kasus	300,000,000	
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			24 Kasus	124,718,000	Kab. Musi Banyuwasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Retahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	24 Kasus	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	%	%	100 %	23,585,622,900						100 %	33,850,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya Petugas Pengelolaan Persampahan di 11 Kecamatan	Orang	Orang	890 Orang	23,585,622,900						890 Orang	33,850,000,000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sanitari landfill, Guji, THR, Petugas dan Sopir Kabupaten/Kota			13 Kecamatan	4,915,172,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Retahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur ulangan dan Pemanfaatan Kembali	13 Kecamatan	3,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					[] Bangunan Bank Sampah				32 M2	196,070,400								
					[] Belanja Motor Roda 3				2 Unit	57,720,000								
					[] Belanja Tong Sampah				94 Unit	198,246,000								
					[] Belanja Alat Berat (Excavator)				1 Unit	1,934,185,000								
					[] Administrasi Penunjang Kegiatan					2,528,951,300								
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Bank Sampah Aktif			100 %	69,642,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Retahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur ulangan dan Pemanfaatan Kembali	100 %	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
				Tersedianya Lokasi Pengelolaan Sampah Khususnya Aspek Pemilahan dan Pengolahan Sampah Serta Pengelolaan TPA		14 Kecamatan												
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah			14 KECAMATAN	18,600,808,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Retahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur ulangan dan Pemanfaatan Kembali	14 KECAMATAN	30,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di 11 Kecamatan				890 Orang							890 Orang		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											27,908,302,710		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	15 Dokumen	10,440,354,067						15 Dokumen	12,278,346,350	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	74,999,670						100 %	115,000,000	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			3 Dokumen	49,900,800	Kab. Musi Banyuwasin,	PENDAPATAN ASLI	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Memperkuat Stabilitas Politik/Sosial Dan	Asasatur	3 Dokumen	55,000,000	Dinas Kependudukan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
	Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah						Sekayu, Kayu Ara	DAERAH (PAD)	Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan			dan Pencatatan Sipil				
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	24,999,870	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	3 Laporan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	7,117,349,288			100 %	8,000,000,000				
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/bulan	7,117,349,288	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang/bulan	8,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	%	100 %	37,030,000			100 %	37,030,000				
2	12	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	37,030,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Dokumen	37,030,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	128,636,000				100 %	151,250,000			
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	31,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	93,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	97,386,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Orang	57,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	1,229,457,620				100 %	1,134,979,350			
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	29,997,490	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	39,981,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	199,949,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Paket	250,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	74,976,615	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	39,997,650	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	299,999,034	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	149,999,961	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			7 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	7 Dokumen	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	49,951,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Laporan	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	399,583,920	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Laporan	350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					99,856,000					150,000,000			
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			20 unit	99,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan		20 unit	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	1,372,075,029				100 %	2,260,625,000			
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	427,975,029	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	3 Laporan	431,925,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	944,100,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Laporan	1,828,700,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	380,950,460						100 %	429,462,000	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					6 Unit	190,490,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	6 Unit	190,490,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	100,839,060	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Unit	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					25 Unit	89,621,400	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	25 Unit	88,972,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%		100 %	392,134,190						100 %	6,872,517,420	
						Terlayannya Permohonan Surat Keterangan Pendah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di 15 Kecamatan					18000 Dokumen								18000 Dokumen	
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%		100 %	392,134,190						100 %	343,517,500	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting dalam Pelayanan Keliling					6000 Dokumen	392,134,190	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	6000 Dokumen	343,517,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%		100 %	238,998,930						100 %	672,975,400	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%		100 %	238,998,930						100 %	349,999,900	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					30 Buku Pokok Pemakaman	238,998,930	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	30 Buku Pokok Pemakaman	349,999,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	%		%		100 %	1,628,204,264						100 %	7,954,463,540	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%		%		100 %	204,063,546						100 %	310,000,000	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					28 Dokumen	39,999,922	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	28 Dokumen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Keajaiban Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					30 Dokumen	164,063,624	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	30 Dokumen	260,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%		100 %	899,999,998						100 %	6,449,000,000	
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Bahan Pendukung Pencetakan Administrasi Kependudukan					598 buah	899,999,998	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	598 buah	6,449,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%		100 %	408,982,682						100 %	918,154,000	
2	12	4	2.03	3	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data penduduk berusia 16 Tahun yang sudah perekaman KTP-El					1 Laporan	228,999,674	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	215,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					25 titik layanan								25 titik layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
										Nasional					Daerah							
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						1 Laporan	39,983,150	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	201,278,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan						1 Laporan	139,999,858	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan							4 Kecamatan		Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan					4 Kecamatan			
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%			%		100 %	115,158,038							100 %	277,309,540	
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah di Konversi						84 Dokumen	75,000,126	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi banyuasin	84 Dokumen	74,991,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						1 Laporan	40,157,912	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi banyuasin	1 Laporan	202,318,540	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%			%		100 %	46,453,096							100 %	130,000,000	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	%			%		100 %	46,453,096							100 %	130,000,000	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk yang dicetak						100 exemplar								100 exemplar		
						Jumlah buku Profil Perkembangan Penduduk yang disusun						1 Buku	46,453,096	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 Buku	130,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun						0 Dokumen								0 Dokumen		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											12,338,913,019							17,056,800,202		
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%			%		100 %	7,149,485,062							100 %	7,976,800,202	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%			%		100 %	74,957,834							100 %	76,000,000	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	49,999,830	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pegawai	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 Laporan	24,958,004	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pegawai	3 Laporan	26,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%			%		100 %	4,810,066,499							100 %	4,975,000,000	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						36 Orang/bulan	4,810,066,499	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	PNS Dinas PMD Kab. Muba	36 Orang/bulan	4,950,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%			%		100 %	43,925,000							100 %	65,000,000	
2	13	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						6 Dokumen	43,925,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Daftar BMD skpd	6 Dokumen	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%			%		100 %	69,406,250							100 %	74,500,000	
2	13	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	24,281,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas PMD	1 Paket	24,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45,125,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas PMD	5 Orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	%	%	100 %	1,135,301,821			100 %	1,238,946,000		
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,926,978	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	1 Paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	199,920,120	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	2 Paket	205,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	74,996,139	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	1 Paket	83,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	299,991,730	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	1 Paket	315,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,045,854	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	2 Paket	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	24,975,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49,935,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	12 Laporan	49,935,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355,511,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitas pendukung kantor dinas pmd	12 Laporan	355,511,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	%	100 %	99,296,856			100 %	185,000,000		
2	13	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	21 Unit	99,296,856	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	sarana aparatur skpd	21 Unit	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	%	%	100 %	576,754,602			100 %	943,954,602		
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175,054,602	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	fasilitas jasa kantor	12 Laporan	175,054,602	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	401,700,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	fasilitas jasa kantor	12 Laporan	768,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	%	100 %	339,776,200			100 %	418,399,600		
2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	7 Unit	223,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana Dan prasarana aparatur skpd	7 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91,031,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana Dan prasarana aparatur skpd	1 Unit	91,031,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	24,794,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana Dan prasarana aparatur skpd	27 Unit	27,368,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	%	75 %	2,019,975,633			75 %	2,510,000,000		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	%	75 %	2,019,975,633			75 %	2,510,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa			1 Dokumen	157,620,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			0 Dokumen						0 Dokumen					
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			65 Dokumen	305,469,708	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	65 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			3 Dokumen	479,293,380	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	3 Dokumen	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			229 Dokumen	155,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	229 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			229 Dokumen	399,999,945	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	229 Dokumen	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			242 Dokumen	115,430,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	242 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa			3 Dokumen	165,686,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	3 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			3 Desa	114,085,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	3 Desa	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			15 Dokumen	126,566,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	15 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	Keluarga		Keluarga	150 Keluarga	3,169,452,324				150 Keluarga	5,020,000,000				
				Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina		Lembaga		Lembaga	15 Lembaga						15 Lembaga					
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina		%		%	100 %						100 %					
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	Lembaga		Lembaga	15 Lembaga	3,169,452,324				15 Lembaga	5,020,000,000				
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	%		%	100 %						100 %						
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			15 Dokumen	886,536,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	15 Dokumen	950,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			229 Lembaga	179,984,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	229 Lembaga	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			4 Dokumen	340,730,948	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	4 Dokumen	345,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			4 Laporan	739,427,976	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	4 Laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			16 Laporan	132,270,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	16 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			15 Dokumen	890,502,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa	15 Dokumen	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA DASAR																			
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
									10,857,840,876							28,424,842,900				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%		%	100 %	9,124,168,922						100 %	16,505,500,000	
2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra, Renja, TAPKIN, LKJ, LPPD dan Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	5 Laporan	75,000,000						5 Laporan	120,000,000	
2 14 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyusunan Renstra, Renja dan TAPKIN	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Penyusunan Renja dan TAPKIN				2 Laporan							2 Laporan		
2 14 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyusunan Renstra, Renja dan TAPKIN	3 Dokumen	40,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Penyusunan LKJIP, LPPD dan LKPI				3 Laporan							3 Laporan		
2 14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	6,998,520,191						14 Bulan	11,000,000,000	
2 14 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang	6,998,520,191	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DPPKB Kab. Muba	58 Orang	11,000,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Stell		Stell	160 Stell	82,535,000						160 Stell	210,500,000	
2 14 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				160 Paket	42,075,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPPKB Kab. Muba	160 Paket	170,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Tertentu				160 Stell							160 Stell		
2 14 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	40,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DPPKB Kab. Muba	2 Orang	40,500,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	877,482,617						100 %	1,090,000,000	
2 14 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	79,869,510	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Paket	40,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pembelian Alat Listrik dan Alat Elektronik Perkantoran				13 Jenis							13 Jenis		
2 14 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	49,970,757	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Paket	75,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan Untuk 12 Bulan				22 Jenis							22 Jenis		
2 14 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	199,994,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Paket	200,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan 1 Tahun				40 Jenis							40 Jenis		
2 14 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	75,036,200	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Paket	80,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan				13 Jenis							13 Jenis		
2 14 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5000 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5000 Dokumen	45,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Langganan Media Koran Nasional dan Lokal				5000 Eksp							5000 Eksp		
2 14 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	49,431,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	50,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
2 14 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	398,180,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Laporan	600,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Tersedianya Dana Untuk Makan Minum Rapat Serta Biaya Koordinasi Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan							12 Bulan		
2 14 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Sarana dan Prasarana DPPKB Kab. Muba	%		%	100 %	387,296,534						100 %	2,315,000,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Double Cabin				1 Unit							1 Unit		
		Pengadaan Sepeda Motor Untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)				15 Unit							15 Unit		
2 14 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	237,345,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DPPKB Kab. Muba	25 Unit	300,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	30 Unit	149,950,034	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DPPKB Kab. Muba	30 Unit	450,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	30 Unit							30 Unit						
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Gaji Tenaga Kontrak Non PNS	Bulan	Bulan	12 Bulan	365,432,580			12 Bulan	850,000,000					
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	130,732,580	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	350,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			
					Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	12 Bulan												
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	234,700,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			
					Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Non PNS Untuk 12 Bulan	20 Orang	20 Orang												
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	337,902,000			12 Bulan	920,000,000					
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7 Unit	260,150,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	7 Unit	400,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana			
					Tersedianya Dana Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda-4	7 Unit	7 Unit												
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Yang Rehabilitasi			15 Unit	64,332,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Unit	500,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit												
					Jumlah Gedung Kantor DPPKB Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit												
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi			20 Unit	13,420,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Unit	20,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
					Pemeliharaan AC Split	20 Unit	20 Unit												
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Stakeholder Yang Memahami Kajian Dampak Kependudukan	%	%	90,01 %	167,207,000			90,01 %	3,400,000,000					
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Kependudukan di 15 Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	15 Kecamatan	167,207,000			15 Kecamatan	2,350,000,000					
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			138 Laporan					138 Laporan					
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			2 Dokumen	167,207,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	PPKBD, Sub PPKB, Kader, PLKB/PKB dan Mitra Kerja DPPKB Kab. Muba	2 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
					Jumlah Kader TPK Yang Mengikuti Pembinaan	2400 Orang	2400 Orang												
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi di Desa Lokus Stunting Terkait Dengan Kegiatan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi Pada Remaja Serta Pemahaman 1000 HPK	65 Orang	65 Orang												
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	%	%	90,70 %	1,143,154,914			90,70 %	6,829,342,900					
2	14	3	2.01		Telaksananya Pengadaan Media KIE Berupa Standing Banner, Banner, Kalender, Spanduk, Stiker dan Media Luar Ruang lainnya	Terlaksananya Pengadaan Media KIE Berupa Standing Banner, Banner, Kalender, Spanduk, Stiker dan Media Luar Ruang lainnya	Jenis	Jenis	5 Jenis	251,664,821			5 Jenis	1,600,000,000					
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			1 Unit	140,928,221	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Pasangan Usia Subur dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Unit	150,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
					Pengadaan Roll Up Banner, Spanduk, Kalender, Stiker	4 Jenis	4 Jenis												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	110,736,600	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Pasangan Usia Subur dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
						Membuatan Papan Nama Balai Penyuluh	15 Buah							15 Buah		
						Membuatan Papan Nama Klinik KB	30 Buah							30 Buah		
						Pengadaan Media Luar Ruang Berupa Tugu Keluarga Berencana (Tugu KB)	5 Buah							5 Buah		
					Terlaksananya Kegiatan Rakorcam, Rakordes dan Minilok di 15 Kecamatan Dalam Kab. Muba	1440 Orang						1440 Orang				
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD	120 Orang	175,540,000						120 Orang	1,260,000,000	
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	175,540,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana PPKBD & Sub PPKD dan Petugas Lapangan (PKB/PLKB) se Kab. Muba	1 Organisasi	75,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	120 Orang							120 Orang		
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	2000 Buah								2000 Buah		
					Pengadaan Buku Panduan	2000 Buah								2000 Buah		
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat dan Obat Pendamping Kontrasepsi dan Pendistribusian ke Lapangan	8 Jenis	573,659,093						8 Jenis	2,319,342,900	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	82,257,588	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petugas Jaringan KB (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit), Akseptor KB dan Kelompok Pendukung Program Keluarga Berencana se Kabupaten Musi Banyuasin	2 Laporan	300,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	42 Unit	119,342,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petugas Jaringan KB (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit), Akseptor KB dan Kelompok Pendukung Program Keluarga Berencana se Kabupaten Musi Banyuasin	42 Unit	119,342,900	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	300 Orang	104,707,605		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petugas Jaringan KB (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit), Akseptor KB dan Kelompok Pendukung Program Keluarga Berencana se Kabupaten Musi Banyuasin	300 Orang	250,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
										Nasional					Daerah							
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						135 Laporan	142,398,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petugas Jaringan KB (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit), Akseptor KB dan Kelompok Pendukung Program Keluarga Berencana se Kabupaten Musi Banyuasin	135 Laporan	600,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	
						Melakukan Pembinaan Kepada Kelompok PK Remaja dan Pencegahan Stunting						25 Kelompok							25 Kelompok			
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Akseptor KB Yang Terlayani di 15 Kecamatan Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						3000 Akseptor 1 Laporan	124,953,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk	Petugas Jaringan KB (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit),	3000 Akseptor 1 Laporan	300,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Terlayannya Akseptor KB Dalam Rangka Pelayanan KB Bersama IBI, TNI dan PKK	Kecamatan				Kecamatan	15 Kecamatan	142,291,000						15 Kecamatan	1,650,000,000		
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Pembinaan Terpadu Kampung KB						1 Laporan	142,291,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya Kab. Musi Banyuasin, Keuang, Keuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk	Kader KB dan Organisasi Pendukung Program Keluarga	1 Laporan	1,400,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Calupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang Di Bina	%				%	100 %	423,310,040						100 %	1,690,000,000		
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%				%	100 %	300,504,800							100 %	1,190,000,000	
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						1 Laporan	135,833,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Kelompok UPPS, Kelompok BKB dan Remaja Yang Terbagung Dalam Kelompok PIK Remaja	1 Laporan	350,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
						Terlaksananya Pelatihan Kader BKB di Lokasi Stunting						15 Kecamatan							15 Kecamatan			
						Terlaksananya Pelatihan Kader BKB di Lokasi Stunting						30 Desa							30 Desa			
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						1 Laporan	164,671,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Kelompok UPPS, Kelompok BKB dan Remaja Yang Terbagung Dalam Kelompok PIK Remaja	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
						Terlaksananya Pelatihan Terhadap Kader Kelompok BKL						15 Kecamatan							15 Kecamatan			
						Terlaksananya Pembinaan Terhadap Remaja Saka Kencana tentang Kespro, NAPZA, PUP HIV Aids dan Program KB						1440 Orang							1440 Orang			
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelatihan Terhadap Kader Kelompok BKB	Kecamatan				Kecamatan	15 Kecamatan	122,805,240						15 Kecamatan	500,000,000		
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						1 Laporan	122,805,240	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	250,000,000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
						Terlaksananya Pelatihan Terhadap Kader Kelompok BKB						15 Kecamatan							15 Kecamatan			
						Melaksanakan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Upaya Pencegahan Stunting						15 Kecamatan							15 Kecamatan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP-JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							27,432,063,000		
2	15	1				100 %	10,076,360,569					100 %	13,300,000,000		
2	15	1	2.01			100 %	64,999,800					100 %	85,000,000		
2	15	1	2.01	1											
							1 Laporan					1 Laporan			
							3 Laporan	44,999,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	3 Laporan	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	6											
							3 Laporan	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	3 Laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02			100 %	5,313,706,057					100 %	6,500,000,000		
2	15	1	2.02	1											
							12 Bulan	5,313,706,057	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	12 Bulan	6,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.03												
								74,508,000					100,000,000		
2	15	1	2.03	2		100 %	74,508,000					100 %	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.05			100 %	207,742,000					100 %	415,000,000		
2	15	1	2.05	2											
							48 stel	41,345,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	48 stel	165,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	9											
							6 orang	166,397,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	6 orang	250,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06			100 %	904,972,477					100 %	1,335,000,000		
2	15	1	2.06	1											
							15 jenis	39,999,916	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	15 jenis	65,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	2											
							6 jenis	149,986,686	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	6 jenis	580,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	3											
							28 Jenis	49,999,506	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	28 Jenis	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4											
							45 Jenis	199,997,469	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	45 Jenis	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	5											
							16 Jenis	99,999,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	16 Jenis	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	6											
							4 Jenis	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	4 Jenis	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	8											
							725 Kotak	40,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	725 Kotak	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9											
							90 kali	299,989,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	90 kali	330,000,000	Dinas Perhubungan
						793 kotak									
2	15	1	2.07			100 %	74,706,850					100 %	100,000,000		
2	15	1	2.07	5											
							3 Jenis	74,706,850	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	3 Jenis	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08			100 %	1,745,242,185					100 %	2,925,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya langganan telpon, air dan listrik serta tv satelit				12 Bulan	295,942,185	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	12 Bulan	325,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya administrasi perkantoran dan pembayaran gaji non PNS				108 Orang	1,449,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	108 Orang	2,600,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		%	100 %	1,690,483,200						100 %	1,840,000,000		
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan				14 unit	1,506,683,200	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	14 unit	1,450,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1 per paket	159,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 per paket	190,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya prasarana gedung kantor				1 Jenis	24,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Jenis	200,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	%		%	90 %	5,518,392,460						90 %	3,180,000,000		
2	15	2	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyediaan perengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	3,397,651,506						100 %	600,000,000		
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	3,397,651,506	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	0 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan	
					[+] Hibah Uang Untuk Penyediaan Perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Musi Banyuasin	Tersedianya perengkapan jalan				40 unit							40 unit			
					[+] Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Marka Tengah Simp. Tugu Bintang s/d Simp. Rumah Pintar Lajur Kanan & Kiri)					1 Paket	3,000,000,000									
					[+] Pengadaan Rambu-Rambu (Ukuran 75x75)					2342 Meter	369,655,566									
					[+] Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross (Simp. Rumah Pintar)					10 Buah	21,010,813									
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					30 Meter	4,735,127									
											2,250,000									
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	%		%	100 %	381,262,000						100 %	530,000,000		
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5 Orang	94,198,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	5 Orang	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji				2000 set	40,588,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	2000 set	65,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor				8 jenis	188,678,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	8 jenis	300,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji keliling di kabupaten musu banyuasin				8 kali/tahun	57,798,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	8 kali/tahun	65,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	549,377,440						100 %	600,000,000		
2	15	2	2.06	1	Penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum lalu lintas				4 kali/tahun					Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	4 kali/tahun			
						Terpenuhinya dokumen dan rapat wahana tata nugraha				1 Dokumen	246,920,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																		
										Nasional	Daerah																					
		Terperuhnya dokumen kajian lalu harian rata-rata				1 Dokumen																										
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya prasarana lalu lintas									30 unit	302,456,940	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	30 unit	300,000,000	Dinas Perhubungan								
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan llaj di jalan	%								100 %	1,190,101,514																
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Peryataan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/juni mudi Terlaksananya razia gabungan dengan instansi terkait Terlaksananya sosialisasi keselamatan bidang LLAJ Tersedianya biaya operasional makan minum, honor dan SPPD pengawasan Lebaran, Natal dan Tahun Baru									1 kali/tahun 50 Orang 6 kali/tahun 24 kali/tahun 2 kali/tahun	1,190,101,514	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	1 kali/tahun 50 Orang 6 kali/tahun 24 kali/tahun 2 kali/tahun	1,300,000,000	Dinas Perhubungan								
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik	%								84 %	1,062,520,850																
2	15	3	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	persentase terlaksananya pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	%								100 %	63,930,000																
2	15	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang									2 Kali/tahun	63,930,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	2 Kali/tahun	50,000,000	Dinas Perhubungan								
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang	Kali/tahun								2 Kali/tahun	998,590,850																
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terperuhnya biaya operasional KM Putri Cindai dan Kapal PELRA Banawa serta 4 Unit Jetski									6 Unit	295,159,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	6 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan								
2	15	3	2.13	6	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan									0 Unit 2 Lokasi	703,431,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	0 Unit 2 Lokasi	602,063,000	Dinas Perhubungan								
					[+] Rehab Gedung Dermaga Sekayu										144,3 M2	563,058,600																
					[+] Pembangunan dermaga depan kantor desa Dusun IV Desa Teluk Kijing I, Kab. Musi Banyuasin, Lais, Teluk Kijing I										1 Paket	102,748,000																
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan											37,625,000																
2	15	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	persentase sarana prasaranan transportasi udara dalam kondisi baik	%								83 %	291,414,600																
2	15	4	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase terlaksananya penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	%								100 %	291,414,600																
2	15	4	2.01	1	Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diperhatikan Terperuhnya prasarana bandar udara	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diperhatikan									0 Dokumen 1 Lokasi	291,414,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin	0 Dokumen 1 Lokasi	10,000,000,000	Dinas Perhubungan								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													30,819,260,948														
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%								100 %	8,515,871,816																
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Berjalan dengan Baik	Laporan								10 Laporan	73,765,000																
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Taplin)	Terlaksananya Musrenbang Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									1 Laporan 2 Dokumen	49,965,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	1 Laporan 2 Dokumen	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika								
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD (Lap. Keuangan, LKRI, LAKIP, LPPD)	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD (Lap. Keuangan, LKRI, LAKIP, LPPD)									4 Laporan	23,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	4 Laporan	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	5,288,863,184						100 %	7,000,000,000	
2 16 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				38 orang	5,288,863,184	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	38 orang	7,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas sumber Daya Aparatur Dinas	%		%	100 %	122,547,250						100 %	278,000,000	
2 16 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya				39 stell	27,056,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	39 stell	28,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN/Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan Jumlah ASN/Pegawai yang Mengikuti Didlat				30 orang	95,491,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	30 orang	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Aktivitas Kerja dan Perkantoran	%		%	100 %	1,204,938,678						100 %	2,000,000,000	
2 16 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor				35 Jenis	29,893,079	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	35 Jenis	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor				20 Jenis	200,317,234	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	20 Jenis	850,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				9 Jenis	74,758,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	9 Jenis	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				36 Jenis	299,998,923	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	36 Jenis	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	150,018,942	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	2 Jenis	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 laporan	49,975,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	12 laporan	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas dalam Daerah, Perjalanan Dinas luar Daerah dan makan Minum Rapat)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas dalam Daerah, Perjalanan Dinas luar Daerah dan makan Minum Rapat)				3 laporan	399,977,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	3 laporan	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan meubeler Penunjang Kenyamanan Bekerja	unit		unit	10 unit	98,490,510					10 unit	150,000,000		
2 16 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				7 Jenis	98,490,510	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	7 Jenis	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1,273,171,944					1 Laporan	2,153,999,800		
2 16 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				12 laporan	318,672,144	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	12 laporan	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan Umum kantor (Gaji Non PNS dan Jasa Kebersihan Kantor)				65 orang	954,499,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab.Muba	65 orang	1,653,999,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan Prasarana penunjang Kenyamanan Bekerja	unit		unit	67 unit	454,095,250					67 unit	505,000,000		
2 16 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9 unit	304,090,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	9 unit	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				513 M2	107,808,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo	513 M2	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (AC dan Genset)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (AC dan Genset)				57 unit	42,197,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinkominfo Kab. Muba	57 unit	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pertentase Informasi Pemerintahan yang disampaikan Kepada Publik	%		%	100 %	10,695,895,309						100 %	13,450,000,000	

Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat	Media		Media	150 Media	10,695,895,309					150 Media	13,450,000,000		
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Unit Pemancar	647,516,983	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	1 Unit Pemancar	1,700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
									2 Jenis						2 Jenis			
									30 Jenis						30 Jenis			
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Bulan	271,664,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	12 Bulan	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Bulan	972,887,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	12 Bulan	1,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya sosialisasi Program Pemerintah kab. Musi Banyuasin			250 orang	421,153,926	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	250 orang	800,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Terpublikasinya Program Pemerintah Kab. Musi Banyuasin melalui Berbagai Media (Dalam dan Luar Ruang)			3000 m2						3000 m2			
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Terpublikasinya Kegiatan Pemerintahan Kab. Muba pada Media Massa (Media Cetak dan Media Elektronik)serta Terlaksananya kerja sama dengan Media Online			150 Media	8,172,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	150 Media	9,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi PPID			250 orang	159,722,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	250 orang	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Tersedianya Jasa Pengacara Sengketa Informasi			1 orang						1 orang			
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Sosialisasi dalam Membangun Masyarakat Informasi (KIM)			80 orang	50,951,400	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab.Muba	80 orang	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi/Website Perangkat Daerah yang Terkoneksi dengan Pusat Data Kabupaten	%	%	100 %	11,607,493,823					100 %	6,500,000,000		
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terperiharanya Domain dan Sub Domain di Lingkungan pemerintah Kabupaten	Domain	Domain	1 Domain	10,395,105,293					1 Domain	5,000,000,000		
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Adanya Pemeliharaan Perangkat ITK			6 Jenis						6 Jenis			
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			0 Unit						0 Unit			
						Tersedianya bandwidth untuk seluruh Perangkat Daerah di kab. muba			2 Gbps						2 Gbps			
						Tersedianya Genset khusus ruang data centre			1 unit						1 unit			
						Tersedianya Peralatan jaringan			7 jenis						7 jenis			
						Tersedianya peralatan video conference			4 jenis	10,395,105,293	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kab. Muba	4 jenis	5,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Tersedianya server mubakab.go.id			2 unit						2 unit			
						Tersedianya server Satu Data Muba			2 unit						2 unit			
						Tersedianya server untuk seluruh Aplikasi Pemkab Muba yang terintegrasi			2 unit						2 unit			
						Tersedianya UPS untuk ruang data centre dan command centre			4 unit						4 unit			
						Tersedianya wifi Publik di Kecamatan			3 lokasi						3 lokasi			
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan masyarakat melalui teknologi Informatika	%	%	100 %	1,212,388,530					100 %	1,500,000,000		
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Aplikasi yang Terintegrasi			1 Aplikasi						1 Aplikasi			
						Perperiharanya Website Pemkab Muba			3 Website	821,346,530	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kab. Muba	3 Website	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Tersedianya Rencana Induk SPBE			1 Dokumen						1 Dokumen			
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Adanya Pameran Smart City			1 kali	391,042,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Masyarakat kab. Muba	1 kali	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Adanya Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kab. Muba			296 Menara						296 Menara			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					952,702,330						1,050,000,000		
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Statistik Sektoral	%	%	100 %	952,702,330					100 %	1,050,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
2	20	2	2.01					1 Dokumen	952,702,330					1 Dokumen	1,050,000,000		
2	20	2	2.01	1				50 orang	158,614,400	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab.Muba	50 orang	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	4				50 orang	241,136,930	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab.Muba	50 orang	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	6				1 Aplikasi 1 Dokumen	552,951,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab.Muba	1 Aplikasi 1 Dokumen	600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21								599,673,900							1,100,000,000	
2	21	2						100 %	599,673,900						100 %	1,100,000,000	
2	21	2	2.01					100 %	599,673,900						100 %	1,100,000,000	
2	21	2	2.01	1				2 Dokumen 50 orang	198,354,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab. Muba	2 Dokumen 50 orang	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	3				12 Bulan 2 unit 2 unit 1 kali	210,112,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab. Muba	12 Bulan 2 unit 2 unit 1 kali	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4				12 Bulan	191,207,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Masyarakat Kab. Muba	12 Bulan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17								9,886,607,563							20,046,350,000	
2	17	1						96 %	6,329,711,547						96 %	9,516,350,000	
2	17	1	2.01					4 Dokumen	64,988,000					4 Dokumen	19,350,000		
2	17	1	2.01	1				4 Dokumen	44,997,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	4 Dokumen	9,675,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	6				3 Laporan	19,991,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	3 Laporan	9,675,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02					35 Orang/bulan	4,481,870,689					35 Orang/bulan	4,900,000,000		
2	17	1	2.02	1				35 Orang/bulan	4,481,870,689	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Negeri Sipil / ASN	35 Orang/bulan	4,900,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.05					96 %	124,871,000					96 %	162,000,000		
2	17	1	2.05	2				1 Paket	24,875,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	1 Paket	32,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.05	9				8 Orang	99,996,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	8 Orang	130,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06					25 Paket	935,016,000					25 Paket	2,270,000,000		
2	17	1	2.06	1				25 Paket	19,999,650	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	25 Paket	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	149,997,558	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	7 Paket	980,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			35 Paket	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	35 Paket	245,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			41 Paket	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	41 Paket	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	100,022,792	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	2 Paket	160,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	3 Dokumen	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	40,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	12 Laporan	53,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	299,996,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	12 Laporan	352,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	%	96 %	75,000,000						96 %	612,290,000	
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			32 Unit	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	32 Unit	157,290,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	%	96 %	451,615,858						96 %	781,000,000	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	129,015,858	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	4 Laporan	164,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			35 Laporan	322,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	35 Laporan	617,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	%	96 %	196,350,000						96 %	771,710,000	
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	113,210,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	2 Unit	113,210,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	1 Unit	624,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			30 Unit	33,140,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	30 Unit	34,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	Koperasi	80 Koperasi	403,864,151						80 Koperasi	1,350,000,000	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	Koperasi	80 Koperasi	403,864,151						80 Koperasi	1,350,000,000	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kelautan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kelautan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			120 Unit Usaha	153,864,151	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi dalam Kabupaten Musi Banyuasin	120 Unit Usaha	700,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 3 2.01 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				312 Unit Usaha	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi dalam Kabupaten Musi Banyuasin	312 Unit Usaha	650,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		Koperasi	70 Koperasi	150,000,000						70 Koperasi	300,000,000	
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Koperasi dan UKM yang berprestasi	Koperasi/UKM		Koperasi/UKM	70 Koperasi/UKM	150,000,000						70 Koperasi/UKM	300,000,000	
2 17 4 2.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				15 Unit Usaha	150,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi dan UKM yang Berprestasi	15 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang menjalin Kerjasama dengan lembaga lainnya	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	350,000,000						5 Koperasi	200,000,000	
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terperuhnya Jumlah Koperasi yang menjalin kerjasama	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	350,000,000						5 Koperasi	200,000,000	
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				160 Orang	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi yang Menjalin Kerjasama dengan Lembaga lainnya dalam Kabupaten Musi Banyuasin	160 Orang	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Mampu Berdaya Saing	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	450,000,000						5 Koperasi	460,000,000	
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mampu Berdaya Saing	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	450,000,000						5 Koperasi	460,000,000	
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 20 Unit Usaha	450,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi dalam Kabupaten Musi Banyuasin	0 Orang 20 Unit Usaha	460,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMK yang berdaya Saing	UMK		UMK	200 UMK	467,600,000						200 UMK	1,220,000,000	
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan	UMK		UMK	20000 UMK	467,600,000						20000 UMK	1,220,000,000	
2 17 7 2.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen 0 Unit Usaha	117,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	UMK dalam Kab. Muba	3 Dokumen 0 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				120 Unit Usaha	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	UMK dalam Kab. Muba	120 Unit Usaha	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			300 Unit Usaha	150,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	UMK dalam Kab. Muba	300 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	UMK		13 UMK	1,735,431,865					13 UMK	7,000,000,000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	UMK		13 UMK	1,735,431,865					13 UMK	7,000,000,000	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			2100 Unit Usaha	1,735,431,865	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	UMK	2100 Unit Usaha	7,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					[+] Bantuan Hibah Mesin Isi Ulang Air Minum Untuk UMKM Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lalin				1 Paket	30,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Mesin Pencetak Batu Bata Untuk UMKM Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lalin				1 Paket	60,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Bengkel Motor Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lalin				1 Paket	29,762,500							
					[+] Bantuan Hibah Peralatan Rebusan Air (Mesin Air Isi Ulang) Untuk UMKM Desa Sumber Sari Kec. Tunggul Jaya				1 Paket	100,000,000							
					[+] Bantuan Peralatan Pres Batako Untuk UMKM Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lalin				1 Paket	25,000,000							
					[+] Bantuan Usaha Air Minum Isi Ulang berupa Kendaraan Roda 3				1 Unit	38,850,000							
					[+] Bantuan Usaha Pertanian berupa Kendaraan Roda 3				1 Unit	38,850,000							
					[+] Bantuan Usaha yang berada di desa Kec. Sungai Lalin				3 Unit	105,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Kuliner untuk UMKM				1 Paket	120,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Kuliner untuk UMKM (Masyarakat DTKS)				1 Paket	80,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Mesin Jahit untuk UMKM				1 Paket	100,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Peralatan Bengkel Otomotif untuk UMKM (Kecamatan Sanga Desa)				1 Paket	200,000,000							
					[+] Bantuan Hibah Peralatan Pertukangan untuk UMKM (Kecamatan Sekayu)				1 Paket	150,000,000							
					[+] Belanja Barang untuk Kegiatan Pameran Promosi				1 Paket	31,725,000							
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					626,244,365							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					13,537,925,569						21,293,382,102	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%	%	100 %	11,858,231,876					100 %	15,794,581,302	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%	%	100 %	74,991,144					100 %	100,000,000	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	49,992,054	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	7 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	24,999,090	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	7 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	%	100 %	8,838,532,014					100 %	10,472,198,302	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	8,838,532,014	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	ASN DPMPPTSP	60 Orang/bulan	10,472,198,302	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	%	100 %	47,417,000					100 %	50,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	18	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	47,417,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	%	100 %	173,484,250							100 %	490,000,000	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	73,480,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DPMPPTSP	1 Paket	280,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					15 Orang	100,004,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DPMPPTSP	15 Orang	210,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	%	%	100 %	1,250,114,949							100 %	1,302,383,000	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	29,995,954	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	320,390,159	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Paket	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	74,971,454	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Paket	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	199,907,634	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Paket	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	149,996,748	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Paket	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Dokumen	36,028,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	49,998,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Laporan	53,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	399,855,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Laporan	407,855,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	%	%	100 %	103,222,579							100 %	1,250,000,000	
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					50 Unit	103,222,579	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	50 Unit	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	%	100 %	720,517,560							100 %	1,425,000,000	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					4 laporan	359,017,560	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	4 laporan	625,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	361,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Laporan	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	%	%	100 %	649,952,380							100 %	705,000,000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	325,283,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	8 Unit	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	271,386,330	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	2 Unit	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	53,283,050	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPMPPTSP	1 Unit	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nisi kinerja PTSP dan percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah	%	%	%	87,76 %	214,978,300							87,76 %	610,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				2 Laporan				Pelayanan Publik	Pemerintahan	perizinan dan non perizinan	2 Laporan		Satu Pintu
2	18	5				1,8 T	305,475,000						1,8 T	1,015,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN					1,5 T							1,5 T		
2	18	5	2.01												
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Usaha PMA yang meyakinkan LKPM	Badan usaha			15 Badan usaha	305,475,000						15 Badan usaha	1,015,000,000	
2	18	5	2.01	1		10 Kegiatan Usaha	99,964,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha PMA dan PMDN dalam wilayah Kab. Muba	10 Kegiatan Usaha	315,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha.							0 Kegiatan Usaha.		
2	18	5	2.01	2		10 Pelaku Usaha	135,539,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha PMA dan PMDN dalam wilayah Kab. Muba	10 Pelaku Usaha	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3		5 Kegiatan Usaha	69,972,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha PMA dan PMDN dalam wilayah Kab. Muba	5 Kegiatan Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6				2 Dokumen	99,983,078						2 Dokumen	1,000,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah data dan informasi dan non perizinan dan non perizinan yang dikelola	Dokumen			2 Dokumen	99,983,078						2 Dokumen	1,000,000,000	
2	18	6	2.01			2 Dokumen	99,983,078	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku usaha yang menerima informasi perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	2.01	1		2 Buku	99,983,078	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku usaha yang menerima informasi perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Buku SOP dan SP Perizinan Berusaha dan Non Perizinan				2 Dokumen							2 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19						55,835,965,545							66,228,500,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	1				100 %	10,094,809,259						100 %	12,780,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%	%		100 %	10,094,809,259						100 %	12,780,000,000	
2	19	1	2.01			100 %	74,935,000						100 %	85,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang disampaikan tepat waktu	%	%		100 %	74,935,000						100 %	85,000,000	
2	19	1	2.01	1		2 Dokumen	49,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	49,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	1	2.01	6		2 Laporan	24,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Laporan	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	24,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Laporan	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	1	2.02			12 Bulan	6,840,313,096						12 Bulan	7,527,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik	Bulan			12 Bulan	6,840,313,096						12 Bulan	7,527,000,000	
2	19	1	2.02	1		53 Orang/bulan	6,840,313,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	53 Orang/bulan	7,527,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	6,840,313,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	53 Orang/bulan	7,527,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	1	2.03			10 Unit	52,728,750						10 Unit	66,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah yang dikelola	Unit			10 Unit	52,728,750						10 Unit	66,000,000	
2	19	1	2.03	2		1 Dokumen	52,728,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Dokumen	66,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	52,728,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Dokumen	66,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	1	2.05			100 %	134,761,000						100 %	165,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	%	%		100 %	134,761,000						100 %	165,000,000	
2	19	1	2.05	2		58 Stel	36,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	58 Stel	115,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
	Pengadaan Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				58 Stel	36,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	58 Stel	115,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
						0 Paket							0 Paket		
2	19	1	2.05	0		0 Orang	98,511,000		PENDAPATAN ASLI		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas	Aparatur	0 Orang	50,000,000	Dinas Pemuda dan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	98,511,000		PENDAPATAN ASLI		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas	Aparatur	0 Orang	50,000,000	Dinas Pemuda dan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7 Orang			DAERAH (PAD)	SDM dan Tata Kelola Pemerintahan		7 Orang		Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum berjalan dengan baik	%	%	%	100 %	1,050,124,612					100 %	810,000,000		
2 19 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,994,212			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	40,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	199,719,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Paket	450,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45,978,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	1 Paket	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Janis	199,545,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	20 Janis		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket						1 Paket			
2 19 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	149,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	8 Paket	175,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	3 Dokumen		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu				370 Orang per Kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	370 Orang per Kali	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan						0 Laporan			
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	349,887,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	12 Laporan		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan barang milik daerah	%	%	%	100 %	99,979,000					100 %	850,000,000		
2 19 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	99,979,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur	1 Paket	350,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang kantor	%	%	%	100 %	1,401,140,801					100 %	2,808,000,000		
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	897,240,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	12 Laporan	1,833,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				52 Laporan	503,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	52 Laporan	975,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	%	%	%	100 %	440,827,000					100 %	469,000,000		
2 19 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	335,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	9 Unit	369,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	104,987,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	2 Unit	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	%	%	99,94 %	2,510,717,700					99,94 %	3,805,500,000		
		Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	%	%	%	32,98 %						32,98 %			
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan	Jumlah Pelatihan kepemudaan yang dilaksanakan	Pelatihan			6 Pelatihan	2,130,725,400					6 Pelatihan	2,830,500,000		
		Persentase pemuda yang bebas narkoba	Pelatihan			6 Pelatihan						6 Pelatihan			
2 19 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	249,993,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Generasi Muda	40 Orang	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				200 Orang	245,748,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Generasi Muda	200 Orang	260,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				75 Orang	1,634,983,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Generasi Muda	75 Orang	1,650,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi yang mendapatkan Pembinaan	Organisasi		Organisasi	3 Organisasi	379,992,300					3 Organisasi	975,000,000	
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen						0 Dokumen		
						Jumlah Lomba yang dilaksanakan				1 Lomba	379,992,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda	1 Lomba	975,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
						Jumlah Pemuda yang mengikuti Lomba				25 Orang						25 Orang		
						Jumlah Peserta Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan				70 Orang						70 Orang		
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	Unit / 1000 penduduk		Unit / 1000 penduduk	0,28 Unit / 1000 penduduk	40,530,437,150					0,28 Unit / 1000 penduduk	42,543,000,000	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan	%		%	100 %	20,007,106,450					100 %	16,873,000,000	
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				10 Unit						10 Unit		
						Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga				26 Lokasi	20,007,106,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Muba	26 Lokasi	16,873,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
						Pembangunan Sarana Olahraga				4 Unit						4 Unit		
						Pembangunan Stadion Mini Kecamatan				4 Lokasi						4 Lokasi		
						[+] Belanja Mesin Pemotong Rumpuk				2 Unit	5,000,000							
						[+] pembangunan lapangan bola kasti desa talang piase desa talang piase kecamatan lawang wetan, Kab. Musi Banyuasin				93 M2	494,760,000							
						[+] Pembangunan lapangan voli Dusun III Desa Bukit Sejahtera Kecamatan Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin				30 M2	158,100,000							
						[+] pembangunan gedung futsal di Dusun IV Desa Teluk Kijing I kee. Leko, Kab. Musi Banyuasin				217 M2	1,197,840,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Bola Volly dan Gedung Olahraga Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin				227 M2	1,198,560,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan				1 Unit	143,094,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Bola Volli Desa Rimba Ular Kec. Sekayu				28 M2	146,160,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin				18 M2	95,040,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Bola Volly Kecamatan Lais				1 Unit	150,925,000							
						[+] Pembangunan lapangan futsal Desa Bangun Sari Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin				37 M2	197,210,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Futsal Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin				37 M2	199,060,000							
						[+] Pembangunan Lapangan Futsal Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin				37 M2	199,060,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
							1,518,386,450										
2	19	3	2.02					17 cabor	1,428,099,500				17 cabor	2,830,000,000			
2	19	3	2.02	2				1 Dokumen	99,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Atlet	1 Dokumen	1,430,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2	19	3	2.02	3				0 Orang	1,328,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Atlet	0 Orang	1,400,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
								150 Orang						150 Orang			
2	19	3	2.03					20 Cabor	10,345,232,000					20 Cabor	12,120,000,000		
2	19	3	2.03	1				190 Orang	79,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar	190 Orang	120,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2	19	3	2.03	3				253 Orang	10,265,832,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelajar	253 Orang	12,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	3	2.04					2 Dokumen	7,500,000,000					2 Dokumen	9,300,000,000		
2	19	3	2.04	2				1 Organisasi	7,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Organisasi Olahraga	1 Organisasi	8,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
								1 Organisasi						1 Organisasi			
2	19	3	2.05					4 Event	1,249,999,200					4 Event	1,420,000,000		
2	19	3	2.05	1				5 Dokumen	349,999,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
2	19	3	2.05	4				0 Dokumen						0 Dokumen			
								1 Dokumen	900,000,000					1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	
								1 Event						1 Event			
2	19	4						12.02 %	2,700,001,436					12.02 %	7,100,000,000		
2	19	4	2.01					12.02 %	2,700,001,436					12.02 %	7,100,000,000		
								32 Orang						32 Orang			
								1 Aplikasi						1 Aplikasi			
2	19	4	2.01	2				1 Organisasi	2,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anggota Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	3,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
2	19	4	2.01	3				30 Orang	350,008,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anggota Organisasi Kepramukaan	40 Orang	1,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
								30 Orang						30 Orang			
								30 Orang						30 Orang			
								14 Kecamatan						14 Kecamatan			
2	19	4	2.01	5				195 Gudep	349,993,436	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anggota Organisasi Kepramukaan	195 Gudep	1,250,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
								2 Laporan						2 Laporan			
								0 Orang						0 Orang			
								216 Sekolah						216 Sekolah			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit						1 Unit						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3,322,165,350						6,650,000,000					
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata	Unit		Unit	64 Unit	1,979,168,000				64 Unit	3,300,000,000				
3	26	2	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event-event pariwisata daerah	Event		Event	4 Event	479,070,000			4 Event	1,875,000,000				
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	479,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku / Peminat Pariwisata	1 Lokasi	1,875,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
3	26	2	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata	Unit		Unit	64 Unit	1,500,098,000			64 Unit	1,425,000,000				
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			1 Unit	1,500,098,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku / Peminat Pariwisata	1 Unit	775,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
					[+] Pembangunan Destinasi Wisata Danau Ulak Lihok Desa Kemang Kec. Sanga Desa				271 M2	1,485,080,000								
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					15,018,000								
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang		Orang	36102 Orang	972,997,350				36102 Orang	2,330,000,000				
3	26	3	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		Orang	36102 Orang	972,997,350			36102 Orang	2,330,000,000				
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			4 Laporan	972,997,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wisatawan dan Generasi Muda	4 Laporan	2,330,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku usaha pariwisata	Orang		Orang	383 Orang	370,000,000				383 Orang	1,020,000,000				
3	26	5	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan kepariwisataan	Orang		Orang	230 Orang	370,000,000			230 Orang	1,020,000,000				
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelantikan Organisasi Pariwisata			1 Pelantikan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku / Peminat Pariwisata	1 Pelantikan	750,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
				Jumlah pelatihan bagi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			2 Pelatihan							2 Pelatihan				
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			70 Orang							70 Orang				
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			0 Orang	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaku / Peminat Pariwisata	0 Orang	70,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				10 Orang					10 Orang				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12,106,772,075				13,244,203,734				
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	Persentase		Persentase	100 Persentase				100 Persentase	11,608,810,299			
					persentase pemenuhan layanan administrasi	Persentase			Persentase	100 Persentase				100 Persentase				
					persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase			Persentase	100 Persentase				100 Persentase				
					persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase			Persentase	100 Persentase				100 Persentase				
					Tersedianya Program-program penunjang urusan pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan					12 bulan				
2	23	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	bulan		bulan	12 bulan	75,000,000				12 bulan	60,000,000			
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPK Kab. Muba	2 Laporan	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPK Kab. Muba	3 Laporan	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi keuangan PD	Bulan		Bulan		12 Bulan	5,728,085,718						12 Bulan	6,000,000,000		
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					39 Orang/bulan	5,728,085,718	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPK Kab. Muba	39 Orang/bulan	6,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian PD	Bulan		Bulan		12 Bulan	125,750,000						12 Bulan	122,960,000		
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					44 Orang	27,750,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	pegawai DPK Kab. Muba	44 Orang	82,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungai	Jumlah orang Mengikuti Diklat Pungsional					10 Orang	98,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai DPK Kab. Muba	10 Orang	40,460,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya Administrasi Umum PD	bulan		bulan		12 bulan	2,411,120,925						12 bulan	1,169,358,015		
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaannya Alat-alat Listrik					14 Jenis	29,999,520	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	14 Jenis	54,858,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediaanya Peralatan Kantor (laptop,PC,AC,TV LED, Cangkir,gordyn, Camera DSLR dan Printer)					4 Jenis	1,482,264,430	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	4 Jenis	130,798,375	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga					18 Jenis	74,998,375	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	DPK Kab. Muba	18 Jenis	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediaanya Alat Tulis Kantor					46 Jenis	199,999,700	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	46 Jenis	314,558,680	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak					18 Jenis	149,999,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	18 Jenis	193,084,560	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediaanya Bahan Bacaan					9 Jenis	23,940,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	9 Jenis	30,240,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	8	Tersediaanya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersediaanya Fasilitas Kunjungan Tamu					12 bulan	49,923,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	12 bulan	86,904,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 bulan	399,996,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	12 bulan	298,714,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediaanya barang milik daerah	bulan		bulan		12 bulan	617,193,900						12 bulan	1,896,720,100		
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersediaanya mebel					4 Jenis	617,193,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	4 Jenis	238,360,100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan		12 bulan	625,156,577						12 bulan	957,244,184		
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terharganya Tagihan Listrik, Air dan Telpn					12 bulan	303,356,577	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK	12 bulan	367,244,184	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terharganya jasa pelayanan umum kantor					12 bulan	321,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK	12 bulan	590,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	bulan		bulan		12 bulan	1,361,274,000						12 bulan	1,402,728,000		
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Operasional Kantor					6 unit	222,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	6 unit	222,950,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya					12 bulan	1,089,044,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	12 bulan	1,130,498,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaan AC dan Genset					2 Jenis	49,280,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPK Kab. Muba	2 Jenis	49,280,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	Persentase		Persentase	8,7 Persentase	1,163,190,955								8,7 Persentase	1,635,393,435	
2	23	2				Rasio jumlah pengunjung	Persentase		Persentase	4 Persentase									4 Persentase		
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya perpustakaan dalam wilayah Kab. Muba	Kecamatan		Kecamatan		15 Kecamatan	847,423,580							15 Kecamatan	1,198,709,860	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	terak Roli Banner Leaflet Sosialisasi imbu perjalanan dinas untuk sosialisasi imbu terlaksananya penambahan koleksi buku gital (e-book pada aplikasi perpustakaan digital i-Muba					22 Roli Banner 500 Leaflet 22 sekolah 1250 judul	182,914,680	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perpustakaan dalam Kab. Muba	22 sekolah 1250 judul	243,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kunjungan siswa PAUD, TK, SD dan SLTP secara reguler ke perpustakaan daerah					35 Kunjungan	69,980,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dalam Kab. Muba	35 Kunjungan	70,095,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya koleksi kekhasan Kec di wilayah Kab. Muba	1 dokumen	24,820,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perpustakaan dalam Kab. Muba	1 dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional	terbiasanya perpustakaan binaan DPK Kab. Muba	56 Perpustakaan	99,923,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dalam Kab. Muba	56 Perpustakaan	321,658,860	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
					Terlaksananya Bimtek Pengelola Perpustakaan		45 Orang							45 Orang			
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka	1750 Judul	399,990,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dalam Kab. Muba	1750 Judul	414,312,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	terpeliharanya buku perpustakaan baru	1750 Eksemplar	29,995,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perpustakaan dalam Kab. Muba	1750 Eksemplar	34,814,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
					terpeliharanya buku perpustakaan lama		1000 eksemplar							1000 eksemplar			
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemetaan perpustakaan Desa/Kelurahan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Desa/Kelurahan	39,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perpustakaan dalam Kab. Muba	30 Desa/Kelurahan	64,430,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
					Terlaksananya pemetaan perpustakaan Sekolah		30 Sekolah							30 Sekolah			
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan gemar membaca tingkat daerah	15 Kec	315,767,375						15 Kec	436,683,575		
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	terlaksananya kunjungan mobil perpustakaan keliling dan pengadaan laptop untuk keperluan editing video kunjungan mobil perpustakaan keliling	13 kecamatan	76,374,375	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemustaka	13 kecamatan	148,068,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Safari Literasi	30 peserta	143,580,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola	Pemustaka	30 peserta	83,503,175	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
					Terlaksananya Lomba bercerita TK, SD/MI		30 Orang							30 Orang			
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Iktisus Sosial	terlaksananya kegiatan binbangan belajar matematika, bahasa Inggris, komputer, TPA dan sanggur tari	5 Kelas Bimbel	95,813,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemustaka	5 Kelas Bimbel	205,112,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			499,991,700							1,297,131,930		
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peringatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	5 Kegiatan						5 Kegiatan	1,297,131,930		
					Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Kegiatan	5 Kegiatan	499,991,700						5 Kegiatan			
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya Arsip Statis di Daerah di lingkungan Pemerintahan Kab. Muba	PD	48 PD	149,992,000					48 PD	300,000,000		
					Akuisisi			27 PD						27 PD			
					Pengolahan			48 PD	149,992,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	48 PD	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
					Preservasi			48 PD						48 PD			
					Terpeliharanya Arsip statis yang ada di Depo Arsip			12 Bulan						12 Bulan			
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya Jaringan SKKD di perangkat daerah	PD	48 PD	349,999,700					48 PD	997,131,930		
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			0 Pengguna	130,595,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jaringan SKKD di perangkat daerah	0 Pengguna	506,931,960	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
					Bimtek Pengelola Arsip			60 Peserta						60 Peserta			
					Pengelolaan Arsip			48 PD						48 PD			
2	24	2	2.03	2	Pembelayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan II Perangkat Daerah	48 PD	219,404,700	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jaringan SKKD di perangkat daerah	48 PD	490,199,970	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				14,836,939,575						27,555,000,000		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akurat	100 %	0 %	100 %	8,388,591,586				100 %	13,255,000,000		
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	%	100 %	74,746,050				100 %	120,000,000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	49,750,200	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	0 Dokumen	60,000,000	Dinas Perikanan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen						4 Dokumen			
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	49,750,200	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	0 Dokumen	60,000,000	Dinas Perikanan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen						4 Dokumen			
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24,995,850	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	4 Laporan	60,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	5,033,537,295				40 Orang/Bulan	6,400,000,000		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/Bulan	5,033,537,295	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	pegawai dinas perikanan	40 Orang/Bulan	6,400,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/Bulan	5,033,537,295	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	pegawai dinas perikanan	40 Orang/Bulan	6,400,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah yang dikelola	100 %	0 %	100 %	56,571,150				100 %	100,000,000		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
3	25	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			5 Dokumen	56,571,150	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	5 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	100%	68,250,000						100%	100,000,000	
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	68,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	0 Orang	100,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang							6 Orang		
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0%	100%	1,113,553,183						100%	1,835,000,000	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	29,713,791	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	4 Paket	450,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	216,564,119	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	2 Paket	200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	43,175,365	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	1 Paket	50,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	208,803,955	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	1 Paket	150,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	71,086,953	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	2 Paket	100,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3 Dokumen	24,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	3 Dokumen	75,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	39,960,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	439,749,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	39,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	0%	100%	165,206,249						100%	200,000,000	
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			30 Unit	165,206,249	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas Perikanan	30 Unit	200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	100%	999,009,409						100%	2,000,000,000	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	282,209,409	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	716,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Sungai Dua Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	1,500,000,000	Dinas Perikanan
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	100%	877,718,250						100%	2,500,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	406,980,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	5 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	393,158,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	77,580,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perikanan	3 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	24.675 Ton		0 Ton	23.484 Ton	1,250,334,440						23.484 Ton	3,700,000,000	
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %		0 %	100 %	1,100,237,440						100 %	2,900,000,000	
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	250,041,710		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hiririsasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Nelayan	3 Dokumen	400,000,000	Dinas Perikanan	
					Pelaksanaan Launching Program Konversi BBM ke BBG					1 Kegiatan							1 Kegiatan		
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				630 Unit	850,195,730	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hiririsasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Nelayan	630 Unit	2,500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 %		0 %	100 %	150,097,000						100 %	500,000,000	
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang di Fasilitasi Pembentukan Koperasi / KUB Berbadan Hukum				2 Koperasi/KUB	150,097,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hiririsasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan	Nelayan	2 Koperasi/KUB	500,000,000	Dinas Perikanan	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					550 Orang							550 Orang		
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	27.896 Ton		Ekor	0 Ton	3,350,135,492						27.772 Ton	4,600,000,000	
					Produksi perikanan budidaya (ton)		Ton		Ton	- Ton							- Ton		
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100 %		0 %	100 %	1,264,373,350						100 %	2,300,000,000	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				11 kelompok	1,191,449,350	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hiririsasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan	11 kelompok	2,000,000,000	Dinas Perikanan	
					Paket Bantuan budidaya ikan lele di kolam terpal					8 paket						8 paket			
					Paket Bantuan budidaya ikan patin di Keramba Jaring Apung (KJA)					3 paket						3 paket			
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	72,924,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Sapat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hiririsasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan	6 Kelompok	300,000,000	Dinas Perikanan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan					12 Orang						12 Orang			
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %		0 %	100 %	2,085,762,142						100 %	2,300,000,000	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	448,802,232	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Berkeadilan	- Kelompok Pembudidaya Ikan - Rumah Tangga Perikanan (RTP)	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perikanan	
					Terlatisnya Perangkat Desa Menggunakan Aplikasi Ikan Musi					240 Desa/Kelurahan						240 Desa/Kelurahan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Tersedianya Buku Agenda Kerja ASN Dinas Perikanan				100 Buku							100 Buku			
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ikan yang dihasilkan BBI	1000000 Ekor		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Kelompok Pembudidaya Ikan - Rumah Tangga Perikanan (RTP)	1000000 Ekor	1,000,000,000	Dinas Perikanan
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	686,239,350	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya												
	Produksi Perikanan Budidaya	25772 Ton		Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Ptnang Banjar												
		[+] Pokir Benih dan Pakan (Kec. Sungai Lilin)				1 Paket	149,984,000									
		[+] Penimbunan Tanah dan Pembuatan Tembok Penahan				250 M3	36,500,000									
		[+] Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi (Tembok Penahan - (Kecamatan Sekayu)				0.045 Km	60,253,650									
		[+] Administrasi Penunjang Kegiatan					439,501,700									
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dihina	1 Laporan		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Kelompok Pembudidaya Ikan - Rumah Tangga Perikanan (RTP)	1 Laporan	500,000,000	Dinas Perikanan
	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dilatih Cara Pembuatan Pakan	4 Kelompok	413,134,760	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan												
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		Kab. Musi Banyuasin, Keuang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lirak Jaya, Semua Kelurahan												
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	500 Orang	199,578,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Kelompok Pembudidaya Ikan - Rumah Tangga Perikanan (RTP)	500 Orang	200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Kajian Pemanfaatan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.	1 Dokumen	338,007,800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Kelompok Pembudidaya Ikan - Rumah Tangga Perikanan (RTP)	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan
					Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha								5 Ha		
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	86 %	0 %	60 %	678,928,457				60 %	1,900,000,000	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan	100 %	0 %	100 %	678,928,457				100 %	1,900,000,000	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahkan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	- Anggota Pokmaswas - Danau Lokasi Penyebaran Ikan Masyarakat Perikanan - Dinas Perikanan Musi Banyuasin	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perikanan
	Jumlah Ikan yang Direstocking	151.041 Ekor	336,739,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kelurahan												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	20 Unit		Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan												
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	1 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin, Lais, Danau Cala Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Sungai Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas	- Anggota Pokmaswas - Danau Lokasi Penyebaran Ikan Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Zonasi Perikanan				1 Dokumen		Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang, Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napat	DAERAH (PAD)	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perikanan - Dinas Perikanan Musi Banyuasin	1 Dokumen		
3	25	6				5 %	1,168,949,600						5 %	4,100,000,000	
3	25	6	2.01			100 %	64,375,000						100 %	550,000,000	
3	25	6	2.01	1		3 Dokumen	64,375,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	30 Unit Usaha	3 Dokumen	550,000,000	Dinas Perikanan
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko				30 unit usaha							30 unit usaha		
3	25	6	2.02			100 %	27,880,000						100 %	2,000,000,000	
3	25	6	2.02	1		2 dokumen	27,880,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	10 Unit Pengolahan Ikan	2 dokumen	2,000,000,000	Dinas Perikanan
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko				10 unit usaha							10 unit usaha		
3	25	6	2.03			100 %	1,076,694,600						100 %	1,550,000,000	
3	25	6	2.03	1		6 puskesmas	528,682,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Ibu-ibu Hamil dan Menyusui Serta Anak Balita stunting dan 40 Pelaku Usaha	6 puskesmas	550,000,000	Dinas Perikanan
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Tersedianya data angka konsumsi ikan				9 ton							9 ton		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional rumah kemasan Tersedianya fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				80 rumah tangga	548,012,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Lala, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Ibu-ibu Hamil dan Menyusui Serta Anak Balita stunting dan 40 Pelaku Usaha	1 dokumen	1,000,000,000	Dinas Perikanan
						20 Pelaku Usaha							20 Pelaku Usaha		
						40 Pelaku Usaha							40 Pelaku Usaha		
2															
2	20						227,831,948							340,000,000	
2	20	2				100 %	227,831,948						100 %	340,000,000	
2	20	2	2.01			100 %	227,831,948						100 %	340,000,000	
2	20	2	2.01	1		1 Dokumen	227,831,948	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1 Dokumen	340,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27						39,383,875,495							57,778,000,000	
3	27	1				100 %	27,460,809,303						100 %	31,641,000,000	
3	27	1	2.01			100 %	74,998,000						100 %	115,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	49,999,522	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5 Dokumen	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	24,998,478	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4 Laporan	55,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan		12 Bulan	21,942,037,727						12 Bulan	22,767,000,000	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					177 Orang/bulan	21,942,037,727	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN DINAS THPP KAB. MUBA	177 Orang/bulan	22,767,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	%		%		100 %	88,191,250						100 %	90,000,000	
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					14 Dokumen	88,191,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	14 Dokumen	90,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	186,318,750						100 %	270,000,000	
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	97,818,750	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pegawai Dinas THPP	1 Paket	170,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang	88,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pegawai Dinas THPP	4 Orang	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya administrasi umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	1,229,987,078						100 %	1,302,000,000	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	29,999,637	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	1 Paket	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	199,996,001	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	1 Paket	165,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	74,995,263	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	1 Paket	75,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	299,996,481	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	1 Paket	200,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	149,999,696	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPP KAB. MUBA	2 Paket	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						12 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	12 Dokumen	27,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	12 Laporan	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	400,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	12 Laporan	575,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%			100 %	99,873,130						100 %	150,000,000	
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						2 Paket	99,873,130	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pegawai Dinas THPH Kab. Muba	2 Paket	150,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	%		%			100 %	3,184,492,368						100 %	6,087,000,000	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	217,892,368	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	12 Laporan	300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	2,966,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	12 Laporan	5,787,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%			100 %	654,911,000						100 %	860,000,000	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya						14 Unit	505,120,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	14 Unit	510,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						17 Unit	99,991,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	17 Unit	250,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						70 Unit	49,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS THPH KAB. MUBA	70 Unit	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	%		%			25 %	6,242,586,197						25 %	11,322,000,000	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%		%			100 %	3,653,971,197						100 %	6,100,000,000	
						Jumlah Alasintan Prasarana yang diberikan						394 Unit		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			394 Unit		
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						0 Laporan		Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak II Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Sungai Angit	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	PETANI DI KAR		0 Laporan		Dinas Tanaman Pangan,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						1 Unit	23,483,160													
						2 Unit	46,966,320													
						1 Paket	198,303,820													
							278,169,812													
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terjaminnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100 %	393,202,000				100 %	2,167,000,000					
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			2 VUB											
						Kelompok Penangkar Benih Padi			4 Kelompok Tani	393,202,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani di Kab. Muba	2 VUB			2,167,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
						Tersedianya Benih Padi Inbrida Lebel Unggu			3200 Kg											
						Tersedianya Insektisida			240 Liter											
						Tersedianya Pupuk NPK			8000 kg											
									1 Paket	75,130,000										
									1 Paket	75,130,000										
									1 Paket	75,130,000										
									1 Paket	75,130,000										
										92,682,000										
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	33,730,000				100 %	55,000,000					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional		Daerah				
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	6 Laporan	164,447,559	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani Ternak	6 Laporan	600,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
						Terlaksananya pelayanan beswan secara massal	2000 ekor									
						Terlaksananya penanggulangan penyakit parasit	800 ekor									
						Terlaksananya penanggulangan penyakit reproduksi	200 ekor									
						Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan tingkat Bios dan pengecer	4 kecamatan									
						Terlaksananya pengelolaan pelayanan dan pembinaan petugas puskesmas	6 unit									
						3	27							4		
Terlaksananya vaksinasi jembrana	650 dosis															
Terlaksananya Vaksin Rabies	3080 dosis															
Terlaksananya surveilance penyakit jembrana dan saramosis	400 ekor															
Terlaksananya surveilance penyakit parasit darah	50 ekor															
Terlaksananya surveilance penyakit rabies	25 ekor															
Terlaksananya surveilance wabah penyakit unggas	250 ekor															
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	%	100 %	162,254,000			100 %	440,000,000		
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	70,481,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani Ternak	4 Laporan	220,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	91,773,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani Ternak	4 Dokumen	220,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OP) dan Dampak Perubahan Edim (DPI) yang di rangani	%	%	55 %	207,675,000			55 %	360,000,000		
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%	%	100 %	207,675,000			100 %	360,000,000		
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OP) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Insektisida untuk Keong	500 Kg	207,675,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani Kabupaten Musi Banyuasin	500 Liter	360,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
						Insektisida untuk Penggerek Batang	500 Liter									
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OP) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	70 Ha									
						Rodentisida	500 Kg									
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	%	11 %	3,068,768,947			11 %	4,600,000,000		
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan pertanian	%	%	100 %	3,068,768,947			100 %	4,600,000,000		
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	1,402,269,270	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani dan Kelompok Tani	15 Unit	1,300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					15 Unit	1,157,338,436	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani dan Kelompok Tani	15 Unit	2,000,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					5 Unit	509,161,241	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani dan Kelompok Tani	5 Unit	1,300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik perkebunan	%		%	100 %	215,017,960							100 %	252,543,000		
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai Tukar Petani	%		%	100 %	215,017,960							100 %	252,543,000		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	215,017,960	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	1 Dokumen	252,543,000	Dinas Perkebunan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan tepat Waktu dan Akuntabel	%		%	100 %	9,161,116,218							100 %	13,243,295,257		
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	75,250,340							100 %	110,850,000		
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	50,087,560	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	6 Dokumen	55,425,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	25,162,780	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	4 Dokumen	55,425,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN dan PJK	Bulan		Bulan	12 Bulan	6,015,363,048							12 Bulan	7,236,800,000		
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	6,015,363,048	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perkebunan Kab. Muba	52 Orang/bulan	7,236,800,000	Dinas Perkebunan			
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asumansi Kendaraan Dinas Roda 4	Unit		Unit	6 Unit	52,440,000							6 Unit	54,230,000		
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	52,440,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	6 Dokumen	54,230,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang		Orang	5 Orang	118,746,000							5 Orang	207,846,000		
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perkebunan Kab. Muba	1 Paket	115,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	92,846,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Perkebunan Kab. Muba	4 Orang	92,846,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum ASN	%		%	100 %	1,294,310,651							100 %	1,995,999,590		
					Administrasi Umum Kantor	%		%	100 %									100 %			
					Komponen Instalasi Listrik	Jenis		Jenis	9 Jenis									9 Jenis			
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,206,018	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	1 Paket	300,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	199,332,896	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	4 Paket	300,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	74,976,206	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	4 Paket	100,000,000	Dinas Perkebunan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	299,870,133	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	1 Paket	299,999,590	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			2 Paket	149,976,798	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	2 Paket	250,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			4 Dokumen	87,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	4 Dokumen	146,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	50,349,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	399,999,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	%	%	100 %	97,024,779					100 %	200,000,000		
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket	97,024,779	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	2 Paket	200,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kantor	%	%	100 %	1,050,095,400					100 %	1,794,699,667		
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	332,295,400	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	12 Laporan	420,299,667	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	717,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	12 Laporan	1,374,400,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur	%	%	100 %	457,886,000					100 %	1,642,870,000		
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 Unit	244,151,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	6 Unit	232,870,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	147,875,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	1 Unit	1,300,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	65,860,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan Kab. Muba	40 Unit	110,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	%	%	1,55 %	4,306,526,181					1,55 %	5,231,298,800		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana Perkebunan	Ha	Ha	5500 Ha	739,036,212					5500 Ha	1,077,067,800		
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Lasa Lahan Kebun Sawit Reklamasi yang diawasi Jumlah Lasa Lahan Kebun Sawit yang akan di Replanting Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			17000 Ha 2000 Ha 12 Laporan	264,083,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	17000 Ha 2000 Ha 12 Laporan	550,367,800	Dinas Perkebunan	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang di Bantu Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			5 Kelompok Tani 15 Laporan	474,953,212	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Perimpong Raya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	5 Kelompok Tani 15 Laporan	526,700,000	Dinas Perkebunan	
					[#] Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga				1 Unit	87,135,000								
					[#] Belanja Sarana Pendukung Perkebunan				1 Paket	327,730,212								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	27	5	2.01			15 Kecamatan	10,007,904,281						15 Kecamatan	8,615,709,800	
3	27	5	2.01	1		50 Ha	58,938,659	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	50 Ha	169,944,800	Dinas Perkebunan
						25 Orang							25 Orang		
3	27	5	2.01	3		914602.3 Ha	9,903,965,622	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	914602.3 Ha	8,345,765,000	Dinas Perkebunan
						27 Unit		Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Pengaturan					27 Unit		
						4.2 Km	1,485,178,002								
						1 Unit	2,277,000,000								
						2 Unit	2,509,886,500								
						1 Unit	2,331,444,000								
							1,300,457,120								
3	27	5	2.01	5		1 Dokumen							1 Dokumen		
						15 Laporan	45,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	15 Laporan	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	6				2,35 %	270,830,000						2,35 %	570,800,000	
3	27	6	2.01			15 Kecamatan	270,830,000						15 Kecamatan	570,800,000	
3	27	6	2.01	3		1 Laporan	270,830,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani dan Perusahaan Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	1 Laporan	570,800,000	Dinas Perkebunan
						12 Laporan		Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kelurahan					12 Laporan		
3	27	7				2,35 %	3,046,102,686						2,35 %	2,882,700,000	
3	27	7	2.01			15 Kecamatan	3,046,102,686						15 Kecamatan	2,882,700,000	
3	27	7	2.01	2		6 Unit	249,433,940	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan Angka Kemiskinan	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	6 Unit	301,200,000	Dinas Perkebunan
						180 Orang							180 Orang		
						150 Orang							150 Orang		
								Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung							
								Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sukarami							
								Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung							
								Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Muara Teladan							
								Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Baliang Timur							
								Kab. Musi Banyuasin, Lais, Petaling							
								Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Pagar Kaw							
								Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Sindang Marga							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	2,697,120,151	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Pengaturan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sumber Rejeki Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Suka Damai Baru Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Cinta Damai Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Bumi Kencana Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Nusa Serasan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayat Ilir Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Mekar Jaya Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Ilir Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Sumber Harum Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Margo Mulyo Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Sri Mulyo Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pateh Jaya Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Simpang Sari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Petani/Kelompok Tani Perkebunan dalam Wilayah Kab. Muba	19 Unit	2,431,500,000	Dinas Perkebunan
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Berkah Tani Desa Pagar Kaya Kecamatan Sungai Keruh		1 Unit	201,354,000							
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Karya Nusantara Desa Sukarami Kecamatan Sekayu		1 Unit	183,730,530							
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Bersama Tani Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkai Jaya		1 Unit	203,420,820							
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Makmur Bersama Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin		1 Unit	194,359,890							
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Rimba Makmur Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkai Jaya		1 Unit	203,420,820							
					[+] Pembangunan Gedung UPPB Tani Mulyo Desa Mulyo Rejo Kecamatan Tungkai Jaya		1 Unit	203,420,820							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Berkah Rezeki Desa Sumber Rezeki Kecamatan Sungai Lilin		1 Unit	60,717,000							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Berkah Serasan Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin		1 Unit	60,717,000							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Maju Bersama Desa Bailangu Kecamatan Sekayu		1 Unit	58,255,020							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Maju Bersama Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh		1 Unit	64,159,110							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Pancur Jaya Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan		1 Unit	56,814,240							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Sejahtera Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu		1 Unit	58,255,020							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Sumber Makmur Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu		1 Unit	58,255,020							
					[+] Pembangunan Pelataran Lelang Bokar UPPB Sumber Rejeki Desa Cinta Damai Kecamatan Sungai Lilin		1 Unit	60,717,000							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	30	1	2.05	2		1 Paket	38,750,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	1 Paket	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.05	9		5 Orang	101,084,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	5 Orang	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06			100 %	1,113,754,601						100 %	1,974,000,000	
3	30	1	2.06	1		1 paket	60,073,978	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	1 paket	80,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	2		2 Paket	200,776,821	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	2 Paket	600,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	3		1 paket	59,973,079	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	1 paket	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	4		1 Paket	199,996,248	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	1 Paket	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	5		1 Paket	147,377,475	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	1 Paket	160,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	6		5 Dokumen	25,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	5 Dokumen	54,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	8		12 Laporan	20,160,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	12 Laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.06	9		12 Laporan	400,197,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	12 Laporan	700,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.07			7 Unit	100,685,880						7 Unit	6,250,000,000	
3	30	1	2.07	5		35 Unit	100,685,880	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Barang Milik Daerah	35 Unit	600,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	1	2.08			100 %	1,751,410,854						100 %	3,270,400,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	361,110,854	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,390,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	ASN	12 Laporan	2,763,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	522,757,500						100 %	950,000,000	
3 30 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	295,110,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Barang Milik Daerah	8 Unit	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	186,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Barang Milik Daerah	1 Unit	550,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	41,647,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Barang Milik Daerah	27 Unit	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terhit	%		%	9.4 %	441,976,000						9.4 %	450,000,000	
3 30 2 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terbitnya Tanda Daftar Gudang	Dokumen		Dokumen	22 Dokumen	133,875,000						22 Dokumen	200,000,000	
3 30 2 2.02 1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				22 Dokumen	133,875,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Sangga Desa, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Hualot Tinggi, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Lalau, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Tungkul Jaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Agen	22 Dokumen	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 2 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terawasinya Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	308,101,000						50 Pelaku Usaha	250,000,000	
3 30 2 2.06 3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				50 Laporan	308,101,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Babat Taman, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Sungga Lilin, Semua Kelurahan, Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Distributor, Pengguna Akhir, Produsen Barang Berbahaya	50 Laporan	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	%		%	30,9 %	8,539,891,282						30,9 %	50,700,000,000	
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang layak	Unit		Unit	7 Unit	8,051,176,800						7 Unit	50,000,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	8,051,176,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Pedagang	7 Unit	50,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
					[] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan DED Pasar Randik Kecamatan Sekayu		1400000000 Rupiah x 0.01 %	980,000,000								
					[] Penimbunan Pasar Randik Kecamatan Sekayu		21400 M3	4,686,600,000								
					[] Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Penimbunan Pasar Randik Kecamatan Sekayu		4686600000 Rupiah x 0.01 %	281,196,000								
					[] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kios Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		308005000 Rupiah x 0.01 %	30,800,500								
					[] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Los Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		308005000 M2 x 0.01 %	30,800,500								
					[] Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kios Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		308005000 Rupiah x 0.01 %	55,440,900								
					[] Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Los Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		308005000 Rupiah x 0.01 %	55,440,900								
					[] Pembangunan Kios Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		57.25 M2	308,005,000								
					[] Pembangunan Los Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir		57.25 M2	308,005,000								
					[] Pembangunan Los Pasar Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin		28.40 M2	149,952,000								
					[] Pembuatan Los Pasar Randik Kecamatan Sekayu		38 M2	198,360,000								
					[] Rehab Ringan Gedung Pasar Randik Kecamatan Sekayu		120 M2	216,120,000								
					[] Peningkatan Jalan Lingkungan Dalam Pasar Ipres Keluang Kecamatan Keluang		130 M1	195,130,000								
					[] Peningkatan Jalan Lingkungan Dalam Pasar Randik Kecamatan Sekayu		170 M1	224,400,000								
					[] Rehab Drainase Dalam Lingkungan Pasar Perjuangan Kecamatan Sekayu		284 M1	199,936,000								
					[] Rehab Drainase Dalam Lingkungan Pasar Randik Kecamatan Sekayu		170 M1	119,680,000								
					[] Administrasi Penunjang Kegiatan			11,310,000								
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Pengelola Sarana	85 Pengelola Sarana	488,714,482				85 Pengelola Sarana	700,000,000		
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		65 Dokumen	330,188,830	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	65 Dokumen	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		20 Dokumen	158,525,652	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	400,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	%	%	100 %	2,185,592,000				100 %	3,200,000,000	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	%	100 %	166,108,000				100 %	300,000,000	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan	166,108,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	Agen Barang Pokok dan Penting	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP-JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 4	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalinya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	Laporan	12 Laporan	1,883,793,000					12 Laporan	2,600,000,000		
3 30 4	2.02 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota			12 laporan	233,371,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pengecer	12 laporan	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 4	2.02 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota			5 laporan	1,650,422,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pengecer	5 laporan	2,300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 4	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	Laporan	2 Laporan	135,691,000						2 Laporan	300,000,000	
3 30 4	2.03 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			2 Laporan	135,691,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Agen Pupuk Subsidi	2 Laporan	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume penjualan produk	%	%	7.5 %	826,623,100						7.5 %	3,200,000,000	
3 30 5	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Promosi bagi Pelaku Usaha Produk Ekspor	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	62 Pelaku Usaha	826,623,100						62 Pelaku Usaha	3,200,000,000	
3 30 5	2.01 2	Pameran Dagang Nasional	jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam pameran dagang			6 pelaku usaha	462,216,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha	6 pelaku usaha	1,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 5	2.01 3	Pameran Dagang Lokal	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal			54 pelaku usaha	289,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha	54 pelaku usaha	1,700,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 5	2.01 5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Diusung Menjadi Materi Promosi			2 Produk	75,030,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha	2 Produk	500,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP Bertanda Tera Sah	%	%	41 %	465,325,100						41 %	650,000,000	
3 30 6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal	Unit	Unit	3800 Unit	465,325,100						3800 Unit	650,000,000	
3 30 6	2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat Ukur, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan ditera Ulang			2600 unit	294,941,100	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Pedagang	2600 unit	450,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 6	2.01 2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina			1200 orang	170,384,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Pedagang	1200 orang	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Kemitraan Usaha	Mitra Usaha	Mitra Usaha	4 Mitra Usaha	507,625,000						4 Mitra Usaha	150,000,000	
3 30 7	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	507,625,000						2 Dokumen	150,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Melalui Kemirisan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemirisan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					2 UMKM	507,625,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha	2 UMKM	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		4,564,817,121											6,900,000,000		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	%		%	1 %		4,346,321,539					1 %	6,400,000,000		
						persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	%		%	1 %							1 %			
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengembangan, Pelaksanaan dan Pemberdayaan Industri	Dokumen		Dokumen	114 Dokumen	4,346,321,539						114 Dokumen	6,400,000,000		
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	220,343,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lalin, Sungai Lalin	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	1,676,810,935			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha Industri	3 Dokumen	650,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					[+] Jasa Pengembangan Produk Hilirisasi Gambar Menjadi Produk-produk Herbal Untuk Kesehatan Manusia					1000 Per Sampel	500,000,000									
					[#] Belanja Modal Mesin Coco Peat dan Coco Fiber					4 Unit	924,824,250									
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						251,986,685									
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				6 Dokumen	2,063,403,671			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha Industri	6 Dokumen	4,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					[+] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hilirisasi Karet						312,576,000									
					[+] Pembangunan Kios Kuliner (Kecamatan Sekayu)						198,360,000									
					[+] Penataan Halaman Rumah Gambo (Kecamatan Sekayu)						910,200,000									
					[+] Administrasi Penunjang Kegiatan						642,267,671									
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat				104 Dokumen	385,763,933			Kab. Musi Banyuasin, Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Iriak Jaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha Industri	104 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	%		%	9.75 %	75,514,000						9.75 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perhasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perhasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Perizinannya	Pelaku Industri		Pelaku Industri	17 Pelaku Industri	75,514,000					17 Pelaku Industri			
3 31 3 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota				17 Dokumen	75,514,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Keuangan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Industri	17 Dokumen		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SINas	Unit Usaha		Unit Usaha	22 Unit Usaha	142,981,582					22 Unit Usaha	500,000,000		
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	142,981,582					1 Dokumen	500,000,000		
3 31 4 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem informasi industri nasional (SINas)				38 Dokumen	69,929,582	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Industri Kecil Menengah	38 Dokumen	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 4 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SINas				1 Dokumen	73,052,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Industri Kecil Menengah	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
4 1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						114,017,315,007					169,682,300,000			
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%		%	100 %	102,428,858,057					100 %	143,700,500,000		
4 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	100,920,000					1 Tahun	149,000,000		
4 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	50,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 dokumen	106,000,000	Sekretariat Daerah	
4 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhetisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rhetisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhetisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	43,000,000	Sekretariat Daerah	
4 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	26,389,023,768					1 Tahun	30,997,000,000		
4 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	26,389,023,768	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polbulhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	300 Orang/bulana	30,800,000,000	Sekretariat Daerah	
4 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,047,640,252					1 Tahun	1,501,000,000		
	Penanaman Barang Milik Daerah	Terperuhnya Pembayaran PBB				45 Unit		Kab. Musi Banyuasin	PENDAPATAN ASLI	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas		45 Unit			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
4	1	1	2.03	2	SKPD	Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)				115 Unit	947,641,252	Sekayu, Serasan Jaya	DAERAH (PAD)			0	115 Unit	1,188,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen yang di sahkan, (Dokumen Pnjam Pakai, Dokumen Hibah, Dokumen Sewa, Dokumen Inventaris Barang)				4 Laporan	99,999,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	313,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	304,805,000						1 Tahun	3,119,000,000	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terperuhnya PSL, PSR, PSH, PDH, Pakaian Batik dan Olahraga				6 jenis	196,075,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 jenis	785,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II				19 Orang	108,730,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	19 Orang	596,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	19,755,390,501						12 Bulan	31,832,000,000	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	358,941,500	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	675,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	1,987,361,409	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Paket	3,864,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga KDH				1 Paket	399,991,210	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	1,875,000,000	Sekretariat Daerah
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Lainnya	1 Paket														
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga WKDH	1 Paket														
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Paket	1,007,701,806	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Paket	1,574,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	972,142,176	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	24 Paket	1,589,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	375,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	7,999,998,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Laporan	13,750,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Makan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				683 Laporan	6,929,254,400	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	683 Laporan	8,130,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	8,211,742,400						1 Tahun	4,825,000,000	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 (dua)				30 Unit	7,537,025,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 Unit	2,575,000,000	Sekretariat Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan Roda 4 (empat)	5 Unit														
				Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan Roda 6 (enam)	2 Unit														
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	674,717,400	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	2,250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	16,327,700,088						1 Tahun	26,117,000,000	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66 Laporan	6,747,526,800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	66 Laporan	9,059,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terperuhnya honorarium Operator Simda Barang, Simda Keuangan, Pengurus Barang dan gaji tenaga honor				132 Laporan	9,580,173,288	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	132 Laporan	17,058,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	12,824,191,150						1 Tahun	23,693,000,000	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhnya pembayaran pajak dan perperangan STNK kendaraan, suku cadang, BBM/ pelumas dan biaya service				115 Unit	4,901,790,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	115 Unit	6,455,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
						1 Paket						1 Paket				
						1 Paket						1 Paket				
						1 Paket						1 Paket				
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	4,600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	45 Unit	10,431,000,000	Sekretariat Daerah
						[+] Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor	1 Paket x 100000000 Rupiah	100,000,000								
						[+] Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Sarana Penunjang Gedung Setda	1 Paket x 100000000 Rupiah	100,000,000								
						[+] Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Asisten I, Asisten II dan Asisten III di Komp Praja Multi Sekayu	1 Paket x 94880000 Rupiah	94,880,000								
						[+] Administrasi Penunjang Kegiatan		4,305,120,000								
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhnya Pemeliharaan AC Gedung kantor dan Rumah Jabatan Terperuhnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200 Unit 56 Unit	3,322,401,150	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	200 Unit 56 Unit	1,875,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	1,196,600,000						12 Bulan	1,512,500,000	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	246,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	562,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan	600,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12		Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	7,225,564,100						12 Bulan	12,250,000,000	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	5,471,974,850	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	7,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	69,871,950	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	2,250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1,683,717,300	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Tahun	3,048,864,982						1 Tahun	3,664,000,000	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	48 Perangkat Daerah	749,999,946	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	48 Perangkat Daerah	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksanakannya Fasilitasi Penyusunan Proposal Inovasi Layanan Publik Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan SOP dan Peta Prohib	1 Dokumen 2 Dokumen	749,999,254	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen 2 Dokumen	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Keselarasan Dokumen IKU, PK, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin	63 Dokumen 48 PD 15 Kecamatan 48 PD	1,234,870,822	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	63 Dokumen 48 PD 15 Kecamatan 48 PD	1,750,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 LKPU Bupati Musi Banyuasin Tahun 2022	1 Dokumen 1 Dokumen	313,994,960	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola	0	1 Dokumen 1 Dokumen	314,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
						2 Dokumen						2 Dokumen			
4	1	1	2.14			12 Bulan	5,996,415,816					12 Bulan	4,041,000,000		
4	1	1	2.14	1		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan	108 Laporan	2,679,990,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	108 Laporan	3,082,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	163 Laporan	3,029,925,656	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	163 Laporan	667,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Jenis	286,500,160	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 Jenis	292,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	9,183,939,810				0	100 %	18,361,000,000	
4	1	2	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	1 Tahun	1,199,963,070				0	1 Tahun	3,775,000,000	
4	1	2	2.01	1		Penataan Administrasi Pemerintahan	2 kegiatan	565,929,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2 kegiatan	2,620,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	2		Pengelolaan Administrasi Wilayah	2 Segmen	232,946,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankem Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Segmen	590,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	13 Kelurahan	401,088,070	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankem Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	13 Kelurahan	565,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Tahun	6,664,138,657				0	1 Tahun	9,100,000,000	
4	1	2	2.02	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	300 Orang	4,163,820,957	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	300 Orang	4,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	2		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	500 Pasang	325,310,500	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	500 Pasang	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	45 Orang	2,175,007,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	45 Orang	3,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Tahun	1,000,001,083				0	1 Tahun	4,300,000,000	
4	1	2	2.03	1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	650 KEPBUP	342,231,483	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	650 KEPBUP	600,000,000	Sekretariat Daerah
						Penyelesaian Sengketa Hukum	3 Kasus					0	3 Kasus		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KUR pada UKM	14 Kecamatan	100,728,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Tungkai Jaya, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	14 Kecamatan	424,000,000	Sekretariat Daerah		
						Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Kegiatan						1 Kegiatan				
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	700,000,140			0	1 Tahun	1,937,000,000	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen SSH barang, Dokumen SSH Bahan dan Upah, Dokumen ASB Konstruksi			3 Dokumen	273,203,140	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	972,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1. Standar Tertinggi Bangunan Gedung Negara (STBGN) 2. Verifikasi KOntrak 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan			3 Laporan	370,392,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Laporan	839,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			15 Laporan	56,405,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Laporan	126,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket Pekerjaan		Paket Pekerjaan	663 Paket Pekerjaan	901,477,000				663 Paket Pekerjaan	1,810,000,000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			679 Paket	442,702,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	679 Paket	860,000,000	Sekretariat Daerah
						terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang		56 Paket									
						terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya		100 Paket									
						terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan pekerjaan konstruksi		523 Paket									
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya implementasi layanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE			1 Aplikasi	216,361,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Aplikasi	630,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya bantuan hukum barang dan jasa Terlaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa			1 Kustas 22 Orang	242,414,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Kustas 22 Orang	320,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	350,000,000				15 Kecamatan	2,041,000,000	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pendataan Perizinan			15 Kecamatan	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Kecamatan	1,019,000,000	Sekretariat Daerah
4	2				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	2				SEKRETARIAT DPRD						91,645,015,570					171,526,903,587	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	%		%	100 %	69,615,379,906				100 %	103,451,200,469	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
4	2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makanan dan minuman tamu			60 kali	189,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Sekretariat DPRD serta masyarakat Kab. Muba	60 kali	1,826,130,600	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia			24 Kali	5,057,974,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Sekretariat DPRD serta masyarakat Kab. Muba	24 Kali	8,925,000,000	Sekretariat DPRD	
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan												
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	%	85 %	86,879,595					85 %	185,272,500		
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan			2 Jenis	86,879,595	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	2 Jenis	185,272,500	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	85 %	4,417,536,350					85 %	6,965,922,300		
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	764,736,350	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	12 bulan	965,922,300	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan			20 Orang	3,652,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	40 Orang	6,000,000,000	Sekretariat DPRD
				Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	69 Orang													
				Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15 Orang													
				Jumlah Belanja Jasa Tenaga Supir	4 Orang													
				Jumlah Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah	11 Orang													
				Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan														
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	%	85 %	1,838,054,258					85 %	6,708,344,349		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			5 Unit	205,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	5 Unit	367,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	865,920,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	28 Unit	909,216,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Paket	610,384,258	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	5 Paket	5,221,717,599	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			137 Unit	156,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Muba	137 Unit	209,910,750	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	%	85 %	40,158,750,000					85 %	47,761,612,500		
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			45 Orang/Bulan	39,000,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang/Bulan	46,521,300,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Adat DPRD			45 Stel	1,001,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	1,051,312,500	Sekretariat DPRD	
				Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	45 Stel													
				Jumlah Pakaian Olahraga DPRD	45 Stel													
				Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH)	90 Stel													
				Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45 Stel													
				Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45 Stel													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	157,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	189,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi DPRD	%	85 %	8,983,247,600					85 %	15,792,118,650	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna	10 Kali 106 Kali	6,463,247,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Kali 106 Kali	13,108,318,650	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah tersedianya bahan pangan dan buah-buahan Pimpinan DPRD	12 bulan	2,520,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	2,683,800,000	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%	85%	22,029,635,664					85%	68,075,703,118	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	85 %	3,301,865,000					85 %	9,071,694,450	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 kali	2,894,799,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	2 kali	8,562,704,850	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3 raperda	407,066,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	3 raperda	508,989,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	85 %	6,361,506,000					85 %	13,446,295,800	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1,502,114,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	1 kali	3,082,098,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen 1 kali	1,502,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Dokumen 1 kali	3,082,098,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah terlaksananya Pembahasan APBD	1 kali	927,582,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	1 kali	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	927,582,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	1 kali	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 kali	1,502,114,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	1 kali	3,082,098,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	%	85 %	1,502,114,000					85 %	3,082,098,600	
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 kali	1,502,114,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Kab. Muba	1 kali	3,082,098,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	85 %	1,962,752,000					85 %	16,260,161,300	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah terlaksananya pendalaman tugas DPRD	2 kali	762,752,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	2 kali	2,500,161,300	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	720,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	10 Orang	756,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	480,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	8 Orang	504,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%		%	85 %	2,282,619,540			85 %	7,212,542,764	
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan Kerja DPRD	6 kali	190,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat Kab. Muba	6 kali	5,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	2,092,419,540	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat Kab. Muba	3 kali	2,212,542,764	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah	%		%	85 %	1,700,246,244			85 %	3,445,556,604	
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	52 Dokumen	1,700,246,244	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah serta masyarakat Kab. Muba	52 Dokumen	3,445,556,604	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%		%	85 %	4,918,532,880			85 %	15,557,353,600	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	3,159,220,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	13 Dokumen	10,057,353,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1,759,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	12 Dokumen	5,500,000,000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	1				PERENCANAAN			20,751,714,095							31,375,690,000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sangat tepat	%		%	100 %	16,329,435,432			100 %	25,010,510,000	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	29,293,110			100 %	31,880,000	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13,638,060	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur perencanaan dan pelaporan Bappeda Kab. Muba	3 Dokumen	14,490,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,655,050	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur perencanaan dan pelaporan Bappeda Kab. Muba	3 Laporan	17,390,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	11,780,618,084			100 %	15,549,250,000	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	11,780,618,084	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	76 Orang/bulan	15,549,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	94,644,000			100 %	123,760,000	
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi kendaraan dinas operasional	11 Unit	94,644,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	11 Unit	123,760,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen		
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas ASN	%		%	100 %	207,030,000			100 %	615,520,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	52,137,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	2 Paket	185,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	154,893,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	31 Orang	430,520,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,495,063,022		100 %	2,354,710,000	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,991,157	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	1 Paket	81,570,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	296,370,587	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	2 Paket	660,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	74,998,005	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	1 Paket	156,470,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	349,973,232	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	1 Paket	558,070,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	249,992,091	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	2 Paket	305,720,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	23,760,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	2 Dokumen	42,480,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,626,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	1 Laporan	8,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	439,353,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	2 Laporan	457,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28 kali													
		10 kali													
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	19,998,950	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bappeda Kab. Muba	1 Dokumen	85,090,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	696,497,038		100 %	3,503,410,000	
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	598,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda Kab. Muba	13 Unit	3,341,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	97,547,038	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda Kab. Muba	1 Paket	162,410,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,305,320,178		100 %	1,971,240,000	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	633,720,178	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda kab. Muba	3 Laporan	689,040,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium operator (PNS) Honorarium Tenaga Kontrak Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Orang 57 Orang 0 Laporan	671,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda kab. Muba	10 Orang 57 Orang 0 Laporan	1,282,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung kantor dan peralatan gedung kantor	%		%	100 %	720,970,000		100 %	860,740,000	
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	407,090,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda Kab. Muba	11 Unit	561,620,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198,670,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda Kab. Muba	1 Unit	199,120,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	115,210,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappeda Kab. Muba	1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kecelarasan program RKPd dalam RPJMD	%		%		100 %	2,166,759,723					100 %	2,997,180,000		
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan	%		%		100 %	1,190,780,300					100 %	1,524,450,000		
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah					4 Dokumen	250,168,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	SKPD Kab. Muba	4 Dokumen	480,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					48 Berita Acara	102,480,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	48 Berita Acara	253,270,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					48 Berita Acara	330,650,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	48 Berita Acara	401,180,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RRJMD/RKPD)					2 Dokumen	507,482,300	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	2 Dokumen	390,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data perencanaan program/kegiatan dalam mencapai RPJMD	%		%		100 %	252,854,189					100 %	626,730,000		
5	1	2	2.02	2	Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					10 Orang	108,091,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SKPD Kab. Muba	10 Orang	126,730,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					0 Buku	144,763,189	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SKPD Kab. Muba	0 Buku	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Pembuatan Video Grafiis Profil Pembangunan Kab. Muba					1 Dokumen									
						Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah					1 Dokumen									
						Pengelolaan Implementasi Satu Data Muba					1 Dokumen									
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%		100 %	643,125,300					100 %	696,000,000		
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					2 Laporan	199,109,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	2 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					6 Laporan	444,015,500	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	6 Laporan	446,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	%		%		100 %	79,999,934					100 %	150,000,000		
5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					3 Dokumen	79,999,934	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	3 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%		%		90 %	2,255,518,940					90 %	3,368,000,000		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%		%		100 %	591,462,420					100 %	1,255,000,000		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RRJMD dan RKPd)					1 Dokumen	99,941,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Dokumen	205,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	49,962,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Laporan	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	1 Dokumen	99,946,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Dokumen	320,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	29,954,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Laporan	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganggulan Kemiskinan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	311,658,820	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Laporan	435,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya alam	%	%						100 %	363,000,000	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	6 Dokumen	74,975,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	6 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25,260,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Laporan	44,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	4 Dokumen	99,863,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	4 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	39,340,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Kab. Muba	1 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	%						100 %	1,750,000,000	
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	145,805,520	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	89,079,600	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	149,848,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	578,207,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	461,678,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			497,479,482							2,300,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diindak lanjuti	%	%	90 %	497,479,482				90 %	2,300,000,000	
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	%	%	100 %	185,916,000				100 %	500,000,000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Laporan Dewan Riset Daerah Kab. Muba MoU terkait ekstrak getah gambir menjadi Katekin dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	%	%	1 Laporan 1 Dokumen	185,916,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan 1 Dokumen	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	%	100 %	136,517,202					100 %	750,000,000		
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Desa inovasi berbasis pertanian, perkebunan dan pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian tumbuhan lahan basah kelompok ibu PKK desa atau UKM sebagai bahan baku pewarna alami tekstil			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	136,517,202	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	%	%	100 %	175,046,280					100 %	750,000,000		
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Facilitasi Pembangunan Jergas Bumi untuk Rumah Tangga dalam Kab. Muba Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kerjasama dengan BPTP Kerjasama dengan STIPER Yogyakarta Penyusunan Kajian Pemetaan Inovasi Daerah Penyusunan Rencana Induk Kelirbangan Penyusunan Sistem Inovasi Daerah			1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	175,046,280	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN												248,269,058,889	295,610,362,544				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	%	%	100 %	15,109,394,723					100 %	20,532,206,779		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	%	%	100 %	49,999,968					100 %	55,769,814		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	24,999,978	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	30,769,814	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	24,999,990	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	%	%	100 %	11,029,757,090					100 %	14,632,820,815		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			78 Orang/bulan	11,029,757,090	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPKAD KAB- MUBA	78 Orang/bulan	14,632,820,815	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	%	%	100 %	149,999,976					100 %	150,000,000		
5	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	149,999,976	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	203,157,000					100 %	624,657,000		
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	53,175,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPKAD KAB. MUBA	2 Paket	280,515,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PM			23 Orang 3 Orang	149,982,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPKAD KAB. MUBA	23 Orang 3 Orang	344,142,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,415,650,070						100 %	1,960,505,505	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	49,996,515	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Paket	70,277,190	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	199,973,142	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	2 Paket	600,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	74,986,129	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Paket	109,537,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	349,998,324	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	2 Paket	412,160,838	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	213,439,960	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Paket	207,544,477	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Dokumen	65,350,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	150,003,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	12 Laporan	108,686,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70 Laporan	322,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	70 Laporan	356,950,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	30,110,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	%		%	100 %	1,519,998,147						100 %	2,331,572,585	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	742,698,147	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	880,472,585	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	777,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	1,451,100,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	%		%	100 %	740,832,472						100 %	776,881,060	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	41,050,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Unit	41,050,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	402,120,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	12 Unit	402,120,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	199,070,412	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	1 Unit	235,119,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			67 Unit	98,592,060	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD KAB. MUBA	67 Unit	98,592,060	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%		%	100 %	231,547,999,168						100 %	272,503,155,765	
5	2	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	1,627,294,964						100 %	2,250,000,000	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	135,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	135,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	48 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	73,839,960	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	48 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	48 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	73,905,904	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	48 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	355,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	600,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	354,549,100	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	%	%	100 %	258,376,000			100 %	495,000,000	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	161,276,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD DAN KANTOR LEMBAGA TERKAIT	7 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	49,440,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD DAN KANTOR LEMBAGA TERKAIT	2 Dokumen	143,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	47,660,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD DAN KANTOR LEMBAGA TERKAIT	5 Dokumen	132,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	%	%	100 %	665,785,146			100 %	2,504,711,662	
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	200,000,146	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	14 Laporan	359,999,518	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	260,820,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	2 Laporan	299,999,583	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	204,965,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	2 Dokumen	369,999,600	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 Puskesmas							28 Puskesmas		
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	%	%	100 %	228,701,737,700			100 %	266,573,444,680	
5	2	2	2.04	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	4,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	1 Laporan		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	222,501,737,700	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	4 Laporan	263,573,444,680	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
													Nasional					Daerah		
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			6 Laporan	1,500,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, OPD, KANTOR DAN LEMBAGA TERKAIT	6 Laporan	2,500,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	%	100 %	294,805,358						100 %	679,999,423			
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	294,805,358	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD DAN PIHAK TERKAIT	1 Dokumen	429,999,917	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Data Aset Yang Akurat	%	%	100 %	1,611,664,998						100 %	2,575,000,000			
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	%	%	100 %	1,611,664,998						100 %	2,575,000,000			
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	143,148,128	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah			1 Laporan	154,458,082	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	601,667,748	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	650,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	71,915,366	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	165,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	79,457,222	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	185,935,246	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	82,717,536	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	1 Laporan	90,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			3 Laporan	292,365,670	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD, OPD, Lembaga dan Kantor Terkait dan Membutuhkan.	3 Laporan	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2	KEUANGAN											26,489,900,770					40,865,000,000		
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
5	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	50,000,000						100 %	120,000,000			
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3 Laporan	60,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	18,681,873,592						100 %	23,900,000,000			
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			113 Orang/bulan	18,681,873,592	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	113 Orang/bulan	23,900,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	219,785,000						100 %	500,000,000	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksi Dinas			1 Paket	69,839,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1 Paket	200,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			28 Orang	149,946,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	28 Orang	300,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	1,828,989,994						100 %	4,195,000,000	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	29,999,908	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	1 Paket	130,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	549,999,887	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	7 Paket	890,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	74,957,854	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	1 Paket	140,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	419,032,509	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	1 Paket	465,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	259,999,836	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	1 Paket	580,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			14 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	14 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	12 Laporan	70,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	400,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	12 Laporan	620,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2 Dokumen	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	2 Dokumen	1,230,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	100,000,000						100 %	770,000,000	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			29 Unit	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	29 Unit	270,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,123,243,199						100 %	2,105,000,000	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	507,943,199	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12 Laporan	885,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	615,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2 Laporan	1,220,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	881,569,850						100 %	2,995,000,000	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11 Unit	499,276,250	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11 Unit	545,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			11 Unit	332,299,800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11 Unit	2,400,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			51 Unit	49,993,800	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	51 Unit	50,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,60%		0%	13,84%	3,604,439,135						13,84%	6,280,000,000	
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%		0%	100%	3,604,439,135						100%	6,280,000,000	
5 2 4 2.01 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	212,002,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	2 Dokumen	365,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	325,019,135	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	1 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	406,204,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	2 Laporan	620,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	70,000,100	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	4 Unit	120,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	410,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	3 Laporan	870,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	160,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	2 Laporan	220,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBHP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NJOP nya				253000 Obyek Pajak	138,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	253000 Obyek Pajak	170,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	425,160,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	3 Dokumen	850,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	206,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	11 Layanan	400,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				128 Dokumen	344,182,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	128 Dokumen	620,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	397,396,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	3 Dokumen	765,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				182 Dokumen	59,979,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	182 Dokumen	120,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	1 Dokumen	560,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	59,996,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	2 Laporan	125,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 2 4 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	90,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Wajib Pajak	2 Laporan	125,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 3	KEPEGAWAIAN														
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat	%		%	100%	9,363,767,247						100%	11,947,642,500	
5 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	49,508,000						2 Dokumen	30,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
										Nasional					Daerah							
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	24,600,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	2 Dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 Laporan	24,908,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	12 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%				100 %	7,075,685,481							100 %	9,118,090,000	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						55 Orang/bulan	7,075,685,481	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	55 Orang/bulan	9,118,090,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	%				100 %	46,282,500							100 %	57,412,500	
5	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	46,282,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	57,412,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	%				100 %	129,805,000							100 %	125,000,000	
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						2 Paket	35,450,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	2 Paket	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.05		Pakaian Olahraga (Training Set)							50 Stel								50 Stel		
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						5 Orang	94,355,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	5 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%				100 %	1,054,524,007							100 %	1,055,000,000	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	29,985,811	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						0 Paket	198,904,458	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	0 Paket	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia							1 Paket								1 Paket		
5	3	1	2.06		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4 Jenis								4 Jenis		
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	53,677,930	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	198,900,678	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Paket	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan						2 Paket	148,055,130	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	2 Paket	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06		Tersedianya Surat Kabar Media Nasional dan Media Lokal							2 Media								2 Media		
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	1	2.06		Tersedianya Konsumsi Makan, Minum, Snack Tamu dan Rapat							12 Bulan								12 Bulan		
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	12 Laporan	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP-JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
5	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	2 Unit		0 Unit	2 Unit	99,386,520								
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			102 Unit	99,386,520	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	102 Unit		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	623,795,739						100 %	1,205,200,000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan							1 Laporan		
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran air, pembayaran Listrik, Pembayaran Telepon dan Kawat/Faksimili /Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit			12 Bulan	205,795,739	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	12 Bulan	365,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan							1 Laporan		
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium non PNS dan honorarium Pengurus Bangun, operator SIMDA Gaji, SMDA Keuangan, Admin SIPP dan Admin RUP			46 Orang	418,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	46 Orang	840,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%		%	100 %	284,780,000						100 %	356,940,000	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	216,480,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	8 Unit	288,640,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	1 Unit	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			30 Unit	18,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	BMD pada Kantor BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin	30 Unit	18,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Survey Kepuasan ASN	%		%	87,25 %	3,960,392,000						87,25 %	9,110,000,000	
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	800,055,000						100 %	1,525,000,000	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPKK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPKK			3 Dokumen	500,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	3 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			1 Laporan	120,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Administrasi Pemberhentian	Pengambilan Sumpah / Janji PNS dan Penyerahan SK PPPK			1 Kali							1 Kali		
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			5 Dokumen	50,011,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	5 Dokumen	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			3 Lembaga	70,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	3 Lembaga	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			4 Dokumen	60,044,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	4 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	%		%	100 %	569,523,000						100 %	1,330,000,000	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1 Dokumen	149,794,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	260,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
		Terlaksananya Mutasi ASN antar Perangkat Daerah, Mutasi Keluar dan Masuk ke Kab. MUBA				50 Orang					Pelayanan Publik	Pemerintahan		50 Orang							
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Naikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naikan Pangkat ASN					1450 Dokumen	219,908,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1450 Dokumen	270,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					150 Dokumen	199,821,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	150 Dokumen	800,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
					Terlaksananya Seleksi JPT Pratama dan Uji Kompetensi (Job Fit)						1 Kali							1 Kali			
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%		%		100 %	2,129,628,000							100 %	5,450,000,000	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya					40 Orang	249,877,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	40 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Didat dan Sertifikasi ASN					1 Dokumen								1 Dokumen		
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					24 Orang	1,179,861,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	24 Orang	2,300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Didlat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Didlat					2 Dokumen	699,890,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	2 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						Jumlah Peserta Latsar CPNS dan Didlat Bimbingan Teknis					50 Orang								50 Orang		
						Terlaksananya Pengiriman Didlat PKA , Didlat PKP, dan Didlat Teknis					2 Kali								2 Kali		
						Terlaksananya Pengiriman Peserta Didlat Bendahara					40 Orang								40 Orang		
						Terlaksananya Pengiriman Peserta Didlat Pengadaan Barang Jasa					40 Orang								40 Orang		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%		100 %	461,186,000							100 %	805,000,000	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	117,071,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Dokumen	185,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						Terlaksananya penilaian prestasi kinerja PNS yang transparan dan akuntabel					6.901 Orang								6.901 Orang		
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					300 Orang	70,090,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	300 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian					4 Angkatan								4 Angkatan		
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					57 Laporan	136,014,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	57 Laporan	140,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Percerian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Percerian Pegawai yang Didiyaini					20 Dokumen	44,609,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	20 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN					1 Laporan	93,402,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	140,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						Terlaksananya Laporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN bagi Wajib Lapor LHKPN salingterangan Penjab Musi Banyuasin Tahun Lapor 2022					600 orang							600 orang			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1				INSPEKTORAT DAERAH																
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%		%		100 %	17,123,922,386							100 %	23,710,000,000	
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja APP	Dokumen		Dokumen		8 Dokumen	50,000,000							8 Dokumen	130,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	4 Dokumen	65,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	4 Laporan	65,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan APF	Bulan		Bulan	12 Bulan	14,431,015,458							12 Bulan	17,500,000,000	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	14,431,015,458	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	85 Orang/bulan	17,500,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah	Unit		Unit	11 Unit	59,562,500							11 Unit	80,000,000	
6	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	59,562,500	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Muba	10 Dokumen	80,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian APP	Orang		Orang	144 Orang	362,813,600							144 Orang	1,080,000,000	
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	55,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Muba	1 Paket	150,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	49,867,600	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Muba	50 Dokumen	55,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	256,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Muba	27 Orang	875,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum APP	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,024,499,828							12 Bulan	1,837,500,000	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,992,924	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	1 Paket	65,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	74,997,758	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	1 Paket	87,500,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,479,881	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	1 Paket	230,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	246,494,265	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	1 Paket	260,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25,320,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	12 Dokumen	65,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	46,252,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	12 Laporan	50,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	400,963,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	3 Laporan	480,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	603,136,000							12 Bulan	1,015,000,000	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	250,436,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	4 Laporan	300,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	352,700,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	12 Laporan	715,000,000	Inspektorat	
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	592,895,000							12 Bulan	717,500,000	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				10 Unit	332,310,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	10 Unit	405,000,000	Inspektorat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	199,979,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	1 Unit	235,000,000	Inspektorat		
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		78 Unit	60,606,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	78 Unit	77,500,000	Inspektorat		
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	Predikat		Predikat	WTP Predikat	3,707,235,600				WTP Predikat	6,160,000,000		
						Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	%	%	60 %	60 %								
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	%	%	85 %									
						Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik	%	%	65 %									85 %
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Laporan	Laporan	150 Laporan	2,667,337,800				150 Laporan	4,720,000,000			
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Laporan	777,837,800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Laporan	1,450,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			0 Laporan	419,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Laporan	1,100,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			1 Laporan	350,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	460,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1 Laporan	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	125,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			0 Laporan	770,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Laporan	1,150,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP			0 Dokumen	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Dokumen	435,000,000	Inspektorat	
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Laporan	37 Laporan	1,039,897,800					37 Laporan	1,440,000,000		
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			48 Laporan	1,039,897,800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	48 Laporan	1,180,000,000	Inspektorat	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Leveling Kapabilitas APSP	Level	Level	3 Level	1,158,403,200					3 Level	2,530,450,000		
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas pengawasan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	200,000,000					2 Dokumen	375,450,000		
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			2 Rekomendasi	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Musi Banyuasin	2 Rekomendasi	325,000,000	Inspektorat	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi APSP	Laporan	Laporan	9 Laporan	958,403,200					9 Laporan	2,155,000,000		
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			15 perangkat daerah	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	15 perangkat daerah	625,000,000	Inspektorat
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			48 perangkat daerah	156,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	48 perangkat daerah	425,000,000	Inspektorat
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0 Kegiatan	352,103,200	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	0 Kegiatan	775,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan Dan Transformatasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Prangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	48 perangkat daerah	330,000,000	Inspektorat		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN		8,878,413,213								12,197,000,000			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%	%	100 %	8,581,639,016				100 %	11,493,250,000			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	39,936,000				7 Dokumen	90,000,000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	19,968,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Honoror Kecamatan Sekayu	3 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	19,968,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Honoror Kecamatan Sekayu	4 Laporan	30,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Bulan	14 Bulan	7,121,793,951					14 Bulan	8,473,000,000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	7,121,793,951	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan dan Kelurahan	0 Orang/bulan	8,473,000,000	Kecamatan Sekayu
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan												
				Tersedianya Gaji ASN Kecamatan Sekayu	12 Bulan	12 Bulan												
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	Orang	3 Orang	88,540,000					3 Orang	161,250,000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	44,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	1 Paket	86,250,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	44,140,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	3 Orang	75,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	464,877,065					100 %	1,150,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	19,389,258	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	45,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	74,800,359	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Paket	300,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	14,951,912	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	12,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	56,350,266	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	110,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	31,809,270	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	105,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			240 Dokumen	7,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	240 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sekayu
				Tersedianya surat kabar dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan												
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			20 Laporan	60,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Laporan	110,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			130 Laporan	199,976,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	130 Laporan	460,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel Kecamatan dan Kelurahan	Unit	Unit	8 Unit	66,306,750					8 Unit	175,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	66,306,750	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	1 Paket	175,000,000	Kecamatan Sekayu
						Terseledainya kebutuhan Mebelur Kantor	9 Jenis						9 Jenis			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai Kecamatan dan Kelurahan	Bulan	Bulan	12 Bulan	674,817,600				12 Bulan	1,240,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,117,600	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Honoror dan ASN Kecamatan Sekayu	12 Laporan	114,950,000	Kecamatan Sekayu
						Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Air, Listrik, Telpon dan internet kecamatan	12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	592,700,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Honoror dan ASN Kecamatan Sekayu	12 Laporan	1,125,050,000	Kecamatan Sekayu
						Terseledainya Pembayaran Honorarium tenaga kontrak	12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor dan operasional kendaraan dinas	Unit	Unit	4 Unit	125,367,650				4 Unit	204,000,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	54,200,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	4 Unit	85,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,854,650	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	1 Unit	90,900,000	Kecamatan Sekayu
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor secara rutin / berkala dalam kondisi baik	20 unit	20,313,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sekayu	20 unit	28,100,000	Kecamatan Sekayu
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit						20 Unit			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	%	%	100 %	222,774,197				100 %	483,750,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kunjungan Kerja Kepala daerah & wakil Kepala daerah dan fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten	Kegiatan	Kegiatan	12 Kegiatan	192,742,326				12 Kegiatan	403,750,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitas Kunjungan Kerja Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten di Kecamatan	10 Kegiatan	192,742,326	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	10 Kegiatan	403,750,000	Kecamatan Sekayu
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen							10 Dokumen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terseleenggaranya Pelayanan PATEN	Bulan	Bulan	12 Bulan	30,031,871				12 Bulan	80,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	30,031,871	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	2 Laporan	80,000,000	Kecamatan Sekayu
						Terseleenggaranya pelayanan (PATEN)	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penegakan Perda	%	%	100 %	18,000,000				100 %	70,000,000	
						Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sekayu	%	%	100 %					100 %		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terseleenggarakan penegakan peraturan daerah	%	%	100 %	18,000,000				100 %	70,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungutnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungutnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	18,000,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dan Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	70,000,000	Kecamatan Sekayu
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sekayu)	%	%	100 %	20,000,000				100 %	80,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah				Penyelenggaraan Forkompinda tingkat kecamatan	kali		kali	2 kali	20,000,000					2 kali	80,000,000		
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				140 Orang	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	140 Orang	80,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu	%		%	100 %	36,000,000					100 %	70,000,000		
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Penyelenggaraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	36,000,000					100 %	70,000,000		
7 1 6 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				10 Dokumen	18,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan AparaturDesa	10 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				14 Laporan	18,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan AparaturDesa	14 Laporan	35,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)	%		%	100 %	99,999,824					100 %	100,000,000		
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	99,999,824					100 %	100,000,000		
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	99,999,824	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Kelurahan Serasan Jaya	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu	%		%	100 %	599,999,733					100 %	750,000,000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Tersenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	599,999,733					4 Kegiatan	700,000,000		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	299,999,922	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Serasan Jaya	2 Unit	350,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	299,999,811	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Serasan Jaya	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN																	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)	%		%	100 %	99,999,852					100 %	100,000,000		
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	%		%	100 %	99,999,852					100 %	100,000,000		
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	99,999,852	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Sekayu
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu	%		%	100 %	599,999,871					100 %	750,000,000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Tersenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	599,999,871					4 Kegiatan	700,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	299,999,922	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Soak Baru	2 Unit	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	299,999,949	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Soak Baru	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1	KECAMATAN											699,995,689	850,000,000							
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											100 %	99,999,991			100 %	100,000,000		
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											100 %	99,999,991			100 %	100,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	99,999,991	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											100 %	599,995,698			100 %	750,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											4 Kegiatan	599,995,698			4 Kegiatan	700,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	299,995,770	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Balai Agung	2 Unit	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	299,999,928	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Balai Agung	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1	KECAMATAN											699,999,695	850,000,000							
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											100 %	99,999,795			100 %	100,000,000		
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											100 %	99,999,795			100 %	100,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	99,999,795	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Kelurahan Kayuara	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											100 %	599,999,900			100 %	750,000,000		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											4 Kegiatan	599,999,900			4 Kegiatan	700,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Kayuara	2 Unit	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	299,999,900	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Kayuara	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Sekayu	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1	KECAMATAN											4,362,476,677	7,167,575,000							
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											70 %	4,036,470,137			70 %	6,074,375,000		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											70 %	29,976,000			70 %	81,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	14,988,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	2 Dokumen	56,000,000	Kecamatan Lais	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	135,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kontrak dan Jasa Kantor Lainnya	12 Laporan	244,000,000	Kecamatan Lais
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	90 %	224,965,440							90 %	334,080,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				3 Unit	125,137,800	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	3 Unit	124,000,000	Kecamatan Lais	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	74,885,940	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Unit	182,580,000	Kecamatan Lais	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Jenis	24,941,700	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	2 Jenis	27,500,000	Kecamatan Lais	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	%	60 %	265,934,000							60 %	717,500,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	%	60 %	251,309,000							60 %	660,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	251,309,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhubkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	6 Dokumen	660,000,000	Kecamatan Lais	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	%	%	66 %	14,625,000							66 %	57,500,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	14,625,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	5 Laporan	57,500,000	Kecamatan Lais	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	%	%	%	60 %	15,056,040							60 %	155,000,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	%	%	%	60 %	15,056,040							60 %	155,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	15,056,040	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhubkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	5 Laporan	155,000,000	Kecamatan Lais	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	%	%	60 %	21,131,100							60 %	92,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	%	%	60 %	21,131,100							60 %	92,000,000	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	21,131,100	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhubkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	100 Orang	92,000,000	Kecamatan Lais	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%	%	60 %	23,885,400							60 %	128,700,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%	%	60 %	23,885,400							60 %	128,700,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 1 6 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Peningkatan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Peningkatan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	8,775,000	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan Desa	3 Dokumen	80,500,000	Kecamatan Lais
7 1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	15,110,400	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan Desa	1 Laporan	48,200,000	Kecamatan Lais
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN														
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat	%	%	%	100 %	4,986,799,145						100 %	6,573,000,000	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat	%	%	%	100 %	40,000,000						100 %	100,000,000	
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	35,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	%	%	%	100 %	3,893,529,633						100 %	4,145,000,000	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3,893,529,633	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Orang/bulan	4,145,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	%	%	%	100 %	66,601,000						100 %	105,000,000	
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	17,766,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	55,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	48,835,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Orang	50,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	%	100 %	445,239,719						100 %	625,000,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,971,423	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	20,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74,568,690	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	110,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24,998,615	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	30,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	49,958,991	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	65,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	24,954,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Paket	45,000,000	Kecamatan Babat Toman
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Babat Toman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					48 Laporan	49,984,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	48 Laporan	60,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	200,004,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	275,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%		100 %	50,467,593						100 %	600,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	50,467,593	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	15 Unit	100,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	367,836,000						100 %	685,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	60,336,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	65,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					25 Laporan	307,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	620,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%		100 %	123,125,200						100 %	313,000,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	41,080,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	4 Unit	70,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	74,725,200	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	1 Unit	225,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	7,320,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	12 Unit	10,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%		100 %	280,281,325						100 %	530,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%		100 %	260,230,000						100 %	475,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					8 Dokumen	260,230,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	475,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%		100 %	20,051,325						100 %	55,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	20,051,325	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Pelayanan PATEN	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETRAMPILAN DAN KETERBITAN UMUM	Fasilitas Penegakan Perda	%		%		100 %	15,020,000						100 %	60,000,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitas Penegakan Perda	%		%		100 %	15,020,000						100 %	60,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					12 Laporan	15,020,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarakannya penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%		%		100 %	14,999,000						100 %	20,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%	100 %	14,999,000					100 %	20,000,000			
7	1	5	2.01	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	%	%	150 Orang	14,999,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan	150 Orang	20,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang Dibina	%	%	100 %	28,395,740				100 %	110,000,000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Dibina	%	%	100 %	28,395,740				100 %	110,000,000			
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	%	%	12 Dokumen	15,115,740	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	%	%	12 Laporan	13,280,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Babat Toman
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				699,398,695							930,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	99,999,857					100 %	110,000,000		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	99,999,857					100 %	110,000,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	%	12 Laporan	99,999,857	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Laporan	110,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	%	100 %	599,398,838					100 %	820,000,000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	%	100 %	599,398,838					100 %	750,000,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	%	%	1 Unit	299,450,250	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Unit	425,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	%	1 Pokmas / Ormas	299,948,588	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	325,000,000	Kecamatan Babat Toman
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				699,517,659							930,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	99,982,801					100 %	110,000,000		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	99,982,801					100 %	110,000,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	%	12 Laporan	99,982,801	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Laporan	110,000,000	Kecamatan Babat Toman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	%	100 %	599,534,858					100 %	820,000,000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	%	100 %	599,534,858					100 %	750,000,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	%	%	1 Unit	299,546,820	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Unit	425,000,000	Kecamatan Babat Toman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	325,000,000	Kecamatan Babat Toman					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat waktu	%	%	100 %	4,245,738,515		100 %	5,428,000,000					
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	%	100 %	40,002,000		100 %	80,000,000					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	20,002,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	30,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan tunjangan ASN	%	%	100 %	3,459,471,884					100 %	4,000,000,000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	3,459,471,884	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	25 Orang/bulan	4,000,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kemampuan Aparatur	%	%	100 %	25,302,000					100 %	50,000,000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			21 Paket	12,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Camat Keluang	21 Paket		Kecamatan Keluang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	12,802,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Camat Keluang	2 Orang	50,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	352,545,631					100 %	571,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	9,995,261	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	20 Paket	10,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	39,648,096	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	10 Paket	165,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			30 Paket	24,997,898	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	30 Paket	10,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			31 Paket	50,062,110	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	31 Paket	50,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	17,827,266	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	4 Paket	8,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			15 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	15 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			20 Laporan	100,050,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	20 Laporan	188,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	99,965,000	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kec Keluang	100 Laporan	132,000,000	Kecamatan Keluang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen		dokumen	2 dokumen	20,300,000					2 dokumen	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Keceluang		3 dokumen		Kecamatan Keluang
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Keceluang		14 Laporan		Kecamatan Keluang
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%								100%	100,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	%								100%	100,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Keluang		12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%								100%	650,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%								100%	600,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Keluang		2 Unit	360,000,000	Kecamatan Keluang
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Keluang		5 Pokmas / Ormas	240,000,000	Kecamatan Keluang
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%								100%		
						Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	%								100%		
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%								100%		
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%								100%		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								5 Dokumen	39,036,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa		5 Dokumen	19,296,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa		5 Laporan	19,740,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	%								100%	3,548,450,270	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa		31 Orang/bulan	3,548,450,270	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								5 Dokumen		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang								2 Orang	63,861,250	
																115,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	21,506,250	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	50 Paket	60,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42,355,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	2 Orang	55,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	10 Paket	391,122,689			10 Paket	530,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9,911,667	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	10 Paket	25,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	72,980,240	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	5 Paket	85,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	23,475,279	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	15 Paket	30,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	49,860,978	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	46 Paket	70,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24,894,525	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	6 Paket	30,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	12 Laporan	130,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	20 Laporan	145,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5 Unit	45,694,704			5 Unit	655,000,000	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6 Unit				6 Unit		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	45,694,704	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	5 Unit	60,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36 Laporan	379,234,392			36 Laporan	705,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36,934,392	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	36 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	342,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	16 Laporan	645,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1 Unit	127,110,000			1 Unit	410,570,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	110,860,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	2 Unit	115,570,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sanga Desa	2 Unit	25,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	335,806,955			100 %	705,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	310,170,000			12 Dokumen	650,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	289,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Ngulak I	2 Unit	312,500,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Ngulak I	2 Pokmas / Ormas	262,500,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN													699,854,803		805,000,000				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%		100 %	99,974,803							100 %	130,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan		1 Laporan	99,974,803							1 Laporan	130,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	99,974,803	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	130,000,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%		%		100 %	599,880,000							100 %	675,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit		2 Unit	599,880,000							2 Unit	575,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	299,880,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Ngulak	2 Unit	312,500,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Ngulak	2 Pokmas / Ormas	262,500,000	Kecamatan Sanga Desa
7	1	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN													3,050,982,941		5,673,000,003				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	%		%		100 %	2,735,717,441							100 %	4,805,000,003	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	29,994,000							3 Dokumen	110,000,000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan		Laporan		4 Laporan								4 Laporan		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	14,997,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Perangkat Daerah	0 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	14,997,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Perangkat Daerah	4 Laporan	35,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan		12 Bulan	1,813,997,410							12 Bulan	2,500,000,003	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1,813,997,410	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Negeri Sipil	12 Bulan	2,500,000,003	Kecamatan Plakat Tinggi	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	52,067,500							100 %	80,000,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					35 Paket	9,712,500	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Perangkat Daerah	35 Paket	25,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	42,355,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Perangkat Daerah	2 Orang	55,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	%		%		100 %	443,966,293							100 %	765,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8 Paket	9,972,717	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	8 Paket	35,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	74,991,282	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	4 Paket	200,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan				22 Paket	24,999,753	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	22 Paket	25,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	49,995,621	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	32 Paket	70,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	24,999,920	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	8 Paket	65,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355 Laporan	199,007,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	355 Laporan	275,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	53,053,338						100 %	275,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	53,053,338	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Perangkat Daerah	7 Unit	175,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak dan Honor Lainnya	Laporan		Laporan	22 Laporan	221,108,900						22 Laporan	455,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,908,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	180,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perangkat Daerah	22 Laporan	400,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	121,530,000						100 %	620,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	108,240,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	0 Unit	130,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Rehab berat mobil Jenazah (Karoseri)	4 Unit														
				- Rehab Rumah dinas Camat	1 Unit														
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	13,290,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3 : Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	0	15 Unit	15,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	275,265,500						100 %	688,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	257,450,000						100 %	650,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					8 Dokumen	257,450,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur Perangkat Daerah	8 Dokumen	650,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	17,815,500					100 %	38,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	17,815,500	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	38,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitas Penegakan PERDA	%	%			100 %	10,000,000					100 %	60,000,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitas Penegakan Peraturan PERDA	Laporan	Laporan			12 Laporan	10,000,000					12 Laporan	60,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					12 Laporan	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%			100 %	10,000,000					100 %	60,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%			100 %	10,000,000					100 %	60,000,000	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					2 Orang	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat dan Aparatur Perangkat Daerah	2 Orang	60,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	20,000,000					100 %	60,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	20,000,000					100 %	60,000,000	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					15 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	15 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					15 Laporan	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	15 Laporan	30,000,000	Kecamatan Plakat Tinggi
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN							3,233,331,722						4,001,916,500	
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	%	%			100 %	2,974,166,522					100 %	3,427,339,500	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	%	%			100 %	23,720,000					100 %	106,989,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	11,860,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	60,998,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9 Laporan	11,860,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	45,991,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	%	%			100 %	2,015,616,953					100 %	2,011,375,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	2,015,616,953	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Orang/bulan	2,011,375,000	Kecamatan Batanghari Leko

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	%		%	100 %	62,850,000						100 %	89,920,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	12,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	40,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	50,850,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	49,920,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	414,424,369						100 %	520,962,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7,143,794	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	67,335,054	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	80,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	22,494,594	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	20,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	45,460,827	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	50,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	17,882,100	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Paket	6,100,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			276 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	276 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			48 Laporan	45,954,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	48 Laporan	100,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	198,154,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	249,862,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	66,878,400						100 %	140,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6 Unit	66,878,400	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	6 Unit	20,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	206,750,000						100 %	340,243,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	43,650,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan	50,243,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	163,100,000	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Laporan	290,000,000	Kecamatan Batanghari Leko
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	183,926,800						100 %	217,850,500	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	129,302,800	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	4 Unit	154,298,000	Kecamatan Batanghari Leko

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	38,954,500	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					13 Unit	24,598,000	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	224,688,000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	216,158,000			
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6 Dokumen	216,158,000	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%			100 %	8,530,000			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	8,530,000	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penegakan PERDA	%	%			100 %	12,015,000			
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi Penegakan PERDA	%	%			100 %	12,015,000			
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					16 Laporan	12,015,000	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%			100 %	7,256,100			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%			100 %	7,256,100			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					300 Orang	7,256,100	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang di Bina	%	%			100 %	15,206,100			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang di Bina	%	%			100 %	15,206,100			
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					16 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					16 Laporan	10,706,100	Kecamatan Batanghari Leko		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							3,307,358,699			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%			100 %	3,042,676,499			

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	20,770,000					100 %	55,000,000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	9,920,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	10,850,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	2,106,958,000					100 %	2,400,000,000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	2,106,958,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya penggajian dan tunjangan ASN	12 Bulan	2,400,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%		%	100 %	59,680,000					100 %	80,000,000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan			30 Paket	12,325,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 Paket	30,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	47,355,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	50,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	426,226,390					100 %	767,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9 Jenis	5,059,050	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	9 Jenis	5,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	39,725,900	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	4 Paket	100,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	4,995,540	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Paket	5,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			40 Paket	49,791,900	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	40 Paket	50,000,000	Kecamatan Sungai Keruh	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	14,997,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	3 Paket	15,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2400 Dokumen	12,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2400 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	97,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Laporan	285,000,000	Kecamatan Sungai Keruh
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	201,857,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Laporan	295,000,000	Kecamatan Sungai Keruh	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	59,799,900					100 %	269,000,000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	59,799,900	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 Unit	150,000,000	Kecamatan Sungai Keruh

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Menwujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Menwujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	29,825,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang	50,000,000	Kecamatan Sungai Keruh	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penegakan PERDA	%		%	100 %	53,665,000					100 %	80,100,000		
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penegakan PERDA	%		%	100 %	53,665,000					100 %	80,100,000		
7 1 6 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				10 Dokumen	23,935,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Sungai Keruh	
7 1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	29,730,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Laporan	45,100,000	Kecamatan Sungai Keruh	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN						5,028,367,642						6,394,275,950		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu	%		%	100 %	4,693,142,373					100 %	5,759,925,950		
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	%		%	100 %	40,000,000					100 %	56,700,000		
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	39,900,000	Kecamatan Sungai Lilin	
		Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan Taplin				3 Dokumen						3 Dokumen			
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	16,800,000	Kecamatan Sungai Lilin	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan						4 Laporan			
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	3,584,222,308					100 %	3,763,433,450		
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	3,584,222,308	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Perangkat Daerah	30 Orang/ Bulan	3,763,433,450	Kecamatan Sungai Lilin
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan						12 Bulan			
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	%		%	100 %	59,505,000					100 %	126,000,000		
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	17,150,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	57,750,000	Kecamatan Sungai Lilin
		Tersedianya Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				48 Orang/Stel						48 Orang/Stel			
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	42,355,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	5 Orang	68,250,000	Kecamatan Sungai Lilin
		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Didlat				5 Orang						5 Orang			
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	424,272,689					100 %	569,160,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	21,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74,283,975	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	105,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terperuhnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	10 Unit							10 Unit		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24,988,431	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	27,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tersedianya Kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kecamatan	20 Jenis							20 Jenis		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,993,068	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	63,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terperuhnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan	40 Jenis							40 Jenis		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,007,215	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Paket	27,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terperuhnya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan	3 Jenis							3 Jenis		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,160,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang - Undangan	3840 Eksemplar							3840 Eksemplar		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	3 Laporan	86,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tersedianya Kebutuhan Mlakan dan Minuman Jamuan Tamu	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat - Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keuh Daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	170,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	220,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan							3 Laporan		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor	100 %	48,657,960						100 %	57,750,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	48,657,960	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	4 Unit	57,750,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tersedianya Kebutuhan Mebeleur Kantor	2 Jenis							2 Jenis		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	321,834,416						100 %	645,750,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,234,416	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	105,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terperuhnya Kebutuhan Pembayaran Air, Listrik, Telepon dan Internet Kecamatan	12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	263,600,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	12 Laporan	540,750,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Tercedainya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak	22 Orang							22 Orang		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	214,650,000						100 %	541,132,500	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	114,860,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	4 Unit	120,603,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	4 Unit							4 Unit		
						Terperuhnya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan	3 Unit							3 Unit		
						Terperuhnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75,000,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	367,500,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan	100 %							100 %		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	24,790,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	0 Unit	26,029,500	Kecamatan Sungai Lilin
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit							12 Unit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Unit							12 Unit		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	275,225,269						100 %	547,100,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	255,225,269						100 %	525,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitas Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Kali	255,225,269	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Kali	525,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Fasilitas Pendukung Kegiatan Kabupaten di Kecamatan	6 Kegiatan							6 Kegiatan		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen							7 Dokumen		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	20,000,000						100 %	22,100,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20,000,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Perangkat Daerah	2 Laporan	22,100,000	Kecamatan Sungai Lilin
						Terseleenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan	100 %	15,000,000						100 %	26,000,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 %	15,000,000						100 %	26,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fasilitas Penegakan PERDA	100 %	15,000,000	Kab. Musi Banyuwasin, Sungai Lilin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	100 %	26,000,000	Kecamatan Sungai Lilin

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiannya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan						1 Laporan						
		Terlaksananya Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 %						100 %						
7	1	5				100 %	15,000,000					100 %	25,750,000					
7	1	5	2.01			100 %	15,000,000					100 %	25,750,000					
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	15,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Perangkat Daerah	30 Orang	25,750,000	Kecamatan Sungai Lili		
						Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Wilayah Kecamatan	12 Bulan						12 Bulan					
7	1	6				100 %	30,000,000					100 %	35,500,000					
7	1	6	2.01			100 %	30,000,000					100 %	35,500,000					
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	15,000,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan	1 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Sungai Lili
						Terseleenggaranya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Bulan							12 Bulan				
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	15,000,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan	1 Laporan	19,500,000	Kecamatan Sungai Lili
						Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	100 %							100 %				
7	1							700,000,000							805,500,000			
7	1	2						100,000,000							110,000,000			
7	1	2	2.02					100,000,000							110,000,000			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	100,000,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Sungai Lili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kelurahan Sungai Lili	7 Laporan	110,000,000	Kecamatan Sungai Lili
						Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan Sungai Lili	12 Bulan							12 Bulan				
7	1	3						600,000,000							695,500,000			
7	1	3	2.02					600,000,000							640,500,000			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	300,000,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Sungai Lili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	100 %	378,000,000	Kecamatan Sungai Lili
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit							2 Unit				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	300,000,000			Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lili, Sungai Lili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	100 %	262,500,000	Kecamatan Sungai Lili

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas							2 Pokmas / Ormas				
		Persentase Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan				12 Bulan							12 Bulan				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1	KECAMATAN					700,000,000							805,500,000			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	100,000,000					100 %	110,000,000			
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan Sungai Lilin Jaya	%	%	100 %	100,000,000				100 %	110,000,000			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	100,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kelurahan Sungai Lilin Jaya	7 Laporan	110,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
					Persentase Pelayanan Administrasi Kelurahan			12 Bulan						12 Bulan			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	%	100 %	600,000,000					100 %	695,500,000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	600,000,000				100 %	640,500,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100 %	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	100 %	378,000,000	Kecamatan Sungai Lilin
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit						2 Unit			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %	300,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	100 %	262,500,000	Kecamatan Sungai Lilin
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas						2 Pokmas / Ormas			
					Persentase Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan			12 Bulan						12 Bulan			
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN				5,017,586,196						5,211,986,197			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan tepat	%	%	100 %	4,708,018,934					100 %	4,902,554,997		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	49,935,100				100 %	49,997,880		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	29,935,900	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	4 Dokumen	29,998,080	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	19,999,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	3 Laporan	19,999,800	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	3,623,113,152				100 %	3,623,059,149		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	3,623,113,152	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	26 Orang/bulan	3,623,059,149	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	Orang	2 Orang	40,460,000				2 Orang	50,000,000		
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	40,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	2 Orang	50,000,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	539,157,174				100 %	534,702,968		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	74,763,934	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	10 Paket	75,000,000	Kecamatan Bayung Lencir

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	24,989,408	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	15 Paket	24,989,008	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	125,503,932	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	20 Paket	125,503,560	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,995,900	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	4 Paket	24,996,400	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	12 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	77,840,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	12 Laporan	73,150,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186,064,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	12 Laporan	186,064,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	44,558,508				100 %	39,600,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	44,558,508	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Unit	39,600,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	332,015,000				100 %	526,415,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83,115,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	83,115,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	248,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	443,300,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	78,780,000				100 %	78,780,000	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %					100 %		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	4 Unit	78,780,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Unit	78,780,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	267,867,262				100 %	267,731,200	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	240,046,000				100 %	240,046,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31 Dokumen	240,046,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	31 Dokumen	240,046,000	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	%	%	100 %	27,821,262				100 %	27,685,200	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27,821,262	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	27,685,200	Kecamatan Bayung Lencir
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	%	%	100 %	12,100,000				100 %	10,800,000	
7	1	4	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	%	%	100 %	12,100,000				100 %	10,800,000	
7	1	4	7.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsihnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsihnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	12,100,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transfornasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	kecamatan bayung lencir	3 Laporan	10,800,000	Kecamatan Bayung Lencir

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RFPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RFPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	tersedianya sarana prasarana kelurahan	1 tahun	399,860,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat kelurahan bayung lencir indah	1 tahun	300,000,000	Kecamatan Bayung Lencir	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terselenggaranya pemberdayaan masyarakat	1 tahun	200,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat kelurahan bayung lencir indah	1 tahun	300,000,000	Kecamatan Bayung Lencir	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN		3,924,506,150							6,250,021,180		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	%	100 %	3,476,729,150				100 %	5,104,994,640		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 %	27,932,000				100 %	82,706,350		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	17,950,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	65,706,350	Kecamatan Lalan	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9,982,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2 Laporan	17,000,000	Kecamatan Lalan	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan Pegawai	%	100 %	2,772,613,783				100 %	3,562,886,481		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,772,613,783	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Kesejahteraan Pegawai ASN	24 Orang/bulan	3,562,886,481	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	57,750,000				100 %	91,434,900		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	15,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	24 Paket	18,000,000	Kecamatan Lalan	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	42,750,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	3 Orang	73,434,900	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	409,391,200				100 %	689,584,305		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	8,182,500	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 Paket	7,170,944	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	14,444,300	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	28 Paket	129,146,432	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21,312,700	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Paket	8,661,659	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	51,294,300	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	34 Paket	66,548,790	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	26,231,400	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Paket	10,079,300	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9,795,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Dokumen	18,016,900	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	74,760,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Laporan	67,407,890	Kecamatan Lalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	203,371,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	382,552,390	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	%	100 %	69,032,000				100 %	307,109,660	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %					100 %		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	69,032,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	40 Unit	87,884,830	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	%	%	100 %	106,430,167				100 %	276,039,650	
						Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %					100 %		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23,630,167	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Umum	12 Laporan	25,279,650	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Umum	12 Laporan	250,760,000	Kecamatan Lalan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	%	100 %	33,580,000				100 %	89,550,650	
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %					100 %		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	1 Unit	33,580,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1 Unit	76,550,650	Kecamatan Lalan
						Terselenggaranya Fasilitas Pelayanan dan Tata Laksana	%	%	100 %					100 %		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	394,718,000				100 %	1,048,789,190	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	368,818,000				100 %	1,028,789,190	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19 Dokumen	368,818,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19 Dokumen	1,028,789,190	Kecamatan Lalan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	%	%	100 %	25,900,000				100 %	20,000,000	
						Terselenggaranya Pelayanan PATEN	Bulan	Bulan	12 Bulan					12 Bulan		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan PATEN	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Lalan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	%	100 %	13,410,000				100 %	24,248,400	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsihnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan	3 Laporan	13,410,000				3 Laporan	24,248,400	
						Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	%	%	100 %					100 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	13,410,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	3 Laporan	24,248,400	Kecamatan Lalan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	100 %	15,809,000					100 %	23,685,750	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan	%	100 %	15,809,000				Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan	100 %	23,685,750	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	15,809,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan	27 Orang	23,685,750	Kecamatan Lalan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah desa yang dibina	%	100 %	23,840,000					100 %	48,303,200	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	%	100 %	23,840,000					100 %	48,303,200	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100 %						100 %		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	11,920,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	27 Dokumen	24,139,500	Kecamatan Lalan
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	11,920,000	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	27 Laporan	24,163,700	Kecamatan Lalan
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			3,371,564,589							4,994,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100 %	2,977,663,089					100 %	4,454,000,000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	100 %	29,757,000					100 %	60,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	14,878,500	Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Tungal Jaya
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen							5 Dokumen		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	14,878,500	Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	30,000,000	Kecamatan Tungal Jaya
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	100 %	2,205,818,452					100 %	2,500,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,205,818,452	Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Orang/bulan	2,500,000,000	Kecamatan Tungal Jaya
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	100 %	52,253,750					100 %	80,000,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	11,793,750	Kab. Musi Banyuasin, Tungal Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Tungal Jaya

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	50,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	%					100 %	499,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9,984,927	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Paket	15,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	59,314,743	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Paket	75,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	21,049,041	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Paket	30,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	48,822,462	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	38 Paket	75,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,497,700	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Paket	30,000,000	Kecamatan Tungkajaya
					Terperuhnya Barang Cetak Kantor Kecamatan	Terperuhnya Penggandaan Kantor Kecamatan	100 %						100 %		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 Laporan	187,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	180,587,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 Laporan	75,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	%					100 %	43,282,014	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	43,282,014	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Sarana dan Prasarana Perkantoran	10 Unit	70,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	%					100 %	154,116,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	29,916,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	35,000,000	Kecamatan Tungkajaya
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan						1 Laporan		
					Terperuhnya kebutuhan Pembayaran Air, Listrik, Telpone, dan Internet Kecamatan		12 bulan						12 bulan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	124,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	250,000,000	Kecamatan Tungkajaya
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan						5 Laporan		
					Tersedianya Pembayaran Honorarium tenaga kontrak		9 orang						9 orang		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Kantor	%	%					100 %	88,180,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	77,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersediannya Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	2 Unit	90,000,000	Kecamatan Tungkajaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10,780,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	333,821,500					100 %	440,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	315,247,000					100 %	400,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		10 Dokumen	315,247,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Dokumen	400,000,000	Kecamatan Tungkajaya
						Terlaksananya Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Fasilitasi Pendukung Kegiatan Kabupaten		12 Kegiatan							12 Kegiatan		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	18,574,500					100 %	40,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	18,574,500	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Telaksananya Pelaksanaan PATEN	5 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penegakan Perda	%	%	100 %	15,220,000					100 %	20,000,000	
7	1	4	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi Penegakan Perda	%	%	100 %	15,220,000					100 %	20,000,000	
7	1	4	7.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		3 Laporan	15,220,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	3 Laporan	20,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%	100 %	15,010,000					100 %	30,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	%	100 %	15,010,000					100 %	30,000,000	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		75 Orang	15,010,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan	75 Orang	30,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	%	%	100 %	29,850,000					100 %	50,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	%	%	100 %	29,850,000					100 %	50,000,000	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		10 Dokumen	14,925,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		5 Laporan	14,925,000	Kab. Musi Banyuasin, Tungkajaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	5 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tungkajaya
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				3,831,356,739							5,885,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	3,503,606,739					100 %	5,055,000,000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	25,504,000					100 %	90,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	12,752,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan		4 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Lawang Wetan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12,752,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Laporan	40,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	2,418,013,144			100 %	3,000,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,418,013,144	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	22 Orang/bulan	3,000,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %							100 %		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawain	%		%	100 %	48,798,750			100 %	85,000,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Stel	14,568,750	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Lawang Wetan	21 Stel	25,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	34,230,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Lawang Wetan	2 Orang	60,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	455,321,306			100 %	755,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,762,028	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	98,372,535	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	8 Jenis	180,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,634,012	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	1 Paket	25,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,355,041	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	1 Paket	85,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,623,690	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	49,959,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	6 Laporan	100,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	192,615,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	12 Laporan	290,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
						Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %							100 %		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	48,363,039			100 %	120,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Jenis	48,363,039	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pacheh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	8 Jenis	120,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket							1 Paket		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	306,846,500			100 %	560,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,646,500	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100 %						100 %			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237,200,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	460,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %						100 %			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	200,760,000					100 %	445,000,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perincian	3 Unit	113,480,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Unit	150,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73,380,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Unit	270,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	13,900,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	11 Unit	25,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	274,650,000					100 %	590,000,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	247,865,000					100 %	500,000,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	247,865,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaraannya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	500,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	26,785,000					100 %	90,000,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	26,785,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Laporan	90,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
					Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100 %						100 %			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	100 %	15,300,000					100 %	60,000,000		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	100 %	15,300,000					100 %	60,000,000		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	15,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	4 Laporan	60,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	15,300,000					100 %	60,000,000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	15,300,000					100 %	60,000,000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 Orang	15,300,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paché	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Orang	60,000,000	Kecamatan Lawang Wetan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan	100 %	22,500,000					100 %	120,000,000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Desa	100 %	22,500,000					100 %	120,000,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	11,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pach	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Desa yang Dibina	4 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	11,250,000	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Pach	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Desa yang Dibina	4 Laporan	60,000,000	Kecamatan Lawang Wetan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN		3,229,363,694							4,423,330,000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	80 %	2,911,784,674			80 %	3,593,330,000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	80 %	29,976,000			80 %	85,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14,988,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan Tapkin	7 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	14,988,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan Tapkin	8 Laporan	30,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,980,000,000			100 %	1,980,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1,980,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	14 Orang/Bulan	1,980,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	70 %	59,715,000			70 %	66,000,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	9,780,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	24 Paket	16,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	49,935,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 orang	50,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	80 %	378,267,317			80 %	571,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,913,410	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Paket	32,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42,672,063	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Paket	47,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	23,676,555	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Paket	62,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	50,016,699	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	59 Paket	69,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25,006,900	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	69,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Babat Supat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						5 Laporan	95,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	167,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%					70 %	305,000,000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						8 Unit	80,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	125,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan					12 Bulan	268,750,000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Bulan	243,750,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%					90 %	317,580,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						3 Unit	110,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	182,580,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	25,000,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%					60 %	257,479,080		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%					60 %	241,924,080		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3 Dokumen	241,924,080	Kecamatan Babat Supat	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%					60 %	15,555,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5 Laporan	15,555,000	Kecamatan Babat Supat	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%					60 %	16,562,040		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%					60 %	16,562,040		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5 Laporan	16,562,040	Kecamatan Babat Supat	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%		%	100 %	17,482,500					100 %	55,000,000		
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	60 %	17,482,500					60 %	55,000,000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional			100 orang	17,482,500	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	100 orang	55,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		%	60 %	26,055,400					60 %	100,000,000		
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		%	60 %	26,055,400					60 %	100,000,000		
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penerapan dan Penegasan Batas Desa			3 Dokumen	12,925,000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	13,130,400	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Babat Banyuasin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Babat Supat
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN						2,650,544,601							3,558,021,000	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	%		%	100 %	2,253,269,471					100 %	2,891,961,000		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	%		%	100 %	29,757,600					100 %	54,135,000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	14,850,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	14,907,600	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	29,135,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%		%	100 %	1,421,704,643					100 %	1,519,706,000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			10 Orang/bulan	1,421,704,643	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	10 Orang/bulan	1,519,706,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%		%	100 %	47,397,500					100 %	73,535,000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	6,937,500	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 Paket	31,200,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	40,460,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	2 Orang	42,335,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	444,407,592					100 %	585,250,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	9,857,411	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	2 Paket	16,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	74,687,139	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	110,000,000	Kecamatan Jirak Jaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	24,993,715	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	2 Paket	15,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	49,999,407	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	2 Paket	65,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24,999,420	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	3 Paket	13,450,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	49,894,500	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	48 Laporan	153,800,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199,976,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	49,478,484					100 %	239,400,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	49,478,484	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana kantor	20 Unit	120,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	210,423,652					100 %	336,535,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,023,652	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	19,985,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	174,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Laporan	316,550,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,100,000					100 %	83,400,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	38,700,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana dalam kondisi baik	2 Unit	77,400,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11,400,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana dalam kondisi baik	2 Unit	6,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	306,391,600					100 %	510,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	278,260,000					100 %	450,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	278,260,000	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7 Dokumen	450,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	28,131,600					100 %	60,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,131,600	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya Pelayanan	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Penegakan Perda	100 %	25,354,050					100 %	50,000,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi Penegakan Perda	100 %	25,354,050					100 %	50,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsihnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsihnya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						12 Laporan	25,354,050	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarakannya penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jirak Jaya				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Facilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	%		%	100 %	21,964,800					100 %	50,000,000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Facilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	%		%	100 %	21,964,800					100 %	50,000,000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	21,964,800	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Forkompinda tingkat Kecamatan	150 Orang	50,000,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina	%		%	100 %	43,564,680					100 %	56,060,000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah Desa yang dibina	%		%	100 %	43,564,680					100 %	56,060,000		
7	1	6	2.01	15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	22,451,400	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	26,560,000	Kecamatan Jirak Jaya
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	21,113,280	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Jirak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	29,500,000	Kecamatan Jirak Jaya
TOTAL											2,688,680,652,297						5,343,468,931,364		



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

“Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD)”

Berdasarkan uraian penetapan kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah diharapkan, (3) Memfokuskan pada hal – hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 RKPD masa transisi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya, maka dapat dilihat capaian dan realisasi dan indikator kinerja utama pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3	4	133,33
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,35	99,24
		3. Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	3	2,82	94,00
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas	4. Persentase Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya yang Terkoneksi Dalam Kondisi Mantap	79,28	72,29	91,18
		5. Persentase KK yang Terlayani Air Bersih	92	87,51	95,12
		6. Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi (air Limbah) yang Layak	95	81,26	85,54
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	7. Pertumbuhan Ekonomi	2,40-2,70	3,42	78,95
		8. Indeks Desa Membangun	0,704	0,704	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		9.	Indeks Gini	0,31	0,326	95,09
4	Menurunkan Angka Kemiskinan	10.	Angka Kemiskinan	14,25	15,84	88,84
		11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	3,99	111,28
		12.	Nilai Tukar Petani	100,10	113,15	113,08
5.	Meningkatnya indeks pembangunan manusia	13.	Indeks Pembangunan Manusia	70,99	68,1	98,03
6.	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	14.	Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina	93,97	91,48	97,35
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,78	73,11	97,77
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16.	Indeks Pembangunan gender (IPG)	83,00	82,90	99,88
		17.	Persentase Kecamatan Layak anak	46,67	53,34	114,29
9.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Disabilitas	18.	Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	78,00	84,12	107,85

Sumber: LKJiP Kab. Muba Tahun 2021, diolah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Sedangkan IKD Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Muba
Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
2	Indeks Gini	0,306	0,296	0,286	0,276
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B
8	Pengeluaran Per Kapita	10.602	10.883	11.064	11.295
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71	70,03	70,38	70,76
10	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38	3,69	4,01	4,34
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76	1,94	2,12	2,31
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70	1,05	1,40	1,75
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79	1,12	1,47	1,82
14	Nilai Tukar Petani	93,00	95,00	97,00	100,00
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
17	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%	100%	100%	100%
18	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%	58,17%	37,50%	0%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
20	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60	12,76	12,91	13,07
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74	7,8	7,86	7,91
22	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08	69,2	69,33	69,45
23	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
24	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Sumber : RPD Kab. Muba 2023 - 2026

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 6.2. berikut.

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target		Target	
NON URUSAN								
		Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100
		Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD	80	85	90	95	95	95
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	70	75	80	85	90	90
		Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
		Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO	3	3	3	3	3	3
		Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba	100	100	100	100	100	100
		Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	275	315	358	134	136	136

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	28	28	29	29	29	29
		Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	3	3	3	3	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	55,48	57,35	59,87	61,2	62,5	62,5
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,48	103,62	105,39	107,56	109,73	109,73
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,6
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75	91,36	94,12	97,42	100	100
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,3	1,2	1,1	1	0,8	0,8
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
		2022	Target	Target	Target	Target
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
	Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55,4	60,38	65,72	70,81	75,2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	Prevalensi stunting pada balita	18,4	16	14	13	12
	Angka kematian ibu	70/10000	64/10000	58/10000	52/10000	46/10000
	Angka kematian bayi	8/1000	7/1000	6/1000	5/1000	4/1000
	Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	1	2	3	4	5
	Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1	1	3	3	3
	Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	95	95	95	95	95
	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	29	29	29	29	29
	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3	3	3	3
	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	40	40	40	40	40
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	12	12	12	12	12
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10	10	10	10	10
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2	2	2	2	2
	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	70	80	85	87	90	90
		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60	65	75	80	85	85
		Persentase ketersediaan obat esensial	86	90	96	98	100	100
		Persentase ketersediaan BMHP	86	90	96	98	100	100
		Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	80	85	90	95	100	100
		Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	30	40	45	50	55	55
		Persentase desa yang melaksanakan PHBS	20	25	30	35	40	40
		Persentase PHBS tempat kerja	40	45	50	55	60	60
		Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	161489	177.638	195.402	214.942	236.437	236.437
		Persentase Rumah Sehat	77,2	83	85	90	95	95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	50	55	60	65	70	70
		Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	75	80	85	90	100	100
		Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	75	80	85	90	100	100
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	44,9	59,26	73,55	87,83	100	100
		Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani	44,9	59,26	73,5	87,8	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target		Target	
		Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	40	55	70	85	100	100
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	25	30	35	40	45	45
		Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	65,61	70	75	80	85	85
		Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	25	30	35	40	45	45
		Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78	79	80	82	84	84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
		Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	4	25	50	75	100	100
		Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	10	30	60	80	100	100
		Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	5	25	50	75	100	100
		Persentase PSU Yang dibangun / direhab	14	20	26	32	38	38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100	100	100	100	100	100
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	85	85	85	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
		Persentase PMKS yang mendapat Layanan	76,15	77,00	78,00	79,00	90,00	90,00
		Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	84,12	93,26	95,76	98,25	100	100
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	100	100	100	100	100
		Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	0	8	9	9,8	10,2	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	n/a	1	1	1	1	1
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	6,9	24,1	25,2	26,2	27	27

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	n/a	50	80	90	100	100
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	40,66	42,60	43,50	45,80	47,80	47,80
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan	8,8	7,8	6,5	5,4	4,8	4,8
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	30	41	49	56	71	71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	24	26	28	30	32	32
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,5	66,7	66,8	66,9	67	67
		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0,006	0,009	0,010	0,011	0,012	0,012
		Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	2	2	3	3	3	3
		Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak	0	1	1	1	1	1
		Persentase Kecamatan Layak Anak	53,34	66,6	80	86,66	93,33	93,33
		Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	4	4	4	4	4	4
		Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,016
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	n/a	50	50	50	50	50
		Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.086,20	2.090	2.095	2.100	2.105	2.105
		Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	9,58	23	22	21	20	20
		Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	96,7	90	92	93	94	94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
		Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	27,3	45,5	63,6	81,8	100	100
		Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	60,4	83,8	88,9	94,4	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66,58	67,05	67,51	68,01	68,5	68,5
		Persentase Luasan RTH yang dikelola	20	20	20	20	20	20
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100	100	100	100	100	100
		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH	100	100	100	100	100	100
		Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penanganan sampah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100
		Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
		Persentase Desa Tertata	30	35	38	42	45	45
		Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	4	6	6	8	10	10
		Persentase Desa Tertib Administrasi	70	75	80	80	100	100
		Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	15	15	15	15	15	15
		Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	150	150	150	150	150	150
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target		Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
		Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,33	2,3	2,27	2,23	2,19	2,19
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03	67,03
		Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	7,88	7,70	7,51	7,23	7,16	7,16
		Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	60	65	70	75	85	85
		Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina	70	75	80	85	90	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
		Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	38	41	43	46	48	48
		Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	85	90	87	97	100	100
		Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	80	84	86	89	99	99
		Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	80	83	85	87	97	97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
		Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	40	55	65	75	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
		Jumlah koperasi aktif	70	80	100	120	140	140
		Jumlah Koperasi sehat	65	70	75	80	85	85
		Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	2	5	6	7	8	8
		Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	2	5	8	10	12	12
		Jumlah UMK yang berdaya saing	100	200	300	400	500	500
		Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	10	13	18	25	35	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
		Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	87,76	88,03	88,10	88,60	88,90	88,90
		Minat Investasi	50	60	75	80	80	80
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76
		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	2400	2550	2550	2600	2700	2700
		Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	85	85	87	87	90	90
		Nilai Realisasi investasi PMA	n/a	1,8 T	2 T	2,2 T	2,3 T	2,3 T
		Nilai Realisasi investasi PMDN	n/a	1,5 T	1,6 T	1,7 T	1,8 T	1,8 T
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
		Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	32,81	32,98	35,12	36,79	41,00	41,00
		Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	16,29	17,16	18,03	18,95	19,88	19,88
		Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
		Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	2,22	12,02	21,27	30,52	39,77	39,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
		Persentase data Statistik Sektoral	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
		Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	9	11	13	13
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42%	48%	60%	73%	85%	85%

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	38	48	58	68	78	78
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah koleksi	244	294	344	394	444	494
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
		Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,2
		Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah	3,58	4	6	8,5	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
		Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	81	81	82	82	83	83
		Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5	5	5	6	6	6
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
		Produksi Perikanan Tangkap	23.024	23.484	23.954	24.434	24.675	24.675
		Produksi Perikanan Budidaya	25.466	25.772	26.813	27.349	27.896	27.896
		Tingkat Partisipasi Pokmaswas	52	60	69	78	86	86
		Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5	5	7	8	10	10

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target	Target		
		Konsumsi Ikan	50,45	52,44	53,76	54,97	60,23	60,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
		Jumlah objek wisata	62	64	67	69	72	72
		Jumlah kunjungan wisatawan	34.056	36.102	39.407	42.184	43.798	43.798
		Jumlah pelaku usaha pariwisata	343	383	420	459	501	501
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
		Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2	2
		Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	20	25	30	35	40	40
		Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
		Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	10	15	20	25	30	30
		Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	20	25	28	30	32	32
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
		Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	7	11	14	20	22	22

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
		Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	4,49	9,4	14,96	22,44	32,05	32,05
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	20,59	30,88	41,18	50,00	58,82	58,82
		Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	NA	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan volume penjualan produk	5	7,5	10	12,5	15	15
		Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	40,38	41,00	41,78	42,57	43,36	43,36
		Jumlah Kemitraan Usaha	2	4	6	8	11	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
		persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
		persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
		Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	4,25	9,75	0,165	24,5	33,75	33,75
		Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas	17	22	27	32	37	37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
		Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	11	22	40	70	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	32	49	61	79	100	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
		Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu	300	300	300	200	200	200
		Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3	3	3	3	3	3
		Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan	13	13	13	13	13	13
		Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9	9	9	9	9	9
		Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	800	800	800	800	800	800
		Terbinanya Sarjana Bina Desa	45	45	45	45	45	45
		Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	210	210	210	210	210	210
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	747	747	747	747	747	747
		Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	14	14	14	14	14	14
		Laporan Inflasi secara periode	7	7	7	7	7	7
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	2	2	2	2
		Standar Satuan Harga (SSH)	3	3	3	3	3	3

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	18	18	18	18	18	18
		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	2.027	2.059	2.091	2.125	2.157	2.157
		Jumlah rekomendasi izin pertambangan	2	2	3	4	4	4
		Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	4	4	6	8	8	8
SEKRETARIAT DPRD								
		Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	80	85	90	95	95	95
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
		Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	65	70	70	70	80	80
		Persentase keselarasan program RPKD dalam RPJMD	100	100	100	100	100	100
		Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	90	90	90	90	90	90
		Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90	90	90	90	90	90
KEUANGAN								
		Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
			2022	Target	Target	Target	Target	Target
		Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100	100	100	100	100	100
		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pencairan Dana On Skedul	100	100	100	100	100	100
		Persentase Data Aset Yang Akurat	100	100	100	100	100	100
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,10	13,84	14,72	15,64	16,60	16,60
KEPEGAWAIAN								
		Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,12	98,15	98,20	98,25	98,30	98,30
		Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	84,85	85,50	86,50	87,50	90,00	90,00
		Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	99,88
		Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,52	1,49	1,39	1,29	1,09	1,09
		Survey Kepuasan ASN	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
		Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan	90	90	90	90	90	90
		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target		Target	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
		Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	22,91	67	70	75	80	80
		Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	33,33	40	50	60	70	70
		Opini terhadap laporan keuangan pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	78	80	83	85	90	90
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	84	85	87	89	90	90
		Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3
		Nilai Maturitas SPIP	3,06	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3
		Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda	CC	CC	B	B	BB	BB
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100
		Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah Desa yang dibina	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
		2023	2024	2025	2026			
		2022	Target	Target	Target		Target	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	n/a	26	52	78	100	100
		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	n/a	8	8	8	8	8
		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	n/a	100	100	100	100	100
		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	100	100	100	100	100
		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	n/a	100	100	100	100	100



BAB VII PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023” memuat arah kebijakan secara sistematis dalam upaya pelaksanaan program kegiatan prioritas untuk pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan momentum melanjutkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang berkelanjutan dalam rangka memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi”

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua *stakeholders*, maka telah dilaksanakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2023 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap tujuan dan sasaran RKPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RKPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Pusat, perumusan prioritas pembangunan daerah serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai dokumen rencana pembangunan tahun 2023 memusatkan pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengarahkan pada pencapaian fokus pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”** sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program tersebut dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan.